PENYUSUNAN DATABASE PAD

KABUPATEN BANGKA BARAT

TIM PUSAT STUDI EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

Gedung PAU Pasca Sarjana UGMDaerah Istimewa Yogyakarta 55281

(0274) 564926

https://psekp.ugm.ac.id/

TIM PENYUSUN

Tim penyusun Penyusunan Database PAD Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut:

1. Dr. Gumilang Aryo Sahadewo, M.A.
2. Awaluddin L., S.E., M.Si
3. Candra Aryudiawan, M.Sc.
4. Ratih Dewi Setiawan, S.E., M.Sc.
5. Afif Amrullah, S.T.
6. Anggraeni Ratnasari, S.E.

Kegiatan ini terselenggara:

Atas kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (PSEKP-UGM) Yogyakarta, 2019.

KATA PENGANTAR

Laporan ini merupakan Draft Laporan Akhir dari pelaksanaan pekerjaan yang bertajuk Penyusunan Database PAD Kabupaten Bangk Barat. Kegiatan tersebut terlaksana sebagai hasil kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (PSEKP-UGM). Laporan ini terdiri dari enam bagian. Bagian pertama, Bab I *Pendahuluan*, menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, sekaligus metodologi penelitian. Bagian Kedua, Bab II *Gamabaran Umum Kabupaten Bangka Barat*, mengurai berbagai kondisi sosial ekonomi dari Kabupaten Bangka Barat. Bagian Ketiga, Bab III *Kinerja dan Potensi Pendapatan Asli Daerah*, mengulas kinerja berbagai pos PAD serta menghitung potensi PAD. Bagian Keempat, Bab IV *Potensi PAD,* memaparkan tentang upaya peningkatan PAD. Bagian Kelima, Bab V *Basis Data Pendapatan Asli Daerah*, menjelaskan tentang basis data untuk pengelolaan data PAD. Bagian Keenam, Bab VI *Penutup*, menunjukkan rangkuman serta rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Magetan.

Tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kab. Bangka Barat, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan. Kami berharap studi ini dapat memberi manfaat dan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

Yogyakarta, …….

Tim Peneliti,

Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik

Universitas Gadjah Mada.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 TUJUAN 5

1.3 OUTPUT/ KELUARAN 5

1.4 RUANG LINGKUP KEGIATAN 5

1.5 KERANGKA PEMIKIRAN STUDI 6

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN 6

1.7 PELAKSANAAN PENELITIAN 7

1.8 METODOLOGI PENELITIAN 7

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT 11

2.1 POTENSI DASAR KABUPATEN BANGKA BARAT 11

BAB III KINERJA DAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BANGKA BARAT 38

3.1 KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANGKA BARAT 38

3.2 POTENSI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANGKA BARAT 54

BAB IV POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BANGKA BARAT 74

4.1 INTENSIFIKASI 74

4.1.1 Investasi idle cash 74

4.1.2 Potensi PAD Sektor Pariwisata 84
4.1.3 Potensi PAD Sektor Balai Benih Ikan 102
4.1.4 Potensi PAD Sektor Sarang Burung Walet 108
4.1.5 Potensi PAD Sektor Pelayanan Pasar 111
4.1.6 Potensi PAD Sektor Perhotelan 119
4.1.7 Potensi PAD Sektor Kafe dan Restoran 126
4.1.8 Potensi PAD Sektor Pajak Parkir 133
4.1.9 Potensi PAD Sektor Retribusi Parkir 135
4.2 EKSTENSIFIKASI 138
4.2.1 Potensi PAD Sektor Pelayanan Persampahan 138
4.2.2 Potensi PAD Sektor Perkebunan Kelapa Sawit 146
4.2.3 Potensi PAD Sektor Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) 163
4.2.4 Potensi Penerimaan Bagian Laba PDAM 169
4.2.5 Potensi PAD Sektor Pelayanan Pelabuhan 174
BAB V PENUTUP 177
5.1 Kesimpulan 177
5.2 Rekomendasi 179

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Otonomi daerah merupakan peluang dan sekaligus juga sebagai tantangan. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk berkreasi dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki dan dinikmati sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain otonomi juga sebagai tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan.

Berdasarkan Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dearah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota. Maka setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, guna meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sembur keuangan. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa:

a. kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan;

b. kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak mendapatkan bagi hasil dari sumber nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya;
c. hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Desentralisasi fiskal bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat di daerah. Dengan desentralisasi fiskal, preferensi masyarakat akan pelayanan publik akan lebih terungkap dan lebih dapat dipenuhi. Tujuan dari desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik jika didukung faktor-faktor berikut:

a. pemerintah pusat yang mampu melakukan pengawasan dan *law enforcement*;
b. SDM yang kuat pada pemda guna menggantikan peran pemerintah pusat;
c. keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggungjawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menuntut pemerintah daerah agar lebih mandiri di bidang keuangan khususnya pada aspek kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan melalui intensifikasi dan atau ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi adalah upaya perluasan keuangan daerah jenis pungutan. Upaya ini harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan ekonomi.[1] Beberapa studi menunjukkan bahwa penggalian potensi daerah dengan cara perluasan jenis pungutan bisa menjadi

[1] Dalam kenyataan saat ini, banyak daerah yang dalam mengembangkan sumber pendapatan daerahnya memunculkan retribusi atau pajak baru yang menimbulkan protes dan kritikan-kritikan karena lebih membebani masyarakat dan kalangan dunia usaha.

disinsentif bagi investor untuk menanamkan modal atau melakukan usaha di daerah tersebut. Investor yang enggan menanamkan modal di daerah tersebut dapat memindahkan usahanya ke tempat lain.

Upaya intensifikasi adalah upaya meningkatkan kemandirian penerimaan daerah dengan meningkatkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini menuntut kemampuan daerah untuk mengidentifikasi secara baik potensi penerimaan daerah dan kemudian mampu memungutnya berdasar pada asas manfaat dan asas keadilan. Untuk mencapai intensifikasi, sumber daya—*softwar*e, *hardwar*e, dan manusia—yang digunakan untuk memungut dan strategi pemungutan perlu segera disiapkan. Upaya intensifikasi dapat menjadi prioritas dalam jangka pendek, memanfaatkan infrastruktur, suprastruktur, dan sumber daya yang ada.

Masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kepatuhan wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah (Wardana, 1992 dan Uppal dan Reksohadiprodjo, 1999b), lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah (Mangkusoebroto, 1987), kelemahan aparatur, kelemahan administrasi, dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang masih rendah (Soemitro, 1985). Menurut Uppal (2000) rendahnya penerimaan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, lemahnya penegakan hukum, dan tingkat penghindaran pajak yang tinggi.

Pembenahan administrasi seperti perbaikan basis data, perluasan basis pajak, intensifikasi, ekstensifikasi wajib pajak atau wajib retribusi, serta meningkatkan kualitas aparat merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah (Sidik, 1996).

Melihat situasi di atas, untuk dapat meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah harus mengetahui potensi PAD secara aktual. Hanya saja, penerimaan PAD dan potensi PAD adalah dua hal yang berbeda. Potensi dan realisasi penerimaan PAD dihubungkan oleh sistem dan prosedur pendapatan daerah. Sebaik apapun sistem dan prosedur pendapatan daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan

sebenarnya maka realisasi penerimaan juga akan rendah. Oleh karena itu penyusunan database potensi PAD perlu dilakukan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangka Barat dari sektor pariwisata mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan selama tahun 2017. Retribusi tempat pariwisata menyumbang sebesar Rp. 120 juta, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 20 juta. Kenaikan pendapatan dari retribusi tempat wisata serta pajak hotel tidak meningkat siginifikan, sedangkan pajak restoran mengalami peningkatan namun didominasi oleh usaha catering. Hal tersebut menjadi sinyal bahwa sebetulnya sektor ini masih cukup potensial untuk dikelola secara lebih serius dan profesional agar dapat terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Jika dilihat dari perkembangan APBD Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2011-2016, belanja daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan rata-rata peningkatan sebesar 12,10 persen. Hal ini hampir berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah dengan rata-rata sebesar 13,00 persen.

Kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat melalui komposisi pendapatan daerah dalam APBD. Seperti halnya sebagian besar daerah lain di Indonesia, komposisi pendapatan daerah di dalam APBD Kabupaten Bangka Barat masih didominasi oleh dana transfer dari pusat. Selama lima tahun terakhir pendapatan transfer dari pusat dalam APBD Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan dan di tahun 2016 proporsi dana transfer mencapai 78,84 persen dan Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 5,69 persen dan meningkat pada tahun 2017 dari total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih sangat terbatas untuk membiayai program-program pembangunan khususnya yang bersifat inisiatif daerah. Oleh sebab itu daerah perlu merencanakan dan

mencari solusi terbaik agar penerimaan daerah dapat meningkat sejalan dengan meningkatnya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakatnya

Tabel 1.1 Profil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2015-2017

No	Jenis Pendapatan	2015	2016	2017
1	Pajak Daerah	12.332,99	13.481,66	17.582,17
2	Retribusi Daerah	4.955,62	5.249,96	3.119,06
3	Hasil pengel kekayaan daerah yg dipisahkan	3.254,93	3.770.08	3.480,80
4	Lain-lain PAD yang sah	35.757,14	30.159,97	54.613,23

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat (2019).

1.2 TUJUAN

Tujuan dari kajian penyusunan database potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Barat adalah tersedianya database potensi PAD di Kabupaten Bangka Barat

1.3 OUTPUT/ KELUARAN

Output yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah tersedianya database potensi PAD Kabupaten Bangka Barat sehingga membantu dinas terkait untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bangka Barat.

1.4 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan kajian Penyusunan Database Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Barat adalah:

1. melaksanakan survey dan observasi lapangan tentang potensi PAD Kabupaten Bangka Barat;
2. melakukan analisis tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi potensi PAD di Kabupaten Bangka Barat;
3. melakukan perumusan masalah dan menyusunan strategi peningkatan PAD di Kabupaten Bangka Barat;
4. membuat dan menyusun dokumen laporan akhir.

1.5 KERANGKA PEMIKIRAN STUDI

Melakukan sebuah kajian mengenai penyusunan database potensi PAD Kabupaten Bangka Barat. Ilustrasi gambar berikut ini menyajikan informasi bahwa untuk beberapa jenis PAD penyajian database potensinya dapat dilakukan dengan metode mikro (sensus/survei) maupun metode makro (analisis data historis). Hasil dari penghitungan potensi tersebut diperbandingkan realisasi penerimaan pendapatan yang bersangkutan. *Gap* atau selisih dari penerimaan tersebut dapat ditelusuri penyebabnya. Selanjutnya SKPD atau unit penghasil tersebut dapat menyusun strategi mencapaian/merealisasikan potensi pendapatan tersebut.

Gambar 1 1 Skema Kerangka Pemikiran Studi

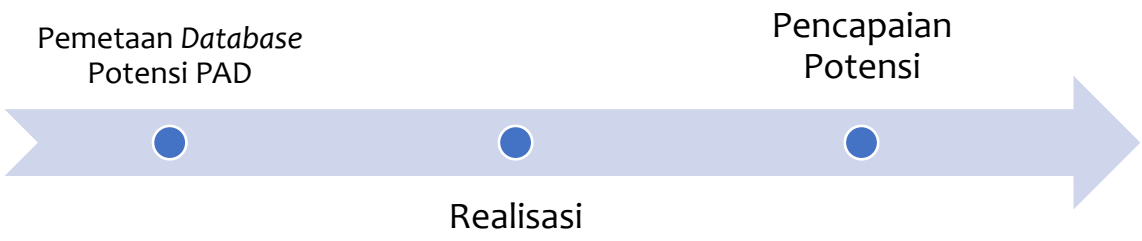

Sumber: pengolahan pribadi (2019)

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan kemajuan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tahapan kemajuan kegiatan setiap fase kemajuan. Adapun keluaran yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

1.6.1 Laporan pendahuluan

Berupa dokumen yang berisi pendahuluan dan metodologi penelitian serta analisis awal terhadap profil Potensi Dasar Kabupaten Bangka Barat yang telah dikumpulkan**.**

1.6.2 Laporan akhir

Berupa dokumen hasil akhir Penyusunan *Database* Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat, setelah mendapatkan masukan perbaikan atas draft laporan akhir serta database sistem informasi manajemen PAD. Dokumen final

dibuat sebanyak 10 buku disertai database sistem informasi manajemen PAD dalam bentuk *soft file.*

1.7 PELAKSANAAN PENELITIAN

Kegiatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, akan dilaksanakan oleh Tim dari Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada bersama-sama dengan Tim dari Bappedal Kabupaten Bangka Barat.

1.8 METODOLOGI PENELITIAN

1.8.1 Analisis Statistika Deskriptif

Dalam mendeskripsikan capaian kinerja pendapatan asli daerah beserta komponennya, digunakan beberapa nilai numerik (rata-rata, nilai maksimal, dan nilai minimum) dan bantuan grafis (garis, batang, dan lingkaran) dalam rangka visualisasi data numerik. Selain itu, digunakan pula analisis tren untuk melihat arah pergerakan capaian PAD beserta komponennya.

1.8.2 Focus Group Discussion dan In-Depth Interview

Tim peneliti akan mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) atau *In-Depth Interview* dengan pemangku kebijakan perencanaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam 5 tahun terakhir dan 5 tahun kedepan. Hasil FGD atau *in-depth interview* akan tim peneliti gunakan untuk melengkapi temuan dari analisis statistik deskriptif.

1.8.3 Metode Estimasi Potensi: Contoh Kasus Retribusi Kawasan Wisata

Perhitungan potensi suatu penerimaan retribusi dilakukan dengan mengalikan tarif retribusi dengan basis retribusi. Secara khusus, formulasi perhitungan potensi retribusi adalah:

Potensi penerimaan retribusi = Tarif retribusi x Basis retribusi

Tarif retribusi ditentukan dalam regulasi atau peraturan daerah. Namun demikian, penentuan basis retribusi cukup kompleks karena basis retribusi dipengaruh oleh

berbagai faktor. Penelitian ini menggunakan dua metode untuk menghitung basis retribusi:

a. **Analisis data historis.** Analisis data historis memerlukan data kunjungan di masing-masing objek retribusi. Analisis data historis menjelaskan tren antar waktu basis retribusi untuk masing-masing objek retribusi. Ketersediaan data kunjungan bulanan memberikan kesempatan analisis fluktuasi kunjungan antar bulan di masing-masing objek retribusi. Sebagai contoh, berapakah kenaikan kunjungan di akhir pekan dan musim liburan puncak? Berapakah kunjungan di periode *low-season*?
b. **Survei.** Metode survei bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkini basis retribusi di masing-masing objek retribusi. Survei dilakukan untuk tempat wisata dengan fokus pada perhitungan jumlah wisatawan dan jumlah kendaraan (PSEKP, 2017). Seperti dijelaskan dalam Gambar 1, tim peneliti melakukan survei dan wawancara dengan koordinator tempat wisata dan observasi langsung. Wawancara dengan koordinator tempat wisata bertujuan untuk mendapatkan informasi dasar terkait kawasan wisata tersebut. Informasi tersebut meliputi luas lokasi, jam buka kawasan wisata, jumlah wisatawan dan kendaraan dalam beberapa periode musim.

Gambar 1 2 Desain Pengumpulan Data

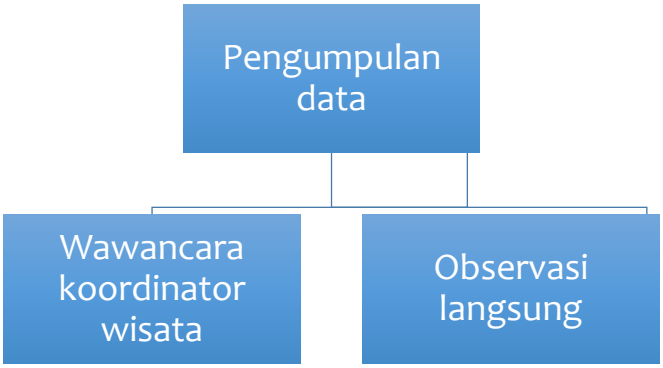

Sumber: pengolahan pribadi (2019)

Tim peneliti menyusun matriks untuk mencatat berbagai skenario keramaian di setiap titik. Seperti ditunjukkan pada Tabel 2, skenario keramaian tersebut meliputi sepi, normal, ramai, sangat ramai, dan sangat ramai hari besar.

Tabel 1 2 Matriks skenario keramaian berdasarkan jenis kendaraan

Situasi	**Golongan 1**	**Golongan 2**	**Wisatawan**
Sepi			
Normal			
Ramai			
Sangat Ramai			
Sangat Ramai Hari Besar			

Sumber: pengolahan pribadi (2019).

Catatan: golongan 1 adalah sepeda motor, golongan 2 adalah mobil dan bus. Wisatawan khusus di tempat wisata.

Tim peneliti melakukan input angka sementara di masing-masing kolom dan baris matriks berdasarkan wawancara dengan koordinator wisata. Sebagai contoh, wawancara dengan koordinator wisata mengindikasikan bahwa jumlah wisatawan di situasi sepi adalah sebanyak 100 sedangkan di situasi ramai adalah sebanyak 200 wisatawan. Oleh karena itu, rasio jumlah wisatawan di situasi ramai dan sepi adalah 2. Metode ini digunakan mempertimbangkan kendala waktu dan dana operasional untuk penelitian lapangan. Data historis juga dapat digunakan untuk menentukan rata-rata pengunjung di musim sepi, musim normal, musim ramai, dan musim sangat ramai. Statistik tersebut digunakan untuk verifikasi rasio pengunjung antar waktu yang berbeda.

Tim peneliti juga menyusun matriks skenario jumlah kendaraan berdasarkan hari dan waktu. Matriks ini berguna untuk mengakomodasi perbedaan keramaian antar waktu (PSEKP, 2017). Tim peneliti melakukan wawancara dengan koordinator wisata untuk menanyakan tingkat keramaian di setiap hari. Sebagai contoh, berdasarkan wawancara dengan juru parkir atau penjaga loket, tim peneliti akan memasukkan keterangan sementara normal (N) di hari Senin.

Tabel 1.3 Matriks skenario jumlah wisatawan berdasarkan hari dan waktu

Hari	Golongan 1	Golongan 2	Wisatawan
Senin			
Selasa			
Rabu			
Kamis			
Jumat			
Sabtu			
Minggu			

Sumber: pengolahan pribadi (2019)

Catatan: input S untuk sepi, N untuk normal, R untuk ramai, SR untuk sangat ramai, dan SRHR untuk sangat ramai hari raya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

2.1 POTENSI DASAR KABUPATEN BANGKA BARAT

2.1.1 Geografi

Kabupaten Bangka Barat secara astronomis terletak pada posisi antara 105°00'-106°00' Bujur Timur dan 01°00'-02°10' Lintang Selatan. Secara geografis Kabupaten Bangka Barat sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bangka, sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Selat Bangka.

Kabupaten Bangka Barat memiliki luas wilayah terbesar ketiga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas sebesar 2.884,31 km^2. Jarak Kabupaten Bangka Barat ke ibukota provinsi, yaitu Kota Pangkalpinang kurang lebih 138 km atau sekitar 3 jam perjalanan dengan menggunakan angkutan darat. Kabupaten ini dibagi menjadi enam kecamatan, yaitu Kelapa, Tempilang, Muntok, Simpang Teritip, Jebus, dan Parittiga. Wilayah kecamatan terluas dimiliki oleh Kecamatan Simpang Teritip dengan persentase mencapai 22,10 persen sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Parittiga dengan persentase luas sebesar 11,22 persen.

Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah yang strategis ditinjau dari sudut geografisnya. Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Bangka Barat dekat dengan Pulau Sumatera sehingga menjadi pintu gerbang masuknya barang dan penumpang dari Pulau Sumatera yang melewati laut.

Seluruh wilayah daratan Kabupaten Bangka Barat berada di Pulau Bangka dengan total luas wilayah lebih kurang 2.884,15 km^2 atau 288.415 Ha. Wilayah daratan terbagi dalam enam kecamatan, yaitu Kecamatan Kelapa dengan luas wilayah 573,80 km2, Kecamatan Tempilang dengan luas wilayah 461,02 km2, Kecamatan Muntok dengan luas wilayah 505,94 km2, Kecamatan Simpang Teritip dengan luas

wilayah 637,35 km2, Kecamatan Jebus dengan luas wilayah 379,49 km2 dan Kecamatan Parittiga dengan luas wilayah 326,71 km2.

Kecamatan Simpang Teritip merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar dengan persentase sebesar 22,10 persen sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Parittiga dengan persentase sebesar 11,22 persen.

Gambar 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, 2017

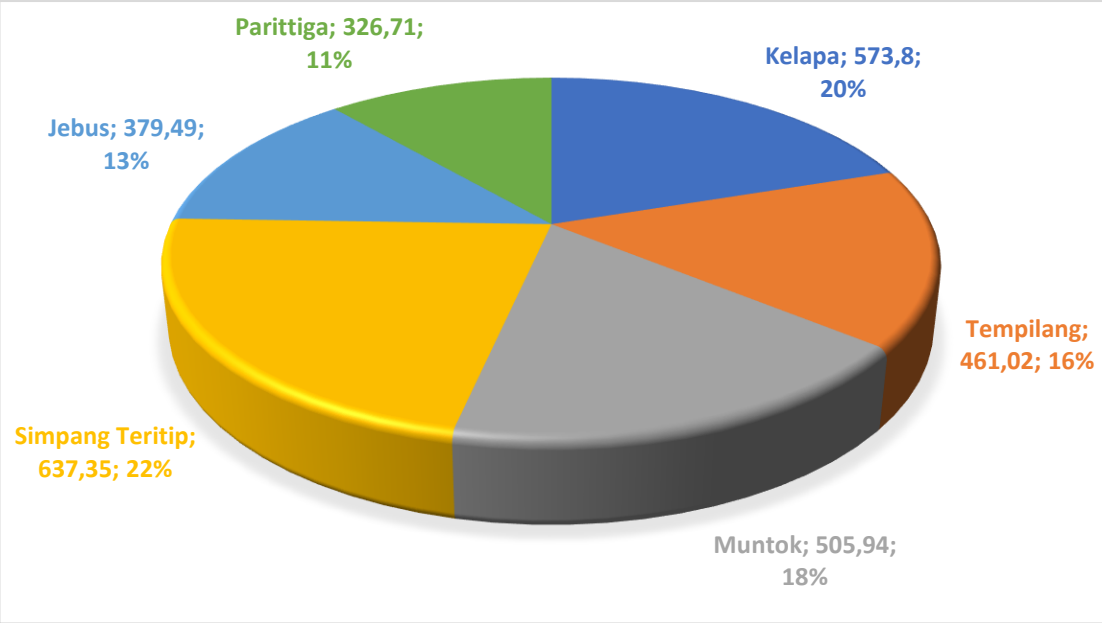

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

2.1.2 Iklim

Secara umum, iklim di Kabupaten Bangka Barat mengikuti Indonesia yang beriklim tropis. Berdasarkan Statistik Daerah Kabupaten Bangka Barat 2018, daerah ini memiliki iklim tropis tipe A. Tanah di daerah Kabupaten Bangka Barat mempunyai PH rata-rata di bawah 5, didalamnya mengandung mineral biji timah dan bahan galian lainnya seperti: Pasir Kwarsa, Kaolin, Batu Gunung dan lain-lain.

Pada tahun 2016, wilayah Pulau Bangka secara umum diguyur hujan sebanyak 259 hari hujan dimana pada bulan November terjadi hujan paling banyak dalam kurun waktu sebulan yaitu sebanyak 26 hari. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, intensitas turun hujan di tahun 2016 lebih tinggi. Meskipun tahun 2016

memiliki jumlah hari hujan lebih tinggi disbanding tahun 2015, tetapi surah hujannya lebih rendah yaitu 128,17 mm tahun 2016 menjadi 64,28 mm pada tahun 2016.

Kecepatan angin rata-rata pada tahun 2016 berkisar antar 7,6 knots hingga 20 knots, dengan rata-rata 11,89 knots. Suhu udara minimum berkisar antara 23,6^{o}C hingga 24,8^{o}C. Sementara untuk suhu udara maksimum berkisar antara 30,2^{o}C hingga 32,3^{o}C. Tekanan udara yang terjadi pada tahun 2016 berkisar antara 1009,2 mb hingga 1011,3 mb dengan rata-rata sebesar 1010,15 mb. Kelembaban udara rata-rata selama tahun 2015 dan 2016 tidak berubah yaitu 79,08 persen. Kelembaban minimum tertinggi sebesar 70 persen, sedangkan kelembaban maksimum tertinggi sebesar 97 persen yang terjadi pada bulan Februari hingga Mei 2016.

Pada tahun 2017, hari hujan tertinggi berada di Bulan November yaitu sebanyak 26 hari hujan. Sementara hari hujan terendah berada di Bulan Agustus dimana pada bulan ini terjadi sebanyak 17 hari hujan.

Gambar 2. 2 Curah Hujan per Bulan (mm) dan Hari hujan (hari) di Kabupaten Bangka Barat, 2017

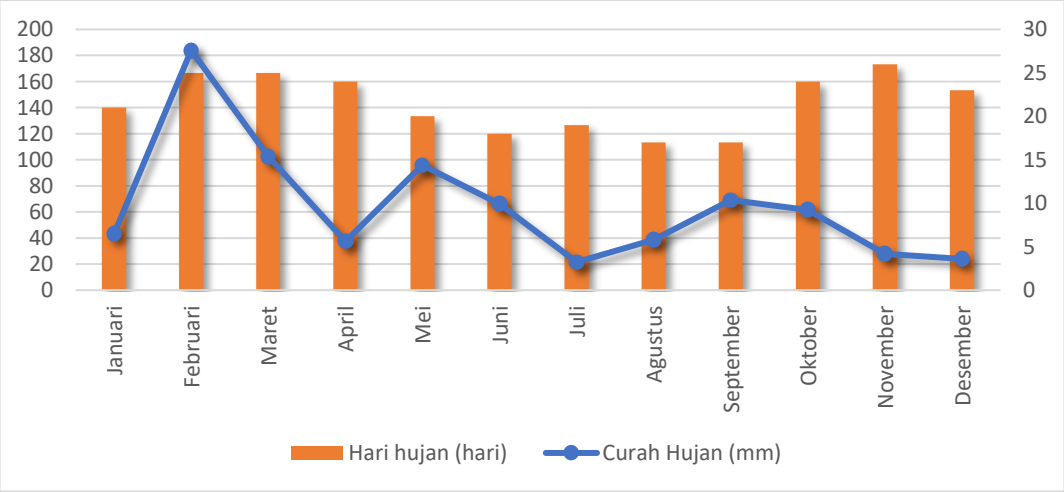

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

2.1.3 Demografi

Hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat mencapai 204.778 jiwa, terdiri dari 106.851 jiwa laki-laki dan 97.927 jiwa perempuan. Penduduk Kabupaten Bangka Barat terus bertambah setiap tahunnya disebabkan karena adanya penambahan yang alami seperti kejadian kelahiran dan migrasi masuk. Dilihat dari piramida penduduknya, Kabupaten Bangka Barat tahun 2017 masih didominasi oleh kelompok umur muda/dewasa, yaitu penduduk yang berusia 15-64 tahun, yaitu sebesar 67,14 persen. Sementara itu pada umur anak-anak, jumlah penduduk 0-4 tahun cukup banyak, mencapai 10,39 persen jumlah penduduk, sehingga perlu perhatian lebih pemerintah dalam hal pemenuhan kesehatan serta pendidikan mereka di masa mendatang.

Dengan luas wilayah sebesar 2.884,31 km^2, pada tahun 2017 setiap km perseginya ditempati 71 orang penduduk. Angka tersebut menunjukkan masih renggangnya kepadatan penduduk karena sebagian besar lahan merupakan lahan perkebunan dan hutan. Kecamatan Muntok tercatat sebagai kecamatan dengan kepadataan penduduk paling padat.

Tabel 2. 1 Indikator Kependudukan Kabupaten Bangka Barat, 2015-2017

Uraian	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Penduduk (jiwa)	196 598	200 684	204 778
Penduduk Laki-laki (jiwa)	102 477	104 689	106 851
Penduduk Perempuan (jiwa)	94 121	95 995	97 927
Kepadatan Pddk (jiwa/km^2)	68	70	71
Sex Rasio (%)	109	109	109
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (jiwa)			
0 - 14 tahun	57 815	59 016	60 221
15 - 64 tahun	131 959	134 734	137 484
> 65 tahun	6 649	6 934	7 073

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

Di tahun 2017, secara persentase Kecamatan Muntok menjadi kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Bangka Barat dengan persentase sebesar 27%. Di sisi lain, Kecamatan Jebus menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Bangka Barat dengan persentase hanya sebesar 11 persen.

Gambar 2. 3 Persentase Penduduk di Kabupaten Bangka Barat Menurut Kecamatan, 2017

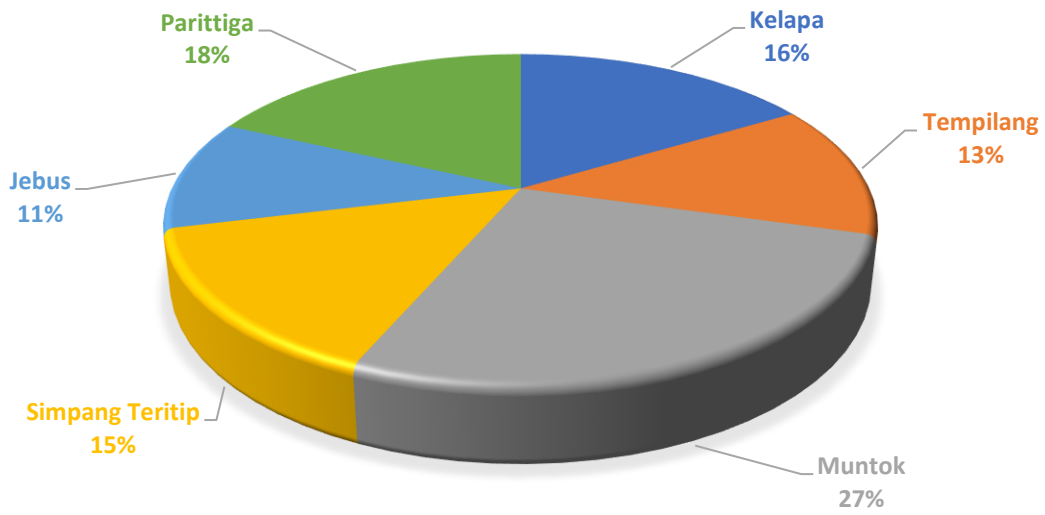

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

Menurut laporan sensus yang dilaksanakan oleh BPS, pada tahun 2010 hingga 2017 terjadi peningkatan jumlah penduduk di hampir semua kecamatan di Kabupaten Bangka Barat. Hanya Kecamatan Jebus yang mengalami penurunan penduduk, hal tersebut dikarenakan telah terbagi wilayahnya menjadi Kecamatan Parittiga.

Gambar 2. 4 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka Barat, 2010-2017

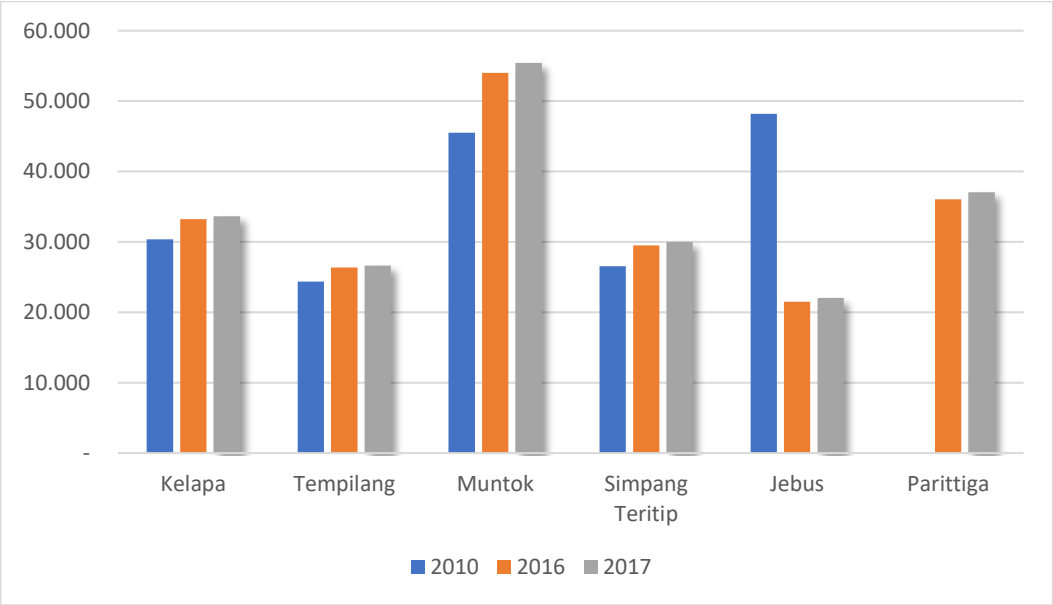

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

Sementara itu, Kecamatan Parittiga menjadi kecamatan dengan angka kepadatan dan pertumbuhan penduduk tertinggi di Kabupaten Bangka Barat dengan nilai kepadatan sebesar 113 jiwa/km^2 dan pertumbuhan sebesar 2,73 persen pada tahun 2017. Di sisi lain, Kecamatan Simpan Tertip menjadi kecamatan dengan nilai kepadatan terendah dengan nilai kepadatan 47 jiwa/km^2. Dari sisi laju pertumbuhan penduduk, Kecamatan Tempilang menjadi kecamatan dengan laju pertumbuhan terkecil pada tahun 2017, yaitu hanya sebesar 1,12 persen.

Gambar 2. 5 Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangka Barat, 2017

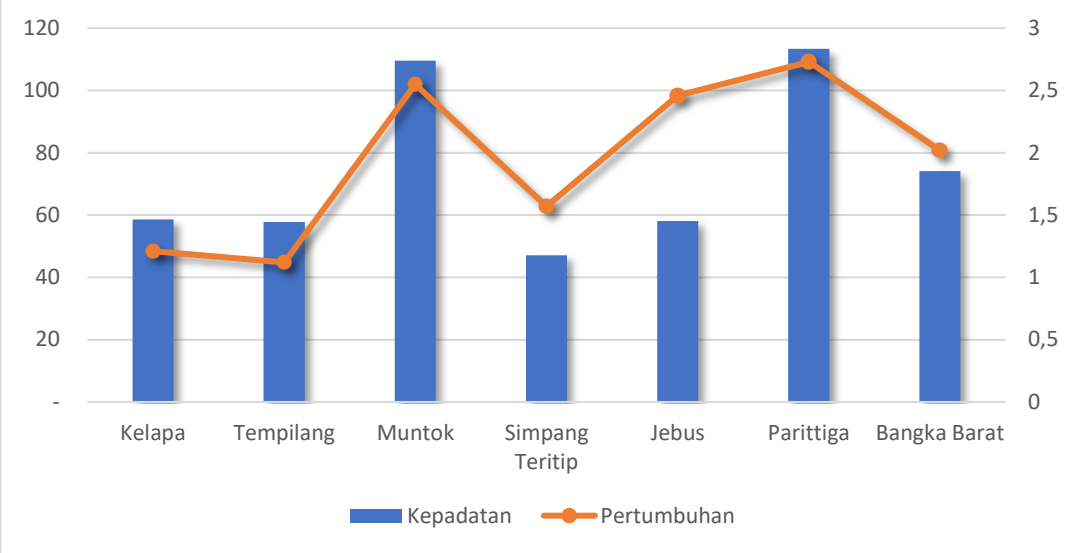

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

2.1.4 Ketenagakerjaan

Salah satu indikator untuk melihat kemakmuran suatu wilayah adalah dengan melihat statistik ketenagakerjaannya. Hal ini dikarenakan indikator ketenagakerjaan penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi dan sosial. Pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan peningkatan kesempatan dan angkatan kerja akan mempengaruhi pembangunan di wilayah tersebut.

Dari total penduduk Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2017, sekitar 147.346 jiwa berada pada usia produktif atau penduduk usia kerja. Dari penduduk usia kerja tersebut, sebanyak 100.449 jiwa adalah angkatan kerja, sedangkan sisanya bukan angkatan kerja yang terdiri dari penduduk yang masih bersekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga, dan lainnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2017 tercatat mengalami peningkatann dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 68,17 persen, artinya dari 100 penduduk usia kerja 68 orang diantaranya aktif secara ekonomi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bangka Barat tercatat sebesar 4,23 persen. Ini berarti pada tahun 2017 dari 100 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja ada 4 atau 5 orang yang menganggur atau sedang mencari

pekerjaan. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun 2015 yang tercatat sebesar 5,92 persen.

Tabel 2. 2 Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat, 2017

Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja yang Bekerja	62.668	33.537	96.205
Pengangguran	3.114	1.130	4.244
Jumlah Angkatan Kerja	65.782	34.667	100.449
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	84,78	49,7	134,48
Tingkat Pengangguran	4,73	3,26	7,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

Selama periode 2013-2017, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bangka Barat mengalami fluktuasi. Angka pengangguran terbuka terendah terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah 3,03%, sedangkan angka pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan persentase mencapai 5,92 persen. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka mampu ditekan hingga mencapai 4,23 persen.

Gambar 2. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bangka Barat, 2013-2017

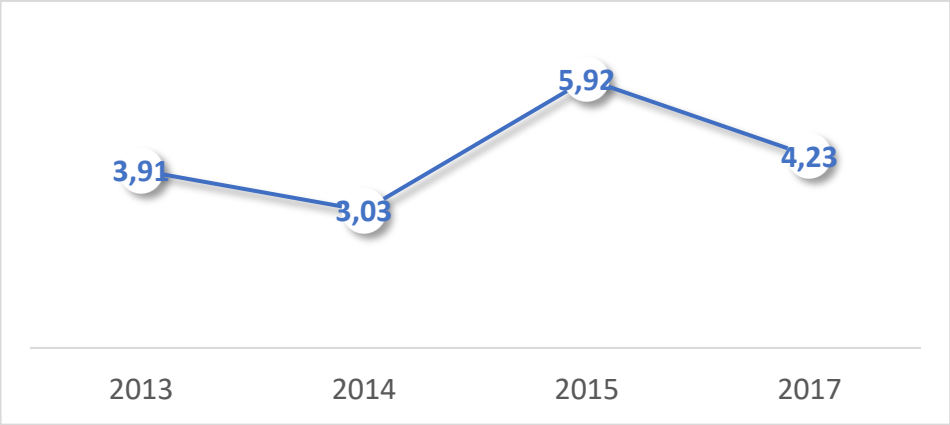

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

2.1.5 Pendidikan

Pendidikan menjadi elemen terpenting dalam proses pengembangan sumber daya manusia di suatu daerah. Salah satu indikator pendidikan yang digunakan Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Menurut publikasi BPS, Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Nonformal di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2018 tertinggi dicapai pada tingkat SD dengan APM sebesar 100 persen. Sementara pada jenjang SMP, nilai APM penduduk laki-laki lebih rendah dibanding dengan penduduk perempuan dengan skor masing-masing 60,74 dan 71,82 persen. Di tingkat pendidikan SMA, nilai APM penduduk laki-laki sebesar 48,84 dan perempuan sebesar 57,4 persen.

Gambar 2. 7 Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Nonformal Penduduk Kabupaten Bangka Barat menurut Jenis Kelamin, 2018

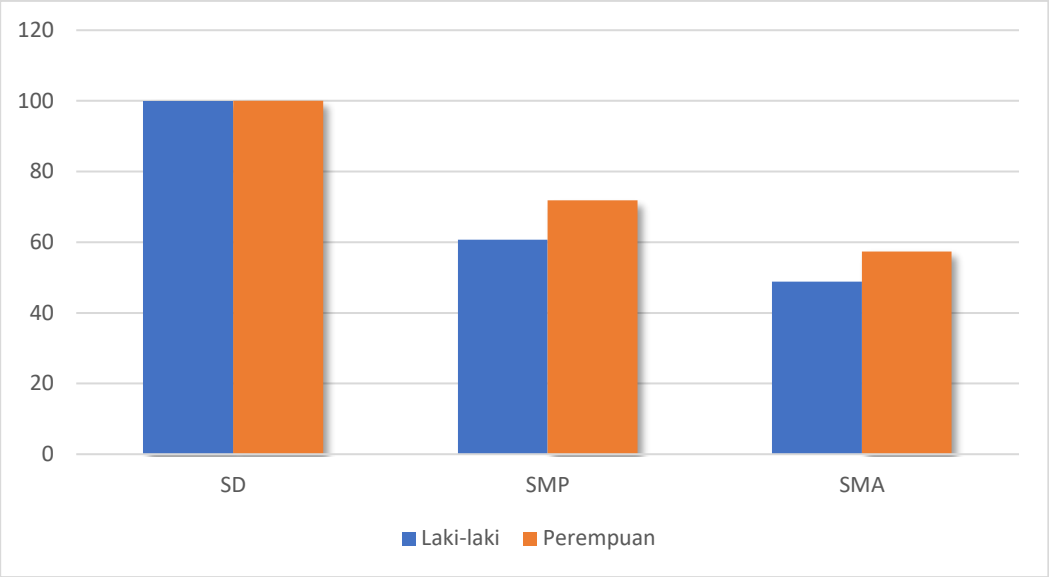

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

2.1.6 Angka Harapan Sekolah

Salah satu indikator pendidikan yang menunjukkan partisipasi penduduk terhadap kegiatan pendidikan adalah lama sekolah yang diharapkan (*Expected Years Schooling*) dan rata-rata lama sekolah (*Mean Years Schooling*). EYS dan MYS Kabupaten Bangka Barat terus meningkat dalam kurun waktu tiga tahun ini. Tercatat harapan lamanya sekolah tahun 2017 sebesar 11,5 atau setara dengan mengenyam pendidikan hingga ke jenjang diatas SMA. Sementara itu rata-rata lama sekolah penduduk sebesar 7,06 tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 6,89 tahun.

Gambar 2. 8 Lama Sekolah yang Diharapkan (Expected Years Schooling) dan Rata-Rata Lama Sekolah (Mean Years Schooling) di Kabupaten Bangka Barat, 2015-2017

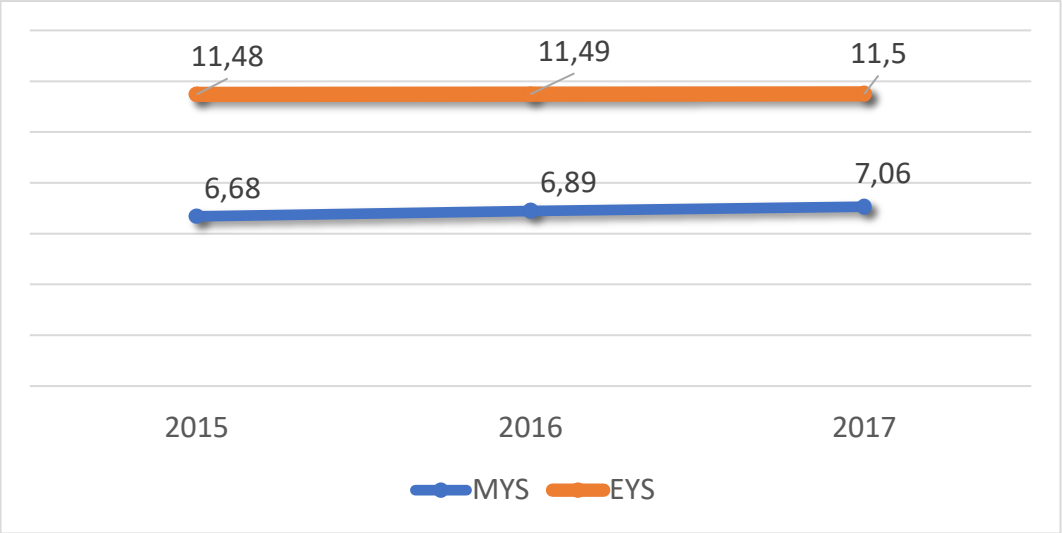

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

Di sisi lain, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Nonformal dari sisi usia dan jenis kelamin di Kabupaten Bangka Barat terlihat bahwa di usia pendidikan dasar setingkat SD seluruh penduduk berusia 7-12 tahun mengikuti program pendidikan. Sedangkan di usia 13-15 tahun, partisipasi laki-laki hanya sebesar 86,41 persen dan perempuan sebesar 93,6 persen. Di usia 16-18 tahun, angka partisipasi semakin menurun dengan komposisi laki-laki sebesar 56,73 dan perempuan sebesar 62,19 persen.

Gambar 2. 9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Nonformal Penduduk Berumur 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, 2018

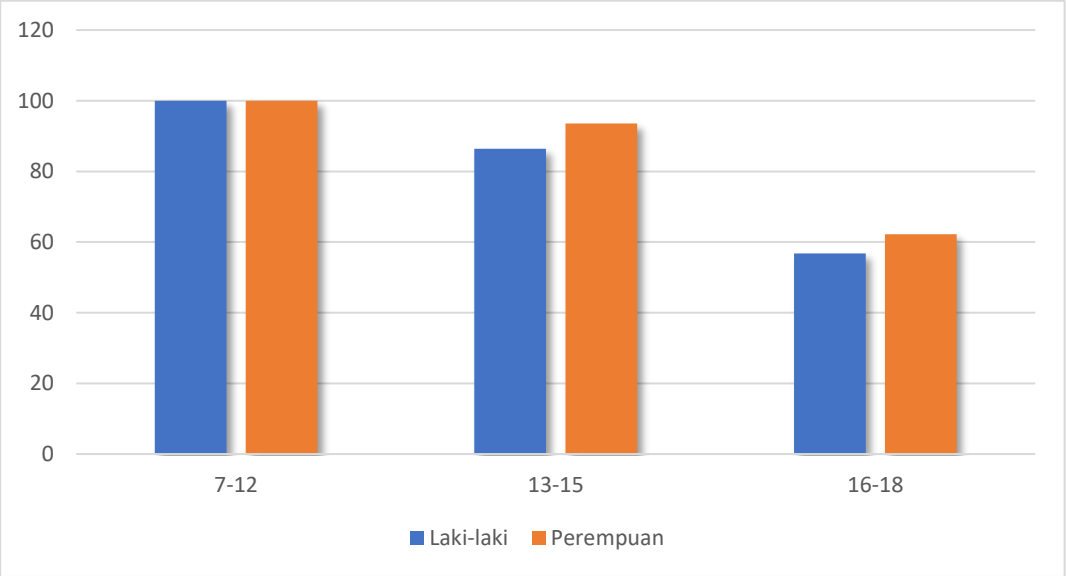

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Sejak diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indikator IPM kemudian mengalami perubahan dengan mengganti Angka Melek Huruf dengan Angka Harapan Lama Sekolah dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode Penghitungan diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Selama tiga tahun terakhir, IPM Kabupaten Bangka Barat terus mengalami tren positif. Di tahun 2015, IPM Kabupaten Bangka Barat sebesar 67,23 dan meningkat menjadi 67,6 pada tahun 2016. Di akhir periode, angka IPM Kabupaten Bangka Barat mencapai 67,94 menutup tahun 2017.

Gambar 2. 10 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Barat, 2015-2017

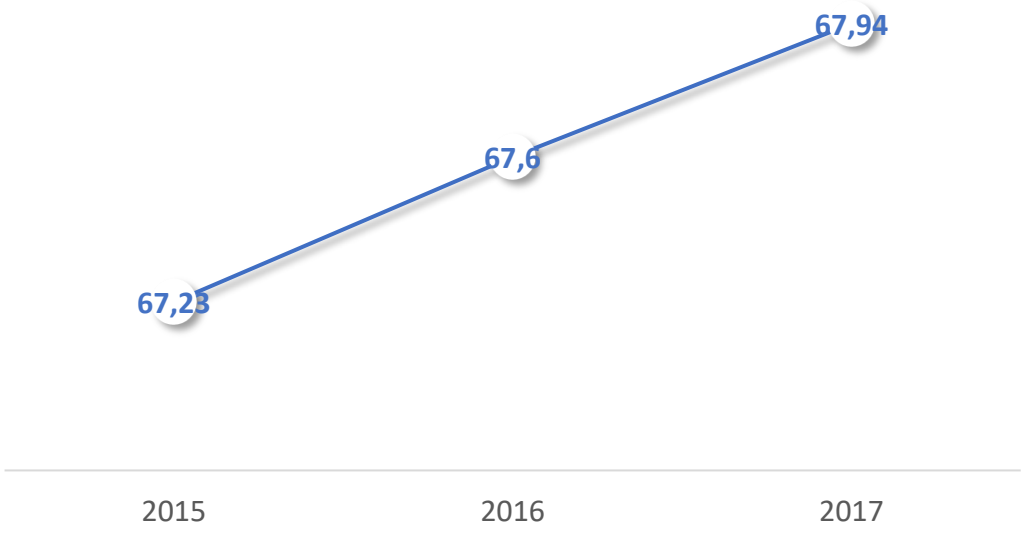

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

2.1.8 Kesehatan

Dinas Kesehatan Bangka Barat telah berusaha untuk melakukan pemerataan jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Bangka Barat. Setiap kecamatan telah memiliki puskesmas, polindes dan poskesdes. Sementara itu, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason masih menjadi satu-satunya rumah sakit pemerintah di Kabupaten Bangka Barat.

Jumlah dokter selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2017 jumlah dokter di Kabupaten Bangka Barat meningkat 11,76 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, dilihat berdasarkan rasio dokter-penduduk yaitu 1 dokter per 2.694 penduduk. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga medis khususnya doker di Kabupaten Bangka Barat hingga tahun 2017 masih sangat diperlukan.

Tabel 2. 3 Statistik Kesehatan Bangka Barat, 2015-2017

Uraian	2015	2016	2017
Lembaga Kesehatan			
Rumah Sakit	2	2	2
Puskesmas	8	8	8
Polindes	12	11	9
Poskesdes	53	59	63
Tenaga Medis			
Dokter	62	68	76
Bidan	189	159	161
Perawat	168	172	169
Apoteker	10	19	23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

2.1.9 Angka Harapan Hidup

Menurut BPS, Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka Harapan Hidup (AHH) juga mencerminkan kemungkinan lama hidup seorang bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu untuk hidup di dunia. Di Kabupaten Bangka Barat, tren positif terjadi pada Angka Harapan Hidup (AHH) selama periode 2015-2017. AHH Kabupaten Bangka Barat tahun 2017 adalah sebesar 69,56 tahun, artinya secara rata-rata bayi yang lahir pada tahun 2017 mempunyai harapan hidup di dunia selama 69 tahun. Selama periode 2015-2017, angka harapan hidup terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa taraf kesehatan masyarakat semakin membaik.

Gambar 2. 11 Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Bangka Barat, 2015-2017

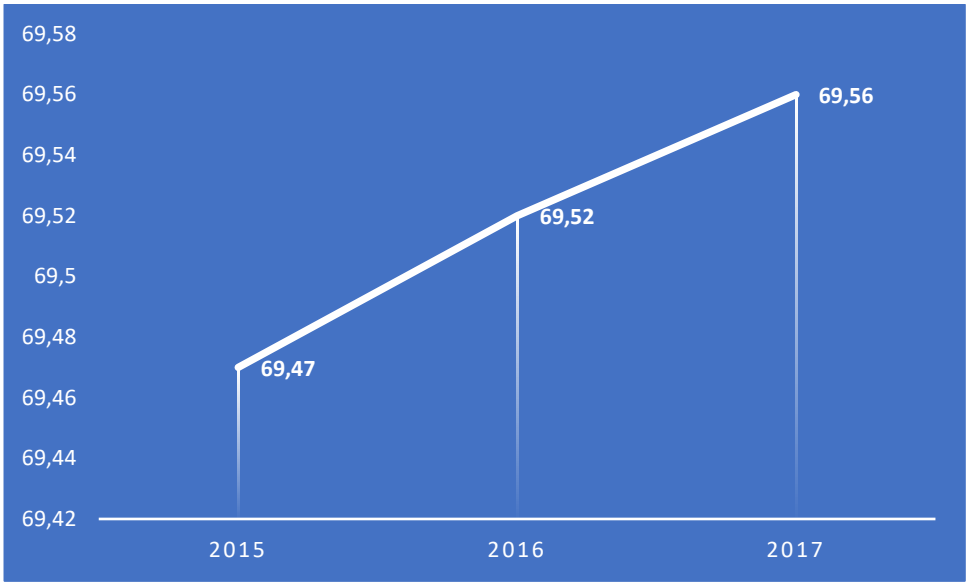

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

2.1.10 Kemiskinan

Kemiskinan menjadi masalah umum yang dihadapi oleh pemerintah di berbagai wilayah. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar *(basic needs approach)*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga dalam pengertian ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 meningkat menjadi 6.060 jiwa atau sebesar 2,98 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Garis kemiskinan tahun 2017 berada pada level Rp 497.567,- meningkat dari tahun 2016. Kenaikan ini dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari sehingga garis kemiskinan pun meningkat.

Sementara itu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan tercatat sebesar 0,16. Semakin tinggi nilai P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran

penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang memberikan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin tercatat sebesar 0,01. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 2. 4 Statistik Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat, 2014-2016

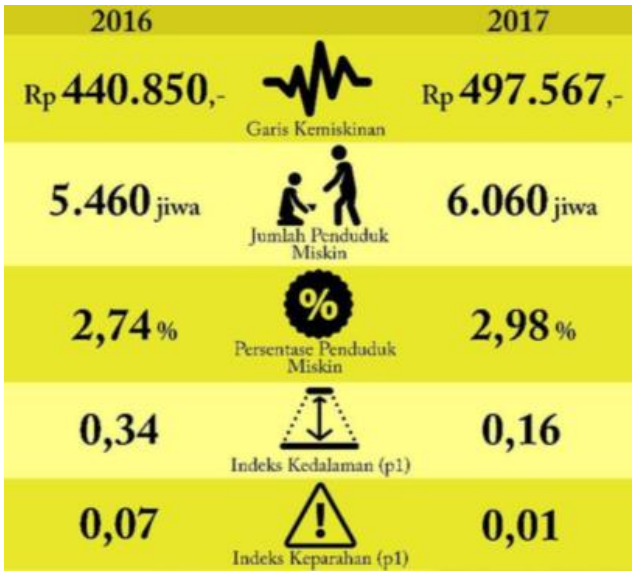

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

Hal yang patut dibanggakan dari usaha pengentasan kemiskinan tampak pada perbandingan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selama empat tahun berturut-turut, Kabupaten Bangka Barat menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terendah di antara kabupaten lainnya.

Gambar 2. 12 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung (ribu jiwa), 2014-2017

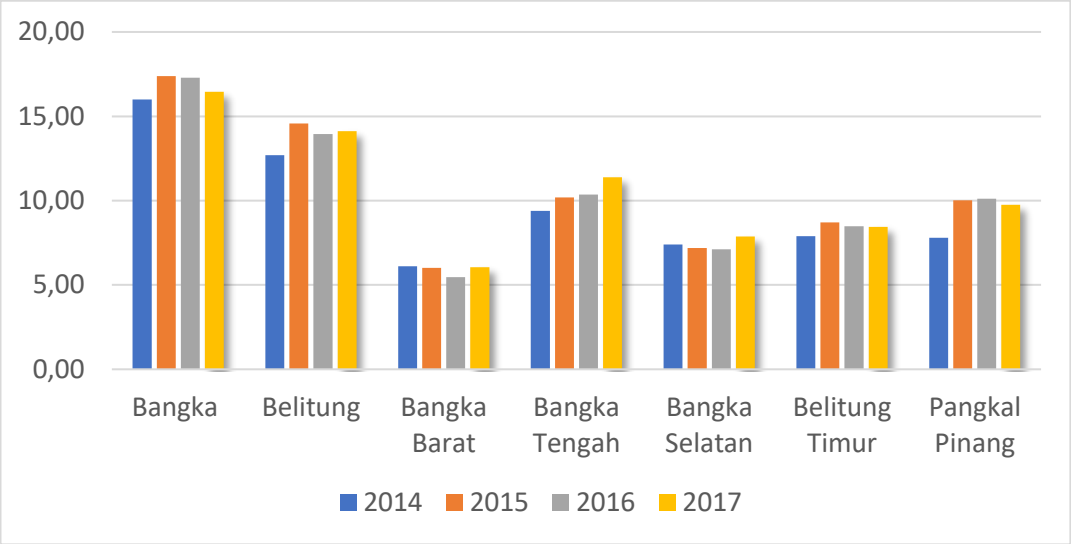

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

2.1.11 Produk Domestik Regional Bruto

Menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu ukuran kinerja pembangunan ekonomi pada tingkat wilayah sebagai indikator penting untuk memonitor perekonomian secara makro. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dari angka PDRB dapat digambarkan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, perubahan struktur ekonomi, pendapatan per kapita, konsumsi, investasi, dan variabel ekonomi makro lainnya. Dalam perkembangannya, PDRB sudah dijadikan sebagai tolok ukur bagi pemerintah maupun pihak-pihak lain untuk melakukan evaluasi keberhasilan dalam bidang pembangunan ekonomi di masing-masing wilayah.

PDRB dinilai menggunakan dua pendekatan, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) dan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB riil). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun dan PDRB tipe ini sangat bermanfaat untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. PDRB atas dasar

harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).

Penyusunan PDRB dapat menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu menurut pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran. Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi.

Selama lima tahun terakhir, baik PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) maupun PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, PDRB ADHB sebesar Rp 9.538 miliar dan PDRB ADHK sebesar Rp 7.973 miliar. Tren positif terus terjadi selama lima tahun berturut-turut hingga pada tahun 2017 PDRB ADHB sebesar Rp 13.221 miliar dan PDRB ADHK sebesar Rp 9.673 miliar.

Gambar 2. 13 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat (miliar rupiah), 2013-2017

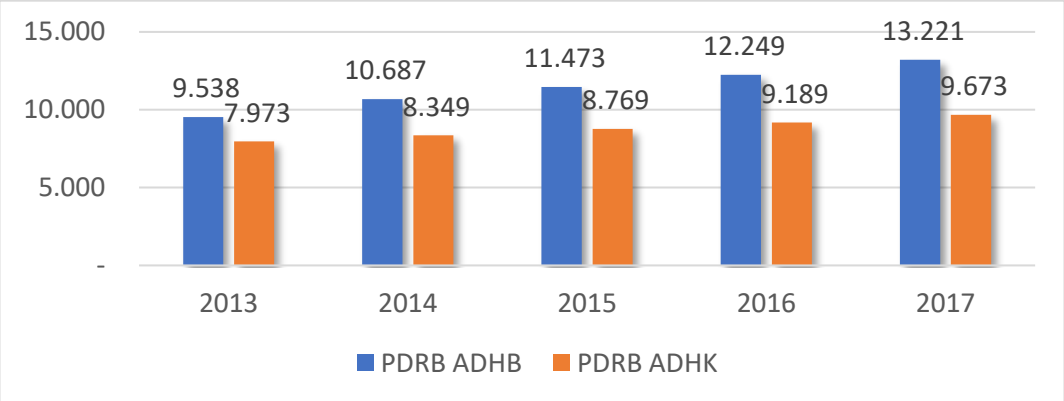

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

2.1.12 PDRB Atas Harga Konstan

Dari sisi lapangan usaha, PDRB ADHK didominasi oleh tiga sektor yang memberikan kontribusi di atas Rp 1 triliun. Ketiga sektor tersebut adalah Industri

pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sementara itu, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang serta Pengadaan Listrik dan Gas menjadi dua jenis lapangan usaha dengan nilai terkecil dalam struktur PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2. 5 PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2014-2017

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.120.752	1.192.686	1.281.698	1.279.011
B. Pertambangan dan Penggalian	1.135.060	1.160.621	1.168.179	1.196.312
C. Industri Pengolahan	3.879.618	4.015.961	4.170.859	4.443.087
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3.118	3.359	3.485	3.681
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	528	567	606	653
F. Konstruksi	435.156	471.029	514.076	550.316
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	939.640	1.007.462	1.086.086	1.165.904
H. Transportasi dan Pergudangan	68.402	72.125	76.768	82.731
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	86.309	90.768	97.948	103.646
J. Informasi dan Komunikasi	25.466	27.553	30.066	32.600
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	30.922	32.586	34.064	34.675

L. Real Estat	156.633	163.851	173.761	182.532
M,N. Jasa Perusahaan	11.405	11.868	12.368	12.875
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	277.088	303.545	326.245	351.692
P. Jasa Pendidikan	106.364	116.602	127.585	140.038
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	51.687	56.119	60.655	66.053
R, S, T, U Jasa Lainnya	21.112	22.941	25.285	27.256
PDRB dengan Migas	**8.349.260**	**8.749.643**	**9.189.734**	**9.673.062**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

Sampai dengan tahun 2017, kontribusi setiap sektor dalam PDRB terlihat tidak merata. Sektor industri pengolahan berkontribusi besar terhadap total PDRB dengan persentase mencapai 46 persen. Dua sektor dengan kontribusi terbesar berikutnya adalah Pertambangan dan Penggalian, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase masing-masing 13 persen dan 12 persen.

Di sisi lain, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang serta Pengadaan Listrik dan Gas menjadi dua jenis lapangan usaha dengan kontribusi terkecil dalam PDRB Kabupaten Bangka Barat. Pada tahun 2018, kedua sektor tersebut hanya memberikan kontribusi sebesar 0,01 persen dan 0,04 persen dari seluruh nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat.

Gambar 2. 14 Distribusi PDRB Kabupaten Bangka Barat Atas Dasar Harga Kontsan Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2014-2017

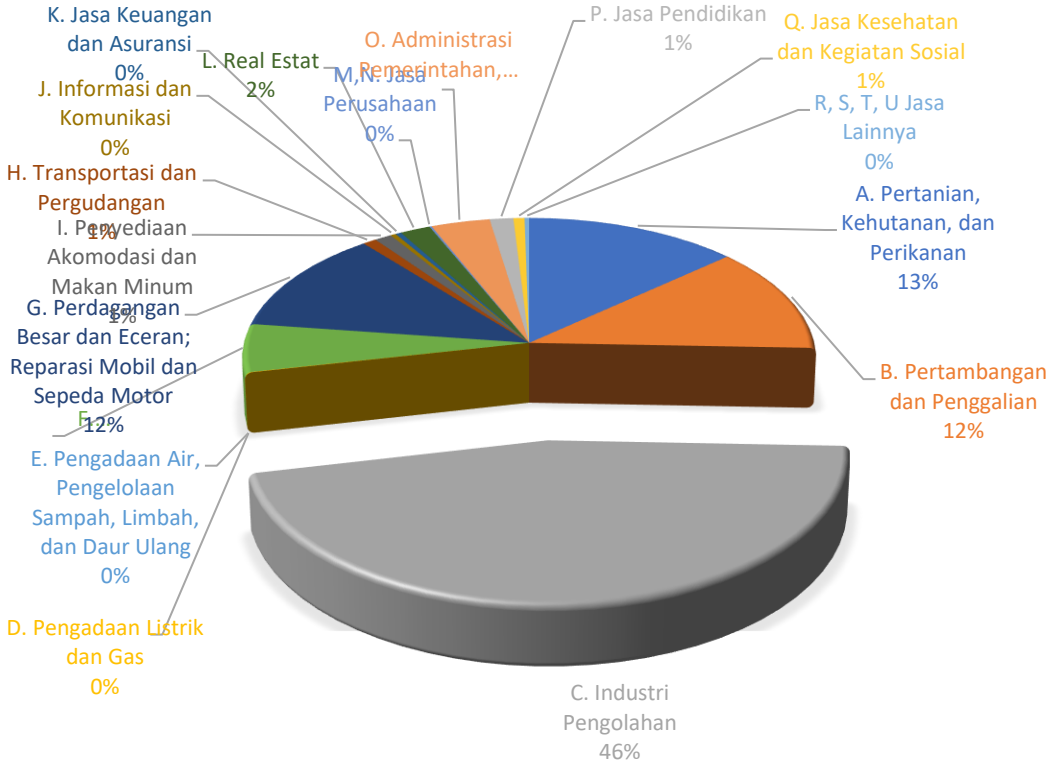

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

Dari sisi laju pertumbuhan PDRB, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi satu-satunya lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif dengan laju pertumbuhan sebesar -0,21 persen. Sedangkan sektor Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Informasi dan Komunikasi menjadi tiga sektor yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi dalam PDRB Kabupaten Bangka Barat. Ketiga sektor tersebut masing-masing meiliki laju pertumbuhan 9,76 persen, 8,9 persen, dan 8,43 persen pada tahun 2017.

Gambar 2. 15 Persentase Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat, 2015-2017

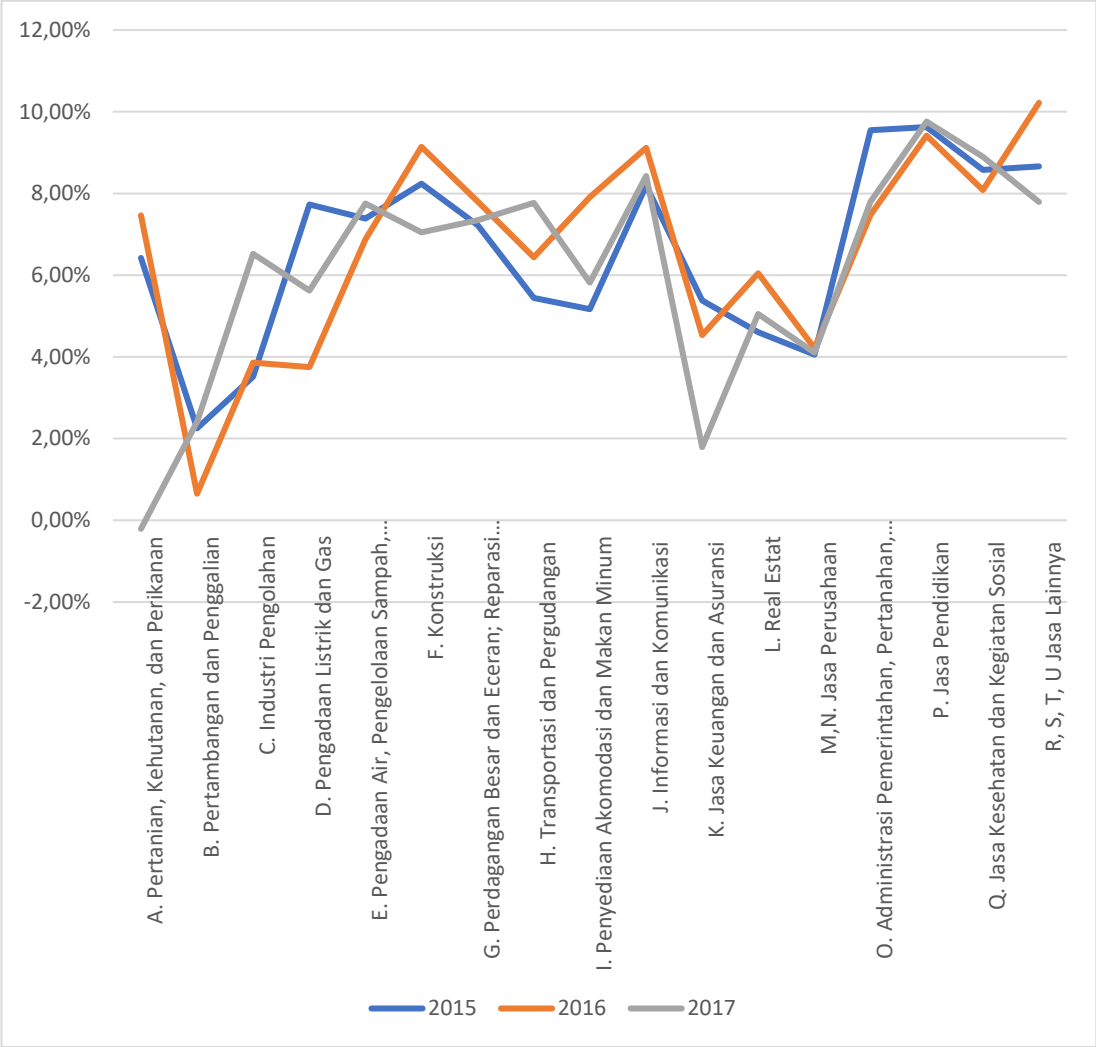

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

2.1.13 Pertumbuhan Ekonomi

Selama empat tahun berturut-turut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat hanya sebesar 4,5 persen. Setahun kemudian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat meningkat menjadi 4,79 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 4,57 persen. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat kembali meningkat dan mencapai rekor baru dengan capaian sebesar 5 persen.

Gambar 2. 16 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat, 2014-2017

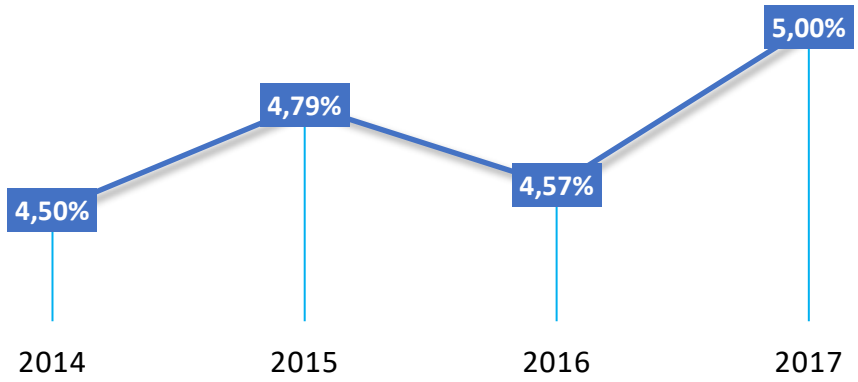

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

2.1.14 Inflasi

BPS menyebutkan bahwa merupakan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selama ini untuk data inflasi, Kabupaten Bangka Barat masih merujuk ke angka inflasi Kota Pangkalpinang. Selama enam tahun terakhir ini laju inflasi di Kota Pangkalpinang berfluktuasi. Inflasi paling tinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 8,71 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 4,66 persen. Inflasi yang terjadi didorong oleh kenaikan harga pada kelompok bahan makanan, transportasi, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar. Jika tingkat inflasi tidak dikontrol, maka daya beli masyarakat akan berkurang, sehingga diperlukan peranan pemerintah dalam menjaga harga bahan kebutuhan pokok agar tetap stabil.

Gambar 2. 17 Laju Inflasi Kota Pangkalpinang 2011-2016 (persen)

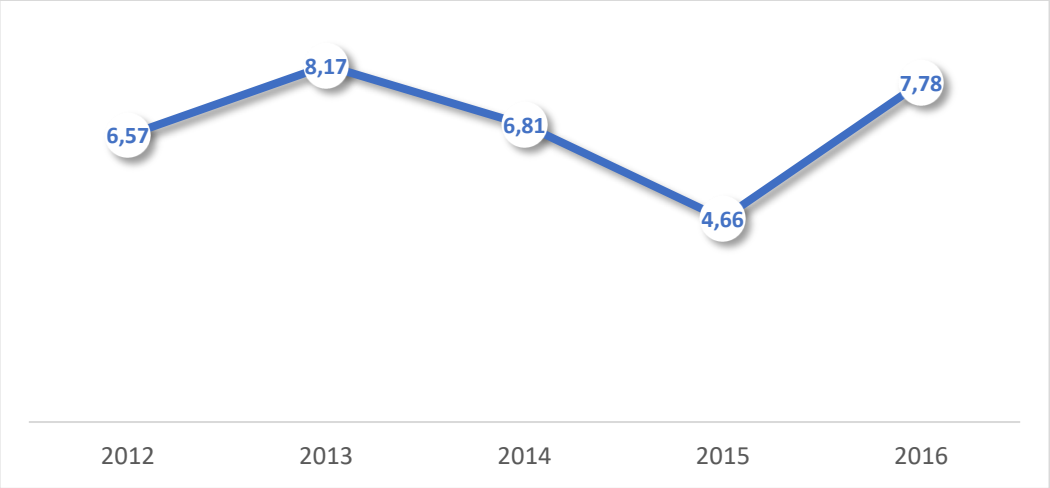

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

2.1.15 Perdagangan

Perdagangan merupakan sektor akhir dari perpaduan sektor primer dan sektor sekunder. Salah satu kegiatan perdagangan adalah kegian ekspor dan impor. Kegiatan ekspor di Kabupaten Bangka Barat terjadi di Pelabuhan Muntok. Berdasarkan data ekspor di Pelabuhan Muntok selama tiga tahun terakhir, ekspor mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2016. Pada tahun 2015 tercatat, ekspor mencapai 19.123 ton kemudian meningkat drastis menjadi 507.919 ton pada tahun 2017.

Gambar 2. 18 Volume Ekspor di Pelabuhan Muntok, 2015-2017 (ton)

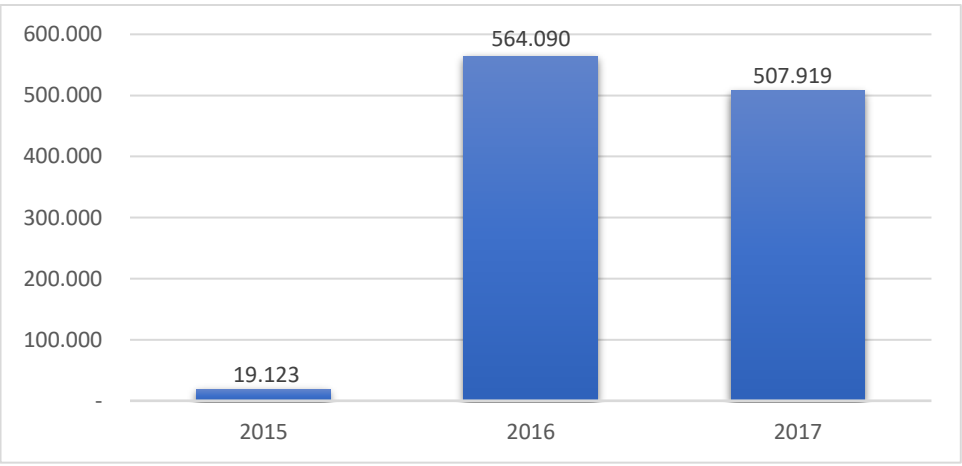

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

2.1.16 Keuangan Daerah

Selama periode 2014-2017, realisasi pendapatan Kabupaten Bangka Barat mengalami tren positif meskipun di akhir periode mengalami koreksi. Pada tahun 2014, pendapatan daerah hanya sebesar Rp 672.405.269.026,03. Peningkatan pendapatan daerah terus terjadi hingga pada tahun 2015 mencapai Rp 835.821.052.821,35. Pada tahun 2017, realisasi pendapatan daerah mengalami kontraksi menjadi sebesar Rp 835.319.418.526,35.

Gambar 2. 19 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat (juta rupiah), 2014-2017

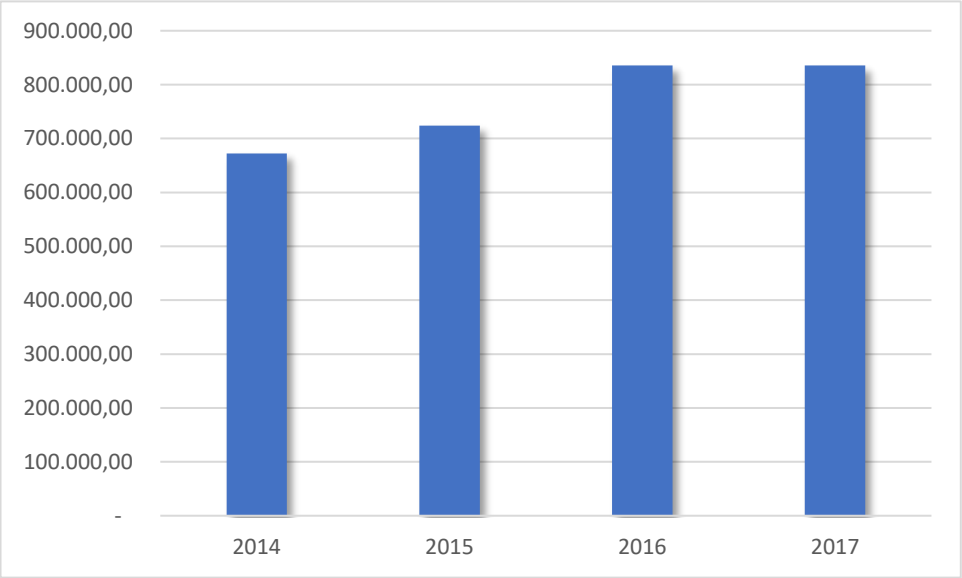

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

Dari sisi struktur pendapatan, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bangka Barat memiliki ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat yang relatif tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Barat yang berada di bawah 50 persen dari total pendapatan daerah pada tahun 2017.

Pendapatan daerah Kabupaten Bangka Barat didominasi oleh Dana Perimbangan dengan persentase 74 persen atau sebesar Rp 615.426.059.715,00. Komponen Lain-lain Pendapatan yang sah menjadi kontributor berikutnya dengan persentase sebesar 17 persen. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat hanya

berkontribusi sebesar 9 persen dari seluruh realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bangka Barat.

Gambar 2. 20 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2017

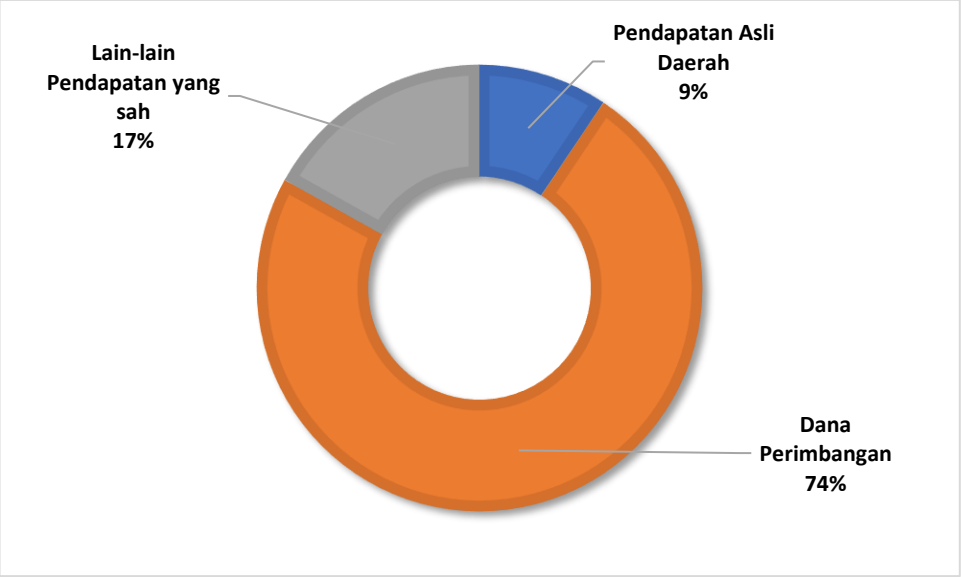

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

Jika dilihat lebih detail, struktur PAD Kabupaten Bangka Barat sebagian besar dihasilkan dari komponen Penerimaan Lain-lain. Pada tahun 2017, komponen ini memberikan kontribusinya sebesar Rp 54.304.858.156,39 atau 69 persen dari seluruh nilai PAD Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan Pajak Daerah memberikan kontribusinya sebesar Rp 17.582.166.053,89 atau secara persentase sebesar 22 persen.

Gambar 2. 21 Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat (juta rupiah), 2017

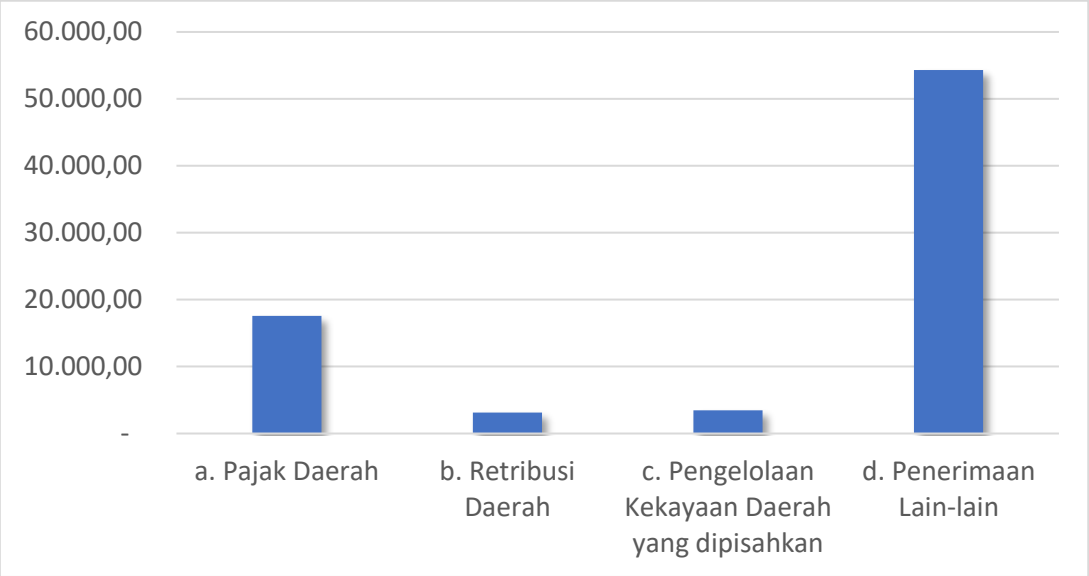

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

Sementara itu, komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah menjadi dua elemen yang berkontribusi kecil terhadap PAD Kabupaten Bangka Barat. Kedua komponen ini hanya memberikan kontribusi sebesar Rp 3.480.796.346,17 dan 3.119.060.973,00 atau hanya 5 persen dan 4 persen dalam struktur PAD Kabupaten Bangka Barat.

Gambar 2. 22 Persentase PAD Kabupaten Bangka Barat, 2017

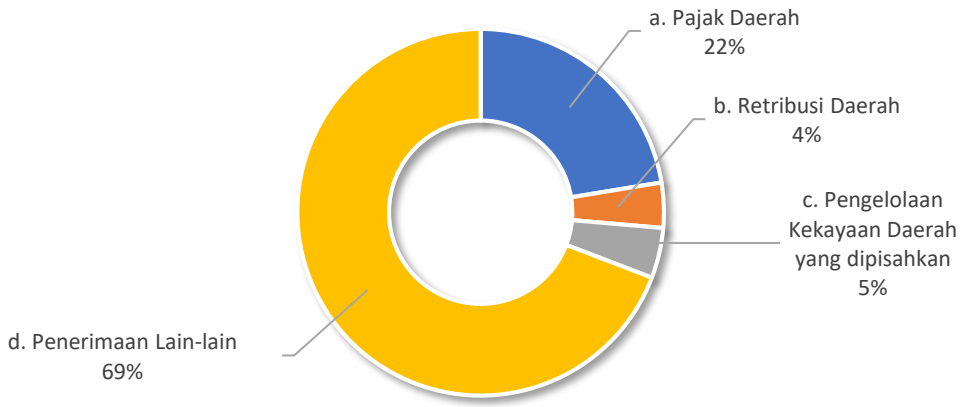

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat (2018).

BAB III

KINERJA DAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BANGKA BARAT

3.1 KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANGKA BARAT

3.1.1 Gambaran Umum

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara sederhana dapat dipahami sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. PAD merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, PAD Kabupaten Bangka Barat terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Di tahun 2017, komposisi penerimaan APBD Bangka Barat masih didominasi oleh dana perimbangan, yaitu sebesar Rp615,42 milyar atau sekitar 73,68%. Pada tahun tersebut, PAD hanya hanya menyumbang 78,49 milyar atau sekitar 9,4% dari total APBD dan sisanya Rp 141,4 milyar (16,93%) merupakan penerimaan lainnya (lihat Gambar 3.1). Dengan kontribusi PAD yang bernilai di bawah 50%, disimpulkan bahwa Kabupaten Bangka Barat masih memiliki ketergantungan fiskal yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat.

Gambar 3. 1 Komposisi Penerimaan APBD Bangka Barat, 2017

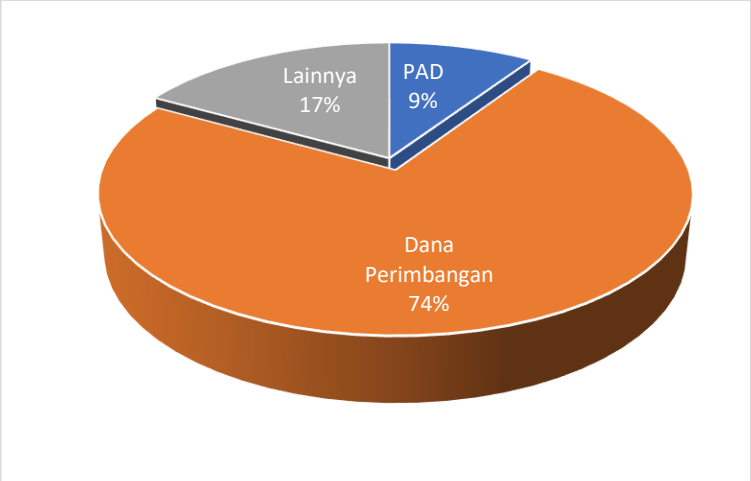

Sumber: diolah dari BPS Bangka Barat (2018).

Pada tahun 2018, PAD Kabupaten Bangka Barat mencapai Rp68,75 milyar. Nilai PAD tersebut mengalami penurunan 12,41% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp78,49 milyar. Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, rata-rata total PAD Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar Rp54,26 milyar. Total PAD tertinggi dicapai pada tahun 2015 sebesar Rp87,88 milyar. Berkebalikan dengan hal tersebut, tahun 2012 merupakan pencapaian total PAD terendah yaitu sebesar Rp29,97 milyar. Dari tahun ke tahun capaian PAD tersebut berfluktuasi dengan *trend* positif (lihat Gambar 3.1).

Capaian PAD mengalami penuruan cukup drastis di tahun 2014, 2016, dan 2018 (lihat Gambar 3.2). Di tiga tahun tersebut, PAD Bangka Barat mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan tahun sebelumnya (lihat Gambar 3.2). *Pertama,* tahun 2014 PAD Bangka Barat tumbuh -10.88%. Penurunan yang cukup besar tersebut disumbang oleh kontraksi tajam pada pajak daerah sebesar 42%, khususnya adalah pajak bahan galian dan pajak BPHTB yang mengalami penurunan sebesar 92% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan cukup tajam terjadi pula pada komponen retribusi daerah yang turun 68%, khsususnya retribusi pelayanan kesehatan yang turun 71% dan penggantian biaya cetak KTP yang turun 93% (lihat Gambar 3.3). *Kedua,* tahun 2016, capaian PAD mengalami pertumbuhan negatif sebesar 42%. Berbeda dengan tahun 2014, penurunan capaian PAD pada tahun

2016 utamanya secara dominan disumbang oleh kontraksi pada komponen lain-lain PAD sah yang tumbuh negatif sebesar 58%, utamanya tuntutan ganti kerugian daerah yang tumbuh -100% dan BLUD yang turun 72% (lihat Gambar 3.3). *Terakhir*, di tahun 2018 capaian PAD mengalami penurunan kembali sebesar 12%. Penurunan tersebut utamanya disumbang oleh kontraksi pada penerimaan bagian laba penyertaan modal BPD Sumatera Selatan yang turun 5% dan BPR Bank Syariah Bangka yang turun 12%. Selain itu, penurunan di tahun 2018 disumbang pula oleh kontraksi pada komponen lain-lain PAD sah yang mengalami penurunan 37%, khususnya penurunan pada penerimaan hasil penjualan aset lainnya yang mengalami penurunan 24% (lihat Gambar 3.3).

Meskipun sempat mengalami pertumbuhan negatif di beberapa tahun di atas, namun secara rata-rata PAD Kabupaten Bangka Barat tumbuh positif sebesar 4,59%. Oleh karena itu, dengan *trend* dan rerata pertumbuhan yang positif tersebut, diyakini masih ada peluang untuk terus mengoptimalkan capaian penerimaan PAD yang digali dari wilayah Kabupaten Bangka Barat itu sendiri.

Gambar 3. 2 Perkembangan Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2011-2018 (dalam Milyar Rupiah)

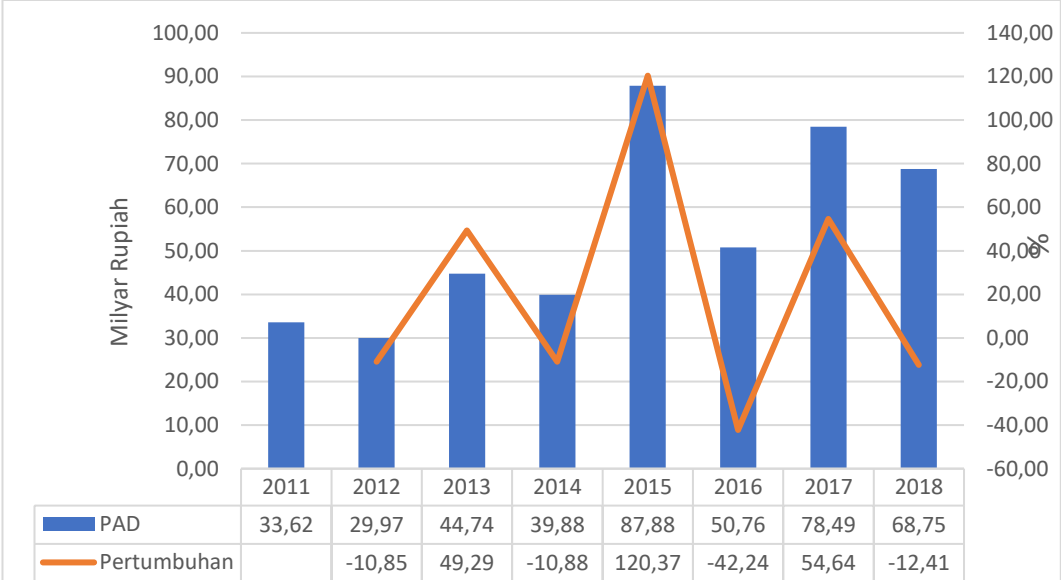

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PAD	33,62	29,97	44,74	39,88	87,88	50,76	78,49	68,75
Pertumbuhan		-10,85	49,29	-10,88	120,37	-42,24	54,64	-12,41

Sumber: diolah dari BP2RD Kabupaten Bangka Barat (2019).

Gambar 3. 3 Perkembangan Komponen PAD Bangka Barat, 2013-2018 (dalam juta rupiah)

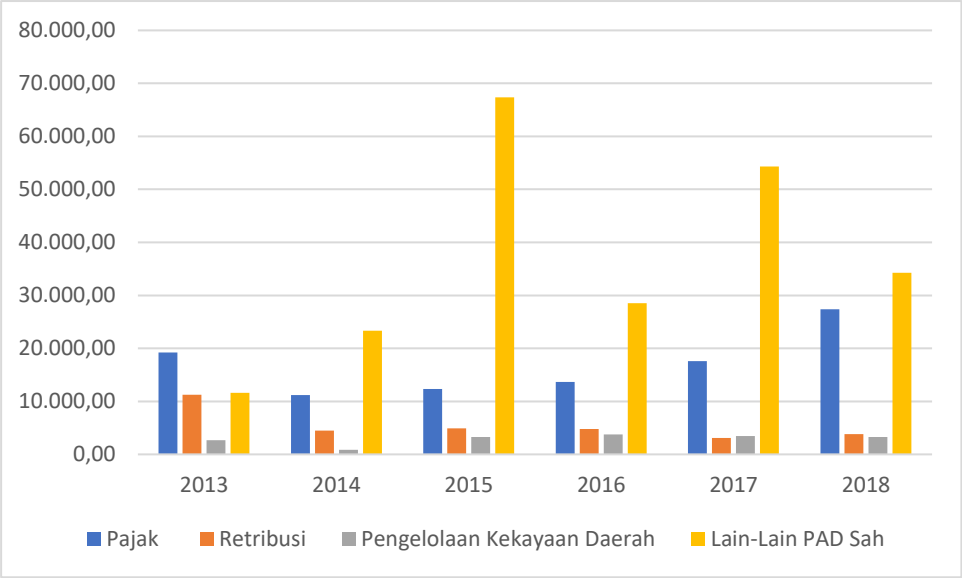

Sumber: diolah dari BP2RD Kabupaten Bangka Barat (2019).

Dalam perkembangannya selama delapan tahun terakhir, struktur PAD Bangka Barat cenderung didominasi oleh komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (lihat Gambar 3.3). Pada tahun 2018, komponen tersebut menyumbang setengah dari total PAD yang ada. Meskipun demikian, kontribusi pajak daerah diyakini akan terus mengimbangi dominasi dari komponen lain-lain PAD sah terhadap total PAD (lihat Gambar 3.4). Pada tahun 2018, pajak daerah menyumbang sekitar 40% total PAD Bangka Barat (lihat Gambar 3.4). Dengan rerata pertumbuhan 13,60%, pajak daerah diyakini akan terus berkontribusi lebih besar terhadap total PAD.

Berbeda halnya dengan pajak daerah, penerimaan PAD dari komponen retribusi daerah kondisinya cukup mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, kontribusi komponen ini terhadap total PAD terus menurun secara konsisten dibandingkan dengan komponen PAD lainnya (lihat Gambar 3.3). Di tahun 2018, retribusi daerah hanya menyumbang sekitar 5% total PAD (lihat Gambar 3.4). Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen PAD yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah setempat dalam mengelola keuangan daerah, khususnya sumber pendapatan yang secara asli berasal dari daerahnya sendiri. Oleh karena itu,

sejatinya pajak daerah dan retribusi daerah bisa dioptimalkan secara beriringan tanpa membiarkan salah satu komponen tertinggal jauh.

Gambar 3. 4 Perkembangan Struktur Pendapatan Asli Daerah Kab. Bangka Barat, 2011-2018

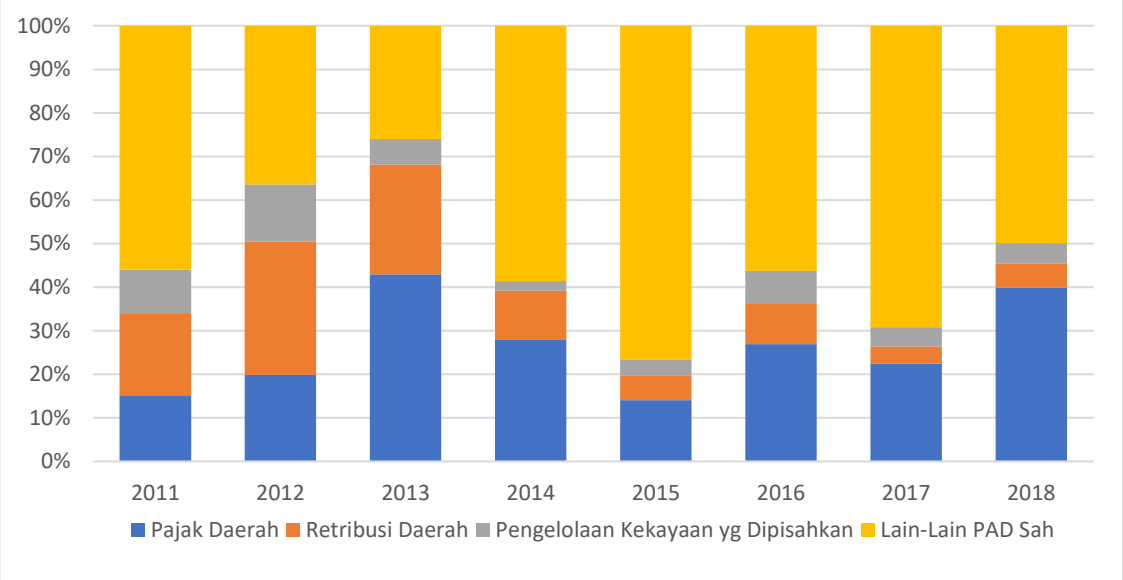

Sumber: diolah dari BPPRD Kabupaten Bangka Barat (2019).

Gambar 3. 5 Komponen Penyusun PAD Kab. Bangka Barat, 2018

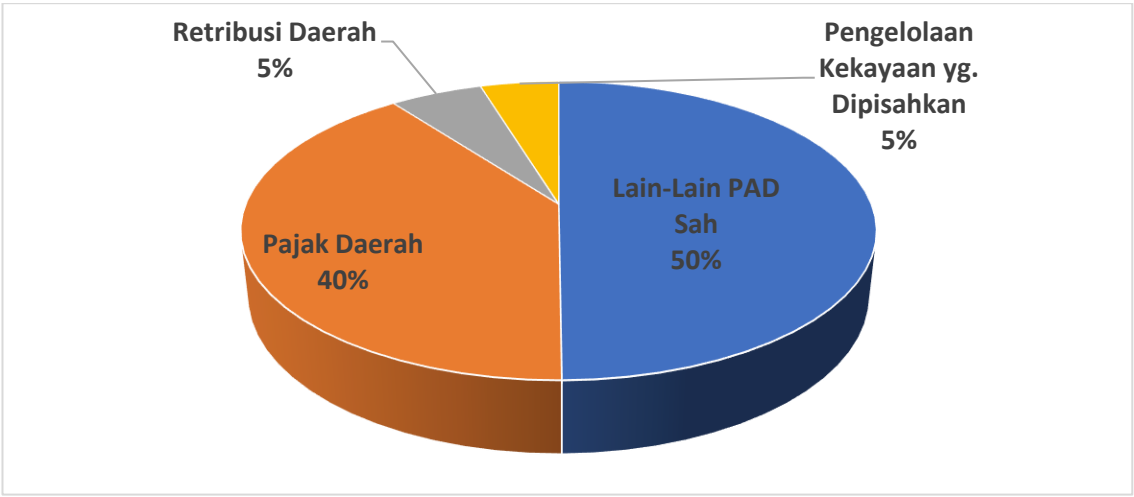

Sumber: diolah dari BPPRD Kabupaten Bangka Barat (2019).

3.1.2 Kinerja Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Bangka Barat

Pendapatan pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat kepada semua objek pajak, seperti orang atau

badan, benda bergerak, dan tidak bergerak. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Bangka Barat cenderung meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2014 sempat mengalami penurunan dan setelahnya secara konsisten mengalami peningkatan kembali (lihat Tabel 3.1). Lebih jauh, secara umum pajak daerah memiliki *trend* kontribusi yang positif terhadap total PAD, meskipun pada tahun 2015 sempat mengalami penurunan dengan kontribusi sebesar 14%. Di tahun 2018, pajak daerah menyumbang sekitar 40% total PAD (lihat Tabel 3.1), kontribusinya masih lebih rendah bila dibandingkan dengan komponen lain-lain PAD sah.

Tabel 3. 1 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2011-2018 (Milyar Rupiah)

Tahun	Total PAD	Pajak Daerah	% dari PAD
2011	33.62	5.05	15
2012	29.97	5.95	20
2013	44.74	19.22	43
2014	39.88	11.17	28
2015	87.88	12.33	14
2016	50.76	13.65	27
2017	78.49	17.58	22
2018	68.75	27.38	40

Sumber: diolah dari BP2RD Kabupaten Bangka Barat (2019)

Pajak daerah dengan sumbangan terbesar adalah jenis pajak penerangan jalan. Pajak ini merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, utamanya untuk memberikan penerangan jalan di Kabupaten Bangka Barat—sumber lain yang dimaksud adalah tenaga listrik yang diperoleh dari PLN dan/atau oleh bukan PLN. Secara umum capaian penerimaan pajak penerangan jalan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, apabila dilihat dari aspek lainnya, kontribusi pajak ini terhadap total PAD secara umum mengalami *trend* peningkatan dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, tahun 2009 sempat mengalami sedikit penurunan dan meningkat kembali di tahun-tahun selanjutnya (lihat Tabel 3.2).

Di tahun 2018, penerimaan pajak penerangan jalan adalah sebesar Rp11,74 milyar. Dibandingkan tahun sebelumnya, penerimaan pajak ini tumbuh sebesar 16,93%. Pajak penerangan jalan dalam hal ini menyumbang 43% dari total penerimaan pajak daerah Kabupaten Bangka Barat (lihat Gambar 3.5) atau sekitar 17,07% dari total PAD (lihat Tabel 3.2)

Tabel 3. 2 Perkembangan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Bangka Barat, 2011-2018 (Milyar Rupiah)

Tahun	Total PAD	Pajak Daerah	Pajak Penerangan Jalan	% dari Pajak Daerah	% dari PAD
2011	33.62	5.05	2.04	40	6
2012	29.97	5.95	3.40	57	11
2013	44.74	19.22	5.70	30	13
2014	39.88	11.17	7.15	64	18
2015	87.88	12.33	7.50	61	9
2016	50.76	13.65	7.63	56	15
2017	78.49	17.58	10.04	57	13
2018	68.75	27.38	11.74	43	17

Sumber: diolah dari BP2RD Kabupaten Bangka Barat (2019)

Jenis pajak daerah lainnya yang memiliki sumbangan relatif besar adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak ini dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP). Pada tahun 2018 pajak ini mencapai Rp3,31 milyar dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 31,68%. Pajak ini dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Di tahun 2018 pajak ini menyumbang 12,11% dari total pajak daerah atau 4,82% total PAD (lihat Gambar 3.6).

Dari beberapa jenis pajak daerah yang ada dan diterapkan di Kabupaten Bangka Barat, jenis pajak dengan capaian dan kontribusi yang paling rendah secara berturut-turut meliputi pajak hotel, pajak parkir, dan pajak hiburan. Pajak hotel meliputi pajak hotel itu sendiri dan pajak losmen, rumah kos, atau penginapan jenis lainnya. Pada tahun 2018 pajak hotel yang berhasil dikumpulkan adalah sebesar

Rp94,25 juta. Pajak ini berkontribusi sebesar 0,34% dari total penerimaan pajak daerah (lihat Gambar 3.6), atau sekitar 0,14% dari total PAD. Pajak ini masih potensial untuk terus dioptimalkan penarikannya, utamanya bila melihat fakta bahwa setiap tahun pajak ini secara rata-rata tumbuh sebesar 9,86%.

Rendahnya kontribusi jenis pajak hotel setidaknya disebabkan oleh beberapa kendala berikut. *Pertama,* bisnis losmen/ rumah kos di Kabupaten Bangka Barat belum terlalu berkembang secara merata—terkonsentrasi di Kecamatan Muntok. Kondisi semacam itu menyebabkan basis pemungutan pajak dari sektor tersebut tidak terlalu signifikan yang berujung pada rendahnya capaian penerimaan pajak hotel itu sendiri. *Kedua,* meskipun hotel-hotel sudah mulai bekembang di Muntok, namun tingkat hunian dari hotel-hotel tersebut masih belum optimal sepenuhnya. Pariwisata yang relatif belum berkembang di Bangka Barat menjadikan sebagian besar tamu hotel bukan dari kalangan wisatawan, tetapi sebagian besar dari mereka adalah tamu dinas dari luar wilayah. Akibatnya, tingkat hunian hotel sangat tergantung pada banyak sedikitnya tamu dinas yang sedang bertugas di Kabupaten Bangka Barat. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang belum terlalu mumpuni membuat kualitas pelayanan pajak belum sepenuhnya optimal sehingga berujung pada keengganan pembayar pajak berurusan dengan petugas pajak.

Selain pajak hotel, pajak yang relatif kecil kontribusinya dalam hal ini adalah pajak parkir dan pajak hiburan. Pajak-pajak tersebut berkontribusi kurang dari 1% terhadap total pajak daerah. Kendala pemungutan pajak jenis ini mirip dengan pajak hotel, yakni belum terlalu berkembangnya bisnis pada sektor terkait serta kemungkinan juga ditenggarai oleh tingginya tunggakan pajak dan rendahnya kesadaran membayar pajak. Pada intinya, perekonomian setempat yang masih mengandalkan sektor ekstraktif (pertambangan) serta pertanian/ perkebunan menjadikan sektor usaha sekunder (industri manufaktur) beserta sektor tersier (jasa dan perdagangan), yang menjadi ciri perkotaan, tidak terlalu berkembang.

Gambar 3. 6 Komponen Penyusun Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018

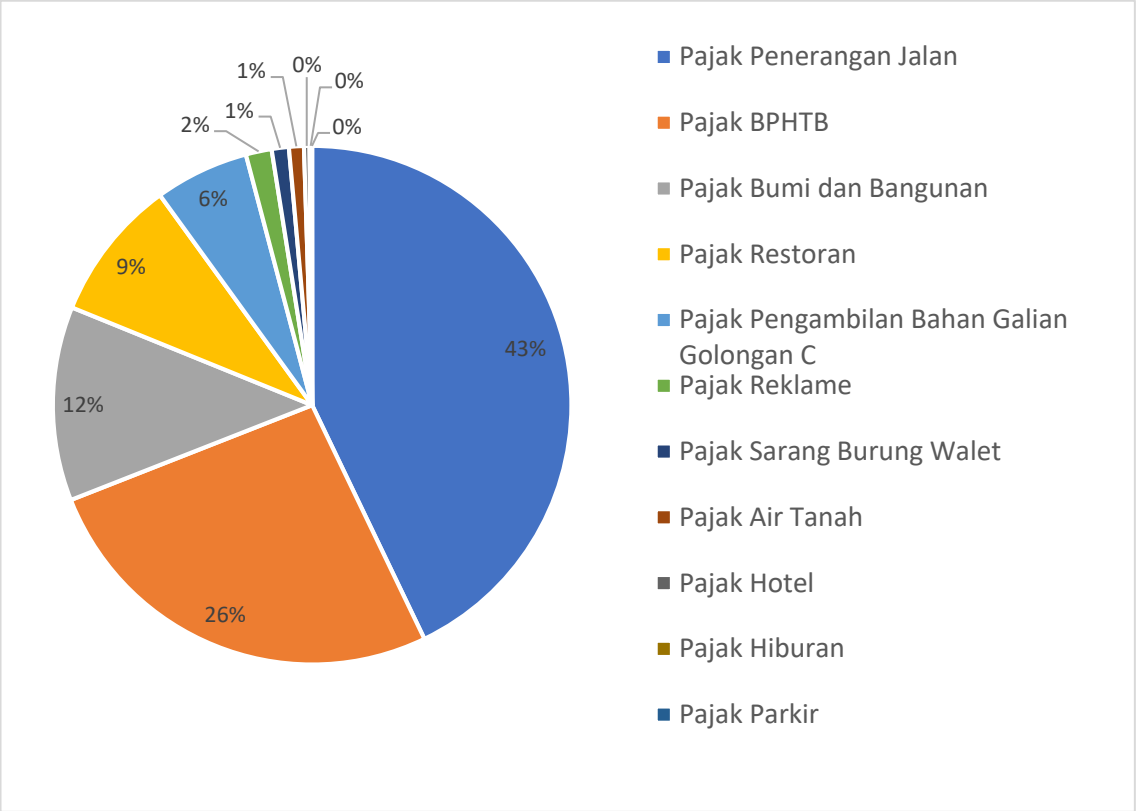

Sumber: diolah dari BP2RD Kabupaten Bangka Barat (2019)

3.1.3 Kinerja Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat

Penerimaan retribusi daerah mengacu pada pungutan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata. Penerimaan retribusi daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2018 mencapai Rp3,83 milyar, dalam hal ini menyumbang sekitar 6% dari total PAD yang ada (lihat Tabel 3.3). Retribusi ini terdiri dari retribusi jasa umum yang mencapai Rp2,95 milyar, retribusi jasa usaha sebesar Rp506,32 juta, dan perizinan tertentu sebesar Rp379,74 juta.

Jumlah penerimaan retribusi daerah berfluktuaasi dari tahun ke tahun. Namun, secara umum total penerimaan jenis ini cenderung menurun dari tahun ke tahun, bahkan sejak tahun 2014 capaian penerimaan ini kurang dari lima milyar rupiah. Lebih jauh, kontribusi retribusi daerah terhadap total PAD terus mengalami penurunan yang signifikan, sejak tahun 2015 kontribusinya berada di bawah 10%

total PAD. Tahun 2012 retribusi daerah menyumbang hampir sepertiga dari total PAD, nilai tersebut terus mengalami penurunan, tahun 2018 kontribusinya hanya sekitar 6% (lihat Tabel 3.3).

Retribusi daerah, khususnya retribusi jasa umum, berkaitan erat dengan pemberian layanan dasar kepada masyarakat seperti layanan kesehatan, parkir, pasar, dan persampahan. Oleh karena itu, rendahnya capaian dan kontribusi retribusi daerah setidaknya mencerminkan kinerja yang belum optimal dalam pemberian layanan dasar kepada masyarakat. Dari sisi retribusi jasa usaha, rendahnya retribusi daerah menunjukan pula bahwa potensi daerah setempat belum digali secara optimal. Dengan rerata pertumbuhan tahunan 0,15%, nampaknya diperlukan usaha yang lebih ekstra lagi dalam meningkatkan capaian retribusi daerah dan kontribusinya terhadap PAD. Usaha tersebut setidaknya dapat berangkat dari saran yang paling umum, yakni keseriusan pemerintah daerah setempat dalam meningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dan mengoptimalkan penggalian potensi daerah yang ada.

Tabel 3. 3 Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2011-2018 (Milyar Rupiah)

Tahun	Total PAD	Retribusi Daerah	% dari PAD
2011	33.62	6.41	19
2012	29.97	9.18	31
2013	44.74	11.26	25
2014	39.88	4.47	11
2015	87.88	4.93	6
2016	50.76	4.79	9
2017	78.49	3.12	4
2018	68.75	3.83	6

Sumber: diolah dari BP2RD Kabupaten Bangka Barat (2019)

Jenis retribusi daerah yang menyumbang penerimaan PAD Kabupaten Bangka Barat paling besar adalah retribusi pelayanan kesehatan. Meskipun begitu,

penerimaan jenis ini memiliki *trend* penurunan dalam delapan tahun terakhir ini (lihat Tabel 3.4). Kemudian, retribusi pelayanan kesehatan dikonfirmasi menyumbang total retribusi daerah dengan besaran yang cenderung stagnan, namun selalu melampaui setengah dari total penerimaan retribusi daerah. Di sisi lain, besaran kontribusi retribusi jenis ini terhadap total PAD cenderung semakin menurun selama kurun waktu delapan tahun terakhir (lihat Tabel 3.4).

Retribusi pelayanan kesehatan pada tahun 2018 mencapai Rp2,40 milyar dengan rata-rata perumbuhan tahunan mencapai 4,78%. Retribusi pelayanan kesehatan tahun 2018 menyumbang 62% dari total penerimaan retribusi daerah Kabupaten Bangka Barat, atau 3% dari total PAD yang ada (lihat Gambar 3.6).

Tabel 3. 4 Perkembangan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, 2011-2018 (Milyar Rupiah)

Tahun	Total PAD	Retribusi Daerah	Ret. Pelayanan Kesehatan	% dari Retribusi Daerah	% dari PAD
2011	33.62	6.41	4.28	67	13
2012	29.97	9.18	6.51	71	22
2013	44.74	11.26	9.29	83	21
2014	39.88	4.47	2.65	59	7
2015	87.88	4.93	2.76	56	3
2016	50.76	4.79	3.02	63	6
2017	78.49	3.12	1.71	55	2
2018	68.75	3.83	2.39	62	3

Sumber: diolah dari BP2RD Kabupaten Bangka Barat (2019)

Terlepas dari hal di atas, masih terdapat beberapa jenis distrubsi daerah dengan penerimaan yang belum signifikan besaran dan kontribusinya terhadap PAD. Retribusi-retribusi tersebut oleh penulis digolongkan sebagai retribusi lainnya yang meliputi retribusi tempat pelelangan, retribusi izin usaha perikanan, retribusi izin trayek, retribusi penjualan hasil perikanan balai benih ikan, dan retribusi izin gangguan/keramaian. Retribusi-retribusi tersebut pada 2018 kontribusinya masih

di bawah 0,015% dari total penerimaan retribusi daerah, atau masih dibawah 0,0008% dari total PAD.

Peneliti menduga rendahnya kontribusi retribusi-retribusi di atas utamanya disebabkan oleh beberapa hal berikut: (a) sarana dan prasarana yang kurang memadai; (b) masih belum optimalnya pelaksanaan regulasi mengenai semua jenis retribusi di atas; (c) rendahnya pengelolaan dan pengawasan penerimaan semua jenis retribusi di atas; (d) rendahnya kesadaran wajib retribusi dengan menunda-nunda dalam membayar kewajibannya; (e) kurangnya perhatian pemerintahan terhadap kenyamanan petugas dinas penarik retribusi yang ada.

Gambar 3. 7 Komponen Penyusun Penerimaan Retribusi daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018

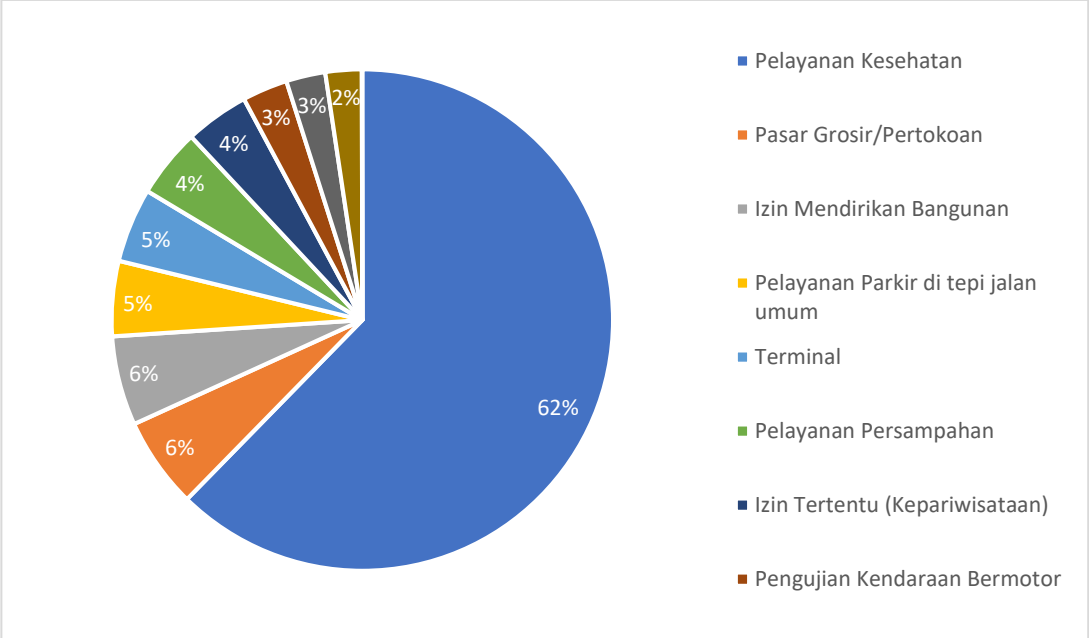

Sumber: diolah dari BP2RD Kabupaten Bangka Barat (2019)

3.1.4 Kinerja Bagian Laba Penyertaan Modal BUMD Kabupaten Bangka Barat

Bagian laba penyertaan modal BUMD mengacu pada pendapatan daerah Kabupaten Bangka Barat yang bersumber dari keuntungan bersih perusahaan daerah. Perusahaan daerah itu sendiri merupakan kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian daerah Kabupaten Bangka Barat.

Sejauh ini terdapat dua perusahaan daerah di Kabupaten Bangka Barat yang masuk dalam penghitungan PAD. Kedua perusahaan daerah/ BUMD tersebut meliputi BPD Sumatera Selatan dan BPR Bank Syari'ah Bangka.

Total penerimaan bagi hasil dari BUMD menunjukan nilai yang relatif stagnan, kecuali pada tahun 2014 sempat mengalami penurunan cukup signifikan di mana penerimaan dari bagian laba BUMD hanya mencapai Rp0,88 milyar. Kontribusi bagian laba BUMD terhadap total PAD cenderung semakin menurun (lihat Tabel 3.5). Tahun 2012 komponen PAD ini berhasil menyumbang 13% total PAD. Nilai tersebut terus berkurang sampai pada tahun 2018, kontribusi bagian laba BUMD hanya sekitar 5% dari total PAD yang ada. Tidak banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penerimaan ini kecuali dengan jalan menambah penyertaan modal dan memelihara kondusivitas usaha perbankan demi tingkat profitabilitas yang berkelanjutan dari bank-bank yang bersangkutan.

Tabel 3. 5 Perkembangan Bagian Laba dari BUMD Kabupaten Bangka Barat, 2011-2018 (Milyar Rupiah)

Tahun	Total PAD	Bagian Laba BUMD	% dari PAD
2011	33.62	3.36	10
2012	29.97	3.93	13
2013	44.74	2.64	6
2014	39.88	0.88	2
2015	87.88	3.26	4
2016	50.76	3.77	7
2017	78.49	3.48	4
2018	68.75	3.25	5

Sumber: diolah dari BP2RD Kabupaten Bangka Barat (2019)

Perusahaan daerah/BUMD dengan kontribusi terbesar adalah BPD Sumatera Selatan. Pada tahun 2018 BPD Sumatera Selatan berhasil menyumbang PAD sebesar Rp2,78 milyar atau dalam hal ini berkontribusi sebesar 85% total bagian laba BUMD dan sekitar 4,04% total PAD (lihat Gambar 3.7). Meskipun demikian,

dikonfirmasi bahwa rata-rata pertumbuhan bagian laba BPD Sumatera Selatan bersifat negatif, yaitu -5,45%. Kemudian, dikonfirmasi bahwa BUMD dengan kontribusi terkecil dalam kasus ini adalah BPR Bank Syari'ah Bangka.. Pada tahun 2018 pendapatan daerah atas penyertaan modal di BPRS Bangka Barat adalah sebesar Rp474,60 juta rupiah. Pendapatan bagi hasil BPR Bank Syari'ah Bangka ini dikonfirmasi turun sebesar 12,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada intinya, kedua BUMD tersebut menyumbang PAD dengan besaran yang semakin menurun. Selain itu, rerata pertumbuhan tahunan bagi hasil kedua bank tersebut diketahui sama-sama bernilai negatif.

Gambar 3. 8 Komponen Penyusun Bagian Laba Penyertaan Modal BUMD Kab. Bangka Barat Tahun 2017

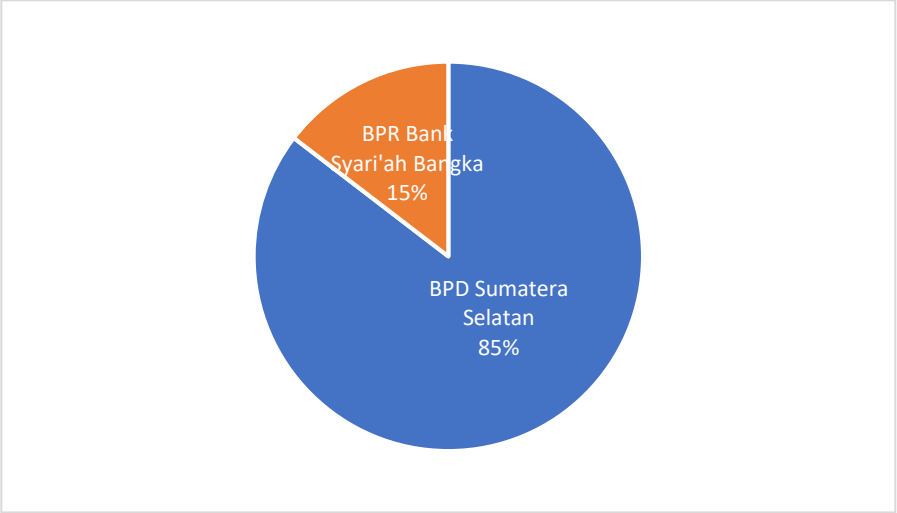

Sumber: diolah dari BP2RD Kabupaten Bangka Barat (2019)

3.1.5 Kinerja Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengacu pada pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, restibusi daerah, ataupun pendapatan dinas-dinas. Dibandingkan dengan pajak, retribusi, dan bagi hasil BUMD, pendapatan lain-lain merupakan komponen PAD dengan kontribusi yang paling besar di tahun 2018, bahkan di banyak tahun sebelumnya—seperti sudah disinggung di bagian atas.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di tahun 2018 mencapai Rp 34,29 milyar. Dari tahun ke tahun penerimaan jenis ini berfluktuasi dengan kecenderungan menurun selama delapan tahun terakhir. Hal serupa terjadi pula pada kontribusinya terhadap PAD yang menunjukkan tren negatif. Di tahun 2015, kontribusinya hampir tiga perempat dari total PAD dan menurun secara konsisten hingga pada tahun 2018 kontribusinya sebesar 50% (lihat Tabel 3.7). Dengan penurunan 7,95%, besaran kontribusi lain-lain PAD sah diyakini akan terus menurun digantikan kedudukannya oleh pajak daerah. Harapannya adalah bahwa pengurungan pada kontribusi komponen PAD tersebut sebagian terserap juga oleh retribui daerah, tidak sepenuhnya diserap oleh pajak daerah. Pada akhirnya, struktur PAD ideal yang diharapkan tercapai adalah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah, keduanya menjadi komponen PAD yang paling dominan dan dapat diandalkan sebagai dana pembangunan daerah setempat.

Tabel 3. 6 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Sah Kabupaten Bangka Barat, 2011-2018 (Milyar Rupiah)

Tahun	Total PAD	Lain-Lain Pendapatan	% dari PAD
2011	33.62	18.81	56
2012	29.97	10.92	36
2013	44.74	11.63	26
2014	39.88	23.36	59
2015	87.88	67.36	77
2016	50.76	28.55	56
2017	78.49	54.31	69
2018	68.75	34.29	50

Sumber: diolah dari BP2RD Kabupaten Bangka Barat (2019)

Besarnya kontribusi pendapatan lain-lain utamanya ditopang oleh pendapatan BLUD (lihat Gambar 3.8). BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pendapatan BLUD Kabupaten Bangka Barat bersumber dari pendapatan jasa layanan umum Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat. Pendapatan BLUD masuk dalam penghitungan PAD Kab. Bangka Barat dimulai dari tahun 2014. Penerimaan jenis ini memiliki kecenderungan meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tahun 2015 penerimaan BLUD berkontribusi terhadap total PAD sebesar 58%. Pada tahun tersebut penerimaan BLUD mencapai Rp51,17 milyar dan merupakan capaian nominal tertinggi selama lima tahun terahkir. Di tahun 2018, penerimaan BLUD berkontribusi 60% dari total lain-lain PAD sah atau sekitar 30% dari total PAD (lihat Tabel 3.8)

Tabel 3. 7 Perkembangan Pendapatan BLUD Kabupaten Bangka Barat, 2011-2018 (Milyar Rupiah)

Tahun	Total PAD	Lain-Lain PAD	Pendapatan BLUD	% dari Lain-Lain PAD	% dari PAD
2011	33.62	18.81	0.00	0	0
2012	29.97	10.92	0.00	0	0
2013	44.74	11.63	0.00	0	0
2014	39.88	23.36	9.84	42	25
2015	87.88	67.36	51.17	76	58
2016	50.76	28.55	14.43	51	28
2017	78.49	54.31	18.77	35	24
2018	68.75	34.29	20.55	60	30

Sumber: diolah dari BP2RD Kabupaten Bangka Barat (2019)

Gambar 3. 9 Komponen Penyusun Lain-Lain Pendapatan Sah Kab. Bangka Barat Tahun 2018

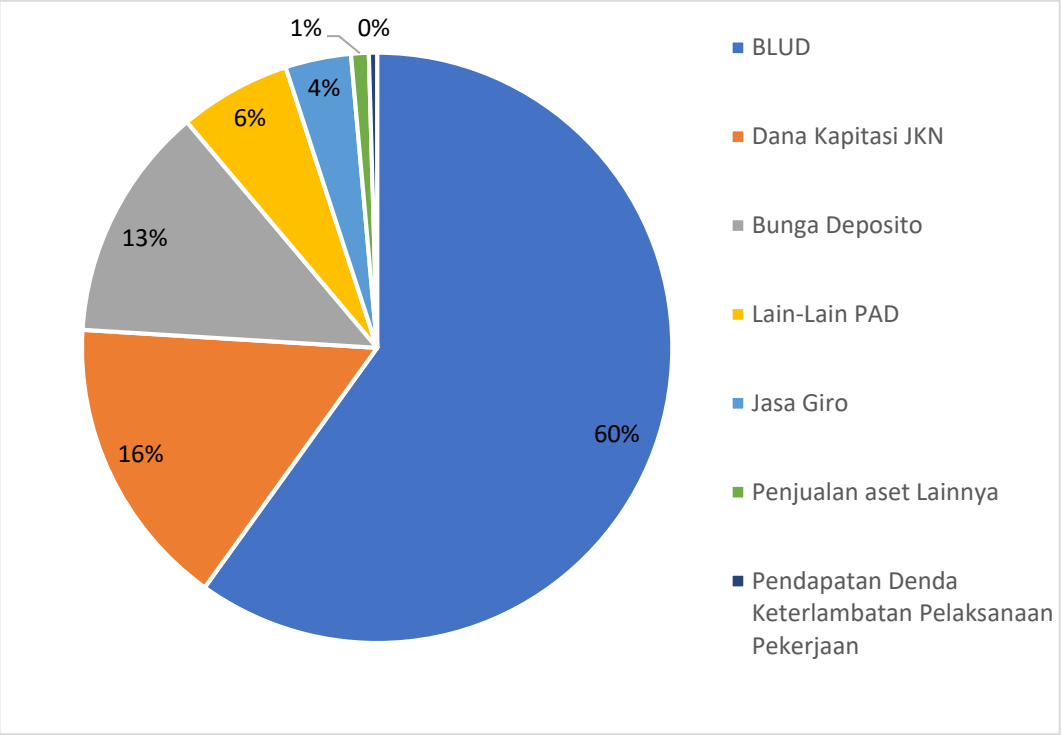

Sumber: diolah dari BP2RD Kabupaten Bangka Barat (2019)

3.2 POTENSI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANGKA BARAT

3.2.1 Teknik Penghitungan Potensi PAD

Proses penghitungan potensi PAD utamanya didasarkan pada realisasi penerimaan PAD itu sendiri di tahun sebelumnya, dalam hal ini tahun 2018. Berikut komponen-kompenen yang menjadi dasar penghitungan potensi/ potensi PAD Kabupaten Bangka Barat.

a. **Realisasi PAD tahun permulaan.** Proses penetapan potensi PAD utamanya didasarkan pada jumlah realisasi PAD tahun permulaan. Artinya, proses penetapan potensi PAD tahun 2019 didasarkan pada realisasi PAD tahun 2018. Rumusan semacam itu lazim digunakan dalam proses penetapan potensi yang bersifat kuantitatif. Realisasi PAD tahun 2018 menjadi *baseline* untuk proses penetapan potensi PAD tahun selanjutnya. Hal tersebut menjamin diperolehnya angka potensi yang realistis dan prospektif.

b. **Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)/ sektor penopang komponen PAD.** Aspek selanjutnya yang menjadi bahan pertimbangan sekaligus komponen penghitungan potensi PAD adalah pertumbuhan ekonomi (PDRB riil) atau pertumbuhan sektor penopang komponen PAD. Untuk komponen-komponen PAD tertentu digunakan petumbuhan sektor penopang. Contohnya penargetan pajak hotel dan restoran didasarkan pada pada pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tidak lain merupakan salah satu komponen PDRB Lapangan Usaha. Di sisi lain, terdapat pula komponen PAD yang dipotensikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi secara umum (pertumbuhan PDRB riil). Hal itu utamanya disebabkan terbatasnya data pertumbuhan sektor-sektor tertentu yang spesifik. Contohnya dalam hal ini pajak hiburan ditetapkan potensinya berdasarkan pertumbuhan PDRB riil, disebabkan sulitnya data pertumbuhan sektor hiburan di Kabupaten Bangka Barat. Komponen ini selanjutnya dinotasikan sebagai PS.

c. **Laju inflasi.** Laju inflasi umum dijadikan bahan pertimbangan sekaligus komponen penghitungan potensi keuangan publik seperti APBN, APBD, termasuk di dalamnya potensi PAD tingkat kabupaten/ kota. Inflasi menjadi indikator perekonomian, skala nasional ataupun daerah, yang cukup penting dalam menggambarkan tingkat kenaikan harga-harga umum. Dalam kasus ini laju inflasi yang digunakan adalah laju inflasi Kota Pangkal Pinang Tahun 2018. Hal itu disebabkan belum tersedianya data inflasi untuk Kab. Bangka Barat. Jadi, digunakan tingkat inflasi kota terdekat, Kota Pangkal Pinang. Laju inflasi diasumsikan sebesar 3% setiap tahunnya. Komponen ini dinotasikan sebagai INF.

d. **Tingkat komitmen pemerintah daerah/ kepala dinas.** Komponen terakhir penghitungan potensi PAD Kabupaten Bangka Barat adalah tingkat komitmen pemerintah daerah/ kepala dinas tertentu di Kabupaten Bangka Barat. Komitmen yang dimaksud mengacu pada keseriusan pemda setempat dalam mencapai potensi yang telah ditetapkannya. Besaran tingkat komitmen bersifat subjektif. Oleh karena itu, penetapan besaran tingkat komitmen ini harus hati-

hati. Ditetapkan bahwa tingkat komitmen pemda/ dinas adalah 2%. Komponen ini dinotasikan sebagai EFF.

Pada akhirnya keempat komponen di atas dapat dituliskan lewat persamaan matematis sederhana sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Potensi_{2019} = Realisasi_{2018} \times (1 + PS + INF + EFF)} \ldots\ldots\ldots\ldots \textbf{(3.1)}$$

Selanjutnya persamaan (1) disebut sebagai formula penghitungan potensi/ potensi PAD Kabupaten Bangka Barat. Dari persamaan (1) tersebut pada akhirnya dapat diperoleh nominal dari potensi/ potensi PAD di tahun mendatang sekaligus nilai potensi pertumbuhannya. Nilai potensi pertumbuhan dapat dihitung dengan formula berikut:

$$\boldsymbol{Potensi\ Pertumbuhan} = \left(\frac{\boldsymbol{Potensi_{2019} - Realisasi_{2018}}}{\boldsymbol{Realisasi_{2018}}}\right) \times \mathbf{100\%} \ldots\ldots\ldots \textbf{(3.2)}$$

3.2.2 Estimasi Titik *Versus* Estimasi Interval

Nilai potensi PAD bisa mengambil dua bentuk: estimasi titik dan estimasi interval. Nilai potensi PAD dikatakan berbentuk estimasi titik apabila hanya diperoleh satu titik nilai perkiraan capaian PAD di tahun mendatang. Di sisi lain, perkiraan capaian PAD di tahun mendatang dapat pula berbentuk estimasi interval. Pada kasus kedua tersebut, perkiraan capaian PAD merupakan nilai interval yang terdiri dari batas bawah *(lower bound)* dan batas atas *(upper bound).* Batas bawah tersebut bermakna jumlah minimal perkiraan PAD yang potensial tercapai di tahun mendatang. Selanjutnya, batas atas bermakna jumlah maksimal perkiraan PAD yang potensial tercapai di tahun mendatang.

Terlepas dari hal di atas, kedua nilai estimasi tersebut dalam penghitungannya menggunakan formula dan komponen yang sama. Perbedaan mendasarnya adalah terletak dari nilai pertumbuhan sektoral/ PDRB-nya. Estimasi titik dihitung dengan menggunakan satu titik nilai pertumbuhan sektor/ PDRB yang merupakan nilai rata-rata pertumbuhan sektor/PDRB selama kurun waktu tertentu. Di sisi lain, estimasi interval menggunakan dua titik nilai pertumbuhan sektor/ PDRB. Dua nilai

tersebut tidak lain adalah laju pertumbuhan tertinggi (maksimal) dan laju pertumbuhan terendah dari sektor/ PDRB terkait selama kurun waktu tertentu.

Terakhir, satu hal yang tidak boleh terlupakan, terdapat satu pedoman sederhana yang digunakan peneliti dalam menilai apakah nilai potensi/ potensi terhitung bersifat realistis atau tidak. Nilai potensi dinilai realistis apabila pertumbuhan potensi dari komponen/ subkomponen PAD tahun mendatang tidak melebihi rata-rata pertumbuhan komponen/ subkomponen PAD tersebut di selama kurun waktu tertentu.

3.2.3 Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 Kabupaten Bangka Barat

a. Gambaran Umum

Total PAD tahun 2019 dipotensikan sebesar Rp75,93-81,67 milyar, atau dipotensikan mengalami pertumbuhan 10,44%-18,79% dibandingkan tahun 2018. Potensi pertumbuhan tersebut dinilai realistis utamanya bila melihat fakta bahwa setiap tahunnya secara rata-rata total PAD mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 4,6% (lihat Tabel 3.9). Lebih jauh, kemungkinan tercapainya potensi tersebut menjadi semakin besar pula apabila pemerintah daerah setempat bisa menjaga laju inflasi di kisaran yang normal, meningkatkan laju pertumbuhan PDRB, dan meningkatkan komitmennya dalam mencapai potensi tersebut.

Di tahun 2019 diyakini tidak akan terjadi perubahan komposisi PAD. Komponen PAD dipotensikan sebagian besar disumbang dari lain-lain PAD yang sah kemudian disusul oleh pendapatan pajak, pendapatan retribusi, dan terakhir bagian laba atas penyertaan modal BUMD (lihat Gambar 3.10)—komposisi tersebut sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun begitu, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kemungkinan untuk bisa tumbuh lebih cepat (tumbuh pada kisaran 14%) dibandingkan dengan lain-lain PAD sah yang dipotensikan tumbuh sekitar 13%. Hal itu masuk akal utamanya bila melihat fakta tingginya rata-rata laju pertumbuhan pajak daerah (sekitar 13,60% per tahun) [lihat Tabel 3.9]. Selanjutnya potensi dari masing-masing komponen akan dianalisis lebih dalam di bagian berikutnya.

Tabel 3. 8 Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Komponennya Tahun 2019

Komponen PAD	Estimasi Titik			Estimasi Interval				Rerata Pert. ***
	Realisasi 2018	Potensi 2019	Potensi Pert.	Potensi 2019		Potensi Pert. 2019		
				BA*	BB**	BA*	BB**	
Pajak Daerah	27.38	31.21	14.01	33.30	29.85	21.66	9.05	13.60
Retribusi Daerah	3.83	4.38	14.17	4.47	4.30	16.65	12.18	0.15
Bagian Laba BUMD	3.25	3.66	12.45	3.79	3.47	16.53	6.79	-2.82
Lain-Lain PAD Sah	34.29	39.12	14.10	40.10	38.30	16.96	11.71	-7.95
Total PAD	**68.75**	**78.37**	**13.99**	**81.67**	**75.93**	**18.79**	**10.44**	**4.59**

Keterangan:
*: Batas atas potensi PAD 2019
**: Batas bawah potensi PAD 2019
***: Rata-rata pertumbuhan PAD dan komponennya tahun 2011-2018
Sumber: analisis penulis (2019)

Gambar 3. 10 Komponen Pendapatan Asli Daerah Kab. Bangka Barat, Proyeksi 2019

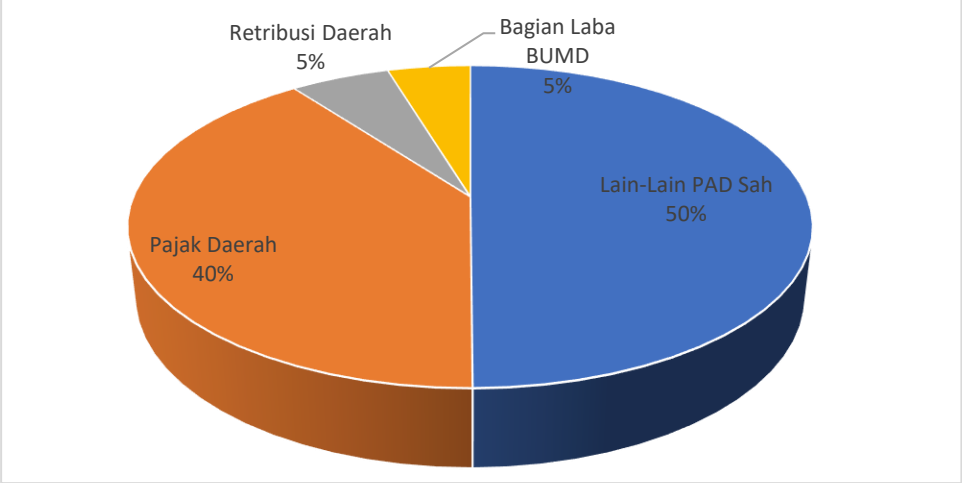

Sumber: analisis penulis (2019)

b. Potensi Penerimaan Pajak Daerah

Potensi penerimaan pajak daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2019 sebesar Rp31,21 milyar atau berada pada kisaran Rp29,85-Rp33,30 milyar. Penerimaan pajak daerah dalam hal ini dipotensikan tumbuh sebesar 14% atau berada pada kisaran 9,05%-21,66%.

Jenis pajak dengan potensi pertumbuhan paling tinggi adalah pajak penerangan jalan, yaitu sebesar 15,72%. Hal itu wajar mengingat pajak tersebut setiap tahunnya secara konsisten menyumbang penerimaan pajak paling tinggi dibandingkan jenis pajak lainnya. Pajak penerangan jalan diyakini akan terus menjadi komponen pajak paling dominan untuk beberapa tahun ke depan mengingat upaya pembangunan infrastruktur penerangan jalan umum (PJU) masih terus diintensifkan di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Pajak jenis lainnya dengan potensi pertumbuhan cukup tinggi adalah pajak hotel dan restoran sebesar 14,24%. Pertumbuhan keduanya ditunjang oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang secara rerata tumbuh 9,2% setiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2018 pajak hotel tergolong ke dalam kelompok pajak dengan penerimaan paling rendah, namun di tahun-tahun mendatang pajak hotel diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan dengan potensi pertumbuhan yang cukup besar tersebut.

Kemudian, di tahun 2019 komposisi pajak daerah diduga kuat tidak akan mengalami perubahan yang berarti. Pajak penerangan jalan, pajak BPHTB, dan pajak bumi & bangunan tetap menjadi komponen penyumbang terbesar penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bangka Barat (lihat Gambar 3.9). Pajak penerangan jalan tahun 2019 dipotensikan sebesar Rp13,58 milyar atau berada pada kisaran Rp12,76-Rp15,12 milyar. Pajak jenis ini dipotensikan tumbuh 15,72% atau berada pada kisaran 8,75-28,86% (lihat Tabel 3.10). Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor pengadaan listrik dan gas yang secara rerata tumbuh sebesar 10,7% setiap tahunnya.

Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan (PBB) dipotensikan sebesar Rp3,76 milyar, atau pada kisaran Rp3,63-Rp3,88 milyar. Di tahun 2019 pajak ini dipotensikan tumbuh 13,35%. atau pada kisaran pertumbuhan 9,61%-17,15. Pajak ini diyakini akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan *real estate* di Kabupaten Bangka Barat yang mencapai 8,4% per tahun. Potensi pajak bumi dan bangunan dapat pula berasal dari kemungkinan diperolehnya pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan rakyat yang kurang dari 25 ha.

Pajak jenis lainnya yang dipotensikan menyumbang penerimaan pajak dalam angka yang cukup signifikan adalah pajak restoran dan pengambilan bahan galian golongan C. Kedua jenis pajak tersebut tersebut dipotensikan mencapai Rp1-3 milyar di tahu 2019 dengan potensi pertumbuhan di atas 5% (lihat Tabel 3.10). Pajak pengambilan bahan galian golongan C dipotensikan tumbuh 5-9% atau sebesar Rp1,71 milyar dengan sektor penopangnya adalah pertambangan yang memiliki rata-rata pertumbuhan 1,9%. Proses pengerasan jalan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar berpotensi pula menyumbang pajak bahan galian golongan C. Pengerasan jalan tersebut biasanya menggunakan material utama berupa bahan mineral bukan logam sehingga pajak bahan galian tersebut menjadi relevan untuk untuk digali lebih lanjut.

Kemudian, pajak restoran berpotensi menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp2,77 milyar di tahun 2019 dengan potensi pertumbuhan 10,17%-18,67%. Pajak-pajak tersebut diyakini akan terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan positif masing-masing sektor penopang (lihat Tabel 3.10). Di sisi lain, jenis pajak yang lainnya dipotensikan kurang dari Rp600 juta. Beberapa pajak yang dimaksud meliputi pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, dan pajak air tanah (lihat Tabel 3.11).

Gambar 3. 11 Komponen Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bangka Barat, Proyeksi 2019

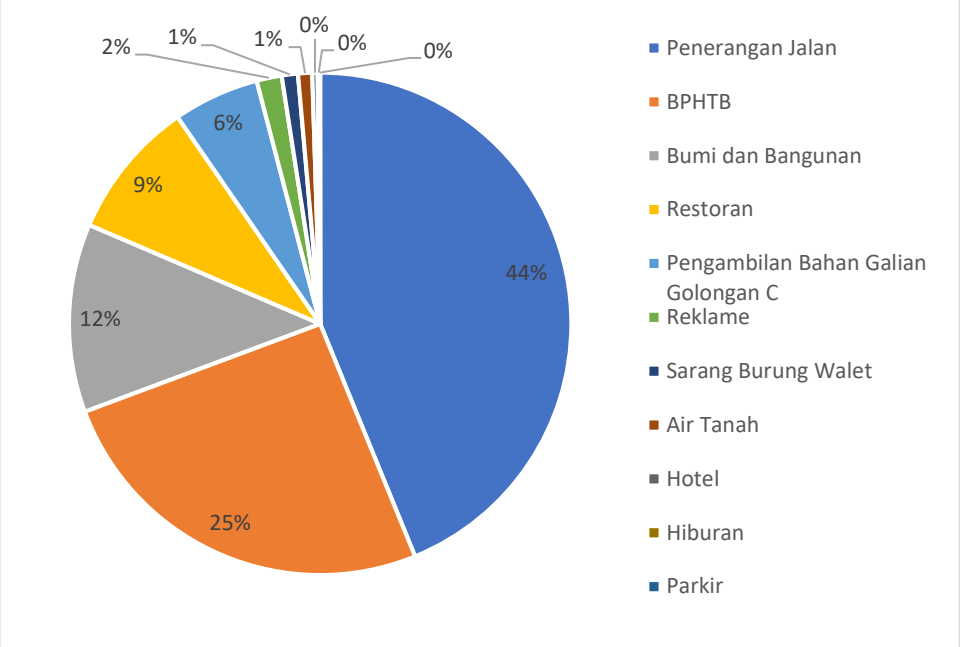

Sumber: analisis penulis (2019)

Tabel 3. 9 Potensi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 (Juta Rupiah)

Uraian Penerimaan Pajak	Estimasi Titik				Estimasi Interval					
					PS**		Potensi*		Potensi Pert. (%)	
	Realisasi 2018*	PS**	Potensi*	Potensi Pert. (%)	Batas atas	Batas bawah	Batas atas	Batas bawah	Batas atas	Batas bawah
Hotel	94.25	0.092	107.68	14.24	0.14	0.05	111.85	103.84	18.67	10.17
Restoran	2,427.79	0.092	2,773.57	14.24	0.14	0.05	2,881.05	2,674.69	18.67	10.17
Hiburan	38.85	0.051	42.78	10.13	0.06	0.05	42.93	42.62	10.51	9.72
Reklame	441.32	0.084	500.46	13.40	0.09	0.08	504.34	497.06	14.28	12.63
Penerangan Jalan	11,736.60	0.107	13,581.93	15.72	0.24	0.04	15,123.78	12,763.55	28.86	8.75
Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1,606.45	0.019	1,716.90	6.88	0.04	0.00	1,749.26	1,686.93	8.89	5.01
Parkir	4.90	0.071	5.49	12.09	0.10	0.05	5.63	5.39	14.94	10.17
Air Tanah	254.56	0.056	281.51	10.59	0.08	0.02	286.61	272.10	12.59	6.89
Sarang Burung Walet	292.94	0.051	322.61	10.13	0.06	0.05	323.73	321.42	10.51	9.72
Bumi dan Bangunan	3,314.20	0.084	3,756.69	13.35	0.12	0.05	3,882.59	3,632.69	17.15	9.61
BPHTB	7,164.02	0.052	7,897.38	10.24	0.06	0.05	7,955.64	7,852.48	11.05	9.61
Jumlah Potensi Penerimaan Pajak Daerah	-	-	30,987.00	14.01	-	-	32,867.41	29,852.77	21.66	9.05

Catatan: *dalam juta Rupiah, **dalam nilai desimal, asumsi: (1) inflasi = 3%, (2) *effort* = 2%.
Sumber: analisis penulis (2019).

c. Potensi Penerimaan Retribusi Daerah

Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah berpotensi mengalami peningkatan di tahun 2019. Potensi penerimaan retribusi daerah adalah sebesar Rp4,3-4,47 milyar. Dalam hal ini memiliki potensi pertumbuhan sekitar 12,18-16,65% (lihat Tabel 3.11).

Pertama, retribusi jasa umum. Dengan pertumbuhan rata-rata 4,21% per tahun, retribusi jenis ini berpotensi tumbuh 12,4-16,62% atau sebesar Rp3,31-3,43 milyar di tahun 2019 (lihat Tabel 3.10). Target yang ada tersebut tidak mengubah komposisi penerimaan retribusi jasa umum. Retribusi pelayanan kesehatan tetap menjadi subkomponen penyumbang terbesar pada penerimaan retribusi jasa umum. Hal ini diduga kuat sebagai akibat dari terus berkembangnya pemberian jasa kesehatan, dalam hal ini pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas yang tersebar di Kabupaten Bangka Barat.

Sektor jasa kesehatan dengan rata-rata pertumbuhan 9,8% per tahun menjadi salah satu dasar penghitungan potensi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan. Retribusi jenis ini ditargetkan tumbuh 13,08-17,11% di tahun 2019, atau ditargetkan sebesar Rp2,7-2,8 milyar (lihat Tabel 3.10). Target pertumbuhan tersebut sekiranya masih dinilai realistis utamanya bila melihat fakta bahwa retribusi ini setiap tahunnya tumbuh sebesar 19,8%. Dengan proses peningkatan kinerja dan pelayanan puskesmas, diharapkan penerimaan dari retribusi jenis ini akan terus meningkat dan menyumbang PAD lebih besar lagi.

Kemudian, potensi penerimaan retribusi jasa umum jenis lainnya, pada tahun 2019 kurang dari Rp300 juta. Beberapa retribusi yang dimaksud meliputi retribusi pelayanan persampahan, pelayanan parkir tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengujian kendaraan bermotor. Meskipun begitu, sebagian besar dari jenis retribusi tersebut memiliki potensi pertumbuhan lebih dari 10%. Hal tersebut menunjukan bahwa retribusi-retribusi tersebut cukup potensial untuk lebih dioptimalkan lagi penarikan dan pengumpulannya. Contohnya dalam hal ini adalah retribusi pelayanan pasar dengan potensi penerimaan sebesar Rp102,76 juta dan

potensi pertumbuhan yang relatif besar yakni 14,5% (lihat Tabel 3.11). Target pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang setiap tahunnya tumbuh secara rata-rata sebesar 9,5%.

Kedua, retribusi jasa usaha. Retribusi jenis ini berpotensi tumbuh sebesar 12,22-17,44% di tahun 2019, atau senilai Rp568,17-594,61 juta. Retribusi pasar grosir/pertokoan merupakan jenis retribusi jasa usaha dengan nominal potensi paling tinggi. Hal itu sejalan dengan realisasinya selama ini bahwa retribusi tersebut merupakan penyumbang terbesar total penerimaan retribusi jasa usaha. Di tahun 2019, potensi pertumbuhan retribusi pasar grosir/pertokoan adalah sebesar 12,22-16,93%, atau senilai Rp252,34-262,93 juta. Lebih jauh, potensi pertumbuhan tersebut ditopang oleh rerata pertumbuhan tahunan dari sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 9,5. Penerimaan retribusi jenis ini juga tentunya ditopang oleh perkembangan daya beli dari masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Oleh karena itu, kunci utama untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi jenis ini adalah dengan peningkatan pelayanan pertokoan/ grosir dan pemeliharaan daya beli masyarakat agar tingkat konsumsi masyarakat terjaga setidaknya pada pertumbuhan reratanya selama ini. Kemudian, untuk retribusi jasa usaha lainnya, potensi penerimaan retribusi-retribusi tersebut diproyeksikan kurang dari Rp200 juta. Meskipun begitu, beberapa retribusi tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang cukup tinggi yakni 10-15% di tahun 2019. Oleh karena itu, penerimaan dari beberapa retribusi yang ada tersebut masih potensial untuk terus dioptimalkan demi peningkatan kontribusi komponen retribusi daerah terhadap total PAD Kab. Bangka Barat.

Ketiga, retribusi perizinan tertentu. Retribusi jenis ini ditargetkan tumbuh sebesar 13%, atau senilai Rp419,41-439,74 juta (lihat Tabel 3.11). Retribusi IMB merupakan jenis retribusi perizinan dengan nominal potensi paling tinggi, yakni Rp245,35-264,41 juta. Hal itu sejalan dengan capaian realisasinya di tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, retribusi ini berpotensi tumbuh sebesar 10,96-19,58%. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun-tahun sebelumnya (pertumbuhan rata-rata sebesar 36%), tidak terlalu mustahil untuk bisa mendekati potensi yang ada

tersebut. Pertumbuhan retribusi IMB dalam hal ini diduga kuat penopangnya adalah sektor konstruksi yang setiap tahun secara rata-rata tumbuh 10,1%. Terlepas dari semua itu, retribusi perizinan jenis lainnya ditargetkan kurang dari Rp200 juta dengan target pertumbuhan berkisar antara 10-12% (lihat Tabel 3.10).

Tabel 3. 10 Potensi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2019

Uraian Penerimaan	Estimasi Titik				Estimasi Interval					
					PS**		Potensi*		Potensi Pert. (%)	
	Realisasi 2017*	PS**	Potensi *	Potensi Pert. (%)	Batas atas	Batas bawah	Batas atas	Batas bawah	Batas atas	Batas bawah
Retrubusi Jasa Umum:										
Pelayanan Kesehatan	2,389.61	0.098	2,743.41	14.81	0.12	0.08	2,798.48	2,702.18	17.11	13.08
Pelayanan Persampahan	170.67	0.056	188.74	10.59	0.08	0.02	192.16	182.43	12.59	6.89
Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	185.53	0.071	207.96	12.09	0.10	0.05	213.24	204.39	14.94	10.17
Pelayanan Pasar	89.75	0.095	102.76	14.50	0.12	0.07	104.94	100.71	16.93	12.22
Pengujian Kendaraan Bermotor	112.19	0.071	125.76	12.09	0.10	0.05	128.95	123.60	14.94	10.17
Jumlah Potensi Ret. Jasa Umum	-	-	**3,368.62**	**14.28**	-	-	**3,437.77**	**3,313.31**	**16.62**	**12.40**
Retribusi Jasa Usaha:										
Pemakaian Kekayaan Daerah	96.91	0.099	111.34	14.90	0.15	0.07	115.92	109.00	19.62	12.48
Pasar Grosir/Pertokoan	224.86	0.095	257.46	14.50	0.12	0.07	262.93	252.34	16.93	12.22
Tempat Pelelangan	0.55	0.051	0.61	10.13	0.06	0.05	0.61	0.61	10.51	9.72
Terminal	183.99	0.071	206.24	12.09	0.10	0.05	211.48	202.71	14.94	10.17
Penjualan Hasil Perikanan Balai Benih Ikan	3.15	0.068	3.52	11.84	0.11	0.06	3.66	3.51	16.16	11.42
Jumlah Potensi Ret. Jasa Usaha	-	-	**579.18**	**14.39**	-	-	**594.61**	**568.17**	**17.44**	**12.22**

Retribusi Perizinan Tertentu:										
Izin Mendirikan Bangunan	221.11	0.101	254.39	15.05	0.15	0.06	264.41	245.35	19.58	10.96
Izin Trayek	0.28	0.071	0.31	12.09	0.10	0.05	0.32	0.30	14.94	10.17
Izin Usaha Perikanan	0.32	0.068	0.35	11.84	0.11	0.06	0.37	0.35	16.16	11.42
Izin Tertentu (Kepariwisataan)	158.04	0.051	174.05	10.13	0.06	0.05	174.65	173.40	10.51	9.72
Jumlah Potensi Ret. Perizinan Tertentu	**-**	**-**	**429.10**	**13.00**	**-**	**-**	**439.74**	**419.41**	**15.80**	**10.44**
Jumlah Potensi Penerimaan Retribusi Daerah	-	-	**4,376.90**	**14.17**	**-**	**-**	**4,472.12**	**4,300.88**	**16.65**	**12.18**

Catatan: *dalam juta Rupiah, **dalam nilai desimal, asumsi: (1) inflasi = 3%, effort = 2%.
Sumber: analisis penulis (2019).

d. Potensi Penerimaan Bagian Laba atas Penyertaan Modal di BUMD

Sejauh ini pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat menyertakan modalnya setidaknya pada dua BUMD yang ada di kabupaten tersebut: BPD Sumatera Selatan dan BPR Bank Syari'ah Bangka. Setiap tahunnya pemda setempat memperoleh bagian laba atas penyertaan modal tersebut. Pada tahun 2019, potensi penerimaan bagian laba BUMD tersebut senilai Rp3,47-3,79 milyar, ditargetkan tumbuh sebesar 6,79-16,53% (lihat Tabel 3.11). Bila hendak mencapai potensi tersebut, nampaknya pemda setempat harus bekerja ekstra lagi untuk mampu mendorong dan membina perusahaan-perusahaan daerah tersebut supaya bisa bekerja lebih efisien dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada para konsumennya. Hal ini wajar mengingat penerimaan jenis ini sebagian besar tergantung kepada tingkat laba yang diperoleh BUMD terkait.

Penerimaan bagian laba BUMD tahun mendatang masih akan didominasi oleh dividen dari BPD Sumatera Selatan dengan potensi penerimaan sebesar Rp2,97-3,24 milyar. Potensi pertumbuhan bagian laba dari BUMD ini adalah sebesar 12,45%. Potensi pertumbuhan bagian laba tersebut utamanya ditopang oleh pertumbuhan positif sektor jasa keuangan dan asuransi yang secara rerata tumbuh setiap tahunnya sebesar 7,5 %. Potensi penerimaan bagian laba tersebut sudah barang tentu tergantung pada besaran penyertaan modal dan kebijakan dividen dari bank yang bersangkutan.

Selain dari BPD Sumatera Selatan, PAD Bangka Barat sejauh ini sedikit banyaknya disumbang pula oleh bagian laba dari BPR Bank Syari'ah Bangka. Di tahun 2019, BUMD ini berpotensi menyumbang bagian laba sebesar Rp506,83-553,05 juta dengan potensi pertumbuhan sebesar 6,79-16,53%. Potensi pertumbuhan yang cukup besar dari dua BUMD di atas seharusnya mampu menjadi sinyal baik akan potensi penerimaan bagian laba yang semakin besar pula bagi penerimaan PAD Bangka Barat. Dalam kondisi semacam itu, bukan keputusan yang keliru apabila pemda setempat mempertimbangkan untuk meningkatkan penyertaan modal pada kedua BUMD tersebut. Karena keduanya cenderung tergolong sebagai

penerimaan pasif, tidak diperlukan banyak anggaran tambahan untuk menciptakan penerimaan tersebut.

Tabel 3. 11 Potensi Pendapatan Bagian Laba dari BUMD Tahun 2019

Uraian Penerimaan	Realisasi 2017*	PS**	Nominal Target*	Pert. Target (%)	PS**		Nominal Target*		Pert. Target (%)	
					Batas atas	Batas bawah	Batas atas	Batas bawah	Batas atas	Batas bawah
BPD Sumatera Selatan	2,778.10	0.075	3,124.05	12.45	0.12	0.02	3,237.32	2,966.73	16.53	6.79
BPR Bank Syari'ah Bangka	474.60	0.075	533.70	12.45	0.12	0.02	553.05	506.83	16.53	6.79
Jumlah Bagian Laba BUMD	**-**	**-**	**3,657.75**	**12.45**	**-**	**-**	**3,790.3**	**3,473.56**	**16.53**	**6.79**

Catatan: *dalam juta Rupiah, **dalam nilai desimal, asumsi: (1) inflasi = 3%, effort = 2%.
Sumber: analisis penulis (2019).

e. Potensi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Potensi penerimaan lain-lain PAD yang sah di tahun mendatang adalah sebesar Rp38,30-40,10 milyar, atau dalam hal ini tumbuh 11,71-16,96%. Lebih jauh, di tahun 2019, lain-lain pendapatan ditargetkan tetap menjadi komponen penyumbang terbesar PAD. Hal tersebut utamanya disumbang oleh penerimaan BLUD, dana kapitasi JKN, dan penerimaan bunga deposito.

Pendapatan BLUD berpotensi tumbuh 13,08-17,11% di tahun 2019, atau senilai Rp23,24-24,06 milyar. Target pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor jasa kesehatan yang tumbuh secara rata-rata 9,8% setiap tahunnya (lihat Tabel 3.12). Pendapatan BLUD berpotensi menjadi subkomponen lain-lain pendapatan yang menyumbang paling besar terhadap lain-lain PAD yang sah—tidak berbeda dengan komposisi di tahun sebelumnya.

Kemudian, komponen lainnya yang berpotensi menyumbang lain-lain PAD yang sah dengan besaran yang cukup signifikan adalah penerimaan dana kapitasi JKN. Potensi penerimaan dana tersebut di tahun 2019 mencapai Rp6,32 milyar atau berada pada kisaran Rp6,19-6,58 milyar. Dengan potensi pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu 14,90%, penerimaan jenis ini diproyeksikan akan tetap menjadi salah satu penopang utama pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka Barat di tahun mendatang, khususnya dari komponen lain-lain PAD yang sah.

Subkomponen lainnya yang menyumbang lain-lain PAD yang sah dengan besaran yang relatif besar adalah pendapatan bunga deposito. Penerimaan yang tergolong sebagai *passive income* ini berpotensi tumbuh sebesar 6,79%-16,53%, tentu semua itu tergantung pada jumlah deposito dan tingkat suku bunga di tahun 2019. Potensi penerimaan PAD dari bunga deposito mencapai Rp4,97 milyar atau pada kisaran Rp4,72-5,15 milyar. Potensi peningkatan penerimaan jenis ini ditopang oleh pertumbuhan positif sektor jasa keuangan dan asuransi dengan rerata pertumbuhan sebesar 7,5% setiap tahunnya.

Kemudian, potensi pendapatan jenis lainnya berada pada kisaran Rp1-2 milyar yang meliputi penerimaan jasa giro dan lain-lain PAD sah yang lainnya. Penerimaan-penerimaan tersebut ditargetkan bisa tumbuh melebihi 10% (lihat Tabel 3.13). Pendapatan jenis lainnya di tahun mendatang ditargetkan kurang dari Rp400 juta seperti hasil penjualan aset lainnya dan pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Tabel 3. 12 Potensi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2019

Uraian Penerimaan	Realisasi 2017*	PS**	Potensi*	Pert. Potensi (%)	PS**		Potensi *		Pert. Potensi (%)	
					Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah
Penerimaan Jasa Giro	1,234.63	0.075	1,388.37	12.45	0.12	0.02	1,438.71	1,318.46	16.53	6.79
Penerimaan Bunga Deposito	4,418.63	0.075	4,968.88	12.45	0.12	0.02	5,149.03	4,718.66	16.53	6.79
Denda Keterlambatan Pekerjaan	154.23	0.099	177.21	14.90	0.15	0.07	184.49	173.48	19.62	12.48
Pendapatan BLUD	20,547.68	0.098	23,589.91	14.81	0.12	0.08	24,063.38	23,235.31	17.11	13.08
Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	2,099.35	0.051	2,311.95	10.13	0.06	0.05	2,319.99	2,303.40	10.51	9.72
Hasil Penjualan aset Lainnya	331.95	0.051	365.57	10.13	0.06	0.05	366.84	364.22	10.51	9.72
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	5,501.41	0.099	6,320.97	14.90	0.15	0.07	6,580.79	6,187.99	19.62	12.48
Jumlah Potensi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	**39,122.85**	**14.10**	**-**	**-**	**40,103.23**	**38,301.52**	**16.96**	**11.71**

Catatan: *dalam juta Rupiah, **dalam nilai desimal, asumsi: (1) inflasi = 3%, effort = 2%.
Sumber: analisis penulis (2019)

BAB IV
POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN BANGKA BARAT

Optimalisasi penerimaan PAD Kabupaten Bangka Barat secara umum dapat ditempuh lewat dua cara: (1) intensifikasi dan (2) ekstensifikasi. Dengan menggunakan cara intensifikasi, upaya meningkatkan PAD ditempuh dengan optimalisasi komponen-komponen PAD yang dinilai belum maksimal proses penggalian potensinya, misalnya dari aspek besaran pajak dan teknis pemungutan serta pengumpulan pajaknya. Di sisi lain, apabila digunakan cara ekstensifikasi, optimalisasi penerimaan PAD ditempuh dengan menggali basis-basis pajak dan retribusi baru dengan cara mengidentifikasi potensi yang masih belum digali dari wilayah Kabupaten Bangka Barat itu sendiri.

4.1 INTENSIFIKASI

4.1.1 Potensi Peningkatan PAD lewat Pemanfaatan Dana Menganggur (Idle Cash)

4.1.1.1 Gambaran Umum

Salah satu upaya untuk meningkatkan PAD adalah dengan melakukan optimalisasi kas dengan memanfaatkan dana menganggur (*idle cash)* pada Pemerintah Daerah. Dana menganggur (*idle cash)* yang berasal dari jasa giro dapat memberikan potensi peningkatan pada pendapatan asli daerah apabila dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan dana menganggur dapat dilakukan dengan berbagai macam pilihan investasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu; Pasal 70, tentang Investasi Pemerintah Daerah: ”Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.”

Pasal 71, tentang Jenis-Jenis Investasi yang dapat Dilakukan:

a. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan."
b. Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
c. Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen.
d. Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
e. Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
f. Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

g. Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemerintah daerah harus dapat melihat peluang-peluang yang tersedia untuk meningkatkan PAD sehingga diharapkan dapat menyediakan dana untuk pembangunan di daerah. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan PAD adalah dengan memanfaatkan kas menganggur (*idle cash)*.

4.1.1.2 Investasi idle cash

Idle cash merupakan dana yang benar-benar tidak terpakai atau menganggur sehingga harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga bisa memberikan hasil yang optimal terhadap manajemen kas. Untuk memprediksi besar potensi *idle cash* yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dapat diketahui jumlahnya dengan menghitung selisih antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar pada periode waktu tertentu. Aliran kas masuk dan aliran kas keluar pada laporan realisasi bulanan pelaksanaan APBD akan menjadi acuan dalam mendapatkan nilai *idle cash* yang akan digunakan dalam Pemanfaatan *idle cash* melalui penerapan pengelolaan kas dimulai dengan menginvestasikan dana yang menganggur dalam berbagai jenis investasi, yaitu:

a. Tabungan, adalah sebagian pendapatan yang tidak dibelanjakan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek maupun panjang. Hal yang dapat dilakukan sebelum menentukan bank yang tepat adalah dengan menyeleksi tingkat suku bunga bank yang memberikan tingkat keuntungan (*return)* yang paling besar bagi Pemerintah Daerah. Kelebihan dari jenis investasi ini adalah sifatnya yang sangat likuid sehingga dapat digunakan ketika dibutuhkan.
b. Deposito, adalah produk simpanan di Bank yang penyetoran maupun penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja atau sesuai dengan jatuh temponya sehingga deposito dikenal juga sebagai tabungan berjangka. Bunga yang diberikan oleh deposito selalu lebih besar dari bunga tabungan sehingga investasi dapat berkembang

lebih cepat. Kelemahannya adalah kurang likuid sehingga lebih sulit untuk mendapatkan dana ketika dibutuhkan.

c. Saham, adalah kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. Keuntungan yang menjadi daya tarik dari investasi saham adalah menerima dividen dan mendapatkan *capital gain*. *Return* ditentukan oleh kondisi pasar dan perusahaan yang mengeluarkan saham sehingga ada risiko berkurangnya nilai investasi yang ditanamkan.
d. Reksa Dana adalah sebuah bentuk investasi yang dilakukan secara kolektif (bersama-sama), dan investasi ini dikelola oleh seorang manajer investasi. Potensi return dan risiko tergantung jenis reksadana yang dipilih seperti saham, obligasi, ataupun equity. Reksa dana memiliki risiko berkurangnya nilai investasi yang ditanamkan.
e. Property termasuk dalam aset tidak lancar yang dapat dijadikan salah satu pilihan untuk investasi. Semakin tinggi inflasi, semakin tinggi kenaikan harga properti, namun dana yang disediakan biasanya cukup besar untuk membeli properti dan jenis investasi ini tidak begitu likuid.

Dengan adanya berbagai macam pilihan investasi, dana menganggur akan disusun dalam satu portofolio sesuai dengan jenis investasi yang diinginkan. Besar proporsi akan dipilih sesuai dengan analisis yang menghasilkan keuntungan terbesar bagi Pemerintah Daerah.

Untuk memilih jenis investasi, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. *Return* atau tingkat pengembalian.
b. Risiko Investasi.
c. Likuiditas.
d. Jangka Waktu Investasi.
e. Biaya Administrasi Pembelian/Penjualan.

Dalam melakukan investasi, diperlukan strategi yang baik untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Ada dua jenis strategi investasi yang dapat diterapkan, yaitu konservatif dan agresif. Strategi investasi konservatif memiliki tujuan untuk perlindungan dana yang telah ada dan sangat mempertimbangkan likuiditas dana. Periode investasi yang akan dilakukan

diarahkan pada investasi jangka pendek sehingga investasi yang cocok pada tipe ini adalah tabungan dan deposito jangka pendek. Strategi investasi agresif memiliki tujuan untuk pertumbuhan dana sehingga dapat dimanfaatkan dikemudian hari untuk pembangunan di daerah, sehingga likuiditas bukan merupakan prioritas utama. Periode investasi pada strategi tersebut diarahkan pada investasi jangka pendek dan jangka panjang. Jenis investasi yang cocok bagi strategi ini adalah tabungan (dalam porsi terbatas), deposito jangka panjang, dan saham.

Pemilihan strategi investasi adalah hal yang penting untuk dilakukan sebelum melakukan investasi dengan dana menganggur. Dalam menentukan strategi yang akan digunakan, hal yang dijadikan pertimbangan adalah tujuan investasi dari Pemerintah Daerah sendiri dan berapa besar *return* yang diharapkan. Selain tingkat keuntungan yang diharapkan, *risk appetite* juga menjadi faktor penentu strategi investasi.

4.1.1.3 Skema investasi idle cash: menggunakan informasi aliran kas

Informasi keuangan dalam suatu periode tertentu, baik mengenai aliran kas masuk *(cash inflow)* maupun aliran kas keluar *(cash outflow)* merupakan informasi penting dalam pelaksanaan anggaran kas, sebab kedua informasi tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi penerimaan dan pengeluaran serta pemanfaatan dana menganggur. Data realisasi penerimaan dan pengeluaran bulanan tersebut dapat digunakan sebagai alat ukur besar dana yang menganggur dengan cara melihat selisih antara aliran kas keluar dengan aliran kas masuk.

Penetapan target atas penerimaan *idle cash* dapat digambarkan pada rangkaian kegiatan dibawah ini:

Gambar 4. 1 Skema Investasi Idle Cash dengan Menggunakan Informasi Aliran Kas

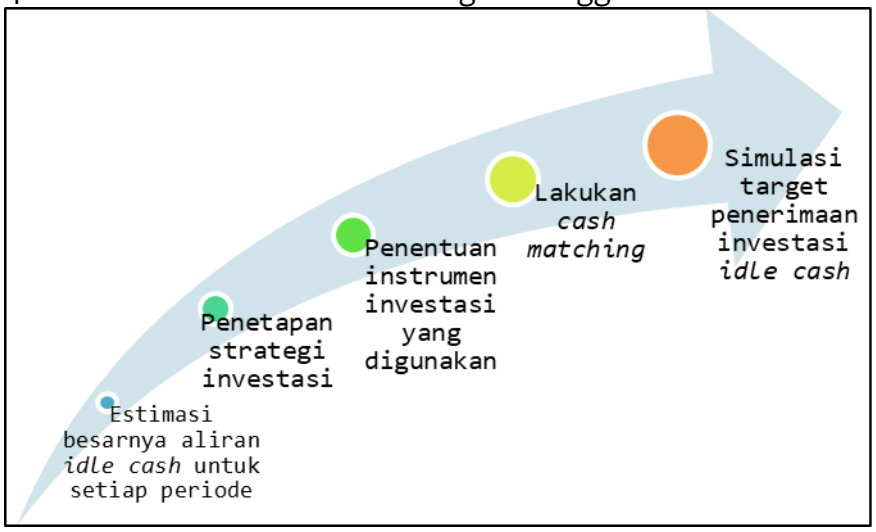

Sumber: pengolahan pribadi (2019)

4.1.1.4 Idle Cash Kabupaten Bangka Barat

Untuk memprediksi potensi kas menganggur yang dapat digunakan untuk investasi dibutuhkan laporan realisasi bulanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dana untuk kegiatan daerah. Cara melakukan prediksi tersebut yaitu dengan mengola data aliran kas kemudian mencari jumlah surplus atau defisit yang terjadi tiap bulan. Apabila yang terjadi adalah defisit, maka skema investasi *idle cash* ini tidak dapat dimanfaatkan, namun jika yang terjadi adalah surplus maka skema investasi yang bertujuan untuk menambah PAD ini dapat dilaksanakan.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada 2018 dan 2017, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (Jumlah Arus Masuk Kas – Jumlah Arus Keluar Kas) Rp 185.697.573.577 (2018) dan Rp 170.867.355.263 (2017), maka saldo kas menganggur dalam dua tahun di Kabupaten Bangka Barat rata-rata Rp 178.282.464.420. Jumlah tersebut akan dikurangi dengan saldo kas minimum yang diasumsikan berjumlah sebesar 10% dari saldo kas yang tersedia. Hal ini bertujuan agar apabila ada kebutuhan finansial yang terjadi secara tiba-tiba di daerah, pengeluaran tersebut dapat segera dipenuhi menggunakan saldo kas minimal. Setelah dikurangi oleh saldo kas minimal, kas menganggur yang dapat digunakan untuk investasi adalah sebesar Rp 160.454.217.978.

Karena adanya keterbatasan data, maka peneliti mengambil asumsi atas *cash inflow* dan *cash outflow* kuartalan di daerah Kabupaten Bangka Barat dengan proporsi sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Asumsi Aliran Kas (Cash Flow) Kuartalan APBD Kabupaten Bangka Barat

Kuartal	Proporsi (%)	Jumlah Kas Menganggur
1	12,25	19.655.641.702
2	22,75	36.503.334.590
3	32,50	52.147.620.843
4	32,50	52.147.620.843
Total	100,00	160.454.217.978

Sumber: pengolahan pribadi (2019)

Pada tabel di atas, diasumsikan jumlah kas menganggur diakhir kuartal satu adalah 12,25 persen dari Rp 160.454.217.978 yaitu Rp 19.655.641.702, kuartal 2 mendapatkan proporsi sebesar 22,75 persen, yaitu Rp 36.503.334.590, sedangkan pada kuartal 3 dan 4 keduanya mendapatkan proporsi yang sama sebesar 32,5 persen dengan jumlah kas menganggur sebesar Rp 52.147.620.843.

4.1.1.5 Penempatan idle cash

Pemanfaatan *idle cash* untuk investasi pada deposito dan tabungan akan dilakukan oleh pemerintah pada beberapa bank yang beroperasi di daerah Kabupaten Bangka Barat yaitu Bank Mandiri, Bank Sumsel Babel dengan tingkat suku bunga sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Tingkat Suku Bunga Perbankan di Kabupaten Bangka Barat, 2019

Bank	Suku Bunga Tabungan (%)	Suku Bunga Deposito (%)			
		1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn
Sumsel Babel	1,00	5,25	5,25	5,25	5,00
Mandiri	1,90	4,50	5,50	5,25	4,75

Sumber: pengolahan pribadi (2019)

Dapat dilihat bahwa Bank Mandiri memiliki suku bunga tabungan sebesar 1,90 persen per tahun nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh Bank Sumsel Babel yaitu sebesar 1,00 persen. Namun untuk tingkat suku bunga deposito dimana Bank Sumsel Babel memiliki suku bunga deposito yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Mandiri karena risiko yang dimiliki oleh Bank Sumsel Babel lebih besar dibandingkan dengan risiko yang didapatkan apabila menabung di Bank Mandiri.

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah dengan menyusun portfolio-portfolio sesuai dengan *risk preferrence* yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 4. 3 Strategi Portfolio yang Ditawarkan, 2019

Strategi	Konservatif		Agresif	
Periode	Tabungan (%)	Deposito (%)	Tabungan (%)	Deposito (%)
Triwulan I	50	50	20	80
Triwulan II	60	40	30	70
Triwulan III	70	30	20	80
Triwulan IV	80	20	50	50

Sumber: pengolahan pribadi (2019)

Risk preferrence adalah tingkat risiko yang ingin dimiliki oleh investor. Pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat yang berlaku sebagai investor adalah pihak yang berhak untuk menentukan jenis portfolio yang mereka inginkan. Apabila pemerintah daerah adalah tipe investor yang konservatif maka dapat menggunakan pilihan portfolio disebelah kiri dimana pada triwulan I proporsi kas menganggur yang diinvestasikan terbagi rata 50 persen pada tabungan dan 50 persen deposito. Namun jika pilihan jatuh pada tipe agresif, maka proporsi investasi adalah 20 persen tabungan dan 80 persen pada deposito di triwulan pertama.

4.1.1.6 Hasil Investasi

Penentuan strategi portfolio yang tepat akan menentukan seberapa banyak hasil yang bisa didapatkan dari investasi. Dibawah ini adalah contoh bagaimana beberapa portfolio dapat memberikan opsi-opsi yang beragam dalam pilihan investasi. Dari tabel di bawah dapat

dilihat bahwa perbandingan perolehan penerimaan ilustrasi *idle cash* dengan menggunakan portofolio II dimana proporsi investasi pada deposito Bank Mandiri dengan rate 3 bulan adalah 80 persen dan 20 persen sisa dari kas menganggur ditempatkan pada tabungan Bank Sumsel Babel, dapat memperoleh penerimaan yang cukup optimal yaitu sebesar Rp 1.476178.805.***

Tabel 4. 4 Strategi Portfolio yang Ditawarkan, 2019

Portofolio	**I**	**II**	**III**	**IV**
Komposisi Dana (Deposito:Tabungan)	50:50	80:20	80:20	70:30
Penempatan Dana	Deposito Mandiri 3 bulan, tabungan Sumsel Babel	Deposito Mandiri 3 bulan, tabungan Sumsel Babel	Deposito Mandiri 1 bulan, tabungan Sumsel Babel	Deposito Mandiri 1 bulan, tabungan Sumsel Babel
Idle Cash				
Q1	159.702.089	226.039.880	186.728.596	169.529.910
Q2	296.589.594	419.788.348	346.781.679	314.841.261
Q3	423.699.419	599.697.640	495.402.398	449.773.230
Q4	423.699.419	599.697.640	495.402.398	449.773.230
Proyeksi Hasil Investasi (1 tahun)	**1.303.690.521**	**1.845.223.507**	**1.524.315.071**	**1.383.917.630**
Proyeksi Hasil Investasi setelah pajak 20%	**1.042.952.417**	**1.476.178.805**	**1.219.452.057**	**1.107.134.104**

Sumber: pengolahan pribadi (2019)

4.1.2 Potensi PAD Sektor Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berbentuk pungutan retribusi dan pajak. Pungutan retribusi diperoleh dari penjualan tiket dan pengelolaan parkir objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Sedangkan pajak dapat diperoleh dari pajak obyek wisata yang tidak dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Kabupaten Bangka Barat sendiri, memiliki dua obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yakni Bukit Menumbing dan Pantai Batu Rakit. Pendapatan dari pengelolaan obyek wisata tersebut akan dicatat sebagai dicatat sebagai retribusi tempat rekreasi. Meski begitu, terdapat objek wisata lain di Kabupaten Bangka Barat yaitu Museum Timah Indonesia yang dikelola oleh PT. Timah Tbk dan Makam H. Khotama Rasyid, penyiar agama Islam pertama di wilayah Bangka Barat, yang dikelola oleh keluarga. Kedua objek ini seharusnya dapat berkontribusi pada PAD melalui pungutan pajak seperti pajak parkir. Namun karena keterbatasan informasi mengenai hal tersebut maka pembahasan berikut spesifik hanya pada dua objek wisata yang berkontribusi pada PAD Kabupaten Bangka Barat melalui pungutan retribusi.

4.1.2.1 Realisasi dan Potenssi

Bukit Menumbing

Bukit Menumbing merupakan objek wisata pesanggrahan yang teletak di Tanjung, Kecamatan Muntok. Pesanggrahan ini merupakan tempat pengasingan Bung Karno dan Bung Hatta, yang dibangun pada tahun 1928 sampai 1933. Kini tempat ini selain dilestarikan sebagai tempat bersejarah juga dijadikan tempat wisata alam karena berlokasi di atas Bukit Menumbing. Besarnya tarif retribusi hingga tahun 2019 sesuai dengan Perda Kab. Bangka Barat No. 20 Tahun 2008 yakni, tiket masuk per orang sebesar Rp 1.000, demikian pula retribusi parkir atau tiket masuk motor juga sebesar Rp 1.000, dan retribusi tiket masuk mobil sebesar Rp 3.000. Pendapatan yang diperoleh dari tarif tiket masuk tersebut menjadi pemasukan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bangka Barat yakni retribusi rekreasi.

Jam berkunjung ke pesanggarahan ini dimulai dari pukul 08.00 sampai 16.00 WIB. Meski objek wisata ini dibuka setiap hari, penarikan tiket masuk dan pengelolaan parkir hanya

dilakukan pada akhir pekan, dan tidak ada perbedaan harga tiket masuk baik untuk libur akhir pekan biasa ataupun libur nasional. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh tim survei, tidak terdapat penjaga tiket di pintu masuk. Namun tim survei mendapatkan data pengunjung yang diperoleh dari buku tamu yang ada di pesanggarahan. Tercatat dari Selasa, 26 Februari 2019 hingga Kamis, 16 Mei 2019 pengunjung berjumlah 6.821 orang atau setiap bulan jumlah pengunjung mencapai 2.280 orang. sedangkan berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2017, rata-rata kunjungan mencapai 3.418 wisatawan per bulan, parkir motor dan mobil sebanyak 648 motor dan 396 mobil, sedangkan pada tahun 2018 adalah 3471 wisatawan, 650 motor, dan 495 mobil.

Tabel 4. 5 Realisasi dan Potensi Objek Wisata Bukit Menumbing

	Tahun 2017	Tahun 2018	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Potensi 2019* (Rp)
Kunjungan wisatawan	41.009	41.645	41.009.000	41.645.000	42.640.000
Parkir motor	7.765	7.799	7.765.000	7.799.000	11.466.000
Parkir mobil	4.745	5.929	14.235.000	17.787.000	21.156.000
Total Kontribusi terhadap PAD			63.009.000	67.231.000	75.262.000

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat 2017 dan 2018, Data observasi survei, data diolah
*Data observasi survei

Dengan biaya tiket masuk Rp 1000, pakir motor Rp 1.000 dan parkir mobil Rp 3.000 maka pada tahun 2017 objek wisata bukit Menumbing memberikan kontribusi sebesar Rp 63.009.000 terhadap PAD Kabupaten Bangka Barat dan pada 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 6% atau mencapai Rp 67.231.000. Sedangkan berdasarkan perhitungan dari data survei potensi penerimaan Bukit Menumbing pada tahun 2019 mencapai Rp 75.262.000 atau naik sebesar 11,95 persen dari realisasi tahun 2018. Kontribusi objek wisata Bukit Menumbing terhadap PAD dapat lebih optimal apabila penjualan tiket dan pengelolaan parkir tidak hanya dilakukan saat akhir pekan yaitu pada hari Sabtu dan Minggu atau pada libur hari nasional saja. Dengan mengasumsikan bahwa pada hari kerja biasa, hari Senin hingga Jumat, terdapat sejumlah kecil pengunjung sebesar 10% dari total

pengunjung dari Sabtu dan Minggu maka kontribusi objek wisata ini terhadap PAD dapat meningkat hingga kurang lebih Rp 600.000 per bulan. Meski begitu, perlu dipastikan bahwa peningkatan biaya lain seperti biaya tenaga kerja masih lebih rendah dibanding jumlah potensi peningkatan.

Pantai Batu Rakit

Selain Bukit Menumbing, obyek wisata yang juga dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat aalah Pantai Batu Rakit. Pantai Batu Rakit terletak di Kecamatan Muntok yakni bersebelahan dengan ASDP Tanjung Kalian. Pantai Batu Rakit menawarkan pasir putih dengan pemandangan laut yang indah, keunggulan lainnya adalah lokasinya yang strategis yaitu hanya berjarak enam kilometer dari Kota Muntok. Sama seperti objek wisata Bukit Menumbing, besarnya retribusi yang dipungut sesuai dengan Perda Kab. Bangka Barat No. 20 Tahun 2008. Retribusi tiket masuk per orang sebesar Rp 1.000, retribusi tiket masuk motor sebesar Rp 1.000, dan retribusi tiket masuk mobil sebesar Rp 3.000, dengan tidak ada perbedaan harga tiket masuk baik untuk libur akhir pekan biasa ataupun libur nasional. Jam berkunjung ke pantai ini dari 08.00 sampai 16.00 WIB. Namun saat tim survei melakukan survei di pos loket Pantai Batu Rakit tidak dijaga dan tidak dikenakan retribusi. Selain itu, berdasarkan penuturan wisatawan yang berkunjung memang seringkali tidak dipungut retribusi, hanya saat ramai di hari-hari libur ataupun saat Hari Sabtu dan Minggu saja terdapat pungutan retribusi untuk memasuki objek Wisata Batu Rakit.

Obyek wisata ini tumbuh menjadi salah satu destinasi utama di Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat, rata-rata kunjungan mencapai 2.323 wisatawan per bulan pada tahun 2017 dan 4.558 wisatawan pada tahun 2018, artinya terdapat pertumbuhan kunjungan wisatawan yang sangat signifikan yaitu mencapai 96%. Dibandingkan dengan objek wisata Bukit Menumbing yang hanya tumbuh 1.5% pada tahun 2018, pertumbuhan kunjungan wisatawan yang signifikan di Pantai Batu rakit ini mungkin dipengaruhi oleh ketertarikan wisatawan yang cenderung menyukai wisata alam dibanding dengan wisata sejarah, selain itu lokasi batu rakit juga lebih strategis karena dekat dengan pusat kota.

Tabel 4. 6 Realisasi dan Potensi Objek Wisata Pantai Batu Rakit

	Tahun 2017	Tahun 2018	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Potensi 2019* (Rp)
Kunjungan wisatawan	27.875	54.700	27.875.000	54.700.000	65.244.000
Parkir motor	13.681	18.465	13.681.000	18.465.000	37.448.000
Parkir mobil	5.151	6.950	15.453.000	20.850.000	21.858.000
Total Kontribusi terhadap PAD			57.009.000	94.015.000	124.530.000

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat 2017 dan 2018, Data observasi survei, data diolah
*Data observasi survei

Kontribusi retribusi objek wisata Pantai Batu Rakit terhadap PAD mencapai Rp 70.690.000 pada tahun 2017 dan Rp 112.480.000 pada tahun 2018. Apabila penjualan tiket dan pengelolaan parkir tidak hanya dilakukan saat akhir pekan pada hari Sabtu dan Minggu atau pada libur hari besar saja maka dimungkinkan adanya peningkatan jumlah pengunjung, sehingga kontribusi objek wisata ini terhadap PAD dapat meningkat. Sedangkan potensi yang dihitung berdasarkan observasi survei mencapai 124.530.000 untuk tahun 2019, atau dimungkinkan ada peningkatan hingga mencapai 10,71 persen dari realisasi tahun 2018, dengan asumsi terdapat pemungutan retribusi pada hari kerja yakni dari Hari Senin hingga Jumat. Namun begitu perlu pula dipastikan bahwa peningkatan biaya lain seperti biaya tenaga kerja masih lebih rendah dibanding jumlah potensi peningkatan.

4.1.2.2 **Strategi Peningkatan PAD Sektor Pariwisata**

a. Penertiban penjualan tiket dan pengelolaan parkir

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa kedua objek wisata tersebut meskipun dibuka setiap hari namun penjualan tiket dan pengelolaan parkir hanya dilakukan pada akhir pekan atau hari libur nasional saja. Terdapat kemungkinan bahwa pada hari biasa jumlah pengunjung tidak terlalu ramai atau cenderung sepi sehingga petugas tiket maupun parkir seringkali tidak ada di lokasi. Namun, Pemda perlu untuk melakukan penertiban tiket masuk dan pengelolaan parkir, bukan saja untuk mendapatkan potensi

peningkatan PAD, namun juga untuk menertibkan petugas tiket maupun parkir yang diberikan tanggung jawab, agar lebih peduli terhadap tanggung jawabnya.

b. Meningkatkan tarif retribusi tiket masuk maupun pengelolaan parkir

Tarif retribusi baik di Bukit Menumbing maupun Batu Rakit tidak mengalami perubahan dari tahun 2008. Oleh karena itu, Pemda Kab. Bangka Barat melakukan penyesuaian tarif dengan menyusun draft perubahan Peraturan Daerah no 20 tahun 2008. Pemda juga perlu memperhatikan bahwa peningkatan tarif retribusi tiket dapat disesuaikan dengan rencana penambahan fasilitas yang ada. Implementasi atas tarif baru tersebut dapat dilakukan dalam tempo waktu tertentu untuk kemudian dievaluasi dan bila perlu dilakukan penyesuaian, misalnya penetapan tarif batas atas tertentu yang diuji coba dalam waktu tiga bulan apabila terbukti tidak terjadi perubahan kunjungan wisatawan maka dapat dibakukan, namun apabila terjadi penurunan kunjungan wisatawan secara signifikan maka selanjutnya perlu dilakukan tindakan yang sesuai.

Selain peningkatan harga tiket pada hari kerja tersebut, Pemda dapat memberlakukan harga khusus pada hari libur nasional atau pada periode hari libur tertentu. Mengingat pada waktu tertentu seperti hari libur sekolah, periode libur Idul Fitri dan periode libur Natal hingga awal tahun terjadi peningkatan jumlah pengunjung hingga lima kali lipat. Sehingga dengan mengimplementasikan strategi ini maka Pemda dapat memperoleh peningkatan PAD yang cukup besar.

c. Penambahan sarana dan prasarana

Pada tahun 2017-2018, terjadi stagnasi kunjungan wisatawan di Bukit Menumbing dengan pertumbuhan hanya sekitar 1.5%, sedangkan pertumbuhan kunjungan wisatawan di Pantai Batu Rakit mencapai 96%. Meskipun, secara rata-rata jumlah kunjungan wisatawan di Bukit Menumbing lebih besar dibandingkan Pantai Batu Rakit, namun pemerintah perlu mencermati faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan kunjungan wisatawan di objek wisata Pantai Batu Rakit untuk dapat diterapkan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan di objek wisata Bukit Menumbing. Salah satu hal yang mungkin terjadi adalah tidak adanya inovasi yang signifikan di objek wisata Bukit Menumbing sehingga masyarakat menjadi bosan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemda perlu

meningkatkan kualitas dan berinovasi pada layanan objek wisata terkait dengan akses menuju ke objek wisata, keamanan, fasilitas seperti parkir dan sarana kebersihan, spot untuk berfoto, wahana wisata yang baru untuk menarik minat masyarakat berkunjung.

Dalam merealisasikan hal tersebut tentu membutuhkan sejumlah modal. Pemda dapat mendorong Pemerintah Desa setempat untuk mengalokasikan dana desa bagi pembangunan infrastruktur, mengajak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau investor swasta untuk berinvestasi pada pembangunan dan pengelolaan wahana wisata.

d. Meningkatkan pemasaran

Untuk dapat mengoptimalkan kunjungan wisatawan, Pemda dapat memanfaatkan internet untuk meningkatkan kunjungan wisatawan paada obyek wisata melalui website atau akun media sosial khusus foto seperti Instagram. Salah satu cara yang mungkin dilakukan untuk menggaet target wisatawan muda ataupun keluarga muda adalah dengan mengadakan kontes foto berhadiah.

4.1.2.3 Statistik Deskriptif Objek Wisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat telah memberikan data mengenai jumlah pengunjung maupun parkir kendaraan per bulan selama dua tahun di kedua objek wisata tersebut. Namun demikian, berdasarkan hasil survei pada hari kerja tidak terdapat pemungutan retribusi, sehingga dalam perhitungan diasumsikan data tersebut hanya mencatat jumlah penjualan tiket dan pengelolaan parkir di akhir pekan. Data ini akan menjadi dasar bagi dilakukannya pemaparan statistik untuk menjelaskan fenomena yang ada serta melakukan peramalan terhadap pola kunjungan wisatawan dengan asumsi tertentu yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Dengan mempelajari mengenai pola-pola kunjungan wisatawan maka diharapkan Pemda dapat mengambil tindakan khusus yang direkomendasikan guna mengoptimalkan PAD.

Bukit Menumbing

Bukit Menumbing memiliki tingkat kunjungan yang stabil pada tahun 2018 mencapai 41.009 wisatawan setara dengan pertumbuhan 1.5% dibandingkan tahun 2017. Kunjungan wisatawan pada objek wisata Bukit Menumbing dapat dipetakan berdasar bulan-bulan

tertentu dalam satu tahun, Gambar 1 menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mengalami lonjakan yang sangat signifikan pada bulan Juli setiap tahunnya mengingat adanya libur tahun ajaran baru untuk anak sekolah dan libur hari raya Idul fitri, selain itu terjadi lonjakan kunjungan wisatawan pada Bulan Desember karena bertepatan libur semester untuk anak sekolah, libur hari raya Natal, libur akhir tahun dan libur awal tahun.

Tabel 4. 7 Jumlah kunjungan Bukit Menumbing Tahun 2017 dan 2018

	Tahun 2017	Tahun 2018
Kunjungan wisatawan	41.009	41.645
Parkir motor	7.765	7.799
Parkir mobil	4.745	5.929

Gambar 4. 2 Pola kunjungan wisatawan Bukit Menumbing

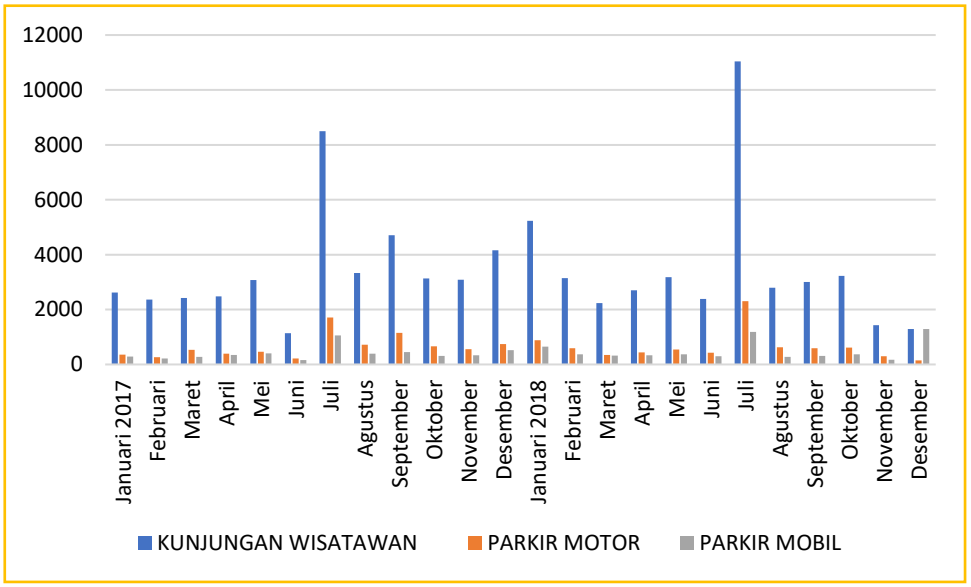

Pantai Batu Rakit

Pantai Batu Rakit tumbuh menjadi destinasi wisata andalan di kawasan Bangka Barat pada tahun 2018 dengan pertumbuhan penjualan tiket mencapai 96% atau setara dengan 54.700 wisatawan. Jumlah ini melebihi kunjungan pada objek wisata lain seperti Bukit Menumbing

yang relatif stabil dalam dua tahun dengan jumlah pengunjung berkisar 40.000 pengunjung.

Tabel 4. 8 Jumlah kunjungan Pantai Batu Rakit Tahun 2017 dan 2018

	Tahun 2017	Tahun 2018
Kunjungan wisatawan	27.875	54.700
Parkir motor	13.681	18.645
Parkir mobil	5.151	6.950

Gambar 4. 3 Pola kunjungan wisatawan Pantai Batu Rakit

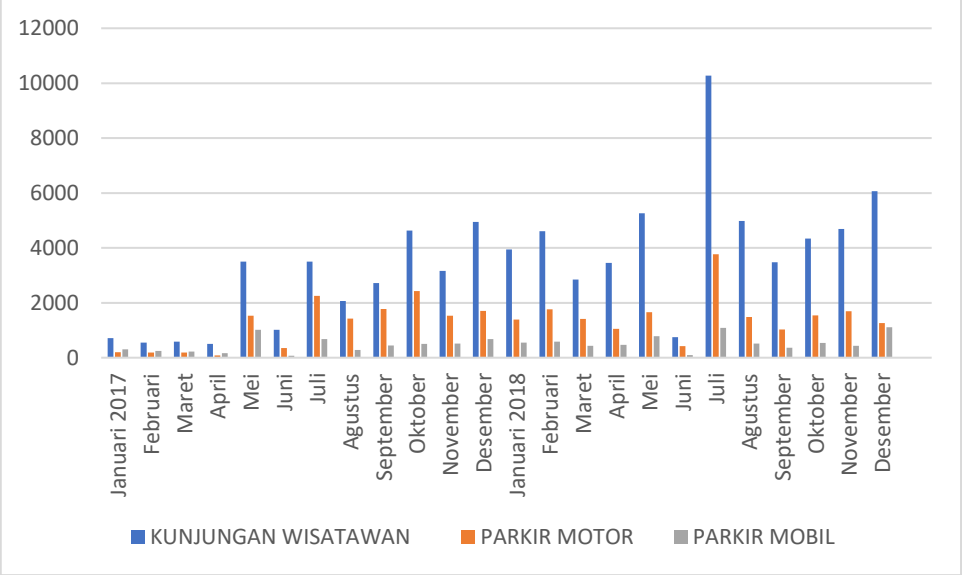

Kunjungan wisatawan pada tahun 2017 dan 2018 dapat dipetakan berdasar bulan tertentu dalam satu tahun, Gambar 2 menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mengalami lonjakan yang sangat signifikan pada bulan Juli mengingat adanya libur tahun ajaran baru untuk anak sekolah dan libur hari raya Idul fitri yaitu sebesar 200%, selain itu terjadi lonjakan kunjungan wisatawan pada Bulan Desember karena bertepatan libur semester untuk anak sekolah, libur hari raya Natal, libur akhir tahun dan libur awal tahun. Pola kunjungan ini sama dengan pola kunjungan di objek wisata Bukit Menumbing.

4.1.2.4 Proyeksi Jumlah Pengunjung

Selain melakukan perhitungan potensi berdasarkan hasil survei, peneliti juga melakukan proyeksi jumlah pengunjung Bukit Menumbing dan Pantai Batu Rakit di tahun 2019. Pendekatan yang digunakan berdasarkan paradigma Positivis dengan menggunakan analisis kuantitatif berbasis model ekonometrika. Data yang digunakan untuk melakukan proyeksi merupakan data runtun waktu mengenai pengunjung yang diperoleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama tahun 2017 dan 2018.

Bukit Menumbing

Sebelum menentukan model ekonometrika yang digunakan untuk melakukan peramalan, maka perlu dilakukan pengujian asumsi. Pengujian normalitas dilakukan pada residual persamaan. Tabel 4. 5 menunjukkan hasil pengujian normalitas dengan beberapa alat statistika pengujian normalitas, terlihat bahwa data tidak normal karena Prob>z signifikan pada 5%. Dan karena data tidak normal maka akan dilakukan transformasi data dalam bentuk logaritma.

Tabel 4. 9 Pengujian Normalitas

	Prob>z
Skewness/Kurtosis	0.0001
Shapiro-Wilk W	0.00002
Shapiro-Francia W'	0.00003

Selanjutnya dilakukan pengujian stasioneritas dengan menguji ada tidaknya unit root menggunakan *Augmented Dicky Fuller* (ADF) dan pengujian autokorelasi menggunakan correlogram yang terdiri dari fungsi autokorelasi (*autocorrelation function*/ACF) dan fungsi autorelasi parsial (*partial autocorrelation function*/PACF) atas residual persamaan yang telah ditambahkan variabel dummy bulan untuk mengakomodir perubahan penjualan tiket yang signifikan pada bulan-bulan tertentu dalam satu tahun.

Stasioneritas menunjukkan konsistensi pergerakan data runtun waktu. Pengolahan data yang tidak stationer dapat memberikan hasil regresi palsu (*spurious regression*) yang tidak

valid sehingga pengambilan keputusan berdasar data menjadi tidak tepat. Tabel 4. 6 menunjukkan bahwa data tidak mengandung unit root atau dengan kata lain data telah stasioner.

Tabel 4. 10 Hasil uji ADF

	p-value for Z(t)
Augmented Dicky Fuller	0.0018

Data runtun waktu harus independen runtun waktu artinya tidak ada korelasi data saat ini dengan data pada waktu tertentu. Korelasi dalam data runtun waktu dibagi menjadi dua fungsi autokorelasi dan fungsi autorelasi parsial. Fungsi autorelasi mengukur korelasi antar pengamatan dengan jeda waktu tertentu; sedangkan fungsi autokorelasi parsial mengukur korelasi antar pengamatan dengan jeda waktu tertentu dan dengan menghilangkan efek pengamatan awal yang terletak diantara kedua pengamatan tersebut untuk menunjukkan bahwa regresor lainnya konstan di dalam persamaan regresi. Gambar 3 menunjukkan hasil uji autokorelasi ACF dan PACF. Pada gambar 4. 3 terlihat bahwa koefisien ACF menurun pada kelambanan (*lag*) 1, sedangkan koefisien PACF menurun drastis *(spiked)* pada lag 1 namun kembali signifikan pada *lag* 10 sehingga diduga model *Auto Regressive* (AR) merupakan model yang paling tepat. Model ini memungkinkan data untuk 'menjelaskan dirinya melalui dirinya sendiri' artinya proyeksi masa mendatang dapat dilakukan hanya dengan mengamati perilaku data tersebut di masa lalu dalam sebuah fungsi linear. Misalnya: nilai variabel dependen Y_t hanya dipengaruhi oleh nilai variabel tersebut pada satu, dua, atau beberapa periode kelambanan (p). Secara umum model AR dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_t = \alpha + \beta_1 Y_{t-1} + \beta_2 Y_{t-2} + \beta_3 Y_{t-3} + \ldots + \beta_p Y_{t-p} + e_t \ldots\ldots \quad (1)$$

Dimana:

Y = variabel dependen;

Y_{t-1}, Y_{t-2}, Y_{t-p} = nilai Y pada kelambanan (*lag*) 1, 2, p;

e_t = residual.

Gambar 4. 4 Correlogram kunjungan wisatawan Bukit Menumbing

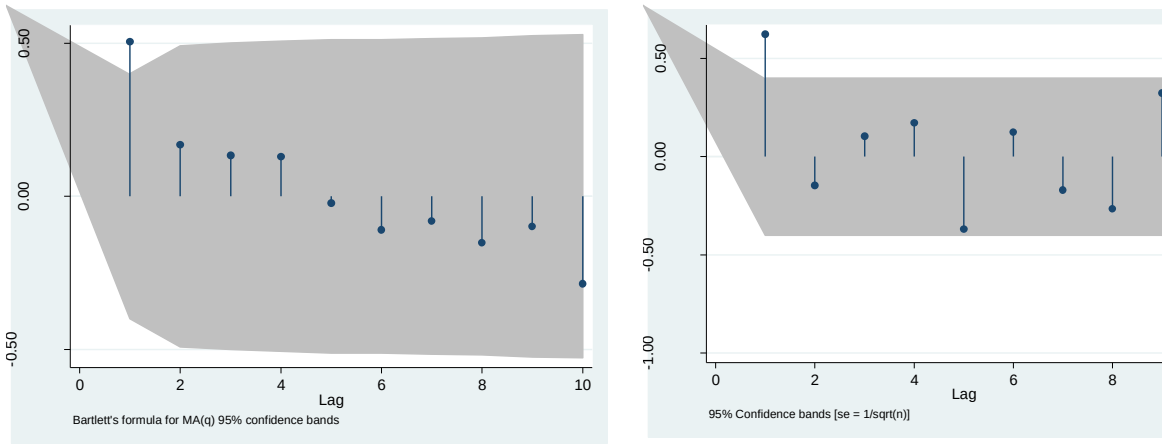

AC PAC

Sumber: Data diolah

Melalui sejumlah uji coba tambahan pada berbagai tingkat kelambanan, model AR(1) terkonfirmasi paling relevan digunakan dengan nilai error atas data aktual yang paling rendah. Hasil estimasi AR(1) dapat dirangkum lewat Tabel 4. 7.

Tabel 4. 11 Hasil Estimasi AR(1)

Jumlah observasi: 24

i^2: 99.78***

Variabel	**Koefisien**	***Standard Error***	**z-statistik**
Y_{t-1}	0.6719***	0.2584	2.60

Catatan: tanda *, **, dan *** menjelaskan signifikansi pada tingkat 10%, 5%, dan 1% secara berurutan. Variabel kontrol yang tidak dimasukkan dalam analisis regresi adalah variabel dummy untuk bulan dan variabel dummy untuk tahun. Estimasi galat baku dikoreksi dengan metode *robust*.

Model regresi AR(1) tersebut dijadikan dasar untuk melakukan proyeksi yaitu dengan menghitung nilai prediksinya. Tabel 4. 8 menunjukkan proyeksi jumlah kunjungan wisatawan pada Tahun 2019 dan Tahun 2020, sebagai catatan data yang digunakan adalah tiket masuk yang terjual saat akhir pekan saja.

Tabel 4. 12 Kunjungan wisatawan Bukit Menumbing

Bulan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019 (F)	Tahun 2020 (F)
Januari	2.617	5.232	1.969	2.305
Februari	2.364	3.143	1.672	1.781
Maret	2.422	2.238	1.571	1.571
April	2.480	2.696	1.858	1.781
Mei	3.076	3.184	2.345	2.184
Juni	1.137	2.381	1.266	1.157
Juli	8.502	11.038	7.569	6.828
Agustus	3.330	2.795	2.401	2.147
September	4.706	3.001	2.957	2.629
Oktober	3.128	3.225	2.481	2.197
November	3.089	1.426	1.614	1.426
Desember	4.158	1.286	1.731	1.527
Total	41.009	41.645	29.434	27.533
Delta		1,5509%	- 29,3216%	6,4585%

Nilai proyeksi tersebut digambarkan pada Gambar 4. Terjadi penurunan kunjungan wisatawan sebanyak 29% pada tahun 2019, dan pertumbuhan kunjungan wisatawan sebanyak 6% pada tahun 2020 sehingga dapat diketahui bahwa jumlah tersebut tetap lebih rendah dibanding jumlah wisatawan pada tahun 2018. Penurunan kunjungan wisatawan pada tahun ini harus diantisipasi oleh Pemda untuk memastikan bahwa penurunan kontribusi PAD tidak berkurang signifikan. Beberapa cara tercepat yang telah direkomendasikan adalah dengan menertibkan penjualan tiket dan pengelolaan parkir serta meningkatkan harga tiket masuk maupun pengelolaan parkir.

Gambar 4. 5 Kunjungan wisatawan Bukit Menumbing

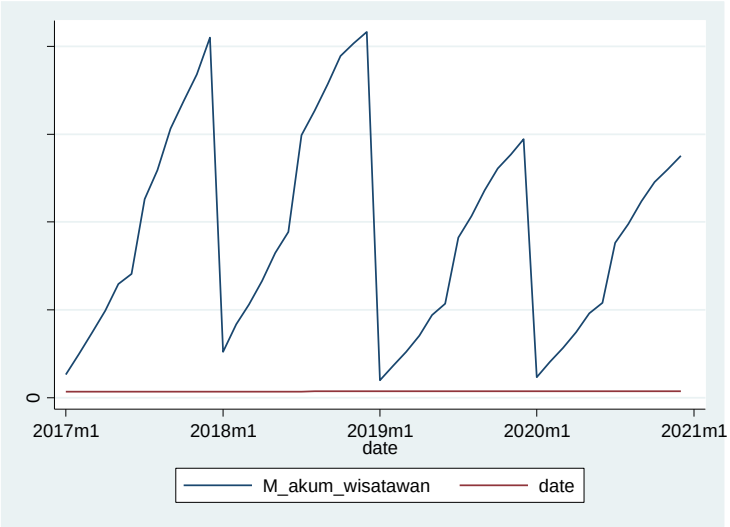

Pantai Batu Rakit

Secara garis besar, tahapan peramalan yang digunakan relatif sama dengan peramalan di Bukit Menumbing, meski begitu terdapat perbedaan model yang digunakan. Tabel 9 menunjukkan bahwa residual tidak terdistribusi normal karena Prob>z signifikan pada pengujian skewness/kurtosis, Shapiro-Wilk dan Shapiro-Francia sehingga perlu dilakukan transformasi data dengan bentuk transformasi yang dipilih adalah logaritma. Tahapan selanjutnya adalah pengujian stasioneritas data yang dilakukan dengan menguji ada tidaknya unit root dan autokorelasi yang disebabkan pengaruh tren dan pengaruh musiman. Untuk menguji pengaruh tren dan musiman maka akan digunakan uji *Augmented Dick Fuller* (ADF) dan correlogram. Tabel 10 menunjukkan bahwa data tidak mengandung unit root sedangkan Gambar 4 menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi berdasar hasil uji autokorelasi ACF dan PACF. Terlihat bahwa ACF signifikan pada lag 2, 12, dan 18, sedangkan PACF signifikan pada lag 2, 4, 12, dan 13 sehingga Model AR merupakan model yang relevan.

Tabel 4. 13 Pengujian Normalitas

	Prob>z
Skewness/Kurtosis	0.0064
Shapiro-Wilk W	0.01398
Shapiro-Francia W'	0.0055

Tabel 4. 14 Hasil uji ADF

	p-value for Z(t)
Augmented Dicky Fuller	0.0004

Gambar 4. 6 Correlogram kunjungan wisatawan Pantai Batu Rakit

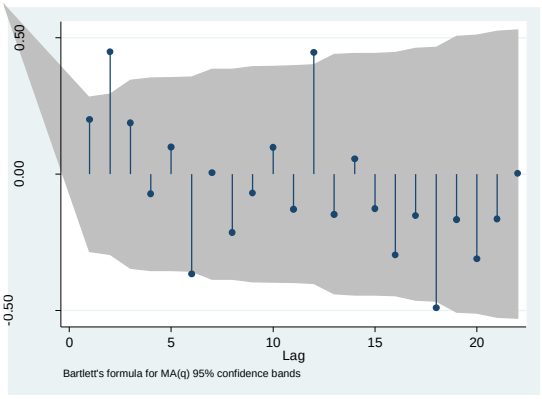

AC

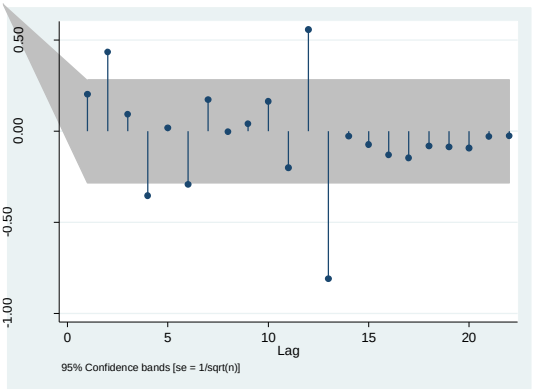

PAC

Sumber: Data diolah

Melalui sejumlah uji coba pada beberapa orde, model AR(1) merupakan model yang paling tepat untuk melakukan peramalan dengan tidak ada autokorelasi. Hasil estimasi model AR(1) akan ditunjukkan pada Tabel 11, sedangkan hasil peramalan pada Tabel 12. Gambar 5 menunjukkan terjadi penurunan kunjungan wisatawan secara signifikan pada tahun 2019, berdasar Tabel 12 maka penurunan kunjungan wisatawan mencapai 58%, meskipun proyeksi tersebut hanya didasarkan pada penjualan tiket akhir pekan. Secara pemodelan ekonometrika, penurunan ini dapat terjadi dikarenakan jumlah observasi yang pendek dan sangat berbeda, dalam hal ini observasi hanya sebanyak 12 bulan dalam dua tahun berturutan dengan pertumbuhan mencapai 96%. Meski begitu, alangkah lebih baik apabila

penurunan kunjungan wisatawan ini diwaspadai karena akan sangat berpotensi menyebabkan penurunan PAD Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 4. 15 Hasil Estimasi AR(1)

Jumlah observasi: 24			
Wald Chi^2: 218.12***			
Variabel	**Koefisien**	***Standard Error***	**z-statistik**
Y_{t-1}	0.5784***	0.1818	3.18

Tabel 4. 16 Kunjungan wisatawan Pantai Batu Rakit

Bulan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019 (F)	Tahun 2020 (F)
Januari	708	3946	5.126	14.289
Februari	547	4611	5.317	13.980
Maret	586	2849	4.550	11.566
April	505	3455	4.788	11.934
Mei	3497	5257	15.797	38.927
Juni	1013	750	3.238	7.927
Juli	3497	10279	22.337	54.478
Agustus	2060	4978	11.913	28.992
September	2714	3472	11.348	27.582
Oktober	4634	4339	16.363	39.742
November	3167	4693	13.737	33.350
Desember	4947	6071	18.727	45.452
Total	27875	54700	133.241	328.219
Delta		96.2332%	143.5850%	146.3348%

Gambar 4. 7 Kunjungan wisatawan Pantai Batu Rakit

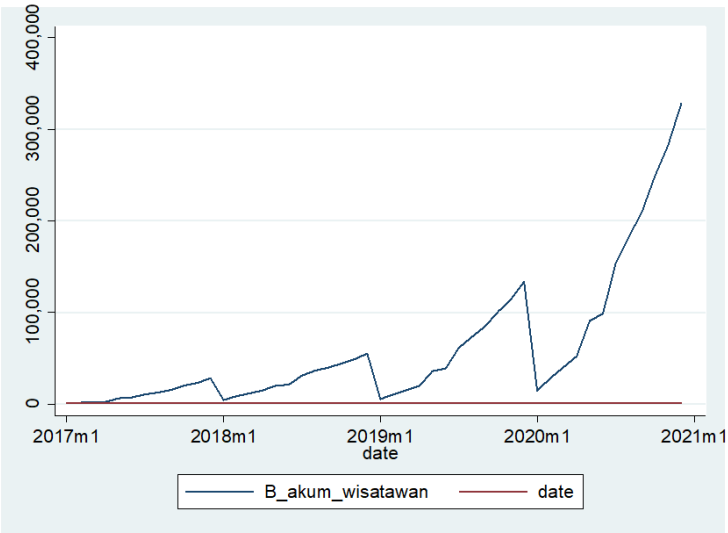

Proyeksi Pemasukan

Bukit Menumbing

Berdasarkan proyeksi jumlah pengunjung tersebut, maka dapat dilakukan proyeksi kontribusi objek wisata Panti Batu Rakit terhadap PAD. Untuk melakukan proyeksi ini, terdapat dua asumsi yang digunakan. Pertama, karena proyeksi tersebut didasarkan pada penjualan tiket pada akhir pekan dan hari libur, dengan adanya implementasi penertiban penjualan tiket dan pengelolaan parkir yang dilakukan setiap hari pada sisa waktu di tahun 2019 ini maka diasumsikan terdapat peningkatan penjualan tiket sebesar 5% sedangkan pada tahun 2020 terdapat peningkatan penjualan tiket sebesar 10%. Asumsi kedua yang digunakan adalah proporsi jumlah kendaraan terparkir terhadap tiket masuk. Berdasarkan data historis, proporsi jumlah motor terhadap tiket masuk adalah 18.15≈19% , sedangkan mobil sebesar 15.34%≈16%. Berdasarkan asumsi tersebut, maka proyeksi jumlah pengunjung maupun pengeloaan parkir adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Proyeksi pengunjung dan pengelolaan parkir Bukit Menumbing

	Tahun 2019	Tahun 2020
Tiket masuk	30.906	30.286
Parkir Motor	9.281	11.044
Parkir Mobil	6.878	7.978

Saat ini harga tiket masuk dihargai sebesar Rp 1.000, parkir motor Rp 1.000 dan parkir mobil Rp 3.000. Pemda dapat melakukan skenario (1) melalui penyesuaian harga, misalnya dengan menaikkan harga tiket masuk sebesar Rp 3.000 dan parkir motor sebesar Rp 2.000. Atau skenario (2) adalah dengan membebankan harga yang berbeda untuk pengunjung dewasa dan anak pada harga Rp 4.000 dan Rp 2.000 dengan proporsi pengunjung dewasa 70% dan pengunjung anak 30% sekaligus menaikkan tarif parkir motor sebesar Rp 2.000. Kontribusi terhadap PAD atas kedua skenario tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 18 Kontribusi PAD Bukit Menumbing (1)

	Kontribusi terhadap PAD			
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019 (F)	Tahun 2020 (F)
Kunjungan wisatawan	41.009.000	41.645.000	123.622800	121.145.200
Parkir motor	7.765.000	7.799.000	15.222.000	16.978.000
Parkir mobil	14.235.000	17.787.000	19.227.000	21.44.7000
Total Kontribusi	63.009.000	67.231.000	162.817.340	167.167.715

Tabel 4. 19 Kontribusi PAD Bukit Menumbing (2)

	Kontribusi terhadap PAD			
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019 (F)	Tahun 2020 (F)
Kunjungan wisatawan	41.009.000	41.645.000	105.079.380	102.973.420
Parkir motor	7.765.000	7.799.000	15.222.000	16.978.000
Parkir mobil	14.235.000	17.787.000	19.227.000	21.44.7000
Total Kontribusi	63.009.000	67.231.000	137.641.380	137.606.420

Pantai Batu Rakit

Berdasarkan proyeksi jumlah pengunjung tersebut, maka dapat dilakukan proyeksi kontribusi objek wisata Panti Batu Rakit terhadap PAD. Untuk melakukan proyeksi ini, terdapat dua asumsi yang digunakan. Pertama, karena proyeksi tersebut didasarkan pada penjualan tiket pada akhir pekan dan hari libur, dengan adanya implementasi penertiban penjualan tiket dan pengelolaan parkir yang dilakukan setiap hari pada sisa waktu di tahun 2019 ini maka diasumsikan terdapat peningkatan penjualan tiket sebesar 5% sedangkan pada tahun 2020 terdapat peningkatan penjualan tiket sebesar 10%. Asumsi kedua yang digunakan adalah proporsi jumlah kendaraan terparkir terhadap tiket masuk. Berdasarkan data historis, proporsi jumlah motor terhadap tiket masuk adalah 39.79≈40% , sedangkan mobil sebesar 18.42%≈19%. Berdasarkan asumsi tersebut, maka proyeksi jumlah pengunjung maupun pengeloaan parkir adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 20 Proyeksi pengunjung dan pengelolaan parkir Pantai Batu Rakit

	Tahun 2019	Tahun 2020
Tiket masuk	29.269	60.170
Parkir Motor	9.507	10.112
Parkir Mobil	4.516	4.803

Pemda dapat melakukan beberapa rekomendasi yang diajukan secara bersama-sama, selain melakukan penertiban penjualan tiket masuk dan pengelolaan parkir, Pemda juga dapat meningkatkan harga tiket masuk maupun pengelolaan parkir. Hingga tahun ini, harga tiket masuk sebesar Rp 1.000, sedangkan parkir motor Rp 1.000 dan parkir mobil Rp 3.000. Skenario pertama, apabila harga tiket masuk dinaikkan menjadi Rp 3.000 dan tiket parkir motor Rp 2.000 maka kontribusi tahunan menjadi seperti dibawah ini:

Tabel 4. 21 Kontribusi PAD Pantai Batu Rakit (1)

	Kontribusi terhadap PAD			
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019 (F)	Tahun 2020 (F)
Kunjungan wisatawan	27.875.000	54.700.000	117.075.000	240.680.000
Parkir motor	27.362.000	36.930.000	19.014.000	20.224.000
Parkir mobil	15.453.000	20.850.000	13.548.000	14.409.000
Total Kontribusi	70.690.000	112.480.000	149.637.000	275.313.000

Selanjutnya apabila tiket dipecah menjadi dua jenis yaitu tiket dewasa dan tiket anak dengan harga sebesar Rp 4.000 dan Rp 2.000 dan proporsi pengunjung dewasa berbanding anak adalah 70% berbanding 30% serta tiket parkir motor Rp 2.000maka kontribusi tahunan menjadi seperti dibawah ini:

Tabel 4. 22 Kontribusi PAD Pantai Batu Rakit (2)

	Kontribusi terhadap PAD			
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019 (F)	Tahun 2020 (F)
Kunjungan wisatawan	27.875.000	54.700.000	99.513.750	204.578.000
Parkir motor	27.362.000	36.930.000	19.014.000	20.224.000
Parkir mobil	15.453.000	20.850.000	13.548.000	14.409.000
Total Kontribusi	70.690.000	112.480.000	132.075.750	239.211.000

4.1.3 Potensi PAD Sektor Balai Benih Ikan

4.1.3.1 Gambaran Umum

Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Bangka Barat yang terletak di Kecamatan Kelapa, merupakan BBI Air Tawar. Luas area pembibitan yang digarap sekitar 1 hektar dari luas area keseluruhan 3 hektar. Balai benih ikan berdiri sejak tahun 2008, program pembibitan dimulai sejak tahun 2009 dan pada tahun 2012 mulai menerima pesanan benih ikan dari peternak-peternak yang ada di kabupaten bangka barat serta kabupaten lainnya. BBI ini

merupakan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan. Sehingga masyarakat menganggap BBI adalah UPT. Namun karena SK lanjutan dari Bupati Bangka Barat belum turun, sehingga sementara waktu BBI ini merupakan sebuah kegiatan dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dasar hukum pemungutan retribusi penjualan benih ikan dan ternak di Kabupaten Bangka Barat yaitu berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual. Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pasar di wilayah daerah atau sekitarnya. Adapun benih ikan yang terdapat dalam regulasi adalah Benih Ikan Mas, Benih Ikan Nila, Benih Ikan Lele, Benih Ikan Patin, Benih Ikan Bawal, Benih Ikan Gurame, dan Benih Ikan Baung. Calon indukan ikan dan Indukan Apkir sama jenisnya dengan benih ikan yang tertera pada regulasi daerah, yaitu Ikan Mas, Ikan Nila, Ikan Lele, Ikan Patin, Ikan Bawal, Ikan Gurame, dan Ikan Baung.

Harga dari tiap benih ikan yang ada pada peraturan daerah cukup bervariasi, mulai dari Rp150/ekor-Rp3000/ekor, tergantung jenis ikan dan ukuran benihnya. Harga termurah untuk benih ikan niladan lele yang berukuran 3cm yaitu Rp150, untuk ukuran 4 cm Rp175, untuk ukuran 5cm Rp200, untuk ukuran 6 cm Rp250, untuk ukuran 7cm Rp275, untuk ukuran 8cm Rp350. Sedangkan harga bibit ikan termahal yaitu bibit ikan gurame, untuk ukuran 3cm Rp1300/ekor, untuk ukuran 4cm Rp1500/ekor, untuk ukuran 5cm Rp2000/ekor, untuk ukuran 6cm Rp2500/ekor, untuk ukuran 7cm Rp2700/ekor, untuk ukuran 8cm Rp3000/ekor.

Fasilitas kolam yang dimiliki oleh BBI Kabupaten Bangka Barat antara lain:

Kolam

Kolam Beton (KB)

Tabel 4. 23 Kolam Beton

NO	NAMA KOLAM	UKURAN (M)		JUMLAH (M2)
		Panjang	Lebar	
1	Kolam Beton Resevoar (KBR.1)	62	49	3.038
2	Kolam Beton (KB.2)	41.5	40	1.660
3	Kolam Beton (KB.3)	42	26	1.092
4	Kolam Beton (KB.4)	26	20	520
5	Kolam Beton (KB.5)	29	6	174
6	Kolam Beton (KB.6)	29	6	174
7	Kolam Beton (KB.7)	42,5	26	1.105

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Bangka Barat (2019)

Kolam Tanah

Tabel 4. 24 Kolam Tanah

NO	NAMA KOLAM	UKURAN (M)		JUMLAH (M2)
		Panjang	Lebar	
1	Kolam Tanah (KT.1)	17	10	170
2	Kolam Tanah (KT.2)	9,0	10	90
3	Kolam Tanah (KT.3)	14	13	154
4	Kolam Tanah (KT.4)	7,0	7,0	49
5	Kolam Tanah (KT.5)	11,5	7,0	80,5
6	Kolam Tanah (KT.6)	17	11	187
7	Kolam Tanah (KT.7)	11,5	7,0	80,5

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Bangka Barat (2019)

Hatchery

Bak Pemijahan (HBPI)

Tabel 4. 25 Bak Pemijahan

NO	NAMA BAK	UKURAN (M)		JUMLAH (M2)
		Panjang	Lebar	
1	Hatchery Bak Pemijahan (HBPI.1)	2,0	1,0	2,0
2	Hatchery Bak Pemijahan (HBPI.2)	2,0	1,0	2,0
3	Hatchery Bak Pemijahan (HBPI.3)	2,0	2,0	4,0
4	Hatchery Bak Pemijahan (HBPI.4)	3,0	1,0	3,0
5	Hatchery Bak Pemijahan (HBPI.5)	3,0	1,5	4,5
6	Hatchery Bak Pemijahan (HBPI.6)	3,0	1,5	4,5

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Bangka Barat (2019)

Bak Pendederan (HBPE)

Tabel 4. 26 Bak Pendederan

NO	NAMA BAK	UKURAN (M)		JUMLAH
		Panjang	Lebar	(M2)
1	Hatchery Bak Pendederan (HBPE.1)	2,0	1,0	2,0
2	Hatchery Bak Pendederan (HBPE.2)	2,0	1,0	2,0
3	Hatchery Bak Pendederan (HBPE.3)	2,0	2,0	4,0
4	Hatchery Bak Pendederan (HBPE.4)	3,0	1,0	3,0
5	Hatchery Bak Pendederan (HBPE.5)	3,0	1,5	4,5
6	Hatchery Bak Pendederan (HBPE.6)	3,0	1,5	4,5
7	Hatchery Bak Pendederan (HBPE.7)	3,0	1,5	4,5

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Bangka Barat (2019)

Aquarium (AQ)

Tabel 4. 27 Bak Aquarium

NO	AQUARIUM	UKURAN (M)		JUMLAH (M2)
		Panjang	Lebar	
1	Aquarium (AQ.1)	1,0	0,5	0,5
2	Aquarium (AQ.2)	1,0	0,5	0,5
3	Aquarium (AQ.3)	1,0	0,5	0,5
4	Aquarium (AQ.4)	1,0	0,5	0,5
5	Aquarium (AQ.5)*	-	-	-

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Bangka Barat (2019)

4.1.3.2 Kendala dan Optimalisasi Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Sumbangan Retribusi dari BBI pada tahun 2017 dan 2018 terhambat, hal ini disebabkan oleh tidak adanya penjualan benih ikan. Tidak adanya penjualan benih ikan ini karena adanya beberapa kendala yang dialami oleh BBI. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, sebagian besar ikan mati disebabkan oleh kualitas air yang buruk serta dicuri, karena lokasi kolam yang masih terbuka dan belum ada pagar pembatas BBI.

Pada tahun 2013 terjadi luapan air bah yang menyebabkan aliran sungai di sekitar kolam BBI tidak dapat terkontrol (tanggul sungai jebol). Banjir ini membuat kolam-kolam yang berada diarea BBI meluap, sehingga ikan-ikan yag berada di kolam pun hanyut. Listrik di BBI merupakan bagian terpenting dari proses produksi ikan, salah satunya untuk penerangan diwaktu malam hari. Akan tetapi, kejadian yang merugikan terus saja terjadi seperti adanya petir yang menyambar sumber listrik di BBI hingga 7 kali. Saat ini hal tersebut sudah tidak menjadi kendala, karena PLN membantu memperbaiki Kwh yang tersambar dan memberi penjagaan terhadap sarana listrik yang berada di kawasan BBI.

Status BBI yang masih belum mendapat kejelasan dari Bupati, merupakan salah satu penyebab kemunduran produksi benih ikan di Kabupaten Bangka Barat. Sarana dan prasarana pendukung yang belum tersedia, seperti standar struktur kolam, sumber air yang masih kurang saat musim kemarau, pengadaan alat ukur kadar air yang belum

terpenuhi serta belum tersedianya blower air, tandon air dan pagar pembatas kolam. Harga benih yang ditetapkan pemda terlalu murah untuk beberapa jenis ikan. Saat ini di luar BBI harga benih ikan lele dengan ukuran 3-4cm Rp. 300,-. Sedangkan benih ikan lele berukuran 4,5-6 Rp500.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi penjualan benih ikan, berikut merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk merealisasikan potensi penerimaan retribusi:

a. Optimalisasi penggunaan lahan dan sarana prasarana.
b. Perbaikan kolam serta saluran pemasukan dan pengeluaran air.
c. Pengadaan peralatan kualitas air.
d. Pengadaan peralatan untuk pembenihan secara buatan (kawin suntik) bagi ikan yang berada di *hatchery.*
e. Pembangunan fisik BBI yang memperhatikan kondisi alam (pagar pengaman area kolam).
f. Fasilitas pemasaran benih ikan.
g. Peningkatan kualitas SDM perlu dilakukan untuk mendapatkan teknik yang terbarukan dalam bidang perikanan.
h. Perbaikan kebijakan dalam penetapan biaya operasional, pembelian pakan ikan dan obat-obatan untuk ikan.
i. Perbaikan kebijakan seperti penetapan harga berdasarkan mekanisme pasar

Penetapan retribusi harga yang kurang ideal akan mempengaruhi jumlah penjualan. Sebab, masyarakat cenderung mengikuti perkembangan harga yang ada di pasar. Untuk itu perlu dilakukan perumusan ulang retribusi harga BBI supaya penerimaan PAD dari sektor ini optimal, yaitu dengan melihat seberapa tinggi permintaan benih ikan yang ada di BBI, perbaikan kualitas produk, siapa saja yang akan membeli benih ikan, serta penambahan modal.

4.1.3.3 Saran dan Rekomendasi

a. Adanya kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam pembuatan lubang biopori di daerah BBI, lubang biopori sangat bermanfaat untuk pencegahan banjir saat air bah datang karena adanya resapan air yang cukup di sekitar BBI. Selain itu dapat digunakan sebagai tempat pembuangan sampah organik, dimana sampah organik tersebut dapat menjadi pupuk. Organisme yang berada di dalam tanah mampu membuat sampah menjadi mineral-mineral yang kemudian dapat larut dalam tanah sehingga kualitas air dalam tanah semakin bagus.

b. Sebaiknya BBI melakukan pencatatan kapan dimulainya indukan dan pemijahan, sehingga dapat diketahi dengan jelas kapan jadwal panen ikan dan berapa jumlah benur yang tersedia. Serta melakukan pencatatan penerimaan pesanan dan jumlah benih ikan yang terjual setiap bulannya.

c. Penetapan tarif retribusi yang ideal sebaiknya sebesar 10 persen atau kurang dari 10 persen, tarif yang mendekati harga pasar. Penetapan juga bisa dilakukan secara fleksibel sehingga mengakomodasi perubahan harga antar waktu.

4.1.4 Potensi PAD Sektor Sarang Burung Walet

4.1.4.1 Gambaran Umum

Sarang burung walet merupakan komoditi bernilai tinggi karena mengandung berbagai macam protein asam amino, mineral serta antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kandungan asam amino antara lain: asam aspartat dan prolin yang bermanfaat untuk regenerasi sel; sistein dan fenilalanin untuk meningkatkan kerja memori, kerja impuls saraf, dan kerja penyerapan vitamin D dari sinar matahari; tirosin, untuk mempercepat pemulihan setelah sakit; glukosamin untuk membantu proses pemulihan tulang rawan. Sedangkan kandungan mineral antara lain: mangan untuk membantu pertumbuhan tulang, penyembuhan luka, sekaligus melancarkan proses metabolisme karbohidrat, kolesterol, dan asam amino di dalam tubuh serta mengaktifkan dan memastikan enzim bekerja dengan baik di dalam tubuh; tembaga berperan menjaga kesehatan jantung dengan menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah serta mengoptimalkan fungsi kekebalan tubuh, serta meningkatkan produksi kolagen dalam

tubuh; kromium yang berperan membantu penyerapan nutrisi di usus; dan asupan kalsium untuk menjaga kesehatan tulang dan persendian, serta mengatur proses pembekuan darah.

Karena manfaatnya yang sangat beragam, sarang burung walet dapat diolah sebagai bahan makanan hingga campuran kosmetik. Ekspor tertinggi sarang burung walet adalah ke Hongkong dan Tiongkok yang menjadikan sarang burung walet sebagai bahan dalam makanan tradisional sejak jaman Dinasti Ming. Permintaan ini akan meningkat pada musim tertentu seperti Tahun Baru Imlek. Tren konsumsi sarang burung walet di Tiongkok menunjukkan kenaikan sejak 2014 sampai dengan 2018 dengan ekspektasi mencapai 1.000 ton pada 2019. Tingginya harga komoditi juga dipengaruhi oleh ketimpangan jumlah permintaan dan hasil produksinya karena jangka waktu panen sarang burung walet yang tidak cepat yaitu dalam satu hingga tiga bulan dengan jumlah hasil produksi yang tidak banyak.

Indonesia merupakan negara pengeskpor sarang burung walet terbesar di dunia. Secara khusus, pada tahun 2016 Tiongkok menjadi pasar utama ekspor sarang burung walet dengan persentase 73% nilai ekspor tersebut hanya US$31,74 juta, dan Indonesia menguasai 59% pasar sarang burung walet Tiongkok pada tahun 2016 dibandingkan negara lain seperti Malaysia dengan 28,6%. Pada tahun 2017, ekspor sarang burung walet Indonesia ke Tiongkok naik 175% setara dengan USD 87,4 juta atau Rp 1,5 trilyun. Negara lain sebagai tujuan ekspor sarang burung walet adalah Singapura, Amerika Serikat, Kanada, Thailand.

4.1.4.2 Potensi Penerimaan PAD Sektor Sarang Burung Walet

Berdasarkan data di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat, wajib pajak sarang burung walet terdaftar pada Februari 2019 sebanyak 95 wajib pajak (WP). Dengan diasumsikan produksi konservatif sebanyak 0,25 kg per wajib pajak setiap bulannya, dengan harga mencapai Rp 2,300,000 per kg, maka potensi penerimaan dalam satu tahun mencapai:

Potensi penerimaan sarang burung walet = 95 WP × 0.25 kg × 12 bulan × Rp 2.300.000

= Rp 655.500.000

4.1.4.3 Saran dan Rekomendasi

a. **Meningkatkan wajib pajak industri sarang burung walet.** Kontribusi sektor ini terhadap PAD dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak melalui sinergitas antar SKPD maupun bekerjasama dengan asosiasi terkait. Pemerintah desa setempat dihimbau dapat membantu melaporkan adanya kegiatan ternak burung walet di wilayah administratifnya kepada lembaga terkait seperti Dinas Pendapatan Daerah atau Direktorat Jenderal Pajak setempat. Selanjutnya, pemerintah terkait dapat mencocokkan profil perpajakan misalnya dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan profil ekonomi yang sebenarnya. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan, maka memungkinkan untuk petugas pajak melakukan langkah proaktif dalam menetapkan wajib pajak berdasar hasil identifikasi potensi pajak. Selian itu, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Asosiasi Peternak Pedangang Sarang Walet Indonesia (APPSWI) yang telah terbentuk sejak tahun 1996 telah terbentuk yang berkedudukan di Surabaya. Adanya asosiasi ini dapat membantu pemerintah dalam memetakan lokasi produsen, memproyeksikan produksi, mengidentifikasi peluang dan realisasi.
b. **Memastikan nilai realisasi produksi.** Pemerintah dapat bekerjasama dengan Bea Cukai setempat untuk memastikan jumlah berat maupun nominal rupiah dari sarang walet yang diekspor sebagai *cross check* atas produksi sehingga dapat menentukan besaran pajak yang dikenakan. Hal ini berguna untuk meminimalkan ketidakpatuhan Wajib Pajak dengan modus menurunkan harga jual dari harga aslinya, hingga tidak melapor kuantitas penjualan secara benar. 3. Identifikasi nilai potensi pajak.
c. **Memastikan kualitas ekspor.** Beberapa negara tujuan memberlakukan kriteria tertentu atas ekspor sarang burung walet asal Indonesia. Misalnya, Tiongkok yang memberlakukan syarat khusus yaitu ketelusuran (*traceability*), kebersihan dengan kandungan nitrit di bawah 30 ppm, proses pemanasan pada suhu 70°C selama 3,5 detik. Hal ini direspon oleh Kemetarian Perdagangan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 51/M-DAG/PER/7/2012 mengenai Ketentuan Ekspor Sarang Burung Walet ke Republik Rakyat China yang mensyaratkan adanya Sertifikat Nomor

Kontrol Veteriner (NKV) serta pemeriksaan fisik oleh Tim Verifikasi dan Monitoring Kebijakan Ekspor Sarang Burung Walet yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

d. **Meningkatkan produksi.** Lebih lanjut, pemerintah daerah melalui dinas peternakan setempat dapat memberikan kompensasi atas pajak yang disetorkan misalnya dengan melakukan pendampingan bisnis, pelatihan, dsb guna meningkatkan produksi sarang burung walet.

4.1.5 Potensi PAD Sektor Pelayanan Pasar

4.1.5.1 Gambaran Umum

Terdapat lima pasar di Kabupaten Bangka Barat yang tersebar di berbagai kecamatan. Kelima pasar yang dimaksud adalah Pasar Muntok, Simpang Teritip, Jebus, Parit Tiga, dan Tempilang. Dari kelima pasar tersebut, Pasar Muntok merupakan satu-satunya pasar yang sudah memiliki UPT. Hal itu wajar mengingat Pasar Muntok merupakan pasar terbesar yang paling ramai serta merupakan pasar yang terletak di ibu kota kabupaten. UPT Pasar Muntok secara teknis mengelola retribusi pasar, grosir, dan atau pertokoan di seluruh Kabupaten Bangka Barat. UPT Pasar Muntok terletak di Pasar Muntok itu sendiri di Jln. Kampung Teluk Bubiah, Kel. Tanjung, Kec. Muntok.

Pedagang di beberapa pasar Bangka Barat pada umumnya digolongkan menjadi lima jenis: petak toko/grosir, ruko, petak meja (buah, sayur, ikan, atau daging), petak PKL. Pertama, petak toko/grosir mengacu pada areal pertokoan satu lantai dengan rata-rata luas 10-50 m^2. Petak toko/grosir tersebar di berbagai titik lokasi di pasar Muntok dan pasar lainnya serta kawasan lainnya di Bangka Barat (lihat Tabel 4.24). Kedua, ruko merupakan toko yang terdiri dari dua lantai (lantai dua biasanya menjadi hunian pemilik toko). Sejauh ini baru terdapat satu kompleks ruko yang berlokasi di Pasar Baru Muntok. Kompleks ruko tersebut terdiri dari delapan buah ruko dengan luas rata-rata 48 m^2.

Ketiga, petak meja merupakan pedagang yang sifatnya semi permanen dengan meja sebagai tempat utama menjajakan jualannya. Petak meja terdiri dari para pedagang yang berjualan sayur, buah, ikan, dan/atau daging. Petak meja tidak memakan ruang yang cukup banyak, hanya menyita ruang kurang lebih 1 m2 setiap mejanya. Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan bahwa pedagang petak meja jumlahnya cukup banyak dan tersebar di

beberapa titik di Pasar Muntok dan pasar lainnya (lihat Tabel 4.24). Terakhir, pedagang yang digolongkan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan yang seharusnya diperuntukan untuk pejalan kaki. Petak PKL sejauh ini baru terdapat di Pasar Muntok yang dikelompokan menjadi Petak PKL I dan Petak PKL II yang masing-masing terdiri dari 36 unit PKL. Seperti halnya petak meja, setiap PKL hanya menyita ruang kurang lebih 1 m^2.

Besar ketetapan retribusi yang harus dibayarkan oleh masing-masing kategori pedagang di atas tentu berbeda satu sama lain. Petak meja dan PKL merupakan pedagang kecil sehingga hanya dikenakan kewajiban membayar retribusi Rp 60.000 setiap tahunnya. Berbeda dengan hal tersebut, petak toko dan ruko dikenai besaran retribusi yang lebih tinggi karena mereka pada umumnya adalah pedagang besar yang secara permanen menempati toko/rukonya. Mereka dikenakan kewajiban membayar retribusi yang beragam yaitu pada kisaran Rp 700.000 – Rp 2.200.000 setiap tahunnya. Pada umumnya retribusi dari para pedagang tersebut ditarik setiap hari agar tidak terlalu memberatkan pedagang.

Kemudian, berdasarkan hasil diskusi dengan pengelola UPT Pasar Muntok, ditemukan tiga kendala utama dalam upaya optimalisasi penarikan dan pengelolaan retribusi pasar dan pertokoan terkait. Ketiga kendala yang dimkasud adalah sebagai berikut:

a. Dari sekian banyaknya petak toko yang ada di Pasar Muntok, beberapa di antaranya masih terdapat toko yang belum ditempati (dibiarkan kosong begitu saja) seperti petak toko yang ada di Petak Eks Tin Palece Hotel Muntok yang baru terisi 29 toko dari total keseluruhan toko sejumlah 59 toko. Lebih jauh, tidak hanya terjadi pada petak toko, petak meja pun masih ada beberapa yang belum ditempati seperti petak meja daging yang baru ditempati 17 meja dari total 24 meja yang ada di Pasar Muntok. Menurut pengelola UPT, kondisi semacam itu menjadi salah satu tanda menurunnya daya beli masyarakat sekitar sehingga banyak toko/kios yang memutuskan untuk menutup usahanya. Dalam kaitannya dengan retribusi pasar, kondisi tersebut menjadi kendala utama dalam optimalisasi penerimaan retribusi pasar dan pertokoan. Artinya, hanya

toko-toko yang sudah ditempati yang dapat ditarik retribusinya sedangkan toko yang belum ditempati menjadi hilang begitu saja kemungkinan penerimaan retribusinya.

b. Ketiadaan UPT di pasar lain di Bangka Barat menjadikan pekerjaan menarik dan mengelola retribusi pasar sepenuhnya merupakan tanggung jawab UPT Pasar Muntok. Padahal, pasar-pasar lainnya berlokasi cukup jauh dengan UPT Pasar Muntok dan hal itu menjadikan upaya penarikan retribusi menjadi cukup sulit karena cakupan kerja yang terlalu luas. Seharusnya UPT Pasar Muntok bisa lebih memfokuskan dirinya pada pengelolaan retribusi pasar di Pasar Muntok saja, yang merupakan pasar terbesar di Bangka Barat, dan pasar-pasar lainnya bisa mengurus dirinya sendiri lewat UPT yang terdapat di masing-masing pasar.
c. Kekurangan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas menjadi kendala lainnya dalam upaya optimalisasi retribusi pasar dan pertokoan di Bangka Barat. Untuk bisa menarik retribusi setiap harinya kepada para pedagang, diperlukan sejumlah orang tertentu yang memadai dalam proses penarikan tersebut. Sejauh ini, diakui oleh pihak UPT Pasar Muntok dan pemda setempat bahwa tenaga penarik retribusi jumlahnya masih sangat terbatas, belum lagi mereka harus bekerja dengan jangkauan yang cukup luas meliputi Pasar Muntok dan pasar-pasar lainnya di Bangka Barat.

4.1.5.2 Potensi Penerimaan PAD Sektor Pelayanan Pasar

Potensi penerimaan PAD dari subkomponen retribusi pelayanan pasar dapat dirangkum lewat tabel 4.24. Berdasrkan tabel tersebut, apabila semua toko, kios, dan meja terisi penuh oleh pedagang maka akan diperoleh penerimaan retribusi pasar sebesar Rp216 juta. Nilai tersebut selanjutnya disebut potensi penerimaan retribusi pasar dalam setahun yang mungkin diperoleh oleh pemerintah daerah Bangka Barat. Dalam realisasinya di tahun 2018, capaian penerimaan retribusi pelayanan pasar baru sebesar Rp90 juta atau dalam hal ini sebesar 42% dari potensi yang ada tersebut. Hal itu utamanya disebabkan oleh kios, toko, dan meja belum semuanya terisi oleh pedagang sehingga basis pemungutan menjadi hilang sama sekali untuk tempat-tempat tersebut.

4.1.5.3 Saran dan Rekomendasi

a. Pembangunan UPT baru di pasar lainnya di Bangka Barat.

b. Peningkatan sumber daya manusia secara kuantitas untuk tenaga pemungut retribusi dan secara kualitas untuk meningkatkan mutu layanan pasar.

c. Pemeliharaan daya beli masyarakat oleh pemerintah daerah setempat agar pasar tetap ramai pembeli dan semua kios/ toko/ meja terisi semua.

d. Pemasaran penggunakan produk-produk lokal untuk menguasai pasar di Kabupaten Bangka Barat sendiri, seperti contohnya Program Bela Beli di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 4. 28 Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahunan

No	Jenis / Petak Meja	Ukuran (M)	Harga Ketetapan	Jumlah Petak	Realisasi 2018	Jumlah Petak Terpakai	Potensi Retribusi
1	**Petak Eks Tin Palece Hotel Muntok**	4 x 8	Rp 1,440,000.00	27	Rp 38,880,000.00	27	Rp 38,880,000.00
		4 x 4	Rp 1,080,000.00	2	Rp 2,160,000.00	2	Rp 2,160,000.00
		4 x 8	Rp 1,440,000.00	1	Rp 1,440,000.00	26	Rp 37,440,000.00
		4 x 6	Rp 1,260,000.00	0	Rp -	4	Rp 5,040,000.00
				29	**Rp 41,040,000.00**	**59**	**Rp 41,040,000.00**
2	**Petak Jl. Tanjung Kalian Muntok**	6 x 4	Rp 1,260,000.00	10	Rp 12,600,000.00	16	Rp 20,160,000.00
				10	**Rp 12,600,000.00**	**16**	**Rp 20,160,000.00**
3	**Petak Meja Sayur Pasar Muntok**	1 x 1	Rp 60,000	112	Rp 6,720,000.00	112	Rp 6,720,000.00
				112	**Rp 6,720,000.00**	**112**	**Rp 6,720,000.00**
4	**Petak Meja Ayam Pasar Muntok**	1 x 1	Rp 60,000.00	24	Rp 1,440,000.00	24	Rp 1,440,000.00
				24	**Rp 1,440,000.00**	**24**	**Rp 1,440,000.00**
5	**Petak Meja Ikan Pasar Muntok**	1 x 1	Rp 60,000.00	91	Rp 5,460,000.00	112	Rp 6,720,000.00
				91	**Rp 5,460,000.00**	**112**	**Rp 6,720,000.00**
6	**Petak Meja Daging Sapi Pasar Mtk**	1 x 1	Rp 60,000.00	17	Rp 1,020,000.00	24	Rp 1,440,000.00
				17	**Rp 1,020,000.00**	**24**	**Rp 1,440,000.00**
7	**Petak Jln Kemakmuran Pasar Mtk**	7,45 x 4	Rp 1,260,000.00	1	Rp 1,260,000.00	1	Rp 1,260,000.00
		7,4 X 4	Rp 1,260,000.00	1	Rp 1,260,000.00	1	Rp 1,260,000.00
		7,45 X 3	Rp 1,260,000.00	2	Rp 2,520,000.00	2	Rp 2,520,000.00

		7,4 X 2,85	Rp	1,260,000.00	1	Rp	1,260,000.00	1	Rp	1,260,000.00
		7,4 X 3,1	Rp	1,260,000.00	1	Rp	1,260,000.00	1	Rp	1,260,000.00
		3,5 X 3,5	Rp	900,000.00	9	Rp	8,100,000.00	9	Rp	8,100,000.00
		3,8 X 4	Rp	1,080,000.00	1	Rp	1,080,000.00	1	Rp	1,080,000.00
		3,8 X 3,65	Rp	1,080,000.00	1	Rp	1,080,000.00	1	Rp	1,080,000.00
		3,8 X 3,5	Rp	1,080,000.00	7	Rp	7,560,000.00	7	Rp	7,560,000.00
		3,8 X 3,65	Rp	1,080,000.00	1	Rp	1,080,000.00	1	Rp	1,080,000.00
		3,8 X 3,85	Rp	1,080,000.00	1	Rp	1,080,000.00	1	Rp	1,080,000.00
					26	**Rp**	**27,540,000.00**	**26**	**Rp**	**27,540,000.00**
8	**Petak Jln. Ahmad Yani Pasar Mtk**	8 x 4	Rp	1,440,000.00	12	Rp	17,280,000.00	12	Rp	17,280,000.00
		8 x 6	Rp	1,620,000.00	2	Rp	3,240,000.00	2	Rp	3,240,000.00
					14	**Rp**	**20,520,000.00**	**14**	**Rp**	**20,520,000.00**
9	**Petak Ruko Pasar Baru Muntok**	6 X 8	Rp	2,520,000.00	8	Rp	20,160,000.00	8	Rp	20,160,000.00
					8	**Rp**	**20,160,000.00**	**8**	**Rp**	**20,160,000.00**
10	**Petak MS.Rachman Pasar Muntok**	5 x 3	Rp	1,080,000.00	5	Rp	5,400,000.00	5	Rp	5,400,000.00
		22,5	Rp	1,260,000.00	1	Rp	1,260,000.00	1	Rp	1,260,000.00
		2,5 x 3	Rp	720,000.00	1	Rp	720,000.00	1	Rp	720,000.00
		4,5 x 3,25	Rp	1,080,000.00	7	Rp	7,560,000.00	7	Rp	7,560,000.00
					14	**Rp**	**14,940,000.00**	**14**	**Rp**	**14,940,000.00**
11	**Petak Yos Sudarso**	6,25 x 20	Rp	2,160,000.00	1	Rp	2,160,000.00	1	Rp	2,160,000.00
		92,95	Rp	1,980,000.00	1	Rp	1,980,000.00	1	Rp	1,980,000.00

					2	**Rp**	**4,140,000.00**	**2**	**Rp**	**4,140,000.00**
12	**Petak PKL I Pasar Muntok**	1 x 1	Rp	60,000.00	36	Rp	2,160,000.00	36	Rp	2,160,000.00
					36	**Rp**	**2,160,000.00**	**36**	**Rp**	**2,160,000.00**
13	**Petak PKL II Pasar Muntok**	1 x 1	Rp	60,000.00	35	Rp	2,100,000.00	36	Rp	2,160,000.00
					35	**Rp**	**2,100,000.00**	**36**	**Rp**	**2,160,000.00**
14	**Petak Toko Pasar Baru Muntok**	3 x 4	Rp	900,000.00	18	Rp	16,200,000.00	30	Rp	27,000,000.00
					18	**Rp**	**16,200,000.00**	**30**	**Rp**	**27,000,000.00**
15	**Meja Buah/Sayur Pasar Muntok**	0,70 x 1,5	Rp	63,000.00	35	Rp	2,205,000.00	40	Rp	2,520,000.00
					35	**Rp**	**2,205,000.00**	**40**	**Rp**	**2,520,000.00**
	Jumlah				**471**	**Rp**	**178,245,000.00**	**553**	**Rp**	**198,660,000.00**
16	**Meja Ikan Pasar Simpang Teritip**	1 x 1	Rp	60,000.00	9	Rp	540,000.00	45	Rp	2,700,000.00
					9	**Rp**	**540,000.00**	**45**	**Rp**	**2,700,000.00**
17	**Petak Toko Pasar Jebus**	3,3 x 5	Rp	1,080,000.00	3	Rp	3,240,000.00	5	Rp	5,400,000.00
	Petak Toko Pasar Baru Jebus	5 x 3	Rp	1,080,000.00	2	Rp	2,160,000.00	20	Rp	21,600,000.00
	Meja Sayur Pasar Jebus	2 x 1	Rp	120,000.00	3	Rp	360,000.00	12	Rp	1,440,000.00
	Meja Ikan Pasar Jebus	1 x 1	Rp	60,000.00	1	Rp	60,000.00	1	Rp	60,000.00
		1 x 1,5	Rp	90,000.00	6	Rp	540,000.00	6	Rp	540,000.00
		1 x 2	Rp	120,000.00	5	Rp	600,000.00	5	Rp	600,000.00
		1 x 3	Rp	180,000.00	4	Rp	720,000.00	4	Rp	720,000.00
					24	**Rp**	**7,680,000.00**	**53**	**Rp**	**30,360,000.00**
18	**Meja Ikan Pasar Parit Tiga**	1 x 2,5	Rp	150,000.00	32	Rp	4,800,000.00	32	Rp	4,800,000.00

	Meja Ikan / Sayur Pasar Parit Tiga	1 x 1,2	Rp 90,000.00	0	Rp -	112	Rp 10,080,000.00
				32	**Rp 4,800,000.00**	**144**	**Rp 4,800,000.00**
19	**Petak Toko Pasar Tempilang**	4 x 5	Rp 1,080,000.00	23	Rp 24,840,000.00	25	Rp 27,000,000.00
				23	**Rp 24,840,000.00**	**25**	**Rp 27,000,000.00**
	Jumlah			**88**	**Rp 37,860,000.00**	**267**	**Rp 64,860,000.00**
	Jumlah Seluruhnya			**559**	**Rp216,105,000.00**	**820**	**Rp 263,520,000.00**

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, data diolah

4.1.6 Potensi PAD Sektor Perhotelan

Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh kabupaten. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat no 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait yang dipungut bayaran. Definisi hotel dalam Perda tersebut mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sedangkan pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan fasilitas hotel tersebut. Fasilitas yang dimaksud meliputi pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, seperti telepon, internet, pelayanan cuci, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya. Pengenaan pajak ini dibebankan kepada konsumen selaku subyek pajak, namun pembayarannya dilakukan oleh orang pribadi atau Badan pemilik hotel.

Besaran tarif pajak hotel di dalam peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat no 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah disebutkan yakni sebesar 10 persen dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar konsumen kepada hotel. Namun berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan tim surveyor di beberapa hotel, menunjukkan bahwa besaran pajak yang dibayarkan oleh hotel jauh dibawah nilai potensinya. Bahkan ada beberapa hotel yang tidak membayar pajak. Pada umumnya penyebab kecilnya pajak hotel karena semakin sepinya pengunjung di beberapa tahun terakhir ini akibat dari jatuhnya PT Timah. Selain itu, beberapa pengelola hotel mengutarakan bahwa pengunjung hotel atau penginapan di Bangka Barat mayoritas merupakan tamu pemda, dan hampir seluruhnya diarahkan atau dipesankan menginap di hotel tertentu. Disamping hal tersebut, beberapa pengelola hotel juga mengeluhkan persentase pajak hotel yang terlalu tinggi ditengah lesunya kondisi bisnis hotel di Kab. Bangka Barat. Permasalahan-permasalahan tersebutlah yang menimbulkan disinsentif bagi

pengelola hotel untuk membayar pajak. Berikut hasil perhitungan potensi pajak hotel berdasarkan hasil survey oleh tim surveyor.

Tabel 4. 29 Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Bangka Barat tahun 2019

No	Nama	Jumlah Penerimaan	Tarif Pajak	Potensi pajak	Realisasi pajak 2018*	potensi kenaikan pajak
1	A	194.083.324,20	10%	19.408.332,42	-	-
2	B	130.539.997,56	10%	13.053.999,76	1.631.460	700%
3	C	363.166.005,03	10%	36.316.600,50	10.479.237	247%
4	D	141.680.000,00	10%	14.168.000,00	370.000	3729%
5	E	156.567.278,40	10%	15.656.727,84	505.450	2998%
6	F	745.555.562,40	10%	74.555.556,24	8.712.000	756%
7	G	424.080.000,00	10%	42.408.000,00	4.391.000	866%
8	H	4.675.000,00	10%	467.500,00	-	-
9	I	92.136.364,20	10%	9.213.636,42	140.000	6481%
10	J	2.466.315.953,13	10%	246.631.595,31	39.837.475	519%
11	K	507.532.304,32	10%	50.753.230,43	5.542.000	816%
12	L	195.753.673,06	10%	19.575.367,31	1.252.000	1464%
13	M	405.187.500,00	10%	40.518.750,00	5.370.000	655%
			Jumlah	**582.727.296,23**	**78.230.622**	**645%**

Sumber : Data observasi survei dan data realisasi pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, data diolah
*Data diolah dari data realisasi pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Tabel tersebut menunjukkan potensi pajak hotel di Kab. Bangka Barat jauh diatas realisasi pajak hotel di tahun 2018. Potensi pajak terbesar diduduki Hotel J yakni sebesar Rp 246.631.595, namun realisasi pajaknya pada tahun 2018 hanya mencapai Rp 39.837.475. Sedangkan potensi pajak terendah diduduki Hotel H yakni senilai Rp 467.500. Jika dilihat dari kemungkinan potensi kenaikan pajaknya, persentase terbesar yakni Hotel I yakni mencapai 6.481 persen dari realisasi 2018. Sedangkan potensi kenaikan pajak terkecil yakni Hotel C yang mencapai 247 persen dari realisasi 2018. Secara keseluruhan potensi kenaikan pajak hotel dibandingkan dengan penerimaan pajak 2018 dapat mencapai 645 persen. Melihat besarnya potensi tersebut, diharapkan dengan melakukan beberapa kebijakan

dan tindakan yang dilakukan oleh Pemda dapat berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak hotel. Seperti penggiliran penggunaan hotel untuk tamu Pemda, peningkatan pemasaran sektor pariwisata yang dimungkinkan untuk menunjang peningkatan pengunjung hotel, ataupun jika perlu dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang terus-menerus tidak membayarkan pajak. Pemda juga dapat melakukan inovasi dengan memasang *tapping device machine* atau *tapping box* di beberapa hotel yang potensial, mesin tersebut merupakan alat perekam transaksi yang berfungsi untuk menangkap semua transaksi yang terjadi, seperti yang telah dilakukan di Kota Magelang. Alat tersebut juga dapat dipasang pada restoran dan tempat hiburan untuk mencatat setiap transaksi.

Berikut gambaran kondisi hotel atau penginapan yang telah tim survei kunjungi:

a. Hotel Yasmin

Hotel Yasmin resmi berdiri pada tahun 2015. Hotel ini menawarkan berbagai pilihan jenis kamar: *standard, superior, deluxe, dan executive deluxe.* Total kamar yang dimiliki hotel ini sebanyak 28 kamar. Tamu yang datang ke hotel ini masih didominasi oleh tamu dinas yang sedang bertugas di daerah setempat. Jumlah tamu dari kalangan wisatawan masih relatif terbatas mengingat pariwisata di wilayah Kab. Bangka Barat belum terlalu berkembang. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah bahwa hunian hotel ini mengalami masa-masa sepinya pada hari libur *(weekend)* dan hari kerja merupakan masa ramai. Untuk lebih menarik minat pengunjung, hotel ini menyediakan pula fasilitas pendukung yang masih menjadi unit usaha dari hotel yang bersangkutan seperti restoran dan jasa cuci & setrika pakaian. Hotel ini merupakan pesaing utama dari Hotel Pasadena yang telah berdiri lebih dahulu. Dibandingkan dengan Hotel Pasadena, hotel ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kelebihan utama dari hotel ini adalah lokasinya yang strategis karena terletak di wilayah perkotaan Muntok sehingga memudahkan tamu hotel dalam mengakses fasilitas penunjang seperti rumah makan dan restoran. Meskipun begitu, dibandingkan dengan Hotel Pasadena,

hotel ini memiliki kelemahan yakni ketiadaan ruang pertemuan yang biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan pemerintah daerah setempat.

b. Penginapan Kita

Penginapan Kita menempati lokasi yang cukup strategis karena terletak di pinggir jalan raya Tanjung Kalian, jalan utama menuju Pelabuhan dan Pantai Tanjung Kalian. Penginapan ini menawarkan dua jenis kamar: Full AC dan Non-AC, dengan total kamar sejumlah 11 kamar. Pihak pemilik penginapan ini juga memiliki kontrakan sebanyak 8 kamar dengan lokasi yang bersebelahan dengan penginapan terkait. Dalam beberapa tahun terakhir, penginapan ini mengalami penurunan hunian kamar yang cukup drastis. Hal itu salah satunya disebabkan oleh sektor pariwisata yang dinilai belum terlalu berkembang dan perekonomian yang belum semaju kabupaten/kota lainnya sehingga daya tarik pengunjung relatif rendah. Penginapan ini hanya mengandalkan tamu dari kalangan salesman yang sedang melakukan promosi produknya di wilayah setempat selama beberapa hari tertentu. Pihak pengelola berniat menutup usaha penginapan tersebut karena jumlah hunian yang semakin berkurang.

c. Penginapan EBF Global

Penginapan EBF Global merupakan salah satu penginapan di Muntok, Bangka Barat, merupakan penginapan yang terdekat dengan kompleks perkantoran pemerintah daerah setempat. Seperti halnya Penginapan Kita, penginapan ini menawarkan dua pilihan kamar: Full-AC dan Non-AC, dengan total kamar sebanyak 10 kamar. Penginapan ini melarang keras pasangan tamu yang bukan suami istri untuk menginap dalam satu kamar yang sama. Lebih jauh, penginapan ini pernah disurvei pula oleh pihak MUI berkat komitmennya dalam menyediakan jasa penginapan yang sesuai dengan Syariah Islam. Sama halnya dengan Penginapan Kita, penginapan ini juga mengandalkan tamu dari kalangan *salesman* yang sedang melakukan promosi produk di wilayah Muntok dan sekitarnya. Pihak pengelola mengeluhkan kondisi perekonomian setempat yang sedang mengalami kelesuan, utamanya karena masa-masa kejayaan timah sudah berakhir. Hal tersebut dinilai

oleh pihak pengelola berdampak pada keberlangsungan bisnis penginapan dan bisnis di sektor lainnya.

d. Hotel Berkah Kalian

Hotel Berkah Kalian didirikan pada tahun 2004. Terletak di jalan Kalian no 132, Muntok, Bangka Barat. Memiliki kamar sejumlah 30 dan ada 4 jenis kamar yang disediakan yaitu *Family Room*, *Superior Room*, *Standard Room*, dan Ekonomi Room. Letak Hotel Berkah Kalian sendiri tidak jauh dari tempat wisata Pantai Batu Kalian, Pelabuhan Tanjung Kalian, Pantai Tanjung Kalian, dan Pantai Batu Berani. Menurut narasumber (Akon; 2019), beliau mengatakan bahwa hotel ini berada di daerah transit bukan merupakan daerah tujuan sehingga banyak tamu yang singgah hanya sebentar. Putaran Jalan atau potongan trotoar yang disediakan oleh pemda berada kurang lebih 500m dari Hotel, lampu penerang jalan juga tidak ada. Sehingga hal tersebut membuat orang yang datang dari pelabuhan terkadang enggan putar balik dan lebih memilih untuk mencari hotel yang berada di pusat Kota Muntok.

e. Penginapan Arwana

Penginapan Arwana berdiri sejak tahun 2000 memiliki 18 Kamar, terletak di jalan utama Muntok. Akan tetapi, tempat tersebut belum membuat penginapan Arwana ramai setelah turunnya harga timah. Menurut narasumber (Hendra; 2019), perusahaan timah yang berada di kabupaten bangka barat dianggap sangat berpengaruh dengan tingkat kunjungan di penginapan Arwana. Dalam dua tahun terakhir, penginapan tertolong dengan para sales yang menginap di Arwana. Ada juga tamu dari pemda kecamatan, namun tidak setiap waktu mereka tugas dinas menginap di Arwana. Menurut narasumber, pajak yang dibayar sangat memberatkan karena penentuan jumlah tarif pajak 10 persen yang sepihak. Pihak pengusaha hotel hanya ditagih oleh pemda tanpa ada runding terlebih dahulu antara pengusaha penginapan dan pemda dalam penentuan tarif pajak. Pengusaha tentu akan lebih legowo dalam membayar pajak jika ada runding terlebih dahulu dengan pihak pemda, misalnya dengan dibedakannya tarif hotel,

motel, penginapan, homestay dan lain sebagainya karena tingkat kunjungan tiap jenis penginapan berbeda.

f. Sampurna Cipta

Penginapan sampurna cipta didirikan pada tahun 2012, namun sekarang sebagian kamarnya berubah menjadi kontrakan dalam rangka bertahan ditengah lesunya perekenomian di Kabupaten Bangka Barat. Menurut narasumber (Deni; 2019), penginapan ini sepi karena tingkat harga pesawat yang tinggi, selain itu pemda tidak sesering dulu dalam menyewa fasilitas yang ada di sampurna cipta. Menurutnya, objek wisata yang berada di Kabupaten Bangka Barat juga belum maksimal. Selain itu, pihak penginapan juga mengharapkan Pemda Kabupaten Bangka Barat dapat menggilir pengunjung pada tiap hotel/penginapan.

g. Hotel Andhika

Hotel Andika didirikan sejak tahun 1980an. Penginapan ini menjadi sepi sejak PT. Timah melemah. Letaknya tidak jauh dari kantor PT. Timah di kecamatan Muntok. Hotel ini dikelola oleh keluarga sehingga tidak memiliki karyawan. Pemilik hotel berharap akan adanya penerangan jalan di sekitar hotel, karena selama ini hanya menggunakan penerangan pribadi. Artinya pemda belum maksimal dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat. Selain itu, pemilik mengaku susahnya regulasi dalam meminjam dana ke bank.

h. Penginapan Pegagan

Hotel Pegagan mulai beroperasi pada tahun 2009. Dengan total kamar sebanyak 12 kamar. Penginapan ini sempat ramai di kunjungi tamu di tamu di tahun 2010 – 2011, yang mayoritas adalah pedagang. Namun semenjak harga timah menurun tamu yang berkunjung di Penginapan Pegagan pun semakin berkurang, terutama di mulai tahun 2018. Oleh karena itu, selain penginapan pemilik penginapan juga mengembangkan bisnis lain seperti rumah makan dan juga jasa laundry, walaupun berdasarkan penuturan pemilik penginapan pemasukan dari rumah makan maupun laundry juga tidak besar. Selain itu pemilik penginapan juga mengeluhkan tentang penetapan pajak hotel yang terlalu tinggi yang cenderung membebani

pengusaha, dan juga membuat pengusaha cenderung menutup-nutupi jumlah tamu yang menginap.

i. Penginapan Sandy Ayu

Penginapan Sandy mulai dijalankan semenjak tahun 2014. Penginapan ini berlokasi di area Pasar Muntok sehingga dekat dengan keramaian. Hal ini pula ynag menarik tamu untuk menginap di Penginapan Sandy karena selain lokasinya yang strategis juga karena harga sewa penginapan yang tidak terlalu mahal dibandingkan dengan penginapan-penginapan lainnya dan terdapat beberapa pilihan kamar. Namun demikian karna kuantitas kamarnya tidak banyak yakni hanya sejumlah 9 kamar, sehingga dikelola sendiri oleh keluarga. Berdasarkan penuturan pemilik pengnapan, penginapan ini hampir selalu ada tamu, walaupun hanya 1 atau 2 kamar saja yang disewa. Namun tidak jarang pula seluruh kamar terisi semua.

j. Hotel Pasadena

Hotel Pasadena dibangun di tahun 2010 dengan kamar hotel sebanyak 16 kamar. Pada tahun 2013 dibanguan 10 kamar baru sehingga total kini menjadi 26 kamar, dengan 22 kamar yang dapat disewakan. Aktifitas Hotel Pasadena mengikuti sikus Keuangan Pemda, karena pengunjung hotel tersebut mayoritas dari Pemda. Munculnya pesaing di tahun 2015 membuat pemasukan bagi hotel pasadena menjadi semakin menurun, sehingga dibuatlah *meeting room* dan family karaoke untuk menutup penurunan kunjungan tersebut. Selain penyewaan kamar hotel fasilitas lain yang disediakan oleh Pasadena hotel yakni *meeting room*, family karaoke, dan restoran.

k. Hotel Taman Dukuh

Hotel ini berada di Kecamatan Parittiga, Dusun Puput Atas. Hotel ini dimiliki oleh Bapak Sudiron dan dikelola oleh keluarga besarnya. Hotel ini berdiri 12 tahun yang lalu. Fasilitas yang dimiliki hotel ini adalah restoran dan ruang pertemuan. Hotel ini memiliki 16 kamar. Terdiri dari 6 kamar biasa tanpa AC dengan tarif Rp 100.000 per malam dan 10 kamar ber-AC dengan tarif Rp 200.000 per malam. Hotel ini memiliki ruang pertemuan dengan tarif antara Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000 sesuai kesepakatan penyewa dan pemilik hotel. Tenaga kerja yang membantu hotel ini

ada 1 orang. Sejumlah tenaga kerja lainnya adalah keluarga besar yang ikut andil di dalamnya.

l. Penginapan Sederhana

Penginapan ini berlokasi di Jl. SD Desa Puput, Kecamatan Parittiga. Tarif kamar yang dtawarkan yaitu, Rp80.000 per malam untuk kamar biasa sebanyak 16 kamar dan Rp100.000 per malam untuk kamar ber-AC sebanyak 3 kamar. Bila sepi, jumlah kamar yang terisi hanya 2 kamar. Saat hari biasa atau normal, kamar yang terisi berjumlah 6 kamar, dan bila ramai hingga 10 kamar. Kondisi ramai terjadi biasanya saat ada event tertentu.

m. Penginapan Asia

Penginapan ini berada di Jalan Kecubung, Desa Puput, Kecamatan Parittiga. Penginapan ini memiliki 26 kamar. Dengan tarif Rp80.000 per malam berjumlah 4 kamar, tarif Rp150.000 per malam berjumlah 6 kamar, dan tarif Rp300.000 per malam sebanyak 16 kamar. Kondisi keterisian kamar dipengaruhi antara lain oleh pendapatan masyarakat lewat pertambangan timah. Bila pertambangan tidak beroperasi, maka efek yang dirasakan oleh penginapan ASIA sangat sedikit.

4.1.7 Potensi PAD Sektor Kafe dan Restoran

Pemungutan pajak restoran di Kabupaten Bangka Barat mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat no 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang menyebutkan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman berbayar, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sama seperti pajak hotel, pengenaan pajak ini dibebankan kepada konsumen selaku subyek pajak, namun pembayarannya dilakukan oleh orang pribadi atau Badan pemilik restoran. Besar tarif pajak hotel sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat no 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah disebutkan yakni sebesar 10 persen. Namun, berdasarkan perhitungan hasil survei yang telah dilakukan didapatkan bahwa potensi restoran di Kabupaten Bangka Barat jauh lebih tinggi

dari realisasi pajaknya. Bahkan ada beberapa restoran yang tidak membayar pajak pada tahun 2018.

Kemungkinan penyebab semakin menurunnya pengunjung restoran yang berdampak semakin kecilnya pajak restoran yang masuk ke Pemda adalah lesunya perekonomian di Bangka Barat. Perekonomian di Kabupaten Bangka Barat betumpu pada aktifitas bisnis PT Timah, sehingga ketika kondisi bisnis PT Timah yang saat ini kian menurun maka perekonomian di Bangka Barat juga ikut menurun. Walaupun secara ilmiah belum ada kejelasan apakah kelesuan perekonomian tersebut erat kaitannya dengan berakhirnya masa kejayaan timah di Bangka Barat atau tidak. Permasalahan tersebut juga mempengaruhi daya beli masyarakat yang cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan primeer dibanding dengan kebutuhan tersier seperti mencari hiburan dengan berkunjung ke kafe. Kondisi ini sama seperti kasus pajak hotel yang dibahas sebelumnya. Berikut perhitungan potensi berdasarkan hasil observasi tim survei.

Tabel 4. 30 Perhitungan Potensi Pajak Restoran Kabupaten Bangka Barat tahun 2019

No	Nama	Jenis	Rerata Pengeluaran Pengunjung	Tarif Pajak	Potensi Pajak	Realisasi Pajak 2018*	Potensi Kenaikan Pajak
1	A	Cafe	50.000,00	10%	81.300.000,00	1.900.000	4179%
2	B	Food Court	12.500,00	10%	8.125.000,00	1.912.500	325%
3	C	Cafe	20.000,00	10%	20.340.000,00	2.700.000	653%
4	D	Cafe	30.000,00	10%	44.250.000,00	2.400.000	453%
5	E	Cafe	30.000,00	10%	21.765.000,00	-	
6	F	Restoran	125.000,00	10%	87.600.000,00	9.261.334	846%
7	G	Cafe	10.000,00	10%	3.825.000,00	400.000	91%
8	H	Cafe	30.000,00	10%	27.045.000,00	-	
9	I	Restoran	20.000,00	10%	22.660.000,00	3.100.000	631%
10	J	Cafe	50.000,00	10%	49.825.000,00	1.400.000	3459%
11	K	Cafe	125.000,00	10%	19.872.000,00	-	
				Jumlah	**323.814.000,00**	**23.073.834**	**1303%**

Sumber : Data observasi survei dan data realisasi pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, data diolah

*Data diolah dari data realisasi pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Tabel diatas menunjukkan potensi pajak restoran di Kab. Bangka Barat berdasarkan perhitungan hasil survei. Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi pajak restoran di tahun 2018 jauh dibawah potensi yang ada, sehingga masih banyak kemungkinan terjadinya peningkatan penerimaan pajak restoran pada tahun 2019. Potensi pajak terbesar berdasarkan hasil perhitungan survei yakni Restoran F sebesar Rp 87.600.000. hal ini sesuai dengan realisasi pajaknya yang juga tertinggi dibandingkan restoran lainnya. Sedangkan potensi pajak terendah yakni Restoran G yakni senilai Rp 3.825.000, realisasi pajaknya juga rendah yakni sebesar 400.000 pada tahun 2018. Persentase realisasi terbesar yakni Restoran B sebesar 24 persen dari potensi. Jika dilihat dari potensi kenaikan pajaknya, kenaikan pajak terbesar mencapai 4179 persen yakni di Café 74. Sedangkan persentase potensi kenaikan pajak terkecil yaitu Slow Rock Café, sebesar 91 persen. Secara keseluruhan potensi kenaikan pajak hotel dibandingkan dengan penerimaan pajak 2018 dapat mencapai 1303 persen. Tentunya dengan melakukan usaha seperti pembuatan kebijakan dan tindakan yang perlu dilakukan oleh Pemda, seperti jemput bola untuk penagihan pajak restoran per bulannya, pemasaran kuliner khas Bangka Barat, ataupun jika perlu dengan memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak.

Berikut gambaran kondisi restoran yang telah tim survei kunjungi:

a. Restaurant Yasmin

Restoran ini memiliki jam operasional yang dimulai sejak pukul 10.00 hingga pukul 23.00 dengan jumlah meja 12 dan jumlah kursi 38. Restoran ini didirikan bersamaan dengan hotel yasmin yaitu pada tahun 2015. Restoran yasmin menyediakan sarapan gratis untuk dua orang penginap dan juga menyediakan sarapan gratis untuk satu orang penginap extra bed. Restoran ini masih relatif sepi, jika hotel tidak ada kunjungan konsumen. Sepinya restoran disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat bahwa restoran yasmin melayani masyarakat umum, bukan hanya pengunjung yang meninap di hotel yasmin.

b. Teras Berase Café

Kafe ini berlokasi di tempat yang cukup strategis karena tepat berada di dekat patung Soekarno-Hatta di Jalan Jenderal Soedirman. Wilayah tersebut merupakan salah satu titik keramaian di Muntok, Bangka Barat. Kafe ini beroperasi pada jam 10.00 hingga 00.00 WIB, dengan menyasar pelanggan dari kalangan generasi milenial yang tinggal di sekitar Muntok. Kafe ini dirancang sedemikian rupa sehingga suasananya menjadi sangat kekinian. Dengan begitu, kalangan anak muda menjadi semakin tertarik untuk datang dan 'nongkrong' di kafe ini. Selain itu, menu yang ditawarkan di kafe ini cukup variatif dan telah disesuaikan dengan perkembangan dunia kuliner yang ada sekarang ini. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, diakui oleh pihak pengelola bahwa kafe sekarang ini semakin sepi pengunjung. Pihak pengelola meyakini hal itu disebabkan oleh lesunya perekonomian setempat yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat sekitar. Berdasarkan pemaparan dari pengelola, selama ini pihaknya telah berupaya keras untuk meningkatkan kembali kunjungan ke kafe tersebut salah satunya dengan membuka gerai pakaian anak muda-mudi di depan kafe. Hal itu diharapkan akan mengundang generasi milenial untuk membeli dan pada akhirnya berkunjung ke kafe tersebut. Meskipun begitu, upaya tersebut dirasakan tidak terlalu efektif dalam menarik pengunjung dan kafe tetap dalam situasi sepi pengunjung. Akibatnya, pengelola mengungkapkan bahwa kafe Teras Berase ini akan segera ditutup dan akan pindah lokasi ke Bogor, Jawa Barat.

c. Slow Rock Café

Kafe Slow Rock berlokasi di Jalan Tebing Gadai. Lokasi tersebut tidak jauh dari Hotel Yasmin dan Pasar Muntok. Kafe yang buka pada pukul 08.00 hingga 00.00 WIB ini pada beberapa tahun terakhir juga mengalami penurunan pengunjung yang cukup drastis. Berdasarkan pengakuan dari pihak pengelola, 2016-2017 merupakan masa-masa kejayaan kafe ini. Seiring dengan meningkatnya kepopuleran kafe ini, menu-menu pun semakain beragam untuk terus menarik pelanggan dari kalangan generasi muda. Akan tetapi, pada setahun terakhir ini kafe ini hanya menyediakan menu sederhana seperti teh, kopi, dan nasi goreng saja. Hal itu menunjukan bahwa pihak pengelola tidak mau mengambil risiko

dengan menyediakan banyak menu, tetapi pengunjung yang datang sedikit. Sejauh ini kafe ini bertahan dengan menyasar kalangan anak muda yang gemar bermain game online dengan jalan menyediakan akses wi-fi, setidaknya kafe ini tidak kehilangan pelanggan sama sekali di tengah-tengah kelesuan ekonomi wilayah setempat. Pengelola mengharapkan pihak Pemda menagih secara rutin pajak tersebut sesuai dengan janji pihak Pemda salama ini untuk menagih secara rutin.

d. Coffee Break Café

Kafe Coffee Break berlokasi di Kampung Sungai Daeng, Muntok, tepatnya di Jalan Imam Bonjol. Sesuai dengan namanya, kafe ini lebih banyak menawarkan menu minuman kopi berbagai variasi rasa dan dilengkapi dengan menu makanan ringan yang cocok diminum dengan kopi. Kafe ini buka pada pukul 10.30 hingga 00.00 WIB, dan mulai ramai dikunjungi oleh para anak muda pada sore hingga malam hari. Berbeda dengan kafe lainnya, kafe ini tidak mengalami penurunan pengunjung yang cukup drastis pada kurun waktu terakhir.

e. Pal 2 Café

Kafe ini terletak di Jalan Raya Pal 2 Muntok. Di bulan puasa Kafe ini beroperasi mulai pukul 14.00 hingga 22.00, sedangkan di luar bulan puasa pada pukul 11.00 hingga 23.00 WIB. Perkembangan bisnis kafe cukup bagus, karena berdasarkan pemaparan pengelola tidak ada penurunan jumlah pengunjung dalam beberapa bulan terakhir. Penurunan di bulan Ramadhan diakuainya wajar mengingat sebagian orang sedang berpuasa. Dibandingkan kafe lainnya, kafe ini merupakan kafe yang masih berani menawarkan banyak variasi menu makanan dan minuman. Hal tersebut tentunya didasarkan pada kenyataan bahwa kafe masih dan diharapkan akan selalu ramai pengunjung dengan asumsi ‘business as usual’. Lokasi kafe yang tepat berada di pinggir jalan menjadikan orang-orang tidak kesulitan menemukan kafe ini. Selain itu, beberapa furniture di kafe yang cukup kekinian menjadikan kafe ini semakin menarik pengunjung dan pada akhirnya kafe relatif cukup ramai.

f. Al-Café Cafe

Kafe Al-Café terletak di Jalan Golf dekat dengan Penginapan EBF Global. Kafe ini cukup populer di Muntok karena pada awal-awal berdirinya di tahun 2014 kafe ini merupakan satu-satunya kafe yang menyediakan live music sebagai daya tarik pengunjung. Akan tetapi, sama halnya dengan mayoritas kafe yang ada di Muntok, kafe ini mengalami penurunan jumlah pengunjung. Berdasarkan pengakuan dari pihak pengelola, ada dua alasan penurunan pengunjung tersebut. Pertama, alasan teknis. Beberapa minggu terakhir, akses wi-fi di kafe ini terputus dengan alasan pihak Telkom hendak memperbaiki aksesibilitasnya. Akan tetapi, pihak Telkom tidak segera memperbaiki akses wi-fi tersebut. Penurunan pengunjung pada akhirnya tidak dapat dihindarkan lagi mengingat akses internet merupakan fitur pendukung yang cukup vital di jaman sekarang ini. Kedua, alasan penurunan daya beli masyaraka, senada dengan keluhan pengelola kafe lainnya. Pengelola kafe merasakan bahwa sekarang ini masyarakat lebih berhemat dalam berkonsumsi. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan primer seperti membeli bahan makanan pokok dan kemudian memasaknya sendiri di rumah. Hal itu diyakini lebih bisa menghemat uang dibandingkan harus membeli makanan siap saji di kafe.

g. Rumah Makan Taman Dukuh

Restoran ini berlokasi di Hotel Taman Dukuh di Kecamatan Parittiga Dusun Puput Atas. Seperti Hotel Taman Dukuh, restoran ini dimiliki oleh Bapak Sudiron. Restoran ini buka dari jam 09.30 sampai jam 21.00 WIB. Saat puasa atau hari sepi, jumlah konsumen sebanyak 20 orang. Pada hari Senin-Jumat, jumlah konsumen sebanyak kurang lebih 30 orang dan pada hari Sabtu dan Ahad berjumlah hingga 50 orang. Konsumen biasanya menghabiskan sekitar Rp 20.000 untuk sekali kunjungan. Menurut penuturan Pak Onci sebagai pengelola restoran, perhari rerata pendapatan sebesar Rp400.000 hingga Rp1.000.000. Restoran ini memiliki 17 meja dan 68 kursi, 4 gazebo taman yang memiliki masing-masing 4 kursi, dan 4 meja panjang yang dilengkapi dengan 24 kursi. Untuk meningkatkan omset restoran dan penginapan, Pak Onci berharap adanya realisasi pembangunan jembatan yang menghubungkan Pantai Batu Dinding dengan Pantai Tanjung Rhu

Bakit. Jembatan inilah yang akan menarik wisatawan dan nantinya diharapkan berpengaruh pada tingkat hunian hotel/penginapan.

h. Kedai Kopi (Kafe) 74

Kedai ini terletak di Jl. Raya Sinar Manik, Kecamatan Jebus. Kafe ini berdiri sekitar tahun 2015 dan mempekerjakan 5 orang karyawan. Kafe ini memiliki 17 meja dengan kursi berjumlah 68 kursi. Pada hari biasa, kafe ini buka dari jam 07.00 pagi hingga 23.00 malam WIB dan dikunjungi rerata 70 konsumen. Pada Bulan Ramadhan, Konsumen yang berkunjung ke kafe ini pada siang hari di bulan puasa hanya kurang lebih 20 orang di tambah pada malam hari kurang lebih 20 orang. Tiap konsumen rerata menghabiskan Rp50.000.

i. Kafe 5 M Sinar Manik

Kafe ini teletak di Jl. Raya Kampung Baru Sinar Manik, Kecamatan Jebus. Berdiri sejak tahun 2017 dan memiliki 5 orang pekerja. Kafe ini buka mulai pukul 09.00 hingga pukul 22.00 malam. Bila kondisi sepi, pengunjung hanya sekitar 10 orang sedangkan bila kondisi ramai dapat mencapai 30 orang. Rerata pengeluaran setiap pengunjung antara Rp10.000 hinga Rp30.000. Jumlah kursi yang dimiliki kafe ini sebanyak 86 buah dan meja sebanyak 22 buah.

j. Kafe Agustini

Kafe ini teletak di Jl. Raya Jebus, Kecamatan Jebus. Tepatnya di area Pasar Ikan dan Sayur Jebus. Kafe ini sudah berdiri 4 tahun yang lalu. Jam operasional dimulai dari pukul 11.00 hingga pukul 17.00 sore dan dilanjutkan kembali dari pukul 18.30 hingga pukul 02.00 dini hari. Kafe ini memiliki 4 meja dan 16 kursi. Pendapatan per hari kafe ini berkisar antara Rp200.000 hingga Rp300.000. Bang Hendri selaku pemilik kafe menuturkan bahwa ia bekerja sendiri tanpa ada yang membantu. Jumlah kunjungan konsumen per hari rerata berjumlah 20 orang dengan rerata konsumen menghabiskan Rp10.000 hingga Rp15.000. Biaya operasional yang dikeluarkan selain listrik adalah sampah sebesar Rp35.000.

k. Restoran Seventy Four Food Factory

Restoran ini teletak di Jalan SDN 1 Puput, Kecamatan Parittiga/di samping Bank Sumsel Parittiga. Pemilik restoran ini adalah juga pemilik Kedai Kopi (Kafe) 74.

Tempat ini baru berdiri setahun yang lalu dengan waktu buka dari jam 07.30 sampai jam 22.30 WIB. Seperti kebanyakan kafe pada umumnya, restoran ini terlihat ramai pada malam hari. Biasaya konsumen menghabiskan Rp 50.000 untuk sekali belanja. Untuk menampung konsumen, restoran ini memiliki 27 meja dan 102 kursi.

4.1.8 Potensi PAD Sektor Pajak Parkir

Berbeda dengan retribusi parkir yang merupakan pungutan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sama halnya dengan pajak hotel dan pajak restoran, pengenaan pajak parkir Pengenaan pajak ini dibebankan kepada konsumen selaku subyek pajak, namun pembayarannya dilakukan oleh orang pribadi atau Badan pemilik hotel.dibebankan kepada konsumen selaku subyek pajak, namun pembayarannya dilakukan oleh orang pribadi atau Badan pengelola lahan parkir.

Terdapat dua lokasi parkir di Kabupaten Bangka Barat yang menjadi obyek pajak parkir yaitu Parkir A dan Parkir B. Sedangkan pajak parkir lainnya bersifat insidentil seperti pemungutan biaya parkir di bazar. Berdasarkan perhitungan hasil survei, baik Parkir A dan Parkir A memiliki potensi yang lebih tinggi dari realisasi pajaknya di tahun 2018. Parkir A tercatat membayar pajak sebesar Rp 835.000, dengan potensi lebih dari empat kali lipatnya, yakni sebesar Rp 4.200.000. Sedangkan Parkir B pada tahun 2018 tercatat membayar pajak parkir mencapai 3.000.000, tetapi potensinya mencapai 7.512.000. Berdasarkaan data tersebut dapat disimpulakan bahwa ada potensi kenaikan pajak parkir hinggga mencapai 205,40 persen di tahun 2019.

Tabel 4. 31 Perhitungan Pajak Parkir Kabupaten Bangka Barat tahun 2019

No	Lokasi	Tarif Pajak	Potensi Pajak 2019*	Realisasi 2018	Potensi Kenaikan pajak
1	A	10%	4.200.000,00	835.000	402,99%
2	B	10%	7.512.000,00	3.000.000	150,40%
			11.712.000,00	3.835.000	**205,40%**

Sumber: data diolah

Berikut gambaran kondisi parkir tepi jalan umum yang telah tim survei kunjungi:

a. Parkir Love Mart

Love mart merupakan salah satu minimarket di Jalan Raya Jendral Sudirman, Kampung Jawa Baru, Muntok. Halaman depan minimarket ini menjadi lahan parkir utama untuk kendaraan sepeda motor. Kawasan parkir ini sudah beroperasi kurang lebih enam tahun. Dengan dilengkapi ATM Center, Love Mart menjadi salah satu toko swalayan yang cukup ramai pembeli. Hal itu menjadikan kawasan parkirnya pun cukup ramai dengan rata-rata motor terparkir setiap harinya sebanyak 200 motor, bahkan bisa mencapai 300 motor ketika dalam kondisi ramai. Jam operasional lokasi parkir ini menyesuaikan jam buka dari toko yang bersangkutan yakni pukul 07.00 - 21.00 WIB. Terkait lahan parkir untuk mobil, sejauh ini sebatas memanfaatkan pinggir jalan raya karena lahan parkir di halaman toko sepenuhnya digunakan untuk parkir motor. Oleh karena itu, jumlah parkir mobil tidak sebanyak dan sesering parkir motor. Dikonfirmasi bahwa tarif parkir motor adalah Rp.1.000,00 dan mobil sebesar Rp.2.000,00. Berdasarkan pengakuan pengelola sekaligus juru parkir di sana, parkiran biasanya ramai ketika tanggal muda dan mulai beranjak sepi menuju tanggal tua. Hal itu tentu sesuai dengan pencairan gaji bulanan dari ASN dan karyawan. Secara resmi lahan parkir ini dikelola oleh Bapak Subandrio yang sudah resmi terdaftar sebagai wajib pajak parkir di kantor BP2RD Kab. Bangka Barat. Berdaarkan penuturan narasumber, setiap bulannya pihak pengelola menyetorkan pajak parkir sebesar Rp 300.000.

b. Parkir Swancity

Swancity merupakan salah satu toko pakaian yang berlokasi di Jalan Raya Jend. Sudirman, Kampung Jawa Lama, Muntok. Toko ini berdekatan dengan Love Mart. Sebagaimana halnya Love Mart, lokasi parkir Swancity mengambil lahan halaman utama Toko Swancity itu sendiri. Lokasi parkir ini lebih dominan menyediakan jasa

parkir kendaraan sepeda motor mengingat lahan parkir sangat terbatas untuk bisa menyediakan parkir mobil. Sama dengan lokasi parkir Love Mart, parkiran ini menetapkan tarif parkir sepeda motor sebesar Rp 1.000. Kondisi toko yang cukup ramai pembeli, khususnya menjelang Hari Raya Lebaran, menjadikan lokasi parkirnya pun ramai dengan rata-rata motor terparkir sebanyak 100 motor setiap harinya. Lokasi parkir ini secara resmi dikelola oleh Bapak Agus Prasetyo. Setiap bulannya pihak pengelola parkir membayar pajak parkir sebesar Rp 75.000. Hal itu dibuktikan dengan slip pembayaran bulanan yang diperlihatkan langsung oleh pihak pengelola sekaligus juru parkir di sana.

Pemda dapat melakukan peningkatan penerimaan pajak parkir dapat dilakukan dengan memperhitungkan realisasi pendapatan yang diterima wajib pajak dari pengelolaan parkir sehingga besaran pajak yang dibayarkan lebih mendekati potensi yang ada. Selain itu, perlu pula memberikan pemahaman baik itu kepada wajib pajak maupun masyarakat bahwa pembayaran pajak tersebut akan kembali kepada masyarakat dengan bentuk lain seperti peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas umum.

4.1.9 Potensi PAD Sektor Retribusi Parkir

Dasar hukum dari pemungutan retribusi tepi jalan umum adalah Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Retribusi Parkir sendiri di definisikan sebagai pungutan daerah berupa pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan dan fasilitas di badan jalan dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Wajib retribusi parkir tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di tiga tempat yakni Terminal Kelapa, Pasar Muntok, dan Pasar Parittiga didapatkan bahwa potensi Pasar Muntok dan Pasar Parittiga cukup besar, sedangkan di Terminal Kelapa cenderung rendah dikarenakan sepinya aktifitas di Terminal

Kelapa dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi parkir. Berikut perhitungan potensi parkir tepi jalan umum berdasarkan hasil survei.

Tabel 4. 32 Perhitungan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kabupaten Bangka Barat tahun 2019

No	Titik Lokasi	Nama Jalan	Potensi	Realisasi 2018*	Potensi Kenaikan Pajak
1	Terminal Kelapa	Terminal Kelapa	1.260.000,00	-	-
2	Pasar Muntok	Area parkir Pasar Muntok	97.800.000,00	85.919.000	13,83%
3	Pasar Parittiga	Kawasan Pasar Parittiga	306.440.000,00	-	-
JUMLAH			**405.500.000,00**	**85.919.000**	**371,96%**

Sumber : Data observasi survei dan data realisasi retribusi Dinas Perhubungan, data diolah
*Data diolah dari data realisasi retribusi Dinas Perhubungan

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Pasar Parittiga memiliki potensi yang tinggi yakni sebesar Rp 306.440.000, namun tim survei tidak mendapatkan data realisasi retribusi pada tahun 2018, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan potensinya. Berbeda halnya dengan Pasar Muntok walaupun potensinya diatas realisasi tahun 2019, tetapi selisihnya tidak terlalu jauh yakni sebesar 13,83 persen. Sedangkan Terminal Kelapa potensinya sangat kecil yakni hanya sebesar Rp 1.260.000, hal ini disebabkan pemungutan pajak yang hanya didapatkan dari retribusi parkir bis saja. Secara keseluruhan dimungkinkan adanyanya potensi kenaikan penerimaan retribusi parkir yaitu sebesar 371,96 persen. Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat potensi untuk meningkatkan retribusi parkir tepi jalan umum, salah satu caranya yaitu dengan mendisiplinkan pemungut retribusi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bersedia membayar retribusi parkir. Selain itu perlu juga diimbangi dengan perbaikan fasilitas parkir agar masyarakat merasakan secara langsung manfaat dari pembayaran retribusi parkir. Inovasi yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan pencatatan berbasis elektronik.

Berikut gambaran kondisi parkir tepi jalan umum yang telah tim survei kunjungi:

a. Terminal Kelapa

Lokasi terminal kelapa berdekatan dengan Pasar Kelapa, yang mana pengunjungnya sangat sepi. Terminal tersebut jarang disinggahi oleh bis, karena bukan terminal pemberhentian. Selain dari tarif parkir bis, terminal kelapa juga menarik retribusi untuk bongkar muat barang dan juga untuk penyewaan toko di sekitar terminal. Selain itu terminal juga sering dimanfaatkan untuk lokasi penyelenggaraan bazar yang biasanya diadakan sekitar 4 kali dalam satu tahun tergantung pada kondisi perekonomian masyarakat Kecamatan Kelapa.. Walaupun demikian kondisi di terminal kelapa cenderung sepi, dan masyarakat Kecamatan Kelapa masih enggan untuk membayar retribusi parkir sepeda motor maupun mobil, sehingga tidak ada pengenaan retribusi untuk sepeda motor dan juga mobil.

b. Parkir Pasar Muntok

Parkir di Pasar Muntok beroperasi sejak pukul 05.00 – 11.00/13.00, memiliki 11 juru parkir yang bertugas di pasar muntok. Hambatan petugas juru parkir dalam memungut retribusi parkir tepi jalan umum diantaranya:

1. Saat hujan penjual dan pembeli menjadi sepi,
2. Paving pada area parkir sebagian besar sudah rusak, sehingga saat hujan air menggenang,
3. Karcis yang disediakan sedikit, hanya diunakan untuk orang yang membutuhkan saja. Sehingga berapa jumlah kendaraan yang parkir tidak terkontrol dengan baik.,
4. Lahan parkir mobil dijadikan los untuk para penjual buah, namun masalah baru timbul karena penjual buah tidak mau menempati lapak yang telah disediakan oleh pemerintah. Sementara itu kendaraan roda 4 parkir sembarangan karena lahannya yang kurang.

c. Pasar Parittiga

Aktivitas Pasar Parittiga berbeda dengan Pasar Jebus. Pasar Parittiga lebih ramai. Hal itu ditandai dengan banyaknya jumlah pedagang dan pembeli. Setidaknya ada

12 pengelola parkir yang mengelola 12 titik parkir di pasar ini. Di satu titik, saat sepi, setidaknya ada 30 hingga 35 motor yang terparkir, saat kondisi ramai, bisa mencapai 100 motor, dan saat normal antara 40 hingga 50 motor. Tiap pengelola menyetor ke Dinas Perhubungan antara Rp20.000 hingga Rp40.000 perharinya.

4.2 EKSTENSIFIKASI

4.2.1 Potensi PAD Sektor Pelayanan Persampahan

4.2.1.1 Kependudukan di Kabupaten Bangka Barat

Menurut BPS, jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2017 sebanyak 204.778 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di 6 kecamatan yang meliputi 60 desa dan 4 kelurahan. Kecamatan Muntok dan Parittiga adalah kecamatan yang paling ramai dan berkembang dibanding kecamatan lain.

Selanjutnya, secara terperinci jumlah rumah tangga di tiap kecamatan tersaji sebagai berikut:

Tabel 4. 33 Rincian Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Bangka Barat, 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga
1.	Muntok	16.588
2.	Parittiga	10.636
3.	Kelapa	8.476
4.	Simpang Teritip	3.776
5.	Tempilang	7.119
6.	Jebus	4.228[2]
Total		55.051[3]

Sumber: BPS Kab. Bangka Barat (2018).

Jumlah penduduk sebanyak 55.051 jiwa ini belum termasuk lembaga/institusi, kantor, restoran, hotel, dan lain-lain. PLN[4] mencatat, selain rumah tangga ada 39

[2] Hasil penjumlahan angka yang tersaji.

[3] Hasil ini tidak berbeda jauh dengan rumah tangga yang menggunakan listrik, yaitu: 54.248 rumah tangga

[4] BPS: Bangka Barat dalam Angka 2018

ragam industri, 368 ragam dinas/instansi, dan 3.333 ragam usaha, sosial, dan lain-lain yang menjadi pelanggan listrik PLN yang tentunya juga menghasilkan sampah.

4.2.1.2 Studi Literatur Persampahan di Berbagai Daerah

a. **Persentase retribusi sampah terhadap retribusi daerah secara umum.** Berbeda dengan retribusi lainnya, retribusi sampah membutuhkan biaya modal dan operasional yang cukup besar. Biaya itu antara lain dari pengadaan kendaraan pengangkut sampah dan perawatannya. Selain retribusi sampah, retribsi lain yang membutuhkan biaya operasional yang tinggi adalah retribusi terminal.

   Bila mencermati berbagai daerah di Indonesia, kontribusi retribusi sampah terhadap retribusi daerah memberikan porsi yang kecil terhadap retribusi daerah. Berikut adalah contoh kontribusi retribusi sampah terhadap retribusi daerah:

   1. Retribusi sampah di Kabupaten Sidoarjo menyumbang 1,07% terhadap retribusi daerah di tahun 2011 dan menyumbang 1,57% terhadap retribusi daerah pada tahun 2012[5].
   2. Retribusi sampah di Kota Baubau menyumbang secara berturut-turut 1,4%, 2,8%, 1,7%, dan 0,8% pada tahun 2006 hingga tahun 2009[6].
   3. Retribusi sampah di Kota Palu pada tahun 2011 hanya menyumbang 0,94%, pada tahun 2012 menyumbang 1,16%, pada tahun 2013 menyumbang 1,13%, pada tahun 2014 menyumbang 0,69% dan pada tahun 2015 menyumbang 0,55% terhadap retribusi daerah[7].

[5] Wahyudi, Muhammad Andi dan Rahaju,Tjitjik (2014). "Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah di Kabupaten Sidoarjo (Studi pada Pelaksanaan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan", jurnalmahasiswa.unesa.ac.id vol 2 no 3

[6] Tugas Akhir Program Magister (TAPM), Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dan Kontribusinya terhadap Peningkatan PAD di Kota Baubau.Asva Rinny 2011 Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Kendari.

[7] Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Palu.Arwan Widodo. Jurnal Katalogis, vol. 6 No. 1 Januari 2018, hal 11-12.

b. **Perbandingan tarif retribusi sampah dari berbagai daerah.** Untuk melihat kesesuaian tarif retribusi sampah Bangka Barat yang ada, maka perlu kiranya melihat besaran tarif retribusi beberapa daerah sebagai *bench mark*. Berikut adalah perbandingan tarif retribusi sampah dari berbagai daerah:

1. Kota Semarang: Rumah Tangga maksimal retribusi Rp5.000,-[8].
2. Kota Pekanbaru: Rumah Tangga maksimal retribusi Rp10.000,-[9].
3. Kabupaten Kulonprogo: Rumah Tangga Rp5.000,-[10].
4. Kota Tegal: Rumah Tangga secara umum Rp2.000,-[11].

Bila dibandingkan dengan beberapa kota/kabupaten, maka jumlah tarif yang harus dibayar oleh masyarakat Kabupaten Bangka Barat cukup besar, yaitu Rp20.000,-

4.2.1.3 Biaya Modal dan Penanganan Persampahan

Untuk memperoleh angka retribusi yang ideal, maka seyogyanya pemerintah menentukan dahulu biaya penanganan sampah. Nantinya, besarnya biaya penanganan ini menjadi dasar penentuan nilai retribusi sampah yang harus dibayar masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat pula. Menurut SNI 03-32-3242-1994, komponen biaya penanganan sampah adalah:

1. Biaya pengumpulan 20-40%
2. Biaya pengangkutan 40-60%
3. Biaya pembuangan akhir 10-30%

Untuk menghitung biaya penanganan sampah secara umum, setidaknya ada 2 komponen biaya yang sangat mempengaruhi, yaitu biaya modal dan biaya

[8] Widhi Ariestianti Rochdianingrum, Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga dalam PAD Studi Kasus di Kota Semarang" Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2011.

[9] Peraturan Wali Kota No. 48 Tahun 2016.

[10] Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012.

[11] Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Peraturan Wali Kota (Perwal) No 16/2017 tentang Perubahan atas Perwal 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2012.

operasional dan pemeliharaan. Berikut adalah komponen masing-masing biaya tersebut secara umum.

a. Belanja Modal

Tabel 4. 34 Estimasi Biaya Modal Penyediaan Jasa Pelayanan Persampahan

No	Nama Kendaraan	Harga (Rp)	Unit	Jumlah (Rp)
1	*Arm Roll Truck*	400.000.000	6	2.400.000.000,-
2	Motor Bak Roda Tiga	25.000.000	64[12]	1.600.000.000,-
3	TPS Tiap Kecamatan	30.000.000	6	180.000.000,-
	Total			**4.180.000.000,-**

Sumber: pengolahan pribadi (2019)

b. Biaya Operasional

Tabel 4. 35 Estimasi Biaya Operasional dan Pemeliharaan selama Setahun yang Dibutuhkan Satu Kendaraan (arm roll truck)

No	Uraian	Vol	Sat	Kebutuhan tiap Tahun	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
Biaya Operasional dan Pemeliharaan Satu Kendaraan						
1	Oli Mesin	5	Liter	60	70.000	4.200.000
2	Oli Perseneling	4	Liter	12	50.000	600.000
3	Oli Gardan	3	Liter	9	50.000	450.000
4	Oli Hidrolis	10	Liter	40	40.000	1.600.000
5	Filter Oli	1	Liter	2	100.000	200.000
6	Fliter Udara	1	Bh	2	80.000	160.000
7	Filter Bahan Bakar Atas	1	Bh	2	70.000	140.000
8	Filter Bahan Bakar Bawah	1	Bh	2	135.000	270.000
9	Air Accu	1	Bh	2	6.000	12.000
10	Vet/Grease Gemuk	0,5	Kg	1	100.000	100.000
11	Accu	1	Bh	1	1.500.000	1.500.000
12	Ban Luar	1	Bh	4	250.000	1.000.000
13	Ban Dalam	1	Bh	4	200.000	800.000
14	Perpanjangan STNK	1	Kali	1	1.800.000	1.800.000
15	KIR	1	Kali	2	400.000	800.000
16	Servis	1	Kali	12	500.000	6.000.000

[12] Jumlah desa dan kelurahan.

17	BBM	45	Ltr/Bln	12	5.150	2.781.000
18	Terpal (5 M x 4 M)	1	Lbr	1	300.000	300.000
19	Sepatu Boat	3	Pasang	1	140.000	420.000
20	Garukan Sampah	1	Bh	1	25.000	25.000
21	Serok Sampah (*Pet Strapping Upcycle*)	1	Bh	2	50.000	50.000
22	Sapu Lidi	1	Bh	3	15.000	15.000
Total						**25.734.000**
	Biaya Tenaga Kerja Satu Kendaraan					
1	Supir	1	Orang	12	1.500.000	18.000.000
2	ABK	2	Orang	12	1.000.000	12.000.000
	Total					**30.000.000**
	Biaya Depresiasi					
1	Arm Roll Truck	1	Unit	1	28.571.428	**28.571.428**
	Total Keseluruhan					**84.305.428**

Sumber: pengolahan pribadi (2019)

Bila terdapat 6 kecamatan, maka setidaknya biaya operasional dan pemeliharaan yang dibutuhkan sebesar:

Rp84.305.428 X 6 kendaraan *arm roll truck* = Rp505.832.568,-

4.2.1.4 Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Sampah

Potensi penerimaan dari retribusi sampah dihitung menggunakan jumlah rumah tangga yang ada Bangka Barat, yaitu:

Potensi dalam satu bulan:

= Jumlah Rumah Tangga x Rp20.000,-

= 55.051 x 20.000,-

= Rp1.101.020.000,-

Potensi dalam satu tahun:

= 1.101.020.000 x 12

= Rp13.212.240.000,-

Hasil penghitungan di atas didasarkan pada asumsi bahwa semua masyarakat taat pajak dan semua masyarakat sanggup untuk membayar.

Ini adalah potensi 100% tanpa mempertimbangkan jumlah keluarga miskin, jumlah keluarga yang tidak bisa dijangkau kendaraan pengangkut sampah, jumlah keluarga yang membakar sampah, dan kemungkinan rumah tangga yang menunggak.

Dengan berbagai faktor yang dipertimbangkan, maka potensi yang mungkin diperoleh pada tahun pertama adalah 10% dari jumlah potensi yang ada atau Rp110.102.000,- dan akan terus bertambah dengan adanya dorongan dari pemerintah dan kesadaran masyarakat membayar retribusi sampah.

Jumlah sebesar 10 persen ini mengingat 2 hal tentang retribusi sampah yang ada di Bangka Barat, yaitu belum adanya regulasi pemerintah yang memberikan BP2RD untuk memungut retribusi di kecamatan dan tidak adanya catatan penerimaan dari retribusi sampah di tiap kecamatan.

Di Kecamatan Jebus contohnya, meskipun ada pemungutan tapi tidak diperoleh data dan tidak adanya regulasi berupa wewenang BP2RD tingkat kecamatan untuk memungut retribusi. Di Kecamatan Parittiga, retribusi persampahan yang dapat dipungut oleh Kantor Kecamatan per bulan baru pada kisaran Rp5.000.000,- yang diperoleh dari: 166 karcis yang terdiri dari 76 pertokoan, 62 pasar, 9 instansi, 19 lain-lain. Bila melihat potensi rumah tangga yang ada, biaya penanganan sampah, dan selisih realisasi dalam setahun, maka:

a) Potensi Penerimaan Rumah Tangga per Bulan
   Jumlah RT X Tarif (Rp)

   5.505 X 20.000 = Rp110.100.000,-[13]

b) Biaya Penanganan Sampah
   Biaya Operasional + Depresiasi Kendaraan

   Rp84.305.428,-

[13] Angka diperoleh dari 10% total rumah tangga. Mengingat: a) tidak semua rumah tangga memiliki akses jalan yang bagus untuk diambil sampahnya. b) jumlah kemiskinan memungkinkan orang tidak dapat membayar retribusi. c) kebiasaan masyarakat yang mengolah sampah dengan cara ditimbun atau dibakar.

Terdapat selisih tipis antara potensi dan realisasi, yaitu Rp25.794.572,- per bulan atau Rp309.534.864,- per tahun. Angka penerimaan ini dapat meningkat bila targetnya pun ditingkatkan tiap tahun.

4.2.1.5 Teknis Pemungutan dan Rekomendasi

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memungut retribusi sampah. Merujuk pada Kota Cirebon, pada awalnya pungutan dilakukan dengan tiga cara, yaitu: bekerja sama dengan PDAM setempat, dipungut oleh petugas, dan warga membayar sendiri. Pungutan retribusi sampah yang dilakukan bersamaan dengan pembayaran PDAM dalam hal ini Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Giri Nata lebih berhasil daripada dipungut petugas. Hal ini karena perbandingan nilai retribusi dan insentif untuk petugas yang tidak sebanding.

Seperti Kota Cirebon, Pagewang (2015)[14] menggambarkan bahwa pemungutan yang dilakukan petugas kebersihan di Kota Makassar tidak efektif, tidak efisien, dan menimbulkan penyimpangan.

Selain Kota Cirebon, Kota Pontianak melalui DLH (Dinas Lingkungan Hidup) dan Kabupaten Sidoarjo[15] melalui DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) juga bekerja sama dengan PDAM Tirta Khatulistiwa (untuk Kota Pontianak) dan PDAM Delta Tirta (untuk Kabupaten Sidoarjo) dalam pembayaran retribusi ini. Sehingga pelanggan PDAM selain membayar tagihan PDAM juga membayar iuran retribusi

[14]Yori Pagewang (2015), "*Manajemen Pelayanan Retribusi Persampahan di Kota Makassar: Studi Kasus Pelayanan Retribusi Persampahan Kecamatan Tamalanrea.*" Skripsi pada Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara.

[15] Wahyudi, Muhammad Andi dan Rahaju,Tjitjik (2014). "Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah di Kabupaten Sidoarjo (Studi pada Pelaksanaan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan", jurnalmahasiswa.unesa.ac.id vol 2 no 3

sampah tiap bulannya. Kota lainya adalah Semarang[16] yang berkerja sama dengan PDAM setempat dan kelurahan/kecamatan setempat. Tercatat, dari 131.391 pelanggan PDAM dapat diperoleh Rp379.855.000,-.

Cara lain pemungutan retribusi sampah dapat juga bekerja sama dengan PLN. Hal ini pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar di Kecamatan Tamalanrea[17]. Melihat beberapa alternatif pemungutan retribusi sampah, maka Pemerintah Bangka Barat dapat bekerja sama dengan:

a) PDAM karena pertumbuhan pelanggan PDAM Kabupaten Bangka Barat yang cukup baik yaitu 17,56% pada tahun 2017 sejumlah 3.756 pelanggan dan 12,33% pada tahun 2018 sebanyak 4.219 pelanggan memungkinkan adanya MoU tentang pungutan retribusi sampah yang dibayarkan saat membayar tagihan PDAM[18].
b) Pemerintah Kecamatan atau Desa/Kelurahan. Hal ini sebagaimana telah terlaksana di Kecamatan Parittiga
c) PLN, mengingat listrik menjadi kebutuhan vital bagi tiap rumah tangga dan lembaga.

Ada dua rekomendasi tekait dengan biaya retrisubi persampahan yang ada di Bangka Barat. Pertama, perlunya memperbarui perda tentang retribusi daerah yang sudah lama. Dengan adanya perubahan tersebut, diharapkan akan ada nominal baru yang lebih sesuai. Kedua, perlunya regulasi yang memberikan hak/wewenangan BP2RD untuk dapat menarik retribusi di beberapa kecamatan yang ada.

---

[16] Widhi Ariestianti Rochdianingrum, Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga dalam PAD Studi Kasus di Kota Semarang" Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2011.

[17] Implementasi Kebijakan Retribusi Persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, Mursyidin, Hidayatul dan Nurlinah Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 2. Juli 2010. Hal 69-82.

[18] Jumlah pelanggan tersebut baru berada di Kecamatan Muntok dan Parittiga. Sedangkan kecamatan lain belum mendapatkan layanan PDAM.

4.2.2 Potensi PAD Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

4.2.2.1 Gambaran Umum

Sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, memiliki andil yang cukup besar bagi perekonomian Bangka Barat. Di tahun 2017, tercatat sebanyak 35.302 penduduk dewasa bekerja di sektor perkebunan. Sektor perkebunan merupakan lapangan usaha yang menyerap angkatan kerja paling besar yaitu sekitar 37% dari total pekerja yang ada. Lebih jauh, di tahun 2017, pertanian dan perkebunan menjadi sektor lapangan usaha yang menyumbang PDRB paling besar kedua setelah sektor industri pengolahan. Sektor pertanian dan perkebunan menyumbang sebesar 14,11% total PDRB yang ada di Bangka Barat dan kontribusi tersebut cenderung meningkat setiap tahunnya. Sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor andalan dalam menghadapi masa-masa berakhirnya kejayaan timah di wilayah tersebut.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan di Kabupaten Bangka Barat. Dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya, kelapa sawit selalu menempati urutan pertama produksi tiga komoditi utama (lihat Gambar ..). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Bangka Barat tahun 2005-2025, kawasan perkebunan, khususnya sawit, menjadi salah satu kawasan strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya,dan/atau lingkungan. Perkebunan kelapa sawit memiliki kawasan khusus peruntukan perkebunan seluas seluas ±41.860 ha (perkebunan besar) dan ±14.331 ha (perkebunan rakyat). Kawasan khusus tersebut tersebar di Kecamatan Jebus, Kelapa, Simpang Teritip, dan Tempilang.

Gambar 4. 8 Produksi Tiga Komoditas Utama Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014 (ton)

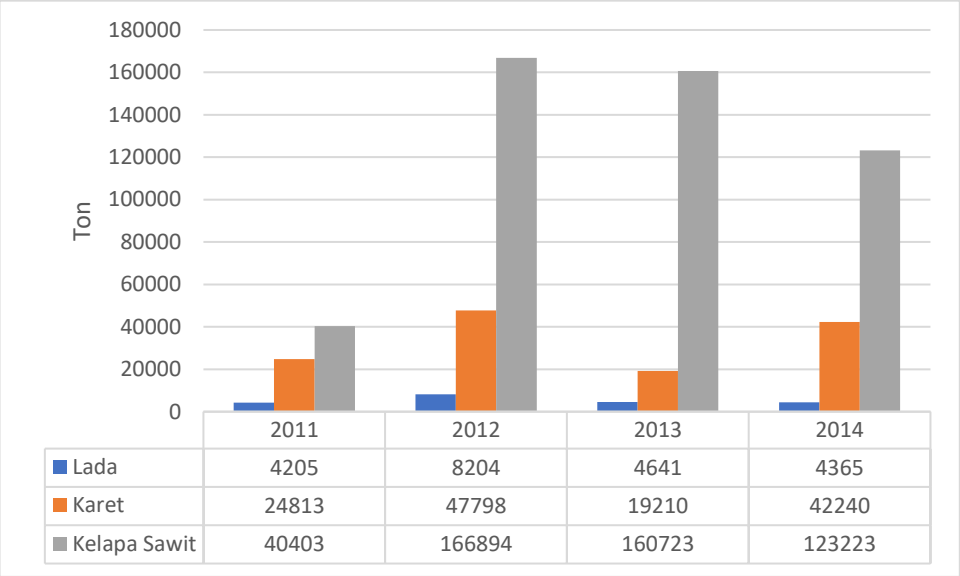

	2011	2012	2013	2014
Lada	4205	8204	4641	4365
Karet	24813	47798	19210	42240
Kelapa Sawit	40403	166894	160723	123223

Sumber: BPS Kab. Bangka Barat (2018)

Berdasarkan bentuk dan skala usahanya, perkebunan kelapa sawit di Bangka Barat digolongkan ke dalam dua jenis: (1) perkebunan besar dan (2) perkebunan rakyat. Kedua jenis perkebunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perkebunan Besar

Perkebunan besar mengacu pada perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum. Dalam perkembangannya terakhir, terdapat enam perusahaan perkebunan besar swasta di Bangka Barat (lihat Tabel 1). Perusahaan perkebunan sawit dengan total hak guna usaha paling luas secara berturut-turut meliputi P.T. Bumi Permai Lestari (14.319,08 Ha), P.T. Gunung Sawit Bina Lestari (9.098,90 Ha), dan P.T. Sawindo Kencana (7.331,20 Ha). Perusahaan perkebunan lainnya yaitu P.T. Tata Hamparan Eka Persada, P.T. M.P. Leidong West Indonesia, P.T. Suwarna Nusa Sentosa, ketiganya memiliki luas hak guna usaha kurang dari da ribu hektar. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di berbagai kecamatan di Bangka Barat. Kecamatan Simpang Teritip merupakan wilayah dengan perusahaan perkebunan sawit terbanyak—empat perusahaan perkebunan berlokasi di kecamatan tersebut.

Tabel 4. 36 Lokasi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Swasta di Bangka Barat, 2019

Nama Perusahaan	Lokasi Kebun		Hak Guna Usaha (HGU)			
	Desa	Kec.	Nomor	Ekspirasi (tahun)	Luas (Ha)	Total HGU (Ha)
P.T. Sawindo Kencana	Tempilang	Tempilang	120/HGU/BPN/97	2032	6.731,20	7.331,20
			01/HGU/BPN26/2002	2037	200	
			02/HGU/BPN26/2002	2037	200	
			03/HGU/BPN26/2002	2037	200	
P.T. Tata Hamparan Eka Persada	Berang	Sp. Teritip	28/HGU/BPN/2004	2039	938,74	1.965,06
	Pelangas	Sp. Teritip	28/HGU/BPN/2004	2039	1.026,90	
P.T. Gunung Sawit Bina Lestari	Mayang	Sp. Teritip	18/HGU/BPN/2001	2031	9.098,90	9.098,90
P.T. Bumi Permai Lestari	Kacung	Kelapa	1/RIt/HGU/BPN R1/2013	2031	10.900,56	14.319,08
	Berang Ibul	Sp. Teritip				
	Dendang	Kelapa	26/HGU/BPN/95/A/34	2030	3.418,20	
P.T. MP. Leidong West Indonesia	Berang	Sp. Teritip	49/HGU/BPN/2004	2039	1.389,25	1.389,25
	Tumbak Petar	Jebus				
P.T. Suwarna Nusa Sentosa	Air Putuh	Muntok	-	-	1.221,63	1.221,63
Total						**35.325,12**

b. Perkebunan Rakyat

Jenis kedua dari perkebunan sawit yang ada di Bangka Barat adalah perkebunan rakyat. Mengacu pada Konsep dan Definisi Baku Statistik Pertanian BPS 2012, perkebunan rakyat mengacu pada perkebunan kelapa sawit yang tidak berbadan hukum. Perkebunan jenis ini dapat digolongkan kembali menjadi dua kategori berikut:

1. **Usaha kecil tanaman perkebunan rakyat**. Jenis perkebunan ini adalah usaha tanaman perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan perseorangan yang tidak berakte notaris dan memenuhi kriteria tertentu. Untuk jenis tanaman kelapa sawit, minimal luas tanaman yang diusahakan adalah dua hektar atau lebih dengan jumlah tanaman yang diusahakan minimal 300 batang.
2. **Usaha rumah tangga perkebunan rakyat**. Kategori perkebunan ini adalah usaha tanaman perkebunan yang tidak berbadan hukum yang diselenggarakan atau dikelola oleh rumah tangga perkebunan dan belum memenuhi kriteria usaha kecil tanaman perkebunan rakyat. Usaha rumah tangga perkebunan rakyat kelapa sawit adalah usaha yang memiliki luas tanaman kurang dari dua hektar dengan jumlah tanaman yang diusahakan kurang dari 300 batan.

Perkebunan (kelapa sawit) rakyat di Bangka Barat tersebar di enam kecamatan yang ada, (lihat Tabel 4.36). Kecamatan dengan perkebunan rakyat paling luas meliputi Tempilang, Kelapa, dan Simpang Teritip dengan luas perkebunan lebih dari dua ribu hektar. Muntok merupakan kecamatan dengan luas perkebunan rakyat kurang dari seribu hektar. Hal itu wajar mengingat Muntok merupakan ibu kota dari Kabupaten Bangka Barat yang merupakan pusat administrasi pemerintahan, bisnis dan juga ekonomi—pertanian bukan sektor andalan di kecamatan tersebut. Terlepas dari persebaran perkebunan tersebut di berbagai kecamatan yang ada, secara umum total luas perkebunan rakyat di Bangka Barat memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Tren peningkatan tersebut terjadi di hampir seluruh kecamatan yang ada (lihat Tabel 4.37).

Tabel 4. 37 Perkembangan Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Kategori Perkebunan Rakyat di Bangka Barat, 2010-2018

No.	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*
1	Muntok	325,53	363,53	373,53	460,53	552,03	608,03	629,03	630,41	648,34
2	Simpang Teritip	737,02	808,44	2.355,00	2.456,00	2.551,00	2.577,50	2.642,50	2.734,54	2.892,32
3	Jebus	1.176,26	1.281,76	1.116,76	1.207,76	1.735,00	1.814,85	1.864,75	1.894,65	1.901,20
4	Kelapa	3.325,71	4.418,86	4.436,86	4.521,46	4.623,46	4.72,46	4.809,75	4.885,34	4.923,18
5	Tempilang	6.162,90	6.177,20	6.258,20	5.877,60	5.952,60	5.956,60	5.949,15	5.960,87	6.029,43
6	Parit Tiga	0,00	0,00	1.079,00	1.162,00	1.897,00	1.910,00	1.923,00	1.945,30	1.984,98
Jumlah		**11.727,42**	**13.049,79**	**15.619,35**	**15.685,35**	**17.311,09**	**17.590,44**	**17.818,18**	**18.051,11**	**18.379,45**

*: nilai proyeksi menggunaka tren linear.
Sumber: pengolahan probadi (2019)

4.2.2.2 Potensi Penerimaan PAD Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

Sebagaimana telah disinggung di atas, pertanian dan perkebunan merupakan sektor lapangan usaha yang mendominasi di wilayah Bangka Barat. Hal itu salah satunya tercermin dari kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja paling dominan dibandingkan lapangan usaha lainnya dan kontribusinya yang relatif dominan terhadap total PDRB Bangka Barat tahun 2017. Tren peningkatan luas perkebunan rakyat di Bangka Barat menyiratkan bukti bahwa sektor pertanian dan perkebunan sejauh ini masih cukup menjajikan bagi masyarakat sekitar untuk memperoleh penghasilan dari lapangan usaha tersebut.

Dalam kaitannya dengan pendapatan asli daerah, kontribusi sektor perkebunan kelapa sawit sejuah ini belum terlalu signifikan dalam upaya optimalisasi penerimaan PAD itu sendiri di wilayah Bangka Barat. Terdapat dua jenis pajak daerah yang perlu dioptimalkan kembali penarikannya dari sektor perkebunan, khususnya perkebunan besar yang berbadan hukum. Pajak daerah yang dimaksud adalah pajak air tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Potensi penerimaan PAD datang juga dari perkebunan kelapa sawit milik rakyat (perkebunan rakyat). Perkebunan rakyat potensial untuk dikenai kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3) karena pada umumnya luas perkebunan mereka kurang dari 25 ha. Berbagai potensi pajak daerah tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Optimalisasi Penerimaan PAD Sektor Perkebunan Besar

Terdapat beberapa jenis pajak yang dibebankan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Berdasarkan regulasi yang sekarang telah ada, beberapa jenis pajak tersebut secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori: (1) pajak pusat dan (2) pajak daerah. Perusahaan perkebunan kelapa sawit dibebani kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh) badan usaha dan pajak pertambahan nilai (PPN). Dua jenis pajak tersebut pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan dana yang terkumpul masuk ke kas negara sebagai komponen utama penerimaan APBN. Selain itu, perusahaan perkebunan sawit dikenai pula kewajiban membayar pajak

pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3). Dalam regulasi yang terbaru, penerimaan pajak PBB P3 selanjutnya menjadi hak pemerintah provinsi dan masuk ke dalam kas pemerintah daerah level provinsi.

Selanjutnya, dengan keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit, pemerintah kabupaten/ kota dituntut untuk mampu mengidentifikasi potensi penerimaan PAD dari perusahaan perkebunan dan menggali potensi penerimaan tersebut. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara intensif dengan pihak terkait, terdapat dua jenis pajak daerah yang relevan diterapkan di sektor perkebununan besar di Kabupaten Bangka Barat: pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak air tanah. Akan tetapi, secara umum penarikan kedua jenis pajak tersebut dikonfirmasi belum optimal sehingga perlu dicarikan solusi ke depannya. Optimalisasi penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. **Pajak air tanah.** Berdasarkan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak air tanah mengacu pada pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pajak ini relevan diterapkan pada perusahaan perkebunan sawit yang melalukan pengambilan/ pemanfaatan air tanah dalam memenuhi kebutuhan air untuk perkebunannya. Singkatnya, perusahaan besar kelapa sawit—dalam hal ini adalah berbentuk badan usaha—merupakan salah satu subjek pajak air tanah. Sebagai catatan, perkebunan rakyat dikecualikan dari subjek pajak ini sehingga pajak air tanah dalam hal ini hanya relevan untuk perkebunan besar berbentuk badan usaha.
   Regulasi dari pajak air tanah ini sudah cukup jelas, baik di dalam peraturan undang-undang maupun peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat. Permasalahan utamanya terletak pada implementasi regulasi pajak air tanah itu sendiri, khususnya untuk konteks perusahaan perkebunan kelapa sawit. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak air tanah dapat diimplementasikan lewat beberapa langkah berikut:

- **Penghimpunan dan pembaharuan data objek pajak dan subjek pajak air tanah.** Pendataan ulang mengenai perkebunan mana saja yang melakan

pengambilan dan pemanfaatan air tanah merupakan langkah pertama yang harus ditempuh untuk mengoptimalkan penerimaan pajak air tanah. Singkatnya, diperlukan rincian yang terbaharukan mengenai objek dan subjek pajak air tanah dari kalangan badan usaha perkebunan kelapa sawit secara spesifik.

- **Pemasangan meteran (kontrol) air untuk penentuan besaran pajak tanah.** Besarnya pajak air tanah yang terutang ditetapkan dengan melihat volume pemakaian air dan harga dasar air. Volume pemakain air diukur menggunakan meteran air. Angka yang ditunjukkan meter air pada akhir bulan dikurangi dengan angka yang ditunjukkan meter air pada akhir bulan merupakan volume pemakaian air pada bulan tersebut. Selanjutnya, volume pemakaian air tersebut dikalikan dengan harga dasar air dan dikalikan dengan tarif pajak air tanah (maksimal 20%). Jadi, pemasangan meteran air di perkebunan yang bersangkutan sejauh ini dinilai cukup efektif dalam mengukur volume penggunaan air tanah oleh pihak perusahaan perkebunan terkait, meskipun memang pemasangan tersebut memerlukan biaya tersendiri dalam pengadaan dan pemeliharaannya. Sebagai catatan, harga dasar air dalam hal ini diatur dalam peraturan khusus di wilayah yang bersangkutan. Pada umumnya, harga dasar air digolongkan menjadi tiga, yaitu nonniaga, niaga dan industri dengan bahan baku air.
- **Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) sebagai alternatif penentuan besaran pajak air tanah.** Apabila meteran air belum bisa dipasang karena memerlukan biaya investasi yang cukup besar, sementara waktu bisa digunakan SIPA yang diterbitkan oleh pemerintah setempat untuk perusahaan perkebunan terkait. Penetapan besaran pajak air tanah dengan menggunakan SIPA memiliki kelemahan tersendiri. Penetapan besaran pajak berdasarkan SIPA merupakan stelsel anggapan. Artinya, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan dan anggapan tersebut tergantung bunyi peraturan resmi yang ada. Penetapan berdasarkan SIPA menimbulkan pajak terutang yang sama setiap bulannya, mengikuti data yang ada di SIPA. Hal ini

menjadi tidak adil bagi perusahaan perkebunan sebagai wajib pajak yang terutang apabila ternyata air tanah yang digunakan pada bulan berjalan kurang dari jumlah yang tertera dalam SIPA atau bahkan sama sekali tidak menggunakan air tanah pada bulan tersebut.

- **Penagihan pajak terutang sebelum jatu tempo.** Secara prosedural, Penagihan seharusnya dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran. Tetapi, pihak BP2RD Bangka Barat dapat mengambil langkah konservatif untuk menarik pajak yang terutang sebelum jatuh tempo pembayaran sehingga tidak ada tunggakan pada bulan tersebut. Dalam banyak kasus, tindakan untuk menarik pajak daerah dalam bulan berjalan cukup efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak air tanah itu sendiri. Sebaliknya, tindakan ini menguntungkan bagi wajib pajak karena wajib pajak tidak perlu ke kantor pengelola pajak Bangka Barat yang jauh dari pusat kota untuk menyetor pajaknya.
- **Peningkatan kesadaran membayar pajak sosialisasi dan pendekatan langsung.** Dalam upaya meningkatkan kesadaran membayar pajak dari perusahaan perkebunan, sosialiasi dan pendekatan langsung secara personal merupakan cara yang dapat dilakukan dalam waktu dekat. Sosialisasi dilakukan oleh pengelola pajak dan dinas terkait Kabupaten Bangka Barat utamanya menyangkut arti penting pajak dan pengetahuan perpajakan secara umum. Lebih jauh, dalam rangka mendisiplinkan pembayaran pajak dan meminimalkan penghindaran serta tunggakan pajak, penegakan hukum harus diterapkan instrumen punishment yang adil terukur. Untuk memberikan insentif, reward tertentu juga harus diberikan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak.

2. **Pajak mineral bukan logam dan batuan.** Sebagai salah satu sarana utama dalam perkebunan, jalan kebun memiliki beberapa peran vital. Jalan kebun berperan penting dalam menjaga mutu dan kualitas produksi kelapa sawit. Keberadaan jalan kebun penting juga untuk menjaga peralatan alat angkut tetap normal dan tidak cepat rusak. Selain itu, jalan kebun berperan penting pula dalam hal membangun konektivitas antarlokasi di perkebunan demi

percepatan dan efisiensi produksi. Agar kualitas jalan terjaga, perusahaan perkebunan harus melakukan perawatan yang mutlak dilakukan pada berbagai jenis jalan kebun.

Setidaknya terdapat lima jenis jalan kebun dalam untuk konteks perkebunan kelapa sawit. *Pertama,* jalan utama *(main road).* Jalan utama merupakan penghubung antara kantor dengan divisi, antar divisi serta akses keluar masuk pada daerah emplasmen luar kebun. Jalan ini berfungsi sangat vital untuk menopang kegiatan di dalam kebun. *Kedua*, jalan produksi *(production road)*. Jalan produksi yang dimaksud adalah jalan yang dibuat antarblok sebagai penunjang transportasi panen, perawatan tanaman perkebunan kelapa sawit dan pemupukan.

Ketiga, jalan koleksi *(collection road)*. Jalan koleksi pada kebun sawit bermula dari timur ke barat. Selama pembuatan jalan juga akan menghilangkan tanaman. Jalan ini berfungsi sebagai pengangkut buah dari blok ke TPH, selain itu juga memperlancar pengangkutan pupuk serta bahan kimia ke dalam blok. *Keempat,* jalan panen *(harvesting road)*. Jalan ini berbentuk sejajar dengan tanaman baris utara-selatan. Berguna untuk mengangkut tandan buah menuju TPH dan sebagai fasilitas pemupukan. *Terakhir,* jalan pringgan. Jalan pringgan atau jalan pinggir kebun terletak di batas luar afdeling dan sebagai juga dimanfaatkan sebagai batas afdeling.

Pembuatan beberapa jenis jalan di atas pada umumnya dilakukan dengan proses pengerasan. Secara spesifik, pengerasan tersebut diawali dengan menggiling permukaan tanah menggunakan *roadroller*. Setelah itu, jalan yang telah terbentuk diberi lapisan batu yang tipis atau cangkang agar permukaan tanah menjadi lebih kuat. Selain itu, permukaan batu juga menjaga stabilitas tanah terjaga dan bongkahan tanah tidak mudah terbawa arus air. Pengerasan jalan bisa pula dilakukan dengan teknik lain, tetapi pada intinya hampir semua teknik pengerasan jalan kebun akan menggunakan bahan baku berupa

mineral bukan logam dan batuan. Oleh karena itu, pajak mineral bukan logam dan batuan menjadi relevan diterapkan pada proses pengerasan jalan kebun di perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Bangka Barat.

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Penerimaan pajak jenis ini menjadi hak pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Bangka Barat, berkewajiban juga untuk mengoptimalkan penggalian potensi penerimaan pajak ini. Optimalisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk konteks pengerasan jalan kebun kelapa sawit dapat diimplementasikan lewat beberapa cara berikut:

- **Perumusan ulang subjek dan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan.** Sedikit berbeda dengan regulasi pajak mineral bukan logam dan batuan pada umumnya, untuk konteks pengerasan jalan kebun kelapa sawit, subjek dan wajib pajak dapat dirumuskan ulang sebagai berikut. Pertama, subjek pajak dalam hal ini adalah pribadi atau badan yang menawarkan jasa pengerasan jalan kebun dan menyepakati kontrak kerja sama dengan perusahaan kelapa sawit untuk proyek terkait. Pajak jenis ini menjadi semakin relevan ketika pihak kontraktor adalah orang/ badan yang secara aktif melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi di Kabupaten Bangka Barat untuk kemudian dikomersilkan sebagai bahan baku pengerasan jalan kebun. Selanjutnya, wajib pajak dalam konteks ini adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sedang melakukan pengerasan jalan kebun.
- **Perumusan prosedur penarikan dan pengumpulan pajak mineral bukan logam dan batuan.** Pada intinya, khusus dalam kasus pengerasan jalan kebun kelapa sawit, pajak mineral bukan logam dan batuan secara riil dibebankan kepada pihak kontraktor. Idealnya, besaran dan kewajiban pembayaran pajak tersebut secara jelas tertuang dalam terma kontrak MOU antara kontraktor

dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dalam terma MOU yang ada, harus dijelaskan secara eksplisit bahwa pihak kontraktor diwajibkan membayar pajak yang bersangkutan. Perusahaan perkebunan menengahi proses pembayaran pajak terkait antara kontraktor dengan pengelola pajak daerah Kabupaten Bangka Barat. Artinya, untuk sementara waktu, setoran pajak terutang dari kontraktor dikumpulkan di perusahaan perkebunan terkait. Karena perusahaan perkebunan secara administratif merupakan wajib pajak maka perusahaan perkebunan selanjutnya wajib menyetorkan pajak terkumpul kepada pengelola pajak daerah Kabupaten Bangka Barat.

- **Penentuan besaran pajak mineral bukan logam dan batuan terutang.** Besaran pajak terutang didasarkan pada volume/tonase hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang digunakan untuk pengerasan jalan kebun. Volume penggunaan mineral dan batuan tersebut selanjutnya dikalikan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral dan batuan terkait dan terakhir dikalikan dengan tarif pajak yang bersangkutan (maksimal 25%).
- **Peningkatan kesadaran membayar pajak sosialisasi dan pendekatan langsung.** Dalam upaya meningkatkan kesadaran membayar pajak dari perusahaan perkebunan, sosialiasi dan pendekatan langsung secara personal merupakan cara yang dapat dilakukan dalam waktu dekat. Sosialisasi dilakukan oleh pengelola pajak dan dinas terkait Kabupaten Bangka Barat utamanya menyangkut arti penting pajak dan pengetahuan perpajakan secara umum. Lebih jauh, dalam rangka mendisiplinkan pembayaran pajak dan meminimalkan penghindaran serta tunggakan pajak, penegakan hukum harus diterapkan instrumen *punishment* yang adil terukur. Untuk memberikan insentif, *reward* tertentu juga harus diberikan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak.

4.2.2.3 Potensi Penerimaan PAD Sektor Perkebunan (Rakyat) Kelapa Sawit

Luas lahan perkebunan sawit swadaya, atau disebut sebagai perkebunan rakyat, menunjukan *trend* peningkatan setiap tahunnya. Sejak tahun 2012, luas perkebunan rakyat di Bangka Barat telah melampaui jumlah lahan khusus perkebunan rakyat itu sendiri—lahan khusus yang ada seluas 14.331 ha. Di tahun 2018, luas keseluruhan perkebunan rakyat di Bangka Barat diperkirakan telah mencapai 18.379,45 ha. Pertumbuhan luas perkebunan yang cukup pesat tersebut menciptakan peluang tersendiri bagi pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat untuk mampu menggali potensi penerimaan PAD dari sektor terkait.

Salah satu jenis pajak daerah yang paling relevan dari sektor perkebunan rakyat adalah pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan (secara resmi dikenal dengan nama PBB-P3). Untuk diingat, pajak PBB-P3 perkebunan besar merupakan jenis pajak pusat dan sedang berproses untuk dialihkan menjadi pajak provinsi. Akan tetapi, di wilayah Bangka Barat pajak PBB perkebunan tersebut belum diterapkan untuk kasus perkebunan rakyat yang kurang dari 25 ha. PBB perkebunan rakyat itulah yang selanjutnya potensial untuk digali lebih lajut demi optimalisasi penerimaan PAD Bangka Barat di tahun-tahun mendatang.

a. Pajak Bumi dan Bangunan-Perkebunan

Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan merupakan salah satu jenis Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Objek PBB perkebunan meliputi bumi dan atau bangunan. Kategori bumi meliputi areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif; areal pengaman; dan areal emplasemen. Di sisi lain, kategori bangunan meliputi kantor, pabrik, dan gudang yang menopang usaha perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Setiap orang/ badan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan tersebut selanjutnya digolongkan sebagai wajib pajak PBB perkebunan. Tidak jauh berbeda dengan PBB perdesaan dan perkotaan (PBB nonperkebunan), dasar pengenaan PBB perkebunan adalah nilai jual objek pajak (NJOP) yang tidak lain merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan. Untuk bisa

diimplementasikan pada sektor perkebunan rakyat, berikut beberapa langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah Bangka Barat:

- **Pembentukan regulasi PBB perkebunan rakyat.** Pembentukan regulasi dalam bentuk peraturan daerah dan sejenisnya mutlak harus ditempuh untuk memberikan legalitas dan pedoman yang jelas dalam pemungutan pajak yang bersangkutan. Sejatinya dalam peraturan tersebut dijelaskan segamblang mungkin mengenai definisi istilah-isitilah yang berkaitan, objek dan subjek pajak, penetapan besaran pajak, prosedur penarikan dan pemungutan pajak, ataupun hal-hal lain yang sekiranya relevan. Regulasi tersebut harus dilengkapi pula oleh instrumen sanksi dan penghargaan yang jelas sebagai insentif dan proses pendisiplinan pembayaran pajak. Meskipun perumusan regulasi tersebut dipastikan akan menyita waktu, tenaga, dan biaya, manfaat yang ada di masa mendatang diyakini akan jauh lebih besar, utamanya berupa peningkatan penerimaan pajak daerah secara signifikan di Kabupaten Bangka Barat.
- **Penghitungan potensi penerimaan PBB perkebunan rakyat.** Modal utama yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat untuk lobi politik ke legislator (DPDRD) dan kepala daerah adalah hitungan mengenai estimasi penerimaan PBB perkebunan rakyat. Hasil penghitungan estimasi tersebut diyakini pula akan berguna untuk hal-hal lainnya seperti penaksiran PAD di tahun-tahun mendatang dan wujud keseriusan pemda setempat dalam menggali potensi daerah yang ada untuk optimalisasi PAD Bangka Barat. Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan proses kalkulasi tersebut tidak boleh terlewatkan begitu saja oleh pihak pemerintah daerah Bangka Barat. Berikut penghitungan dari estimasi penerimaan PBB perkebunan rakyat, estimasi tersebut selanjutnya disebut sebagai besaran potensi PBB perkebunan rakyat.

Skema Perhitungan

A.	NJOP Tanah				
	1. Areal Produktif	256 x 10.000 x 75.000 = 192.000.000.000			
	2. SIT	256 x 2.795.000	=	715.520.000	+
	3. Total NJOP Tanah			192.715.520.000	
B.	NJOP Bangunan			0	+
C.	Total NJOP			192.715.520.000	
D.	NJOPTKP			10.000.000	-
E.	NJOP perhitungan PBB			Rp192.705.520.000	
F.	Rumusan PBB	0,3% x 192.705.520.000			
G.	PBB perkebunan terutang			Rp578.116.560	

Berdasarkan penghitungan lewat Skema perhitungan, disimpulkan bahwa PBB perkebunan rakyat setidaknya bisa menyumbang PAD sebesar Rp578 juta setiap bulannya. Skema perhitungan merupakan penghitungan potensi PBB perkebunan rakyat dengan menggunakan basis data satu KUD yang ada di Kecamatan Tempilang. KUD tersebut beranggotakan 143 pekebun yang tersebar di berbagai desa di Kecamatan Tempilang. KUD yang dimaksud adalah "KUD Bina Tani Sejahtera". Perhitungan tersebut menggunakan beberapa asumsi berikut:

- Semua petani di KUD Bina Tani Sejahtera taat membayar PBB perkebunan.
- Semua areal perkebunan yang digarap oleh petani swadaya merupakan lahan produktif.
- Nilai jual objek pajak bumi diasumsikan sebesar Rp75.000/m^2.
- Standar Investasi Tanaman (SIT) yang digunakan adalah Rp2.795.000/ha. SIT merupakan jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman.
- NJOP bangunan belum masuk ke dalam perhitungan PBB.
- NJOPTKP diasumsikan sebesar Rp10.000.000, mengikuti NJOPTKP PBB-P2.

- Tarif pajak terutang diasumsikan sebesar 0,3% mengikuti anjuran tarif maksimum PBB-P2.

Dalam skema perhitungan yang sedikit berbeda, apabila nilai jual objek pajak bumi diasumsikan sebesar Rp100.000/m^2, diperoleh potensi PBB perkebunan sebesar yang lebih besar yaitu Rp770.116.560. Di sisi lain, apabila asumsi nilai jual objek pajak bumi diasumsikan sebesar Rp50.000/m^2, diperoleh potensi PBB perkebunan sebesar Rp386.116.560. Jadi, disimpulkan bahwa potensi penerimaan PBB perkebunan rakyat berkisar antara Rp386.116.560 s.d. Rp770.116.560.

- **Dukungan pemerintah dalam pengembangan perkebunan (rakyat) kelapa sawit.** Di samping pemberian beban pajak kepada para pekebun swadaya, pemerintah daerah harus memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan tertentu untuk pengembangan dan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit swadaya. Pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat berhak memperoleh penerimaan pajak dari keberadaan perkebunan sawit yang ada di wilayahnya—terlepas dari kenyataan bahwa penerimaan tersebut masih harus dioptimalkan dan digali lebih lanjut. Sebagai konsekuensi logis dari hal tersebut, pemerintah daerah setempat berkewajiban untuk memberikan dukungan kepada pengembangan perkebunan (rakyat) kelapa sawit yang ada di Bangka Barat. Terdapat beberapa bentuk dukungan pemerintah daerah yang bisa dijadikan opsi kebijakan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit, diantaranya sebagai berikut:

  1. **Pemberian bantuan langsung dan pembangunan infrastruktur fisik.** Dukungan pemerintah daerah terhadap upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit swadaya di Bangka Barat salah satunya dapat diwujudkan dengan pemberian beberapa jenis bantuan. Bantuan yang dapat disalurkan diantaranya adalah berupa bibit kelapa sawit, pupuk, dan dana peremajaan kebun. Bantuan yang ada sifatnya dapat pula berbentuk pelatihan teknologi dan ilmu-ilmu perkebunan lainnya untuk peningkatan produktivitas para petani sawit yang ada di Bangka Barat. Aspek lain yang tidak boleh terlewatkan adalah

pembangunan infrastruktur fisik yang terkait erat dengan perkebunan itu sendiri seperti pembangunan irigasi untuk sumber air perkebunan yang sejauh ini secara dominan telah terdegradasi oleh tambang timah.

2. **Pola kemitraan perkebunan besar dan perkebunan rakyat.** Dalam rangka meningkatkan produktivitas petani sawit swadaya, pemerintah daerah Bangka Barat harus mampu mendorong terciptanya pola kemitraan yang baik antara petani swadaya dan perusahaan perkebunan swasta/ BUMN. Pola kemitraan yang ada harus diarahkan pada hubungan timbal balik yang bersifat simbiosis muatualistis antara kedua pihak terkait. Ketersediaan pabrik kelapa sawit yang dibangun perkebunan swasta/ BUMN menjamin terciptanya pasar tandan buah segar hasil petani sawit. Hal itu merupakan salah satu contoh nyata pola kemitraan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Lebih jauh, pemerintah daerah harus memastikan bahwa hubungan di antara keduanya tidak sebatas transaksi jual beli tandan buah segat kelapa sawit. Alih-alih semacam itu, pemerintah daerah harus mendorong perusahaan perkebunan swasta agar memiliki keberpihakan terhadap petani sawit swadaya, contohnya dengan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para petani swadaya.

3. **Perbaikan kelembagaan petani sawit swadaya.** Beberapa petani sawit swadaya di Bangka Barat belum terafiliasi ke dalam organisasi petani sejenis koperasi unit desa (KUD) ataupun jenis kelompok tani lainnya. Para petani tersebut biasanya merupakan petani kecil yang tinggal saling terpencar dan berjauhan serta kurang memiliki pengalaman/ kemampuan berorganisasi. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah daerah Bangka Barat harus mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani yang terorganisir semacam KUD ataupun kelompok tani jenis lainnya. Mengorganisir mereka lewat sebuah kelembagaan akan mendatangkan beberapa manfaat tersendiri bagi para petani kecil itu sendiri. Beberapa manfaat yang dimaksud adalah posisi daya tawar petani yang diyakini akan meningkat, perolehan akses pasar

yang lebih luas, perolehan berbagai fasilitas, pelatihan dan pembiayaan, serta kemungkinan memperoleh pendapatan yang lebih baik di masa depan.

Dalam jangka panjang, perbaikan kelembagaan petani dapat pula ditempuh dengan upaya pemberian pelatihan kepada para petani swadaya menuju sertifikasi dari *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), dan *International Standard on Certification and Carbon* (ISCC). Namun, sertifikasi keberlanjutan hanya diberikan kepada kelompok petani, bukan kepada individu. Jadi, masih terkait poin sebelumnya, pemerintah daerah harus mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani sebelum sertifikasi tersebut dilangsungkan. Terdapat beberapa manfaat yang akan diperoleh kelompok tani dari sertifikasi yang ada. Dalam jangka pendek, para petani akan memperoleh pelatihan intensif teknologi pertanian dan beberapa bantuan lainnya. Dalam jangka panjang, dengan sertifikasi, kelompok tani akan mendapatkan akses terhadap permintaan internasional untuk kelapa sawit secara berkelanjutan, peningkatan efisiensi produksi, peningkatan produktivitas dan peningkatana efisiensi biaya pengelolaan.

4.2.3 Potensi PAD Sektor Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)

Pengujian kendaraan bermotor (uji kir) adalah serangkaian kegiatan pengujian bagian kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis dan layak jalan di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang baik pribadi maupun plat kuning, seperti mobil penumpang,truk dan bus, kendaraan berplat kuning serta tidak berlaku untuk sepeda motor.

Rangkaian pemeriksaan meliputi: 1) emisi gas buang, 2) tingkat kebisingan, 3) kemampuan rem utama, 4) kemampuan rem parkir, 5) kincup roda depan, 6) kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama, 7) akurasi alat penunjuk

kecepatan, dan 8) kedalaman alur ban dengan estimasi waktu sekitar 25 menit dan dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Tabel 4.38 menunjukkan jumlah kendaraan roda empat atau lebih di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2010 hingga tahun 2017, karena data untuk tahun 2018 tidak tersedia. Secara rata-rata, pertumbuhan kendaraan roda empat atau lebih sebesar 4.08% ≈ 4% per tahun.

Tabel 4. 38 Jumlah kendaraan roda empat atau lebih

Tahun	Jumlah	Delta
Tahun 2010	4029	-
Tahun 2011	5098	26.53%
Tahun 2012	5790	13.57%
Tahun 2013	6706	15.82%
Tahun 2014	5695	-15.08%
Tahun 2015	5695	0.00%
Tahun 2016	4933	-13.38%
Tahun 2017	4987	1.09%
Tahun 2018	N.A.	-

Sumber: analisis penulis (2019).

Tabel 4.39 menunjukkan jumlah kendaraan yag diwajibkan mengikuti uji kir, baik untuk kendaraan baru maupun pengujian ulang. Apabila dicermati lebih lanjut, proporsi antara jumlah kendaraan roda empat atau lebih yang wajib mengikuti uji kir terhadap jumlah kendaraan roda empat atau lebih secara rata-rata pada tiap tahun tersebut adalah sebanyak 43%. Artinya, sebanyak 43% dari kendaraan roda empat atau lebih setiap tahunnya wajib mengikuti uji kir.

Tabel 4. 39 Jumlah kendaraan roda empat atau lebih wajib KIR

Tahun	Jumlah
Tahun 2010	2104
Tahun 2011	2335
Tahun 2012	2239
Tahun 2013	2828
Tahun 2014	2598
Tahun 2015	2004
Tahun 2016	1937
Tahun 2017	1679
Tahun 2018	1609

Sumber: analisis penulis (2019).

Biaya yang dikenakan untuk pengujian ini berbeda untuk tiap kategori kendaraan, penentuan biaya ini didasarkan pada jumlah berat bruto (JBB) rata-rata tiap kategori kendaraan. Untuk mobil penumpang sebesar Rp 40.000, mobil bus sebesar Rp 42.000, mobil barang sebesar Rp 52.000 dan kereta gandeng sebesar Rp 42.000. Pada tahun 2010 hingga tahu 2018, biaya yang dikenakan tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Barat terdapat kendala dengan terbatasnya tempat balai pengujian kir sehingga dirasa perlu untuk melakukan pembangunan gedung uji baru dengan nilai pembangunan mencapai Rp 1.951.071.600. Selain faktor alat dan kualitas sumberdaya manusia yang berdampak langsung pada teknis pengujian, pembangunan gedung uji kir merupakan salah satu cara mengantisipasi peran swasta dalam persaingan penyedia uji kir, mengingat UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewadahi keterlibatan swasta dalam penyediaan fasilitas uji kir.

Tabel 4.40 memproyeksikan jumlah kendaraan roda empat atau lebih dan jumlah kendaraan roda empat atau lebih yang wajib mengikuti untuk setiap tahun dalam sepuluh tahun mendatang, asumsi yang digunakan adalah: 1) pertumbuhan

kendaraan roda empat atau lebih sebesar 4% per tahun, 2) 43% diantaranya wajib mengikuti uji kir.

Tabel 4. 40 Proyeksi kendaraan roda empat atau lebih

Tahun	Jumlah	Wajib kir
Tahun 2019	5394	2319
Tahun 2020	5610	2412
Tahun 2021	5834	2509
Tahun 2022	6067	2609
Tahun 2023	6310	2713
Tahun 2024	6563	2822
Tahun 2025	6825	2935
Tahun 2026	7098	3052
Tahun 2027	7382	3174
Tahun 2028	7677	3301
Tahun 2029	7984	3433

Sumber: analisis penulis (2019).

Untuk melakukan proyeksi pendapatan diperlukan rincian uji kir untuk masing-masing kategori kendaraan. Dan karena adanya keterbatasan data, maka diasumsikan proporsi untuk tiap kategori adalah sama yaitu 25%. Dengan biaya pengujian yan sama yaitu mobil penumpang sebesar Rp 40.000, mobil bus sebesar Rp 42.000, mobil barang sebesar Rp 52.000 dan kereta gandeng sebesar Rp 42.000, maka proyeksi kontribusi uji kir terhadap PAD adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 41 Proyeksi pemasukan

	Rincian pemasukan				Kontribusi terhadap PAD (Rupiah)
	Mobil penumpang	Mobil bus	Mobil barang	Kereta gandeng	
Tahun 2019	23.190.000	24.349.500	30.147.000	24349500	102.036.000
Tahun 2020	24.120.000	25.326.000	31.356.000	25.326.000	106.128.000
Tahun 2021	25.090.000	26.344.500	32.617.000	26.344.500	110.396.000
Tahun 2022	26.090.000	27.394.500	33.917.000	27.394.500	114.796.000
Tahun 2023	27.130.000	28.486.500	35.269.000	28.486.500	119.372.000
Tahun 2024	28.220.000	29.631.000	36.68.6000	29.631.000	124.168.000
Tahun 2025	29.350.000	30.817.500	38.155.000	30.817.500	129.140.000
Tahun 2026	30.520.000	32.046.000	39.676.000	32.046.000	134.288.000
Tahun 2027	31.740.000	33.327.000	41.262.000	33.327.000	139.656.000
Tahun 2028	33.010.000	34.660.500	42.913.000	34.660.500	145.244.000
Tahun 2029	34.330.000	36.046.500	44.629.000	36.046.500	151.052.000

Sumber: analisis penulis (2019).

Untuk menguji kelayakan atas investasi pembangunan gedung maka akan digunakan analisis Net Present Value (NPV). Pada dasarnya, ide untuk melakukan NPV adalah menggunakan konsep Nilai Mata Uang (Time Value of Money). *Net Present Value* ini mengestimasikan nilai sekarang pada suatu proyek, aset ataupun investasi berdasarkan arus kas masuk yang diharapkan pada masa depan dan arus kas keluar yang disesuaikan dengan suku bunga dan harga pembelian awal. Nilai NPV yang negatif berarti proyek tidak layak dilakukan karena nilai inevstasi lebih besar dibandingkan nilai yang dihasilkan, sedangkan nilai NPV positif berarti proyek layak dijalankan karena memberikan keuntungan diluar nilai investasi, dan nilai NPV sama dengan nol berarti nilai investasi dan nilai yang dihasilkan adalah sama (impas).

NPV dapat dihitung sebagai berikut:

$$NPV = \sum_{t-1}^{T} \frac{C_t}{(1+r)^t} - C_0$$

Keterangan :

NPV = *Net Present Value* (dalam rupiah)

C_t = *Cash flow*/ arus kas per tahun pada periode t

C_0 = *Initial outlay*/ nilai investasi awal pada tahun ke 0 (dalam rupiah)

r = *Discount rate*/ tingkat suku bunga atau (dalam %)

Dengan menggunakan tingkat discount rate sebesar 10% untuk mengakomodir faktor risiko atas gedung yang dibangun, dan masa gedung selama 20 tahun maka penghitungan NPV adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 42 Analisa NPV

Tahun	Pemasukan	Discount Rate (10%)	Proceed
2019	102036000	1.1	92760000
2020	106128000	1.21	87709091
2021	110396000	1.331	82942149
2022	114796000	1.4641	78407213
2023	119372000	1.61051	74120620
2024	124168000	1.771561	70089599
2025	129140000	1.9487171	66269239
2026	134288000	2.14358881	62646343
2027	139656000	2.357947691	59227777
2028	145244000	2.59374246	55997850
2029	151052000	2.853116706	52942805
2030	157101145	3.138428377	50057266
2031	50506679	3.452271214	14629986
2032	169920599	3.797498336	44745404
2033	176717423	4.177248169	42304746
2034	183786120	4.594972986	39997214
2035	191137564	5.054470285	37815548
2036	198783067	5.559917313	35752882
2037	206734390	6.115909045	33802725
2038	215003765	6.727499949	31958940
Total			1.114.177.396
Initial Outlay			1.951.071.600
NPV			-836.894.204

Sumber: analisis penulis (2019).

Berdasarkan penghitungan tersebut, pembangunan gedung baru perlu dikaji ulang karena nilai investasi lebih besar dibandingkan proyeksi pendapatan selama dua puluh tahun mendatang. Terdapat dua rekomendasi yang dapat dilakukan

yaitu dengan mengurangi nilai investasi atau dengan meningkatkan pemasukan. Biaya uji kir tidak mengalami perubahan selama sepuluh tahun terakhir, sehingga penyesuaian biaya dapat dilakukan.

4.2.4 Potensi Penerimaan Bagian Laba PDAM

4.2.4.1 Gambaran Umum

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), disamping sumber pendapatan lain seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Dari aspek hukum, pembentukan BUMD merupakan amanat undang-undang UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Nota Keuangan dan RAPBN, 1997/1998). Sehingga merupakan kewajiban untuk masing-masing daerah untuk mengoptimalkan kinerja BUMD yang dimiliki sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatnya umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah sesuai dengan tujuan dibentuknya BUMD yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di atas.

Salah satu BUMD yang bergerak di bidang usaha adalah perusahaan jasa air bersih (PDAM) yang dimiliki masing-masing daerah kota/kabupaten, termasuk PDAM Tirta Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat. Ditinjau dari evaluasi kinerja berdasarkan Kepermendagri No. 47 Tahun 1999, beberapa rekomendasi perlu dilakukan oleh manajemen PDAM Tirta Sejiran Setason, salah satunya menyusun *Corporate Plan* baru (2020 – 2025). Sebelumnya PDAM Tirta Sejiran Setason telah memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM (Jakstrada SPAM) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bangka Barat no. 58 tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang berpedoman pada Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2013 – 2033. Dalam Jakstrada SPAM

tersebut belum mencantumkan proyeksi rinci sasaran yang ingin dicapai sampai dengan akhir masa berlaku 2019. Sehingga direkomendasikan untuk membuat *Corporate Plan* baru (2020 – 2025) dengan mempertimbangkan isu strategis, permasalahan yang dihadapi, dan realisasi lima tahun sebelumnya dalam menetapkan target.

Corporate Plan yang disusun perlu mempertimbangkan isu strategis terkini seperti potensi pengembangan lini bisnis baru dan potensial penerimaan dari eksisting konsumen maupun potensial konsumen yang dapat diciptakan dari dikembangkannya produk baru. Belajar dari PDAM di kabupaten lain, beberapa PDAM mulai melakukan manufer bisnis seperti membuka lini bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dilakukan oleh PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulonprogo dan PDAM Tirta Satria Banyumas. Perluasan lini bisnis AMDK merupakan hal yang menarik karena PDAM telah memiliki modal berupa saluran-saluran pada sumber air di masing-masing daerah.

4.2.4.2 Benchmark Perluasan Lini Bisnis AMDK

Untuk membuka lini bisnis baru, perlu dilakukan analisis terhadap biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan yang dapat dihasilkan dari bisnis tersebut. Perhitungan analisis bisnis di bawah menggunakan pendekatan, angka, dan scenario yang dilakukan oleh studi terdahulu. Sehingga untuk diaplikasikan di Kabupaten Bangka Barat perlu dilakukan penyesuaian harga, kapasitas supply air, kemampuan daya beli konsumen yang akan mempengaruhi harga jual produk, dan hal-hal khusus lain.

a. Rencana Harga Produksi

Pilihan produk yang dapat dihasilkan ada tiga jenis, yaitu galon 19L, botol 600mL, dan gelas 240 mL dengan presentase produksi yang berbeda untung masing-masing produk sesuai dengan kapasitas efektif mesin produksi.

Tabel 4. 43 Persentase produksi AMDK liter/jam kerja

No.	Kemasan (unit)	Persentase Kemasan	Produksi (liter)	Produksi Efektif (liter)
1	Galon 19L	89%	2.106	1.685
2	Botol 600mL	6%	142	114
3	Gelas 240mL	5%	118	95
	Total	100%	2.366	1.893

Sumber: pengolahan pribadi (2019)

Selanjutnya dapat diproyeksikan untuk jangka waktu per hari (20 jam operasional), dan per tahun (240 hari kerja).

Tabel 4. 44 Volume produksi AMDK liter/tahun

No.	Kemasan (unit)	Produksi		
		Liter/jam	Liter/hari	Liter/tahun
1	Galon 19L	1.685	33.694	8.086.592
2	Botol 600mL	114	2.272	545.163
3	Gelas 240mL	95	1.893	454.303
	Total	1.893	37.859	9.086.058

Sumber: pengolahan pribadi (2019)

Untuk kemasan per kardusnya, AMDK kemasan botol 600mL akan diisi 24 unit per pack dan 48 unit per pack untuk kemasan gelas 240mL.

Tabel 4. 45 Volume produksi AMDK pack/tahun

No.	Kemasan (unit)	Produksi		
		pack/jam	pack/hari	pack/tahun
1	Galon 19L	89	1.773	425.610
2	Botol 600mL	8	158	37.859
3	Gelas 240mL	8	164	39.436

Sumber: pengolahan pribadi (2019)

Tabel 4. 46 Rencana harga dan laba penjualan AMDK

No.	Kemasan (unit)	Harga Rp/unit	Harga Rp/liter	Harga Rp/pack	Biaya Produksi Rp/pack	Laba Rp/pack
1	Galon 19L	10.000	526	10.000	4.000	6.000
2	Botol 600mL	1.500	2.500	36.000	31.000	5.000
3	Gelas 240mL	250	1.042	12.000	9.000	3.000

Sumber: pengolahan pribadi (2019)

Tabel 4. 47 Nilai penjualan AMDK liter per satuan waktu

No.	Kemasan (unit)	Nilai Penjualan (liter)		
		Rp/jam	Rp/hari	Rp/tahun
1	Galon 19L	886.688	17.733.754	4.256.100.965
2	Botol 600mL	283.939	5.678.786	1.362.908.736
3	Gelas 240mL	98.590	1.971.801	473.232.200
	Total	1.269.217	25.384.341	6.092.241.901

Sumber: pengolahan pribadi (2019)

b. Biaya Investasi

Biaya investasi merupakan biaya yang perlu dikeluarkan investor untuk memulai bisnis, berupa pembebasan lahan, perizinan usaha, pembangunan gedung, pembelian mesin, dan biaya lain-lain. Perkiraan biaya investasi perluasan lini bisnis AMDK digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 48 Biaya investasi pendirian lini bisnis AMDK

No.	Uraian	Biaya (Rp)
1	Biaya perizinan dan persiapan	533.000.000
2	Persiapan lahan	69.200.000
3	Konstruksi bangunan	1.361.500.000
4	Masin RO	1.295.000.000
5	Mekanikal & elektrikal	182.000.000
	Total setelah PPn 10%	**3.731.470.000**

Sumber: pengolahan pribadi (2019)

c. Biaya Operasional

Untuk mengkasilkan produk yang diharapkan, perusahaan perlu melakukan kegiatan produksi yang dilakukan setiap hari kerja selama satu tahun periode. Biaya ini secara rutin akan dikeluarkan oleh perusahaan setiap tahun mengikuti inflasi dan kenaikan harga. Guna kebutuhan kemudahan perhitungan, kenaikan biaya operasional diasumsikan naik sejalan dengan kenaikan harga jual produk sehingga kenaikan biaya ini akan terkompensasi seiring dengan kenaikan harga jual produk.

Tabel 4. 49 Biaya operasional tahunan lini bisnis AMDK

No.	Uraian	Biaya per Tahun (Rp)
1	Biaya Peralatan	490.000.000
2	Biaya Tenaga Kerja	1.057.200.000
3	Biaya Bahan (botol, tutup, sealing, merk)	623.769.681
4	Biaya Listrik	240.000.000
5	Biaya Transportasi	979.200.000
6	Biaya Overhead	139.968.000
	Total	**3.530.137.681,2**

d. Biaya Pemeliharaan

Setelah beroperasi, perusahaan juga perlu menganggarkan biaya pemeliharaan yang meliputi pemeliharaan gedung dan lahan, pemeliharaan bangunan air, dan pemeliharaan peralatan, mesin dan biaya memeliharaan lain. Estimasi pembiayaan untuk pemeliharaan mencapai Rp 14 juta per bulan atau Rp 168 juta per tahun. Sama seperti kenaikan harga pada kegiatan produksi, kenaikan biaya pemeliharaan diasumsikan akan searah dan sama besar dengan kenaikan harga jual produk AMDK.

e. Analisis Kelayakan Bisnis dengan Metode Net Present Value (NPV)

Metode NPV merupakan alat untuk menilai kelayakan bisnis dengan memproyeksikan penerimaan yang akan didapat di masa yang akan datang dan membaginya kengan koefisien *present value* untuk mengukur nilai keuntungan di masa sekarang. Rumus metode NPV adalah sebagai berikut:

$$NPV = -(Biaya\ Investasi) + \frac{Laba\ Bersih\ Tahunan}{(1+r)}$$

Proyek ini harapkan akan eksis selamanya dan menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka Barat. Laba bersih tahunan didapat dari hasil pengurangan biaya operasional dan biaya perawatan. Interest rate yang digunakan dalam proyeksi adalah target inflasi pemerintah 2019 (3,5%) ditambah resiko bisnis lain, sehingga diambil angka interest rate sebesar 6% per tahunnya. Proyek dinilai layak diterima apabila nilai NPV positif sesuai dengan ekspektasi penerimaan yang diinginkan investor.

$$NPV = -Rp\ 3.731.470.000 + \frac{Rp\ 2.394.104.220}{(1+0{,}06)} = Rp\ 5.650.998.949{,}63$$

Perhitungan di atas menggunakan pendekatan sederhana tanpa memperhatikan kapasitas umur ekonomis mesin, penyusutan, dan risiko bisnis lain. Dari perhitungan kelayakan bisnis dengan metode NPV menunjukkan bahwa perluasan usaha AMDK mampu memberikan NPV yang positif, layak investasi.

4.2.5 Potensi PAD Sektor Pelayanan Pelabuhan

4.2.5.1 Gambaran Umum

Kapal laut adalah salah satu moda transportasi yang dapat dijadikan alternatif untuk berpergian, dengan harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan pesawat. Selain menjadi alternatif moda transportasi, kapal juga memiliki peran penting dalam angkutan barang, yakni dengan penggunaan peti kemas yang memudahkan proses bongkar-muat, sehingga biaya angkut barangnya relatif murah, serta keamanan barangnya juga lebih terjaga. Dalam mendukung aktifitas tersebut, pelabuhan juga menjadi fasilitas vital dalam proses aktifitas tersebut, yakni untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang. Melihat tingginya aktifitas di pelabuhan dapat menjadi potensi pemasukan bagi Pemerintah Daerah Kab. Bangka, yakni dengan melakukan kerjasama dengan PT. ASDP selaku pengelola Pelabuhan.

Selain pelabuhan, terdapat pula mercusuar yang berlokasi persis disebelah pelabuhan. Mercusuar Tanjung kalian memiliki nilai sejarah yang tinggi, sehingga dapat dijadikan obyek wisata unggulan selain Pantai Batu Rakit dan Bukit Menumbing. Namun, fasilitas yang ada di wilayah mercusuar terlihat kurang terawat. Pengelolaan obyek wisata ini juga belum dipungut retribusi untuk masuk ke mercusuar ataupun retribusi parkir untuk pengunjung. Untuk itu perlu dilakukan kerjasama dengan Distrik Navigasi Kementerian Perhubungan untuk mengelola mercusuar tersebut, agar lebih terawat dan menjadi salah satu pemasukan untuk sektor pariwisata.

4.2.5.2 Saran dan Rekomendasi

a. **Pemungutan retribusi parkir Pelabuhan**. Walaupun untuk memasuki Pelabuhan Penyebrangan PT. ASDP telah dikenakan taraif masuk, namun dapat pula ditambah dengan retribusi parkir yang dipungut oleh Pemda, ataupun bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola parkir tersebut, dan membayar pajak parkir kepada Pemda. Tarif retribusi parkir dapat dijadikan satu dengan tarif masuk, yakni dengan menaikkan tarif masuk pelabuhan. Strategi lain yang dapat dipilih yakni dengan memisahkan antara karcis masuk dan karcis parkir. Dengan strategi ini Pemda dapat mengenakan tarif retribusi parkir sesuai Perda No. 4 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sehingga tidak terlalu memberatkan pengunjung. Selain itu pemda juga perlu memberikan keamanan lebih atas kendaraan pengunjung karena telah dikenakan retribusi parkir.
b. **Pemungutan retribusi tiket masuk dan parkir Mercusuar**. Pemda dapat melakukan kerjasama dengan Distrik Navigasi Kementerian Perhubungan untuk mengelola mercusuar dan memungut tiket masuk dan parkir. Besaran tarif dapat ditentukan sesuai kesepakatan, ataupun menggunakan Perda Kab. Bangka Barat No. 20 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

c. **Pembangunan fasilitas yang memadai**. Selain memungut retribusi Pemda juga perlu mengimbangi dengan menyediakan fasilitas yang memadai disekitar mercusuar, seperti MCK, pendopo yang terawat, maupun spot foto untuk menarik minat wisatawan untuk berkeunjung ke mercusuar.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Melihat komposisi penerimaan APBD Kabupaten Bangka Barat yang masih didominasi oleh dana perimbangan, di tahun 2017 kontribusinya mencapai 74%, dengan kontribusi PAD sebesar 9%, menunjukan bahwa Kabupaten Bangka Barat masih memiliki ketergantungan fiskal yang relatif tinggi terhadap pemerintah pusat. Meskipun begitu, seiring dengan gencarnya penggalian potensi dasar Kabupaten Bangka Barat, penerimaan PAD berpotensi untuk mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan PAD Kabupateng Bangka Barat, yakni dengan menyusun database PAD Kabupaten Bangka Barat. Penyusunan database PAD ini meliputi kajian mengenai intensifikasi peningkatan PAD, proyeksi PAD, kajian ekstensifikasi PAD yang dapat dikembangkan di Kabupaten Bangka Barat, seperti potensi pemanfaatan sampah rumah tangga, pemungutan pajak PBB untuk perkebunan kelapa sawit rakyat, serta analisis pengujian kendaraan bermotor KIR. Dari analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan beberapa asumsi yang diberlakukan, total penerimaan PAD tahun 2019 dipotensikan sebesar Rp76 milyar-Rp82 milyar, pertumbuhan PAD tahun 2019 dipotensikan pada kisaran 10%-19%. Di tahun 2019, komposisi PAD diproyeksikan tidak akan mengalami perubahan berarti—lain-lain PAD masih akan menjadi komponen paling kontributif. Meskipun begitu, dominasi komponen lain-lain PAD akan diimbangi oleh pajak daerah yang memiliki rerata perumbuhan tahunan mencapai 13% dan di tahun mendatang dipotensikan tumbuh 9%-22%. Diharapkan bahwa upaya yang gencar untuk menggali lebih dalam potensi penerimaan retribusi daerah mampu meningkatkan penerimaan komponen tersebut sehingga mampu mengimbangi pajak daerah yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan lebih besar lagi. Pada akhirnya, struktur PAD ideal

yang diharapkan adalah komposisi PAD yang lebih didominasi oleh pajak dan retribusi daerah karena keduanya merupakan cerminan kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi dasar wilayah setempat.

2. Optimalisasi penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Bangka Barat terkendala oleh kejujuran dari pihak pengusaha atau peternak walet yang tidak terbuka menginformasikan jumlah pendapatannya. Selain itu, harga sarang walet di pasaran yang fluktuatif menjadi kendala lain sulitnya penarikan pajak dari sektor ini oleh pemerintah daerah setempat.
3. Dua tahun terakhir yaitu tahun 2017-2018 sumbangan BBI pada PAD nihil karena adanya hambatan internal dan eksternal yang menyebabkan tidak adanya penjualan benih ikan. Hambatan internal yang ada ialah status BBI yang belum jelas dari bupati (apakah UPT atau Kegiatan Dinas) menyebabkan petuggas kurang semangat dalam bekerja. Struktur kolam yang belum memenuhi standar. Penetapan retribusi penjualan dibawah harga pasar. Sedangkan hambatan eksternal yang terjadi adalah adanya bencana alam seperti banjir air bah, petir, PH Air dibawah 5, serta adanya hama (hewan pemangsa ikan dan manusia). Penetapan retribusi harga yang kurang ideal akan mempengaruhi jumlah penjualan. Sebab, masyarakat cenderung mengikuti perkembangan harga yang ada di pasar.
4. Berdasarkan hasil survei lapangan, potensi retribusi rekreasi, retribusi parkir, retribusi pelayanan pasar, pajak hotel, pajak restoran, maupun pajak parkir potensi menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari realisasi tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kemungkinan peningktan PAD dengan melakukan intensifikasi obyek PAD yang ada.
5. Pada umumnya, perolehan PAD dari retribusi persampahan di berbagai daerah tidak lebih dari 3 persen bila dibandingkan perolehan retribusi secara keseluruhan. Akan tetapi, dengan nilai retribusi persampahan di Bangka Barat yang cukup besar, yaitu Rp20.000,- bila dibandingkan dengan daerah lain, maka nilai potensi realistis yang dapat diperoleh dari retribusi rumah tangga (10%) dari

jumlah keseluruhan rumah tangga per bulan mencapai Rp 25.794.572 per bulan atau Rp 309.534.864 per tahun.

6. Keberadaan perkebunan sawit di Kabupaten Bangka Barat berpotensi menyumbang penerimaan PAD lebih besar lagi di masa yang akan datang. Sektor perusahaan perkebunan sawit berpotensi menyumbang lebih besar lagi penerimaan pajak air tanah dan pajak bahan galian. Di sisi lain, perkebunan (rakyat) sawit berpotensi menyumbang PAD dalam bentuk pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan. Dengan beberapa asumsi yang ada, potensi penerimaan PBB sektor perkebunan rakyat adalah sebesar Rp386 juta-Rp770 juta.
7. Berdasarkan perhitungan kelayakan bisnis, pembuatan AMDK oleh PDAM Tirta Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dinilai layak investasi. Hal itu ditunjukan oleh angka net present value (NPV) yang positif. Diharapkan bahwa penambahan lini bisnis tersebut dapat meningkatkan operating profit dan memberikan kontribusi tersendiri bagi penerimaan PAD Kabupaten Bangka Barat.
8. Tingginya aktifitas di pelabuhan dan tidak dipungutnya retribusi untuk memasuki wilayah mercusuar, dapat menjadi potensi PAD bagi Kab. Bangka Barat. Melihat potensi tersebut Pemda dapat melakukan kerjasama dengan PT. ASDP untuk menarik retribusi parkit di pelabuhan, serta pengelolaan mercusuar sebagai salah satu obyek wisata sejarah.

5.2 Rekomendasi

Secara umum, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan secara mendalam, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD, diantaranya sebagai berikut:

1. Membuat slogan yang menjadi payung program-program antar sektor yang terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD.
2. Menetapkan peningkatan PAD yang berkelanjutan sebagai Key Performance Indicator dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, melalui roadmap peningkatan PAD.
3. Mendorong kepemimpinan OPD yang berorientasi pada inovasi pelayanan publik dan peningkatan PAD.
4. Mendorong pembangunan industri manufaktur yang memanfaatkan komoditas dan sumber daya lokal seperti produk turunan minyak kelapa sawit, air minum kemasan, sarang burung walet, pengeringan dan pengasapan ikan.
5. Mengutamakan penggunaan produk dan komoditas lokal pada setiap kegiatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meingkatkan insentif produksi sektor pertanian dan manufaktur.
6. Menyeimbangkan antara kebijakan peningkatan PAD dan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
7. Menciptakan festival tahunan dengan tema pembelajaran sejarah yang mendorong pariwisata lokal.
8. Melakukan peninjauan regulasi secara berkala, khususnya regulasi yang terkait dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bangka Barat, agar mengikuti perkembangan dan dinamika yang ada.

Terakhir, secara khusus, rekomendasi kebijakan yang dapat mengarah pada peningkatan PAD baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan basis data berbasis sistem informasi nyaris mutlak dibutuhkan oleh Kabupaten Bangka Barat khususnya untuk memetakan potensi PAD yang ada di wilayah tersebut. Perancangan basis data potensi PAD diharapkan mampu menggenjot penerimaan PAD di masa mendatang untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Bangka Barat.

2. Intensifikasi pemungutan pajak sarang burung walet dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bangka Barat, salah satunya berupa peningkatan kegiatan pemeriksaan oleh aparat pajak melalui verifikasi lapangan. Dari verifikasi lapangan tersebut diharapkan aparat pajak dapat memperoleh data akurat wajib pajak sarang burung walet. Pendekatan langsung kepada para pengusaha/ peternak sarang walet diharapkan mampu meningkatkan kejujuran mereka dalam menyampaikan pendapatan dari sektor usaha tersebut yang selanjutnya menjadi basis penghitungan pajak sarang burung walet.
3. Penertiban penjaga loket wisata, agar dapat beroperasi setiap hari, tidak hanya saat akhir pekan atau hari libur nasional saja. Selain itu perlu juga meningkatkan tarif retribusi, yang diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasaran yang memadai, dan melakukan juga pemasaran obyek-obyek wisata di Kab. Bangka Barat.
4. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dan pajak hotel yakni dengan melakukan jemput bola ke obyek-obyek pajak tersebut di setiap bulannya. Selain itu, dapat pula dilakukan dispensasi persentase pajak dengan persyaratan-persyaratan tertentu.
5. Intensifikasi penerimaan pajak air tanah sektor perusahaan perkebunan dapat diawali oleh pendataan rumah tangga yang menetap di areal perkebunan dan menggunakan air tanah. Selanjutnya, untuk akurasi basis pajak terkait, meteran air harus dipasang di setiap rumah. Untuk sementara waktu, skenario penentuan basis pajak lewat SIPA dapat ditempuh sebelum meteran air berhasil dipasang.
6. Dalam menerepkan pajak bahan galian pada proses pengerasan jalan kebun sawit, direkomendasikan bahwa pajak terkait secara riil dibayarkan oleh pihak kontraktor perusahaan pengerasan jalan. Selanjutnya, penerimaan pajak tersebut disetorkan kepada pengelola pajak daerah oleh perusahaan perkebunan sawit sebagai wajib pajak.

7. Penerapan PBB sektor perkebunan rakyat harus diawali oleh perumusan regulasi (perda) yang relevan dengan hal tersebut. Inisiasi PBB sektor perkebunan rakyat harus diiringi oleh perbaikan kelembagaan petani sawit swadaya yang ada di wilayah Bangka Barat. Pembentukan organisasi petani semacam koperasi tani akan memudahkan pihak pemda dalam melakukan sosialisasi berikut proses penarikan pajak tersebut di masa mendatang. Agar keberadaan pajak ini tidak menjadi disinsentif bagi petani sawit swadaya, pemerintah daerah harus berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada para petani tersebut. Dukungan tersebut diantaranya dapat berupa perbaikan kelembagaan petani swadaya, pemberian bantuan benih dan dana peremajaan kebun, pemberian pelatihan teknologi perkebunan dan pertanian, dan sertifikasi petani sawit untuk memperoleh kepastian harga dan akses pasar yang lebih luas lagi.
8. Belanja daerah harus diarahkan untuk memperluas basis pajak/ retribusi baru (ekstensifikasi) di wilayah Bangka Barat, khususnya untuk investasi awal berikut biaya pemeliharaan rutin dari aktivitas baru yang ada. Secara khusus sejumlah dana tertentu harus dianggarkan untuk pembangunan sarana prasarana pendukung penyediaan jasa pelayanan baru berupa layanan persampahan dan pengolahannya (dikembangkan untuk rumah tangga), layanan uji KIR, usaha penyediaan AMDK, PBB sektor perkebunan rakyat, dan layanan parkir pelabuhan. Untuk kepastian hukum dalam pemungutan pajak/ retribusi tersebut, diperlukan pembentukan dan pembenahan regulasi (peraturan daerah) terkait.
9. Melakukan kerjasama dengan PT. ASDP untuk memungut retribusi parkir untuk pengunjung pelabuhan, yang dapat diterapkan dengan menaikkan tiket masuk, atau mengelola parkir untuk diungut retribusi oleh Pemda. Selin pelabihan, kerjasama yang dibangun dapat pula mengatur kerjasama untuk pengelolaan mercusuar agar lebih terpelihara dan dapat menjadi sumbangan ke PAD dengan pemungutan retribusi.

LAMPIRAN

MANUAL BOOK
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Pendahuluan

Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) merupakan aplikasi sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk memberikan informasi dan melakukan input pendapatan asli daerah. Melalui aplikasi ini user dapat :

a. melakukan input terhadap data pendapatan daerah dan melakukan olah data terhadap data tersebut
b. mengetahui laporan dari berbagai data pendapatan asli daerah berdasarkan data awal yang telah diinput
c. melakukan forecast (peramalan) terhadap data pendapatan asli daerah berdasarkan laporan dari tahun sebelumnya.
d. Sebagai dasar dalam memberikan keputusan untuk peningkatan potensi daerah.

Adapun rincian fitur – fitur aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) adalah sebagai berikut :

a. Menu Utama (Pajak dan Retribusi) : di dalam menu ini user dapat melakukan olah data / input data yang kemudian secara otomatis akan di terjemahkan oleh aplikasi menjadi laporan – laporan pendapatan asli daerah
b. Menu Laporan : di dalam menu ini user bisa melihat laporan pendapatan asli daerah yang sudah diolah oleh system. Melalui menu ini user juga bisa melakukan eksport data laporan yang ada.
c. Menu Referensi : didalam menu ini user bisa memasukkan data master yang diperlukan oleh aplikasi dan menjadi data acuan untuk data data yang ada di menu utama
d. Menu Sistem : di dalam menu ini user dapat melakukan manajemen user, manajemen group ,melihat log dan konfigurasi system.

Halaman Login & Dashboard

Untuk masuk kedalam aplikasi harus menggunakan username dan password. Agar pegawai mempunyai username dan password, maka admin perlu memasukkan username pegawai, ketika data sudah tersimpan maka secara otomatis user tersebut akan mempunyai username dan password sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh admin.

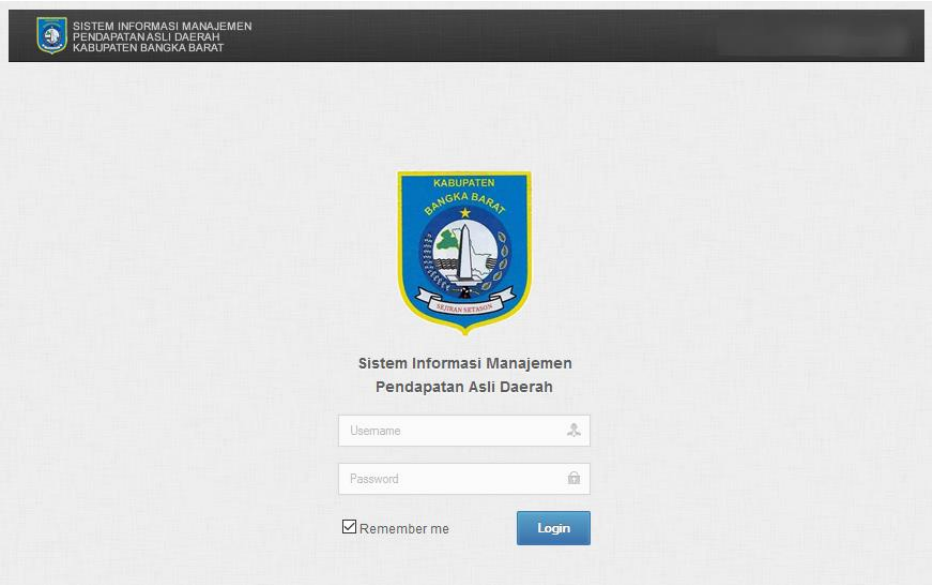

Setelah login, user akan masuk ke dashboard yang berisikan menu-menu disebelah kiri dan icon-icon di bagian tengah. Menu dan icon tersebut memiliki fungsi yang sama dimana apabila diklik maka akan menghubungkan user ke bagian lain dalam sistem sesuai dengan keperluan.

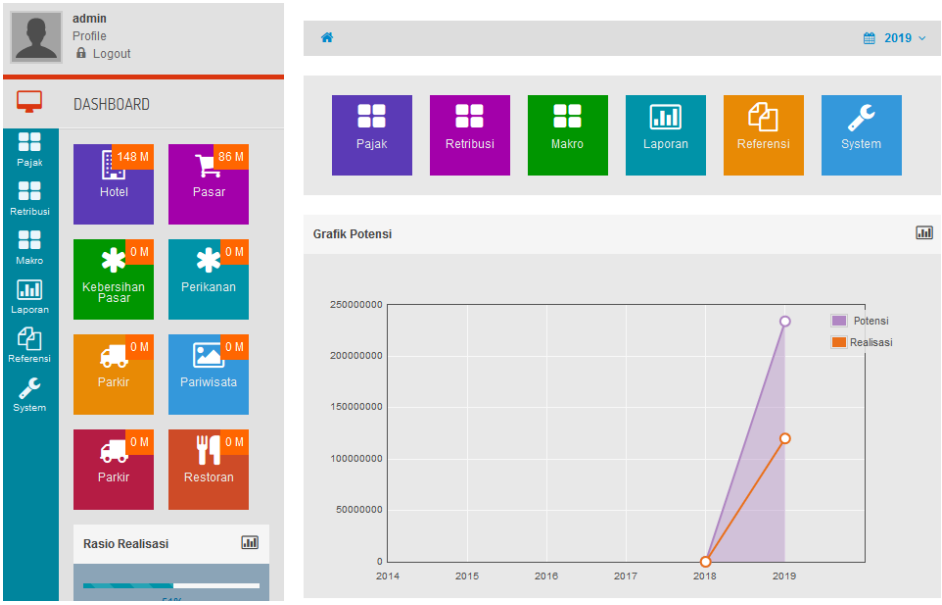

Secara umum di bagian dashboard ini ada 3 (tiga) menu;

1. **Dashboard:** merupakan halaman muka (homepage) dari sistem. User akan secara otomatis masuk ke halaman ini setelah login ke sistem. Untuk kembali ke halaman dashboard ini, user bisa meng-klik menu dashboard disebelah kiri atas.
2. **Profil:** merupakan halaman yang menampilkan profil pengguna. User bisa mengakses halaman ini dengan meng-klik menu profil disebelah kiri atas. Untuk melakukan perubahan password atau data profil klik tombol Ubah Profil yang berada di kanan atas
3. **Logout:** merupakan menu yang berfungsi untuk keluar dari sistem. User bisa keluar dari sistem dengan meng-klik menu logout ini.

Pajak

A. Pajak Hotel

Menu Hotel digunakan untuk input data yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah pajak hotel. Melalui menu ini user bisa memasukkan data pajak hotel, melakukan edit data yang sudah ada dan melakukan copy data dari tahun sebelumnya.

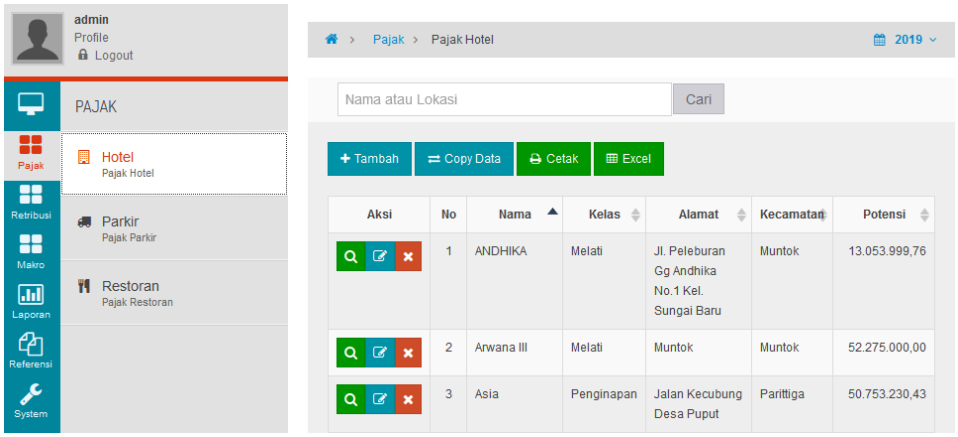

Untuk menambah data Pajak hotel dapat dilakukan dengan langkah berikut :

1) Pilih menu **Pajak**.
2) Pilih submenu **Pajak hotel**.
3) Pilih icon **Tambah**

untuk menambah kelompok.
4) Lalu isikan kolom yang ada sesuai dengan data yang dimiliki.
5) Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama menu pajak hotel.

Cara mengubah data **Pajak Hotel**:
1) Pilih menu **Pajak.**
2) Pilih submenu **Pajak Hotel.**
3) Pilih menu icon **Ubah** yang berada disamping data yang ingin diubah.
4) Lakukan update data untuk kolom yang ingin dilakukan perubahan.
5) Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman pajak hotel.

Untuk melakukan **copy data** dari tahun sebelumnya bisa dilakukan dengan cara :
1) Pilih menu **Pajak.**
2) Pilih submenu **Pajak Hotel.**
3) Pilih menu icon **Copy Data**

yang berada halaman pajak air tanah.
4) Lakukan update data untuk kolom yang ingin di copy.
5) Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman pajak Hotel.

Cara melihat detail data **Pajak Hotel**:
1) Pilih menu **Pajak.**
2) Pilih submenu **Pajak Hotel.**
3) Pilih menu icon **Detail** yang berada disamping data yang ingin dilihat.
4) Plih tombol **Kembali** 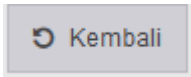

untuk kemabil ke halaman sebelumnya.

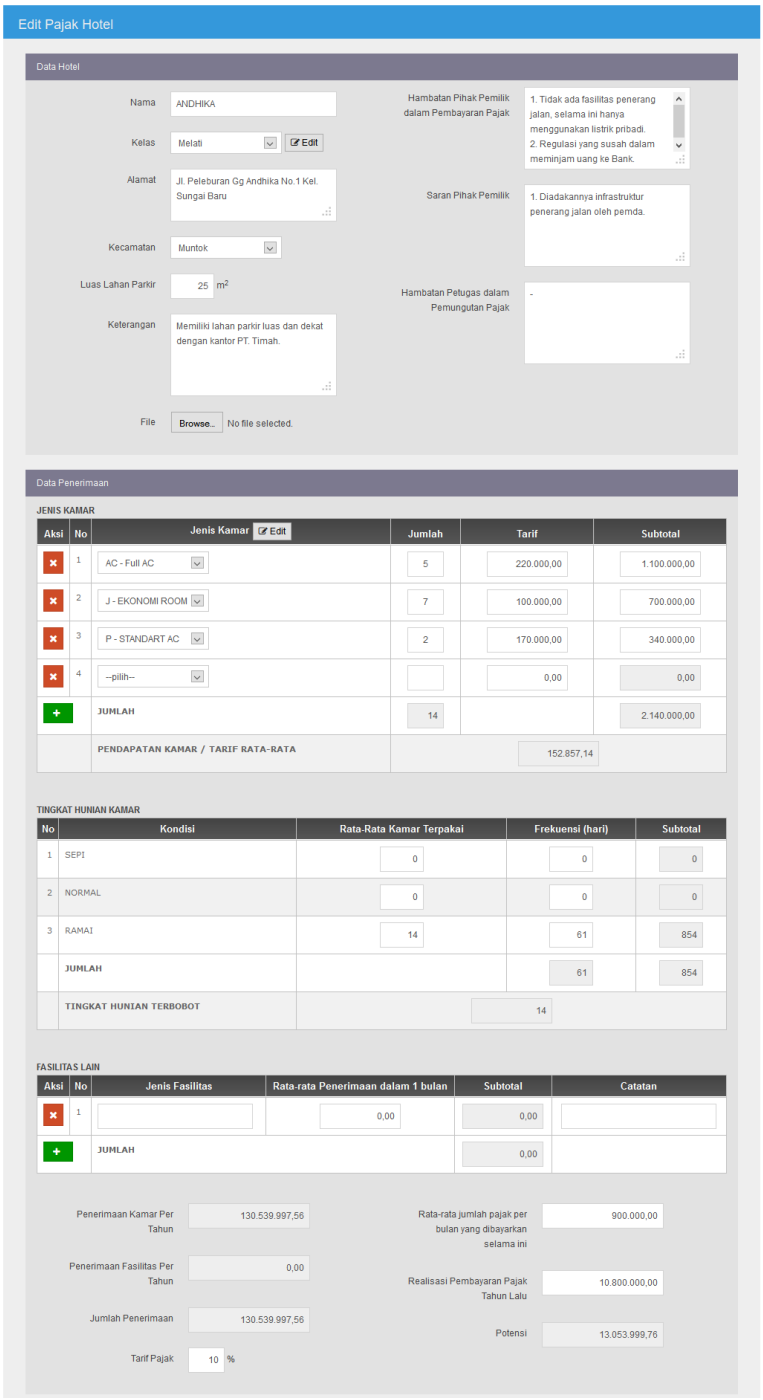

B. Pajak Parkir

Menu Pajak Parkir digunakan untuk melihat data pajak parkir, melakukan penambahan data pajak, melakukan pengubahan data pajak. Melalui menu ini user juga bisa mekakukan copy data dari tahun sebelumnya dan melakukan export dan cetak data.

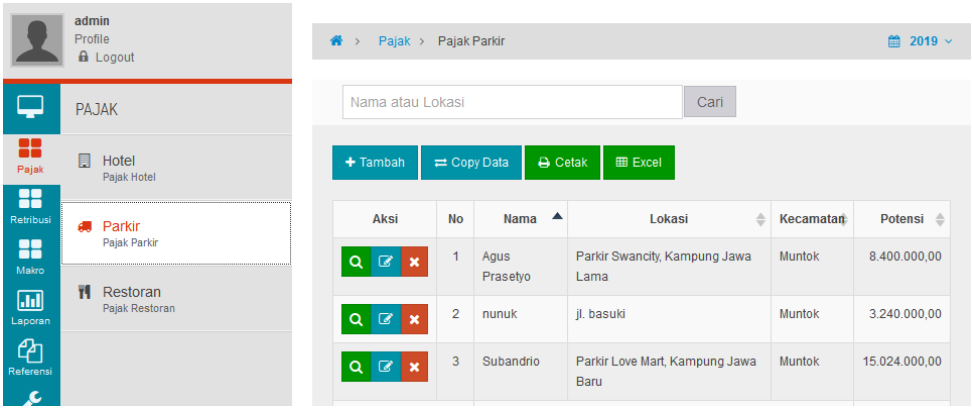

Untuk menambah data **Pajak Parkir** dapat dilakukan dengan langkah berikut :

1. Pilih menu **Pajak.**
2. Pilih submenu **Pajak Parkir.**
3. Pilih icon **Tambah**

untuk menambah data pajak parkir.
4. Lalu isikan kolom yang ada sesuai dengan data yang dimiliki
5. Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama pajak parkir

Cara mengubah data **Pajak Parkir**:

1. Pilih menu **Pajak.**
2. Pilih submenu **Pajak Parkir**
3. Pilih icon **Ubah** yang berada disamping data yang ingin diubah.
4. Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama pajak parkir

Untuk proses **Copy Data** dapat dilakukan dengan langkah berikut :

1. Pilih menu **Pajak.**
2. Pilih submenu **Pajak parkir.**
3. Pilih menu icon **Copy Data** 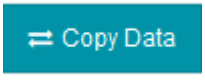

yang berada halaman pajak parkir.
4. Lalu isikan kolom yang ada sesuai dengan data yang ingin dicopy

5. Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama pajak parkir

C. Pajak Restoran

Menu Pajak Restoran digunakan untuk manajemen data yang berkaitan dengan pendapatan pajak restoran. Melalui menu ini user bisa menambah data pajak restoran, melakukan edit data, menambah data pajak, serta melakukan eksport data atau mencetak data.

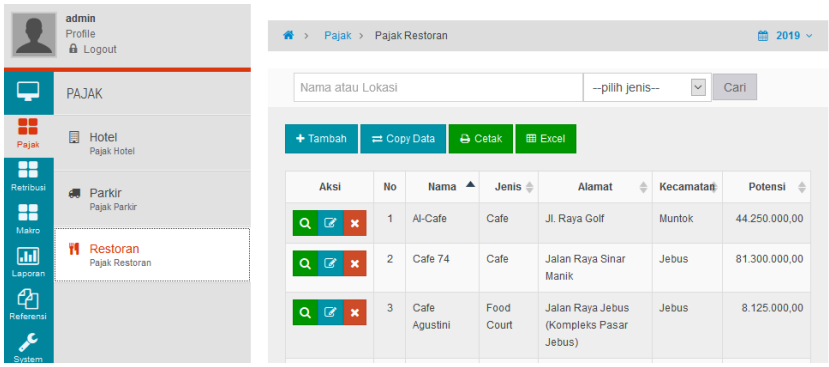

Untuk menambah data **Pajak Restoran** dapat dilakukan dengan langkah berikut :

1. Pilih menu **Pajak.**
2. Pilih submenu **Pajak Restoran.**
3. Pilih icon **Tambah**

untuk menambah data pajak restoran.
4. Lalu isikan kolom yang ada sesuai dengan data yang dimiliki
5. Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama pajak restoran

Cara mengubah data **Pajak Restoran:**

1. Pilih menu **Pajak.**
2. Pilih submenu **Pajak Restoran**
3. Pilih icon **Ubah** yang berada disamping data yang ingin diubah.
4. Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama pajak restoran

Untuk proses **Copy Data** dapat dilakukan dengan langkah berikut :

1. Pilih menu **Pajak.**
2. Pilih submenu **Pajak Restoran.**
3. Pilih menu icon **Copy Data** 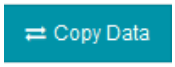

yang berada halaman pajak restoran.
4. Lalu isikan kolom yang ada sesuai dengan data yang ingin dicopy
5. Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama pajak restoran

Untuk melihat detail dari data **Pajak Restoran** dapat dilakukan dengan langkah berikut :
1. Pilih menu **Pajak.**
2. Pilih submenu **Pajak Restoran.**
3. Pilih icon **Detail** disamping data yang ingin dilihat secara mendetail.
4. Plih tombol **Kembali** 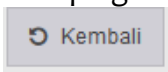

untuk kembali ke halaman sebelumnya

Retribusi

A. Retribusi Kebersihan Pasar

Menu retribusi Kebersihan Pasar digunakan untuk melakukan input, melakukan olah data dari penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi Kebersihan Pasar.

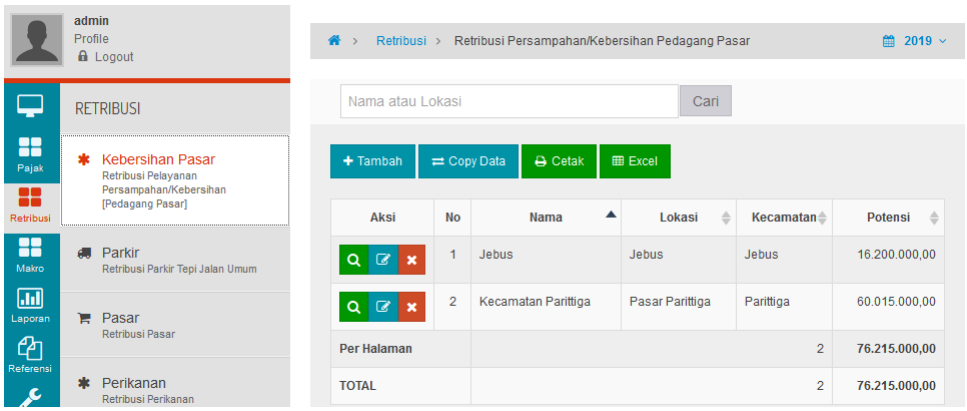

Untuk menambah data **Retribusi Kebersihan Pasar** dapat dilakukan dengan langkah berikut :
1. Pilih menu **Retribusi.**
2. Pilih submenu **Retribusi Kebersihan Pasar.**

3. Pilih icon **Tambah**

untuk menambah data Retribusi Kebersihan Pasar.
4. Lalu isikan kolom yang ada sesuai dengan data yang ada
5. Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama retribusi Kebersihan Pasar

Cara mengubah data **Retribusi Kebersihan Pasar**:
1. Pilih menu **Retribusi**.
2. Pilih submenu **Retribusi Kebersihan Pasar**
3. Pilih icon **Ubah** yang berada disamping data yang ingin diubah.
4. Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama retribusi Kebersihan Pasar

Untuk proses **Copy Data** dapat dilakukan dengan langkah berikut :
1. Pilih menu **Retribusi**.
2. Pilih submenu **Retribusi Kebersihan Pasar**.
3. Pilih menu icon **Copy Data** 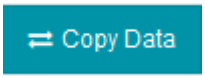

yang berada halaman pajak reklame.
4. Lalu isikan kolom yang ada sesuai dengan data yang ingin dicopy
5. Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama retribusi Kebersihan Pasar

Untuk melihat detail dari data **Retribusi Kebersihan Pasar** dapat dilakukan dengan langkah berikut :
1. Pilih menu **Retribusi**.
2. Pilih submenu **Retribusi Kebersihan Pasar**.
3. Pilih icon **Detail** disamping data yang ingin dilihat secara mendetail.
4. Plih tombol **Kembali** 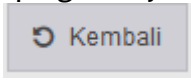

untuk kembali ke halaman sebelumnya

B. Retribusi Parkir

Menu retribusi parkir berguna untuk melakukan input data retribusi parkir. Disini user bisa menambah data, mengubah data, dan melakukan ekspor dan cetak data yang berkaitan dengan retribusi parkir.

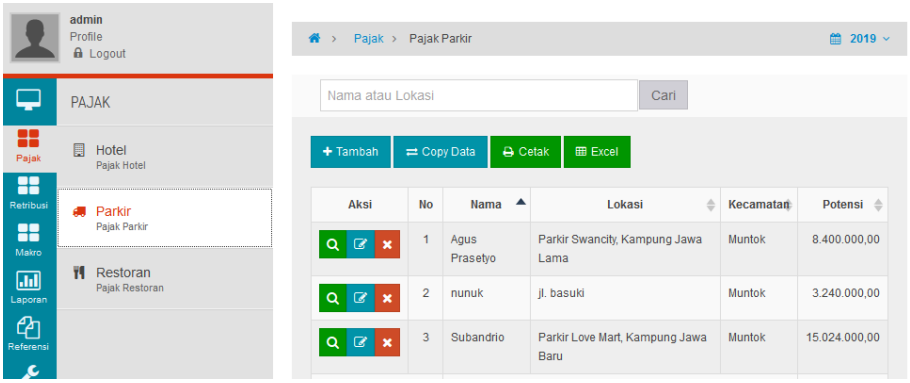

Untuk menambah data **Retribusi Parkir** dapat dilakukan dengan langkah berikut :

1. Pilih menu **Retribusi**.
2. Pilih submenu **Retribusi Parkir**.
3. Pilih icon **Tambah**

untuk menambah data Retribusi Parkir.
4. Lalu isikan kolom yang ada sesuai dengan data yang ada
5. Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama retribusi parkir

Cara mengubah data **Retribusi Parkir**:

1. Pilih menu **Retribusi**.
2. Pilih submenu **Retribusi Parkir**
3. Pilih icon **Ubah** yang berada disamping data yang ingin diubah.
4. Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama pajak Retribusi Parkir

Untuk proses **Copy Data** dapat dilakukan dengan langkah berikut :

1. Pilih menu **Retribusi**.
2. Pilih submenu **Retribusi Parkir**.
3. Pilih menu icon **Copy Data**

yang berada halaman pajak parkir.
4. Lalu isikan kolom yang ada sesuai dengan data yang ingin dicopy

5. Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama retribusi parkir

Untuk melihat detail dari data **Retribusi Parkir** dapat dilakukan dengan langkah berikut :

1. Pilih menu **Retribusi**.
2. Pilih submenu **Retribusi Parkir**.
3. Pilih icon **Detail** disamping data yang ingin dilihat secara mendetail.
4. Plih tombol **Kembali** 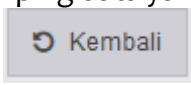

untuk kembali ke halaman sebelumnya

C. Retribusi Pasar

Menu retribusi pasar berguna untuk melakukan input data retribusi pasar. Disini user bisa menambah data, mengubah data, dan melakukan ekspor dan cetak data yang berkaitan dengan retribusi pasar.

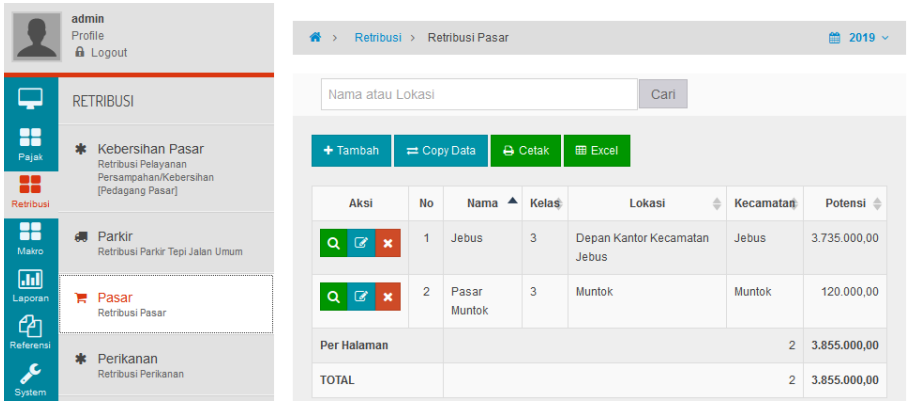

Untuk menambah data **Retribusi Pasar** dapat dilakukan dengan langkah berikut :

1. Pilih menu **Retribusi**.
2. Pilih submenu **Retribusi Pasar**.
3. Pilih icon **Tambah**

untuk menambah data Retribusi pasar.
4. Lalu isikan kolom yang ada sesuai dengan data yang ada
5. Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama retribusi pasar

Cara mengubah data **Retribusi Pasar**:

1. Pilih menu **Retribusi**.
2. Pilih submenu **Retribusi Pasar**
3. Pilih icon **Ubah** yang berada disamping data yang ingin diubah.
4. Plih tombol **Simpan** untuk menyimpan data atau tombol **Batal** untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama retribusi pasar

Untuk proses **Copy Data** dapat dilakukan dengan langkah berikut :

1. Pilih menu **Retribusi**.
2. Pilih submenu **Retribusi Pasar**.
3. Pilih menu icon **Copy Data** yang berada halaman pajak parkir.
4. Lalu isikan kolom yang ada sesuai dengan data yang ingin dicopy
5. Plih tombol **Simpan** untuk menyimpan data atau tombol **Batal** untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama retribusi pasar

Untuk melihat detail dari data **Retribusi Pasar** dapat dilakukan dengan langkah berikut :

1. Pilih menu **Retribusi**.
2. Pilih submenu **Retribusi Pasar**.
3. Pilih icon **Detail** disamping data yang ingin dilihat secara mendetail.
4. Plih tombol **Kembali** 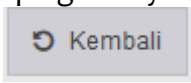 untuk kembali ke halaman sebelumnya

D. Retribusi Perikanan

Menu retribusi perikanan berguna untuk melakukan input data retribusi perikanan. Disini user bisa menambah data, mengubah data, dan melakukan ekspor dan cetak data yang berkaitan dengan retribusi perikanan.

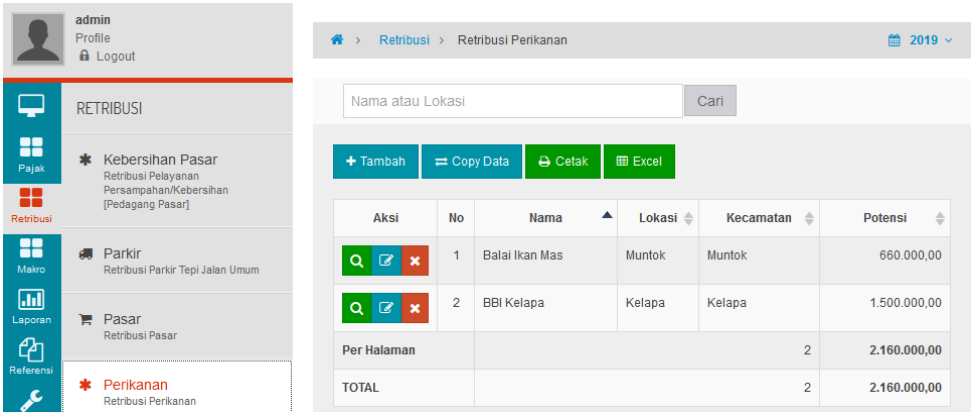

Untuk menambah data **Retribusi Perikanan** dapat dilakukan dengan langkah berikut :

1. Pilih menu **Retribusi**.
2. Pilih submenu **Retribusi Perikanan.**
3. Pilih icon **Tambah**

untuk menambah data Retribusi Perikanan.
4. Lalu isikan kolom yang ada sesuai dengan data yang ada
5. Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama retribusi Perikanan

Cara mengubah data **Retribusi Perikanan:**

1. Pilih menu **Retribusi**.
2. Pilih submenu **Retribusi Perikanan**
3. Pilih icon **Ubah** yang berada disamping data yang ingin diubah.
4. Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama retribusi Perikanan

Untuk proses **Copy Data** dapat dilakukan dengan langkah berikut :

1. Pilih menu **Retribusi**.
2. Pilih submenu **Retribusi Perikanan.**
3. Pilih menu icon **Copy Data**

yang berada halaman retribusi Perikanan.
4. Lalu isikan kolom yang ada sesuai dengan data yang ingin dicopy
5. Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama retribusi Perikanan

Untuk melihat detail dari data **Retribusi Perikanan** dapat dilakukan dengan langkah berikut :

1. Pilih menu **Retribusi**.
2. Pilih submenu **Retribusi Perikanan**.
3. Pilih icon **Detail** disamping data yang ingin dilihat secara mendetail.
4. Plih tombol **Kembali** untuk kembali ke halaman sebelumnya

E. Retribusi Pariwisata

Menu retribusi pariwisata berguna untuk melakukan input data retribusi pariwisata. Disini user bisa menambah data, mengubah data, dan melakukan ekspor dan cetak data yang berkaitan dengan retribusi pariwisata.

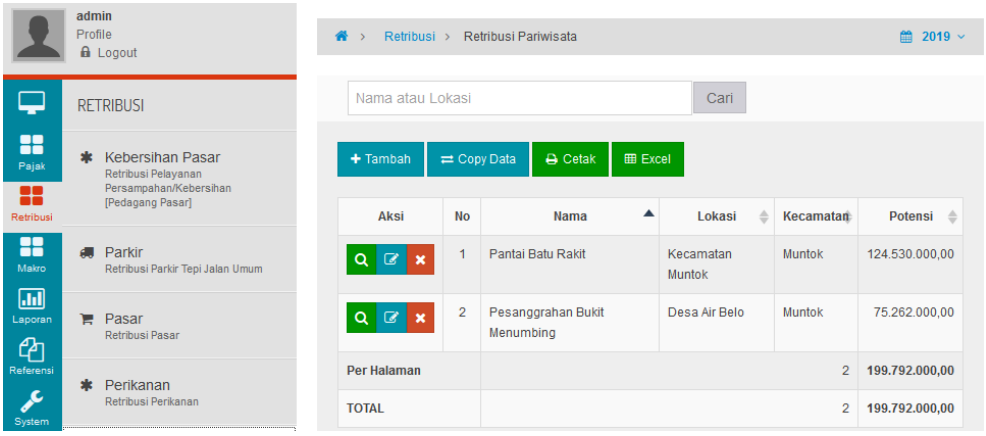

Untuk menambah data **Retribusi Pariwisata** dapat dilakukan dengan langkah berikut :

1. Pilih menu **Retribusi**.
2. Pilih submenu **Retribusi Pariwisata**.
3. Pilih icon **Tambah** untuk menambah data Retribusi Pariwisata.
4. Lalu isikan kolom yang ada sesuai dengan data yang ada
5. Plih tombol **Simpan** untuk menyimpan data atau tombol **Batal** untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama retribusi Pariwisata

Cara mengubah data **Retribusi Pariwisata**:

1. Pilih menu **Retribusi**.
2. Pilih submenu **Retribusi Pariwisata**

3. Pilih icon **Ubah** yang berada disamping data yang ingin diubah.
4. Plih tombol **Simpan** untuk menyimpan data atau tombol **Batal** untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama retribusi Pariwisata

Untuk proses **Copy Data** dapat dilakukan dengan langkah berikut :

1. Pilih menu **Retribusi**.
2. Pilih submenu **Retribusi Pariwisata**.
3. Pilih menu icon **Copy Data** yang berada halaman retribusi Pariwisata.
4. Lalu isikan kolom yang ada sesuai dengan data yang ingin dicopy
5. Plih tombol **Simpan** untuk menyimpan data atau tombol **Batal** untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman utama retribusi Pariwisata

Untuk melihat detail dari data **Retribusi Pariwisata** dapat dilakukan dengan langkah berikut :

1. Pilih menu **Retribusi**.
2. Pilih submenu **Retribusi Pariwisata**.
3. Pilih icon **Detail** disamping data yang ingin dilihat secara mendetail.
4. Plih tombol **Kembali** 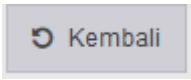 untuk kembali ke halaman sebelumnya

Laporan

Menu Laporan berfungsi untuk mengetahui berbagai laporan dari kegiatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendapatan Asli Daerah sehingga memudahkan pihak manejemen untuk mengukur performa dari Pendapatan Asli Daerah dan memudahkan dalam pengambilan keputusan manajemen.

Menu Laporan terdiri dari:

1. Laporan Potensi
2. Grafik Potensi

A. Laporan Potensi

Menu Laporan Potensi berguna untuk mengetahui tingkat potensi pendapatan asli daerah yang bisa dicapai sehingga memudahkan

manajemen dalam membandingkan data potensi dengan penerimaan pendapatan riil sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan selanjutnya

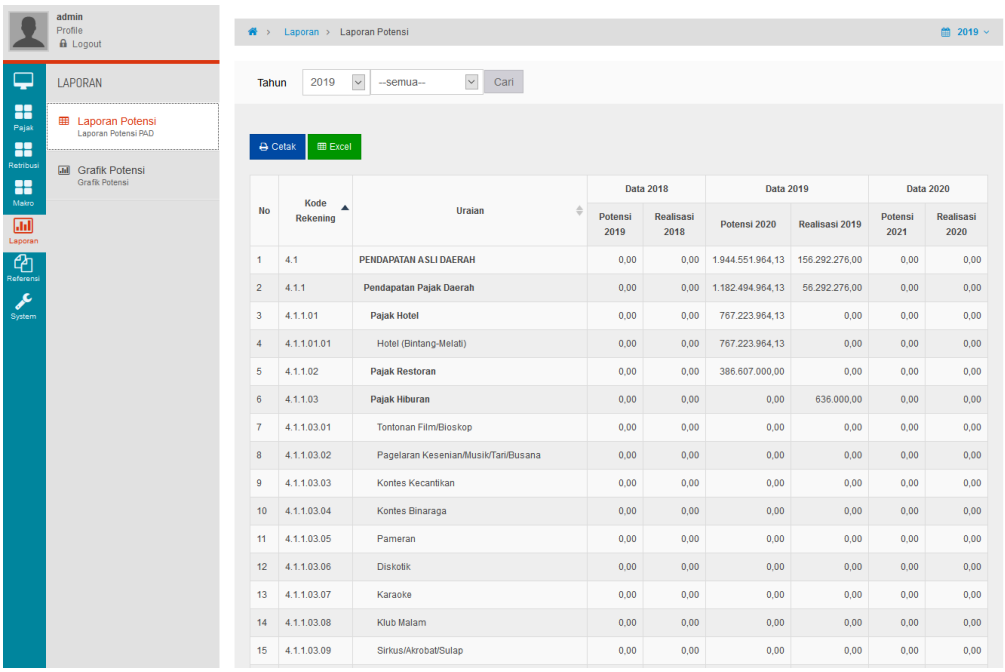

No	Kode Rekening	Uraian	Data 2018		Data 2019		Data 2020	
			Potensi 2019	Realisasi 2018	Potensi 2020	Realisasi 2019	Potensi 2021	Realisasi 2020
1	4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	0,00	0,00	1.944.551.964,13	156.292.276,00	0,00	0,00
2	4.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	0,00	0,00	1.182.494.964,13	56.292.276,00	0,00	0,00
3	4.1.1.01	**Pajak Hotel**	0,00	0,00	767.223.964,13	0,00	0,00	0,00
4	4.1.1.01.01	Hotel (Bintang-Melati)	0,00	0,00	767.223.964,13	0,00	0,00	0,00
5	4.1.1.02	**Pajak Restoran**	0,00	0,00	386.607.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.1.1.03	**Pajak Hiburan**	0,00	0,00	0,00	636.000,00	0,00	0,00
7	4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4.1.1.03.03	Kontes Kecantikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4.1.1.03.04	Kontes Binaraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.1.1.03.05	Pameran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4.1.1.03.06	Diskotik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4.1.1.03.07	Karaoke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4.1.1.03.08	Klub Malam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4.1.1.03.09	Sirkus/Akrobat/Sulap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Menu Grafik Potensi

Menu Laporan Grafik Potensi digunakan untuk memperlihatkan laporan potensi pendapatan asli daerah berdasarkan grafik sehingga mudah untuk dibaca dan mudah untuk menganalisisnya.

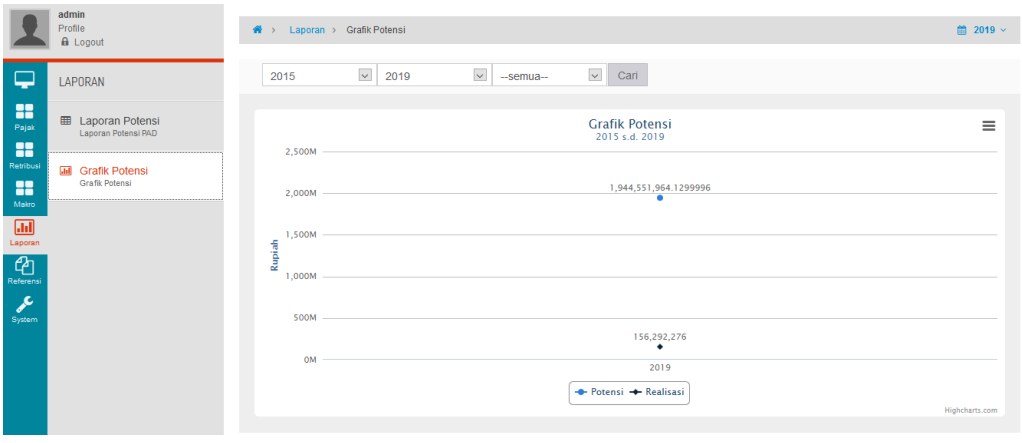

Referensi

Menu referensi berguna sebagai data referensi / data master yang digunakan oleh aplikasi SIM Pendapatan Asli Daerah. Melalui menu referensi ini user bisa mengubah / menambah data data yang berkaitan dengan fungsi umum sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah.

Menu referensi terdiri dari:
1. Referensi Master Rekening
2. Referensi Kelas Hotel
3. Referensi Jenis Kamar Hotel
4. Referensi Jenis Restoran
5. Referensi Kecamatan

Manajemen Sistem

A. Group

Group berguna untuk mengatur hak akses masing-masing login, apakah group tersebut bisa mengakses menu tertentu atau tidak. Misal apakah suatu user akan dimasukkan ke dalam group kasir, gudang, admin, atau group lainnya.

Pada tampilan, disebelah kiri daftar group yang telah dibuat terdapat dua icon menu yaitu edit group dan delete group, sedang di sebelah atas terdapat menu untuk tambah group.

Pada menu tambah group ataupun menu edit group, terdapat kolom untuk nama dan deskripsi group, dan juga terdapat pilihan hak akses untu group tersebut dengan memberikan tanda check/centang pada pilihan hak akses.

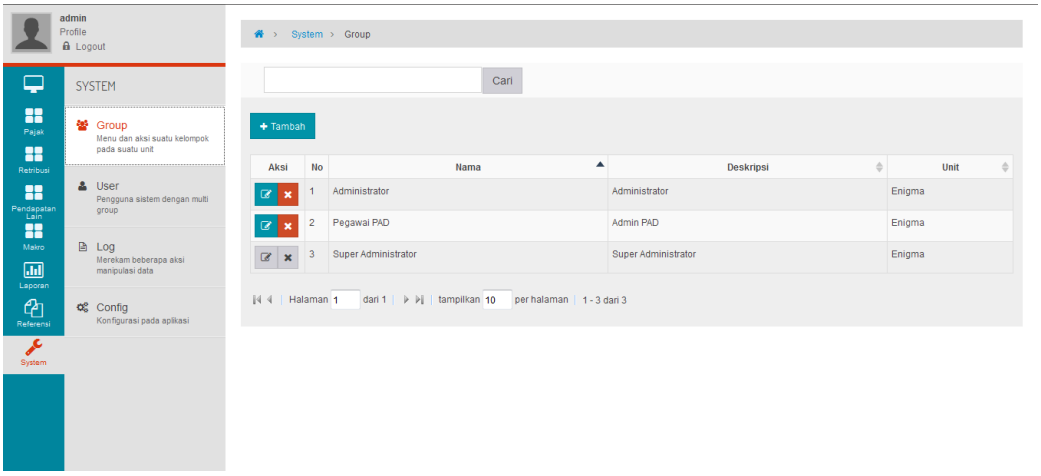

Cara menambahkan **kelompok/Group**
1) Pilih menu **Manajemen Sistem**.
2) Pilih submenu **Group**.
3) Pilih icon **Tambah**

untuk menambah kelompok.
4) Lalu isikan nama dan deskripsi **Group** pada kolom yang disediakan.
5) Centang pada fitur menu pada bagian bawah dimana grup ini akan mempunyai hak akses pada menu yang dicentang tersebut.

6) Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman manajemen Group.

Cara mengubah data **Group**:
1) Pilih menu **Manajemen Sistem**.
2) Pilih submenu **Group**.
3) Pilih menu icon **Ubah**
yang berada disamping data yang ingin diubah.
4) Lakukan update data untuk kolom yang ingin dilakukan perubahan.
5) Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman **Manajemen Group**.

Cara menghapus **Group**:
1) Pilih menu **Manajemen Sistem**.
2) Pilih submenu **Group**.
3) Pilih menu icon **Hapus**
yang berada disamping data yang ingin dihapus.
4) Setelah Anda mengklik icon **Hapus**
akan muncul notifikasi apakah Anda benar-benar ingin menghapus data tersebut, klik **Ok** untuk menghapus data, dan klik **Cancel** jika Anda tidak jadi menghapus data.
5) Jika proses penghapusan berhasil akan muncul notifikasi yang menjelaskan bahwa proses penghapusan berhasil dilakukan.
6) Jika proses penghapusan gagal akan muncul notifikasi yang menjelaskan bahwa proses penghapusan gagal dilakukan. Salah satu penyebab data gagal atau tidak bisa dihapus adalah karena data tersebut masih dipakai atau berhubungan dengan data yang lain.
Sebelum melakukan penghapusan data, lakukan pengecekan ulang apakah Anda benar-benar berniat menghapus data, karena setelah data dihapus maka tidak dapat dilakukan proses pembatalan.

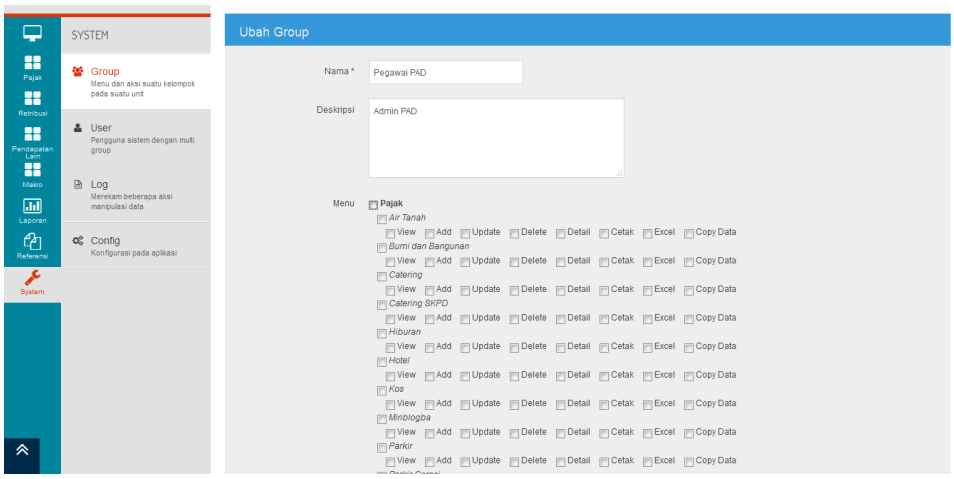

B. User / Pengguna

Menu pengguna berfungsi untuk menambahkan user login untuk masuk ke dalam sistem. Untuk setiap orang sebaiknya menggunakan satu login, jadi masing-masing orang mempunyai user login yang berbeda.

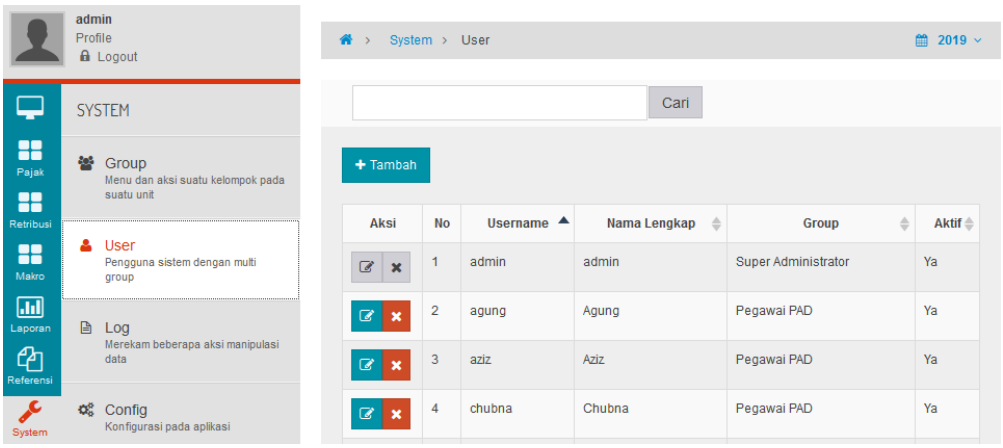

Cara menambahkan data **Pengguna:**

1) Pilih menu **Manajemen Sistem.**
2) Pilih submenu **Pengguna.**
3) Pilih icon **Tambah**

untuk menambah data **Pengguna.**
4) Lalu isikan data nama **Pengguna** pada kolom yang disediakan. Pilih grup dan juga status aktif/tidak aktif.
5) Plih tombol **Simpan**

untuk menyimpan data atau tombol **Batal**

untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman daftar **Pengguna.**

Cara mengubah data **Pengguna:**

1) Pilih menu **Manajemen Sistem.**
2) Pilih submenu **Pengguna.**

3) Pilih menu icon **Ubah** yang berada disamping data yang ingin diubah.
4) Lakukan update data untuk kolom yang ingin dilakukan perubahan.
5) Plih tombol **Simpan** Simpan untuk menyimpan data atau tombol **Batal** Batal untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman daftar **Pengguna**.

Cara menghapus data **Pengguna**:
1) Pilih menu **Manajemen Sistem**.
2) Pilih submenu **Pengguna**.
3) Pilih menu icon **Hapus** yang berada disamping data yang ingin dihapus.
4) Setelah Anda mengklik icon **Hapus** akan muncul notifikasi apakah Anda benar-benar ingin menghapus data tersebut, klik **Ok** untuk menghapus data, dan klik **Cancel** jika Anda tidak jadi menghapus data.
5) Jika proses penghapusan berhasil akan muncul notifikasi yang menjelaskan bahwa proses penghapusan berhasil dilakukan.
6) Jika proses penghapusan gagal akan muncul notifikasi yang menjelaskan bahwa proses penghapusan gagal dilakukan. Salah satu penyebab data gagal atau tidak bisa dihapus adalah karena data tersebut masih dipakai atau berhubungan dengan data yang lain.
Sebelum melakukan penghapusan data, lakukan pengecekan ulang apakah Anda benar-benar berniat menghapus data, karena setelah data dihapus maka tidak dapat dilakukan proses pembatalan.

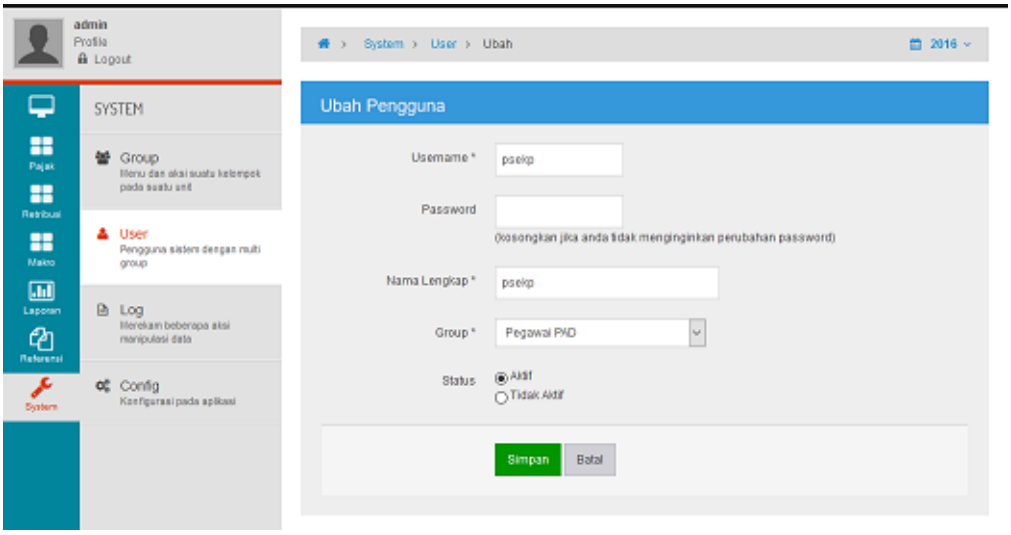

C. Konfigurasi

Menu konfigurasi berfungsi untuk memberikan informasi umum, yang nantinya ditampilkan pada aplikasi ini.
Cara mengubah data konfigurasi:
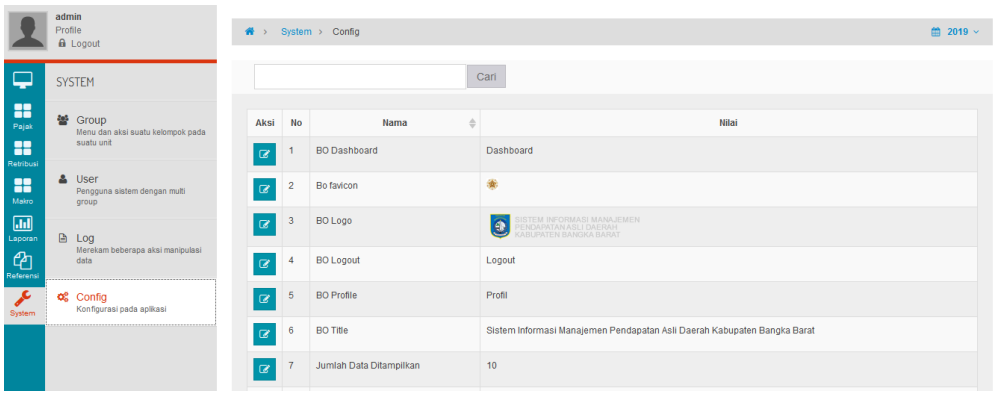
1) Pilih menu **Manajemen Sistem**.
2) Pilih submenu **Konfigurasi**.
3) Pilih menu icon **Ubah** yang berada disamping data yang ingin diubah.
4) Lakukan update data untuk kolom yang ingin dilakukan perubahan.
5) Plih tombol **Simpan** untuk menyimpan data atau tombol **Batal** untuk membatalkan penyimpanan dan kembali ke halaman daftar **Konfigurasi**.